



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah membawa perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dibanding dengan sistem perencanaan sebelumnya. Pasal 1 butir 3 undang-undang ini menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah

Dalam konteks Daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, dikenal dokumen RPJP Daerah (RPJPD) yang rentang waktu berlakunya dua puluh tahun, RPJM Daerah (RPJMD) yang rentang waktu berlakunya lima tahun, dan RKP Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan. Secara substansi, Pasal 5 undang-undang ini menyebutkan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (ayat 1); RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (ayat 2); dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (ayat 3).

Selama ini, Pemerintah Kota Bekasi telah berupaya maksimal dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan kondisi sosial politik, pasar domestik maupun lingkungan strategis global yang menuntut komitmen dalam bentuk visi, misi strategis yang disusun oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan DPRD. Selanjutnya, upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam SPPN telah dilakukan secara maksimal dan sistematis melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga dalam bentuk RKPD Kota Bekasi dengan mengacu pada visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Sejalan dengan perspektif di atas, proses perumusan dokumen RKPD Kota Bekasi dirasa perlu mempertimbangkan keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan kondisi, potensi dan permasalahan khas daerah. Pada akhirnya, melalui proses musyawarah mufakat dari seluruh pemangku kepentingan, maka RKPD Kota Bekasi secara substantif akan tertuang dalam visi dan misi Kota Bekasi. Dengan demikian, arah pembangunan yang telah disusun dapat memuat kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sebagai dasar dalam penetapan arah dan kebijakan pembangunan di Kota Bekasi. Di lain sisi, karakteristik sosial ekonomi Kota Bekasi yang berbasis religius, kultural, dan memiliki aneka ragam sumberdaya alam diharapkan mampu mendorong terwujudnya tujuan jangka panjang pembangunan di Kota Bekasi.

Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan strategis tata ruang nasional yang dalam hirarki pembangunan nasional merupakan bagian dari kawasan perkotaan metropolitan Jabodetabek pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letaknya yang strategis menyebabkan berbagai kegiatan dan fasilitas sosial ekonomi yang sifatnya pendukung dapat tumbuh dan berkembang pesat menjadi sebuah kawasan kota satelit yang berkarakter dan terintegrasi. Hal tersebut menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah tujuan yang memberikan berbagai kemudahan, mulai dari ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, hingga tingginya aksesibilitas sebuah kota moderen yang ramah dan nyaman.

Potensi sumberdaya lokal yang melimpah di Kota Bekasi perlu ditopang oleh sistem pengelolaan terpadu yang terintegrasi sehingga dapat dicapai hasil optimal dalam bentuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingginya aksesibilitas

berpengaruh pada tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) akibat migrasi datang, yang akhirnya berujung pada munculnya berbagai permasalahan demografi. Diyakini permasalahan demografi akan mengakibatkan berbagai persoalan lintas sektoral, mulai masalah pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berangkat dari potensi dan permasalahan di atas, pendekatan sistem pengelolaan didasarkan pada upaya pengembangan nilai manfaat dari potensi yang tersedia, serta eliminasi semaksimal mungkin permasalahan yang ditimbulkan. Dengan mencermati hal tersebut, maka berbagai langkah perlu ditempuh untuk menjamin terlaksananya pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka dasar pemikiran dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang moderen, dinamis dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 juga merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 ini didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan OPD, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 ini merupakan rencana tahun terakhir dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Arah kebijakan tematik pada tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah TAHUN INOVASI DAN KREATIVITAS yang diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, sehingga terwujud Kota Bekasi yang Ihsan, Maju, Sejahtera. Adapun beberapa indikator keberhasilan pencapaian kebijakan tahun kelima adalah meningkatkannya aktivitas pariwisata, seni dan budaya, peningkatan *event-event* kepemudaan dan olahraga. Adapun tema pembangunan tahun 2018 adalah “Mengembangkan semangat berinovasi dan kreativitas menuju Kota Bekasi maju, sejahtera, dan ihsan”.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Bekasi tahun 2018 diarahkan sekurang-kurangnya untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2018.

Pada tahun 2018, sesuai dengan arah kebijakan nasional, dalam menentukan anggaran, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan dengan perkuatan *money follows program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan pada: pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP Tahun 2018, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan perkuatan integrasi sumber pendanaan. Ini

berarti bahwa dalam perencanaan RKPD Tahun 2018, Daerah dituntut untuk menajamkan program prioritas, memastikan pelaksanaannya, dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.

Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 disusun berlandaskan asas *good governance* yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Secara khusus, penyusunan dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang masih berlaku.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

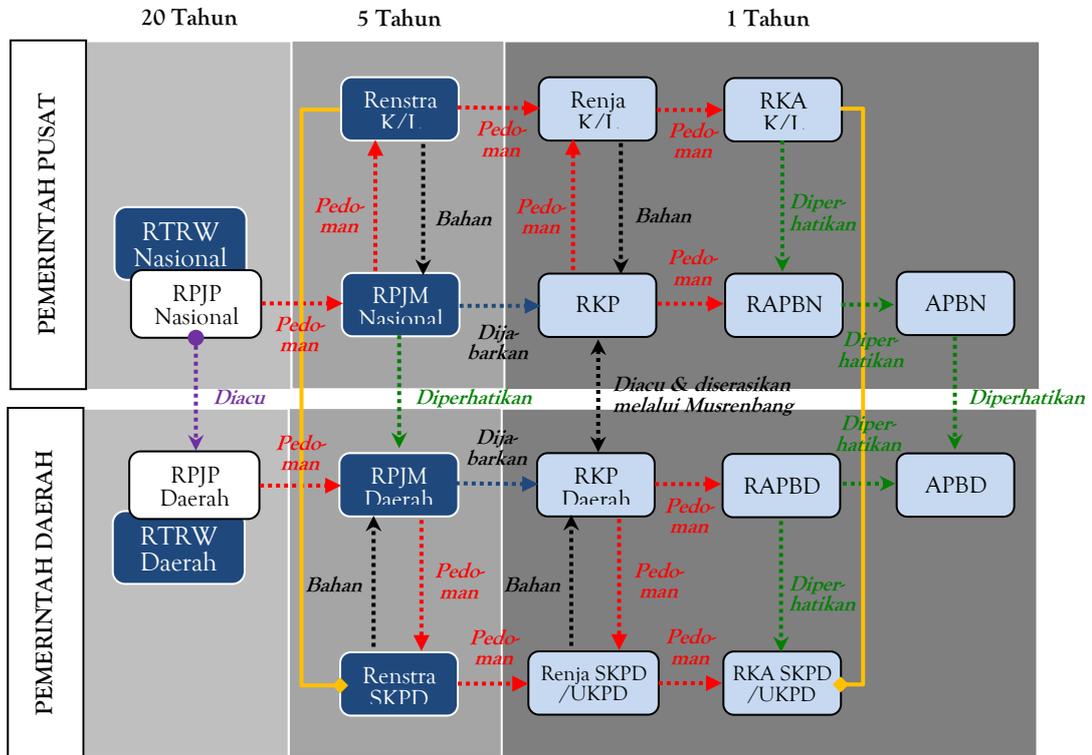
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi; dan
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rancangan RKPD Kota Bekasi tahun 2018 disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen lainnya yang terkait, antara lain RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Selain hal-hal di atas, dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi,

arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke dalam tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahunan dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antardokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu arahan yang saling terkait.



Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Keterkaitan Dokumen RKPD dan RKP 2018

Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terutama dalam perwujudan sembilan butir agenda sebagai berikut:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam rencana strategis (renstra) kementerian/kembaga sebagai penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Kota Bekasi tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 dari RPJPN 2005-2025, dengan tema pembangunan : **“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”**. RPJMN ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan visi: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi pembangunan nasional di atas didasari atas berbagai pertimbangan terkait masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, dan capaian pembangunan sampai saat ini. Tiga masalah pokok bangsa saat ini, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Dan, 9 (sembilan) tantangan pembangunan saat ini adalah:

1. Stabilitas politik dan keamanan;
2. Tata kelola: birokrasi efektif dan efisien;
3. Pemberantasan korupsi;
4. Pertumbuhan ekonomi;
5. Percepatan pemerataan dan keadilan;
6. Keberlanjutan pembangunan;
7. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
8. Kesenjangan antarwilayah; dan
9. Percepatan pembangunan kelautan.

Selanjutnya, RPJMN -yang terdiri dari Buku I: Agenda Pembangunan Nasional, Buku II: Agenda Pembangunan Bidang, dan Buku III: Agenda Pembangunan Wilayah, akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi, khususnya dalam mensinkronkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah untuk menjabarkan program-program pembangunan prioritas dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi.

1.3.2. Keterkaitan RKPD 2018 DAN RPJMD KOTA BEKASI 2013-2018

Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dalam rangka mewujudkan visi: **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”**. Di dalam visi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 tersebut terdapat tiga buah gambaran kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan. Ketiga kondisi Kota Bekasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- “Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju;
- “Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera; dan
- “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kehidupan yang beradab.

Untuk mencapai visi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2013-2018, berikut ini adalah misi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2013-2018:

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi disusun untuk menghubungkan antara strategi pembangunan yang ditempuh dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Arah pembangunan tahun 2018 yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Inovasi dan Kreativitas”. Dalam dokumen RKPD 2018, arah pembangunan ini diintegrasikan dengan tema RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 yaitu **“Berkarya Melalui Kreativitas dan Inovasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.”**

1.3.3. Keterkaitan RKPD, Renja OPD, dan KUA-PPAS

RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 memuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018 yang merupakan representasi dari Renstra OPD Tahun 2013-2018. Renja OPD Tahun 2018 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2018, hasil penelaahan dari kegiatan reses DPRD, hasil musrenbang, serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap OPD.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 untuk dibahas dan disepakati antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Bekasi. Penyusunan KUA-PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang disusun dan disajikan dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah dengan arahan subbab sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
- b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja PD berdasarkan laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 dan target program/kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2017) yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
- c. Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2018, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oleh karena itu, dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2018.

BAB IV PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI

Di sini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (tahun 2016) dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2018, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam tahun 2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam tahun 2018 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja OPD dan harapan dukungan seluruh *stakeholder* terkait pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2018 dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral dari setiap pemangku kepentingan. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Bekasi 2018 adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 dan sinkronisasi dengan sasaran program OPD;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antarpelaku pembangunan (*stakeholders*);
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan; dan
6. Menjadi acuan dalam menyusun Renja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang relevan dan konsisten antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta bertujuan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat.



BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

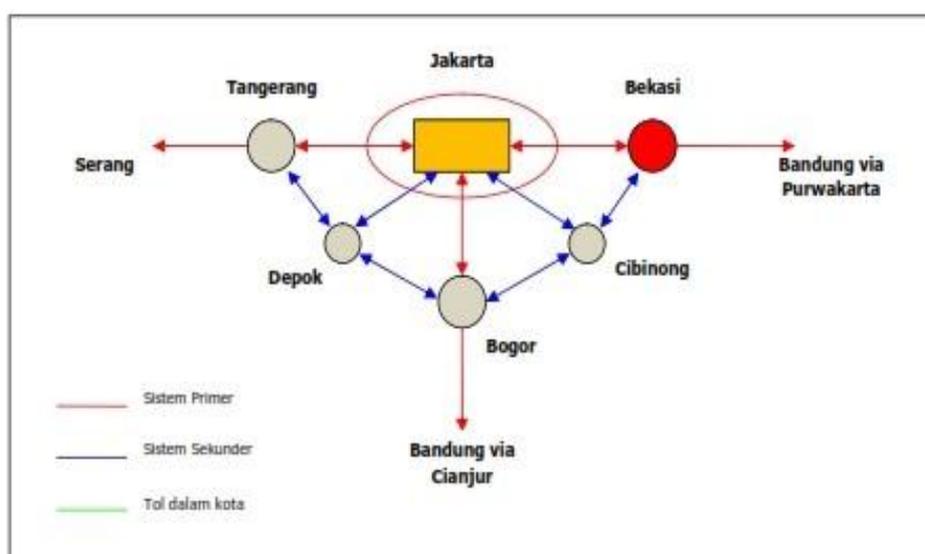
Kota Bekasi dibentuk tahun 1997 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3663). Sejak tahun 2004 wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dan 56 kelurahan.

Dalam konteks regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bekasi merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat. Pengembangan PKW ini terkait dengan pengembangan Jabotabek sebagai kawasan tertentu dengan pertumbuhan yang cepat, yakni sebagai kawasan tempat pengembangan kegiatan strategis skala nasional. Dalam hal ini Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan penyangga DKI yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Dalam struktur pengembangan wilayah Jawa Barat, sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Kota Bekasi ditetapkan sebagai kota hirarki IIA di wilayah pengembangan tengah (merupakan bagian dari wilayah utama tengah yang mencakup Tangerang, Bogor, Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sumedang dan Subang). Selain itu, RTRW Provinsi Jawa Barat mengarahkan Kota Bekasi sebagai bagian dari pengembangan kawasan industri dan permukiman perkotaan untuk mengantisipasi kebutuhan di Jabodetabek sebagai kawasan cepat tumbuh.

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus

menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri dan permukiman. Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah intensifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Perkembangan perumahan yang pesat di Kota Bekasi diakibatkan oleh kedekatan lokasi dengan Jakarta, dimana penduduk bermukim di Bekasi namun bekerja di Jakarta. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bekasi.



Gambar 2.1 Posisi Kota Bekasi dalam Konstelasi Regional

Akibat logis dari letak wilayah geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Kota Depok, Bogor, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Secara umum, kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi menempati lokasi di sepanjang jalan utama, baik itu jalan arteri maupun jalan kolektor. Untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di pusat kota, umumnya terpusat di sepanjang Jalan Juanda dan di sepanjang Jalan A. Yani, dan di pusat perdagangan Pondok Gede dengan skala pelayanan

kota/regional. Sedangkan yang berkembang di lokasi lain umumnya berada di sepanjang jalan kolektor atau jalan utama lingkungan perumahan bercampur dengan kegiatan lain, baik itu perumahan penduduk maupun industri dan pergudangan dengan skala pelayanan yang lebih kecil. Sebagian besar kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai, sehingga seringkali menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.

Kegiatan industri di Kota Bekasi masih tersebar secara parsial di beberapa lokasi-lokasi industri seperti di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Kalibaru, dan Kelurahan Pejuang. Selain itu lokasi industri juga berkembang di Desa Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Ciketing Udik. Umumnya keberadaan kegiatan industri ini bercampur dengan kegiatan lainnya, seperti perumahan atau perdagangan dan jasa, sehingga apabila tidak ditangani dan dikontrol dengan benar dapat mencemari lingkungan sekitarnya, baik berupa pencemaran suara, udara (bau), ataupun limbah yang dihasilkan. Untuk mencegah pencemaran limbah industri maka kegiatan industri yang menghasilkan limbah berbahaya perlu dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah. Sedangkan perkembangan kegiatan industri perlu diarahkan untuk kegiatan industri yang tidak mencemari lingkungan (*clean industry*).

Dilihat dari kondisi lahan tidak terbangun atau ruang terbuka hijau, kenyataan di lapangan pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau yang berkembang di Kota Bekasi masih didominasi oleh kawasan hijau pertanian pada bagian selatan kota dan utara kota. Kondisi lahan pertanian di Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria saat ini sebagian besar sudah teralokasikan untuk kegiatan terbangun, khususnya kegiatan permukiman skala besar yang dikembangkan oleh swasta, meskipun saat ini masih belum terbangun dan masih berupa ruang terbuka hijau.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

a. Luas Wilayah dan Letak Geografis

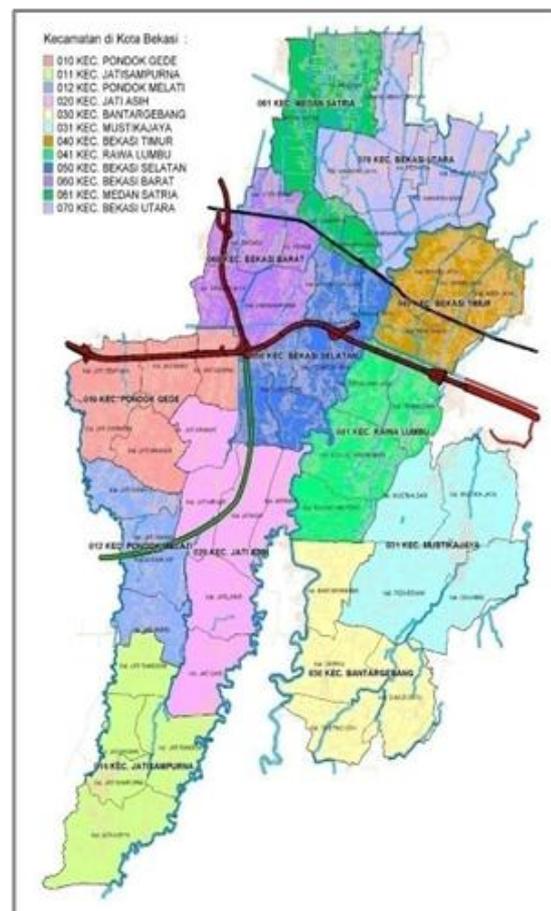
Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- sebelah Timur : Kabupaten Bekasi;
- sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok; dan
- sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta.

Letak Kota Bekasi ini sangat strategis, dimana wilayahnya merupakan perbatasan antara 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta (yang berkedudukan sebagai ibukota negara) dan Provinsi Jawa Barat (seperti Gambar 2.2). Letak geografis 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan.

Kota Bekasi secara administrasi terbagi kedalam 12 wilayah kecamatan dan 56 kelurahan. Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah terluas (24,73 km²), sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km²).

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota, Kota Bekasi menjadi daerah penyangga ibukota. Hal ini berpengaruh dalam penggunaan lahan yang terdapat di Kota Bekasi. Sebagian besar lahan di Kota Bekasi digunakan untuk tempat tinggal dan usaha. Luas lahan pertanian di Kota Bekasi semakin berkurang sehingga sektor pertanian



Gambar 2.2 Peta Geografi Kota Bekasi

di Kota Bekasi tidak memperlihatkan kemajuannya. Luas lahan di Kota Bekasi yang diperuntukkan untuk lahan sawah hanya 2,33% dari luas Kota Bekasi, yaitu 491 ha. Selebihnya merupakan lahan kering yang digunakan untuk bangunan dan halaman (15.086 ha), Kebun (4.285 ha) dan sedikit yang digunakan untuk kolam (69 ha).

b. Topografi

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar, dengan kemiringan antara 0 - 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondok Gede. Sedangkan ketinggian antara 25 - 100 m di atas permukaan air laut (dpl) berada di Kecamatan Bantar Gebang, Pondok Melati, dan Jati Asih.

Kondisi tanah sebagian besar berupa aluvial yang merupakan endapan pantai di bagian utara kota dan tanah liat serta vulkanik di bagian selatan kota. Suhu udara Kota Bekasi cukup tinggi antara 24 - 33°C karena terletak di dataran rendah. Kota Bekasi relatif tidak memiliki sumberdaya alam. Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengendalikan secara proporsional potensi sumberdaya yang ada seperti sumberdaya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah. Disamping itu, terkait keseimbangan lingkungan hidup diupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan lahan-lahan terbuka untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota.

c. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh *pleistocene volcanic facies*. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi bagian utara. Sedangkan struktur *miocene sedimentary facies* terdapat di bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan DKI Jakarta. Kondisi di wilayah selatan Kota Bekasi, tepatnya di daerah Jatisampurna, terdapat sumur gas. Sumur gas tersebut adalah Sumur JNG-A (106°55'8,687"BT; 06°20'54,051"LS) & Sumur JNG-B (106°55'21,155"BT; 06°21'10,498"LS).

Keadaan tanah dapat membantu di dalam menentukan wilayah yang cocok untuk permukiman dengan mempertimbangkan aspek fisik yang meliputi kedalaman efektif, tekstur tanah, dan jenis tanah. Dengan kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm, jenis tanah latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi sedang halus. Komposisi perbandingan keadaan tanah berdasarkan luasnya antara

lain: tekstur halus seluas 17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%) dan tekstur kasar seluas 421 ha (2%).

d. Hidrologi dan Klimatologi

Tabel 2.1.
Profil Sungai di Wilayah Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit m ³ /dtk)	
			Permukaan	Dasar		Maks	Min
1.	Kali Cikeas	17,479	10,00	24,00	30,00	5,90	250,00
2.	Kali Cilengsi	19,800	10,00	40,00	30,00	8,50	350,00
3.	Kali Bekasi Hulu	11,425	10,00	50,00	30,00	14,40	375,00
4.	Kali Bekasi Hilir	17,675	10,00	55,00	40,00	12,00	450,00
5.	Kail Sunter	22,682	2,00	12,00	10,00	3,60	14,63
6.	Kali Cakung	29,129	2,00	7,00	6,00	3,00	16,25
7.	Kail Jambe - Kali Siluman	14,076	2,40	8,00	7,00	1,20	18,75
8.	Kali Blencong	4,200	2,50	8,00	7,00	1,50	12,00
9.	Kali Sasak Jarang/Narogong	1,003	1,70	6,00	5,00	0,80	9,35
10.	Kali Bojong Rangkong	2,900	2,00	7,00	5,00	-	-
	Kali Irigasi:						
11.	Primer Kali Malang	8,900	2,50	24,00	14,00	16,00	19,00
12.	Saluran Rawa Baru	4,500	1,60	12,00	10,00	3,50	11,00
13.	Saluran Bekasi Pangkal	2,700	1,70	12,00	10,00	4,50	10,20
14.	Saluran Bekasi Utara	5,900	1,50	10,00	7,00	2,50	8,50
15.	Saluran Pulo Timah	1,400	1,20	6,00	4,00	0,50	4,00
16.	Saluran Tanah Tinggi	6,100	1,40	8,00	6,00	1,00	7,00
17.	Saluran Bekasi Tengah	3,100	1,60	14,00	11,00	1,50	11,00
18.	Saluran Pondok Ungu	4,900	1,60	11,00	8,00	1,00	9,50
19.	Bogor Penggarutan	3,200	1,30	7,00	5,00	1,00	3,00
20.	Kali Krupuk - Kali Batu	24,000	2,00	10,00	9,00	2,80	19,00
21.	Kali Empet/Sal Rawa Tembaga	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Lebar dan kedalaman dihitung rata-ratanya

Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2011

Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan di sini mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai

Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air.

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada tahun 2011 yang dibandingkan dengan Baku Mutu Air menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 serta dengan menggunakan Metode Storet guna mengetahui Status Mutu Air berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2005 dapat disimpulkan sebagaimana pada Tabel 2.2 sebagai berikut ini:

Tabel 2.2.
Status Kelas dan Mutu Air Sungai Utama
Di Kota Bekasi Tahun 2011

No.	Nama Sungai	Kelas PP No.82 Tahun 2001	Status Pergub Jabar No.69/2005 (Metode Storet)
1.	Kali Cikeas	II	Cemar Sedang
2.	Kali Cileungsi	II	Cemar Sedang
3.	Kali Bekasi	II	Cemar Berat
4.	Kali Baru	II	Cemar Berat
5.	Saluran Sekunder	II	Cemar Sedang

Sumber : BPLH Kota Bekasi, 2011

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

Tabel 2.3.
Rata-rata Kekерuhan Kali Bekasi 2015 (mg/l^t)

Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2003	239	2.670	3.244	4.088	3.540	506	40	47	48	3.860	593	419
2004	1.256	1.816	778	2.967	2.696	64	235	46	85	365	648	2.583
2005	423	595	589	447	261	503	253	144	51	391	295	146
2006	537	552	211	179	97	61	36	31	24	23	302	603
2007	343	1.011	87	364	216	378	46	46	68	115	313	367
2008	188	433	968	776	157	29	22	21	175	97	362	207
2009	314	283	184	488	454	162	160	25	122	228	102	185
2010	187	663	883	187	406	192	290	266	389	222	231	105
2011	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2013	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2014	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Sumber: Divisi I Perum Jasa Tirta II (diambil dari BPS Kota Bekasi 2016)

Dari tabel di atas, terlihat data tentang kekeruhan rata-rata sungai di Kota Bekasi terakhir didapat data tahun 2010, yaitu 105 mg/l^t. Setelah tahun 2010, tidak diperoleh lagi data dari Perum Jasa Tirta II, khususnya dari Divisi I, terkait kekeruhan air sungai yang melintas di Kota Bekasi. Hal ini disebabkan karena alat untuk mengetahui rata-rata kekeruhan Kali Bekasi mengalami kerusakan, dan sehingga mulai tahun 2015 tidak dapat diketahui seberapa besar kekeruhan Kali Bekasi.

Tabel 2.4.
Rata-rata Debit Bulanan Kali Bekasi 2003-2015
 (dalam m³/detik)

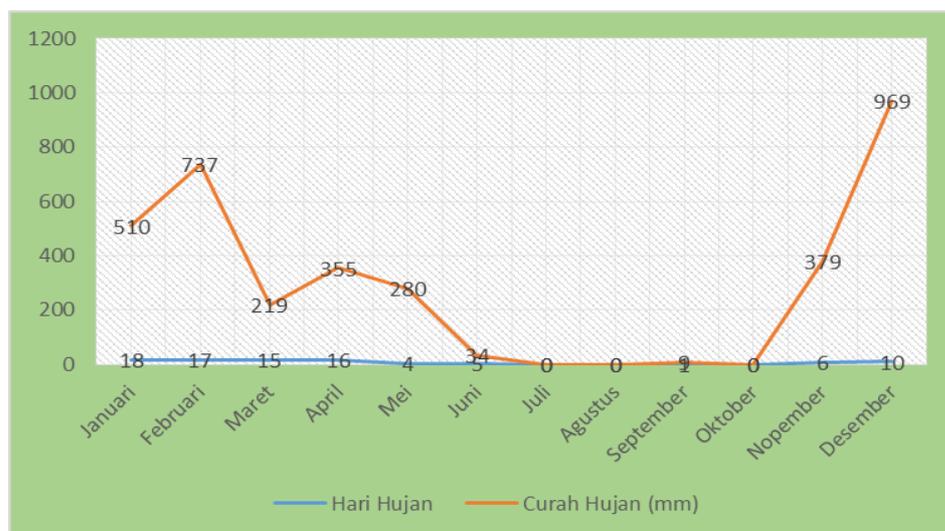
Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2003	10,62	55,57	40,52	33,38	31,04	16,49	3,81	1,83	6,51	34,35	22,46	24,34
2004	44,28	21,56	19,98	35,26	52,45	90,10	93,80	17,49	34,30	10,20	37,12	33,15
2005	64,59	83,50	97,22	66,11	56,75	69,83	42,66	37,38	24,65	28,09	43,71	26,11
2006	72,48	72,63	36,34	42,52	27,44	14,28	6,94	3,47	1,35	1,60	10,34	42,41
2007	35,38	98,55	25,63	32,63	22,32	25,41	9,94	4,98	6,74	*	6,29	17,98
2008	30,62	43,24	53,91	52,20	25,70	7,50	16,22	11,17	12,97	19,67	38,85	24,66
2009	56,52	54,56	48,70	52,83	58,38	35,35	24,66	21,41	28,42	38,17	36,15	27,53
2010	32,28	83,29	68,89	18,02	45,09	34,38	34,50	39,35	68,95	46,37	45,48	32,60
2011	50,43	36,69	25,59	69,88	74,77	40,6	35,98	15,73	10,16	29,97	55,69	57,46
2012	37,74	63,44	24,64	45,09	27,75	20,64	10,48	4,48	5,72	19,54	40,77	113,06
2013	59,86	62,53	44,08	65,60	48,33	27,90	36,89	33,87	37,54	32,80	27,74	44,361
2014	59,86	62,53	44,08	65,60	48,33	27,90	36,89	33,87	37,54	32,80	27,74	44,361
2015	59,86	62,53	44,08	65,60	48,33	27,90	36,89	33,87	37,54	32,80	27,74	44,361

Sumber: Divisi I Perum Jasa Tirta II (diambil dari BPS Kota Bekasi 2016)

Sementara itu, debit air Kali Bekasi yang melintasi Kota Bekasi tahun 2015 rata-rata 43,46 m³/detik. Dari tabel 2.4. dapat dilihat bahwa debit terbesar terjadi pada bulan Januari dan Februari, dimana pada bulan tersebut biasanya curah hujan cukup tinggi.

Iklm di Kota Bekasi tergolong iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Selama tahun 2015 keadaan iklim di Kota Bekasi cenderung panas, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu tercatat 979 mm dengan jumlah hari hujan 10 hari. Jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan September, yaitu 9 mm, dengan jumlah hari hujan 1 hari. Sedangkan pada bulan Juli, Agustus dan Oktober tidak terjadi hujan di Kota Bekasi. Pola curah hujan di Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi. Karena letak Kota Bekasi yang dilatarbelakangi oleh dataran rendah yang dibatasi batas administrasi wilayah DKI Jakarta, Kab Bogor, dan Kab Bekasi serta terletak agak jauh dari pantai Teluk Jakarta yang dipisahkan batas administrasi Kabupaten Bekasi dan wilayah utara Kota Bekasi.

Pola curah hujan di Kota Bekasi dipengaruhi oleh bentuk wilayah terutama kondisi morfologi regional yang relatif datar dengan kemiringan antara 0 - 3%, dengan bentuk miring ke arah utara serta ketinggian antara 0 - 25 m di atas permukaan laut dengan daerah datar yang berrawa.



Gambar 2.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan Di Kota Bekasi 2015

e. Luas/Sebaran Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya & Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Lindung

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu (1) membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan (2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung. Sesuai RTRW 2011-2031, kawasan lindung Kota Bekasi sbb.:

Tabel 2.5.
Rencana Kawasan Lindung Kota Bekasi sesuai RTRW
Tahun 2011-2031

Kawasan Lindung		Lokasi
Kawasan perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Kali Cikeas
		Kali Cileungsi
		Kali Bekasi
		Kali Sunter
		Kali Cakung
		Bantaran Sungai Cikiwul
	Daerah Sekitar Situ	Situ Rawalumbu
		Situ Rawagede
		Situ Rawa Pulo
	Tampungan Air dan Pengendali Banjir	Kawasan Karang Kitri
		Kawasan Harapan Baru Regensi
		Kawasan Taman Permata Cikunir
		Situ Uwong
		Kawasan Puri Gading
		Bendung Cikeas
		Kawasan Rawa Pulo
		Kelurahan Pengasinan
		Kawasan Rawa Pasung
		Kawasan Rawa Lele
		Jati Bening 2
		Situ Jati Bening
		Kawasan Kompleks Kodam Jaya
		Kawasan Bumi Bekasi 3
		Situ Rawalumbu
		Saluran Rawalumbu Hulu
		PHP Narogong
		Rawa Gede
Cipendawa		
Desa Jatimulya		

Kawasan Lindung		Lokasi
Ruang Terbuka Hijau Kota	Kawasan Penyangga	
	Hutan Kota	
	Taman Kota	
	Taman Lingkungan	
	Taman Rekreasi	
	Tempat Pemakaman Umum	
	Lap Olahraga/Lap Terbuka Hijau	
	Sempadan Jalan	
	Sempadan Sungai	
	Pulau Jalan	
	Sempadan Instalasi Bahaya	
	Sempadan Kereta Api	
	Taman Halaman Gedung	
	Taman Persil	
	LahanPekarangan	

Sumber: Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

Kawasan Budidaya

Kota Bekasi didominasi penggunaan lahan permukiman baik yang terstruktur maupun yang dibangun oleh individu masyarakat. Perkembangan kegiatan permukiman terstruktur beberapa tahun terakhir mengakibatkan bangkitan kegiatan pendukung permukiman berupa perdagangan, jasa dan kebutuhan fasilitas masyarakatnya. Di sisi lain perkembangan Kota Jakarta menyebabkan Kota Bekasi yang berfungsi sebagai penyangga Kota Jakarta mendapat limbah kegiatan baik berupa industri, perdagangan dan jasa serta permukiman itu sendiri.

Tabel 2.6.
Klasifikasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Kawasan Tahun 2015

Jenis Penggunaan Lahan	Pusat Kota	Jati Sampurna	Pondok Gede	Bekasi Utara	Mustika Jaya	Kota Bekasi	
						Hektar	Persen
Perumahan	3.632,812	1.195,802	2.074,565	1.394,191	1.243,058	9.540,428	47,18 %
Komersial	288,117	86,264	123,894	92,578	93,501	684,354	3,39 %
Industri	124,813	36,054	58,399	324,198	233,535	776,999	3,84 %
Fasilitas Pelayanan	200,792	72,658	649,336	78,828	47,094	1.048,708	5,19 %
Kawasan Lindung	115,431	33,024	42,666	52,808	47,770	291,699	1,44 %
Transportasi	4,7000	-	-	3,562	2,334	10,596	0,05 %
Ruang Terbuka Hijau	217,847	50,812	296,654	76,963	131,811	774,088	3,83 %
Campuran	40,502	10,472	7,682	30,625	0,219	89,499	0,44 %
Pertanian (Lahan Kosong)	848,687	1.810,976	938,717	910,865	2.403,108	6.912,353	34,19 %
Pemerintahan, Hankam	66,819	7,112	3,809	12,158	2,492	92,391	0,46 %
Jumlah (Hektar)	5.540,519	3.303,174	4.195,722	2.976,776	4.204,922	20.221,119	
Jumlah (Persen)	27,40 %	16,34%	20,75 %	14,72 %	20,79 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2016.

Permukiman

Secara umum perkembangan permukiman di Kota Bekasi mengarah pada terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru skala besar yang dikembangkan oleh swasta, terutama di Bantargebang dan Jatisampurna, dan di kawasan sebelah utara Kota Bekasi.

Adapun permukiman yang dibangun secara individu tersebar merata disemua kecamatan di Kota Bekasi. Permukiman di Bekasi bagian selatan merupakan permukiman dengan kepadatan yang masih rendah. Permukiman dengan kepadatan tinggi banyak ditemui Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Rawalumbu. Sedangkan permukiman kepadatan sedang berkembang di Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Jatisampurna, dan Jatiasih. Kemudian untuk permukiman dengan kepadatan rendah berkembang di Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta sebagian Kecamatan Jatiasih.

Daerah Titik Banjir dan Genangan

Beberapa titik banjir dan genangan di atas terkait dengan sistem drainase yang diterapkan. Beberapa kelurahan yang selama ini memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana banjir di Kota Bekasi antara lain:

- Kecamatan Bekasi Utara, meliputi: Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Harapan Jaya, dan Kalibaru;
- Kecamatan Jati Asih, meliputi: Kelurahan Jatikramat, Jatimekar, dan Jatirahayu;
- Kecamatan Bekasi Timur, meliputi: Kelurahan Mustika Jaya dan Cikiwul;
- Kecamatan Pondok Melati, yaitu di Kelurahan Jatisari.

Sedangkan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Bekasi Timur merupakan area berisiko sedang menuju tinggi. Tabel 2.7. berikut menginformasikan secara lebih detail tentang data terakhir terkait luasan bencana banjir yang terjadi di Kota Bekasi.

Tabel 2.7.
Data Luasan Bencana Banjir Di Kota Bekasi

Kecamatan	Luas/Area		Kelu- rahan	Wilayah Banjir	
	Ha	%		%	Ha
Pondokgede	1.629	7,74 %	5	10 %	160
Jatisampurna	1.449	6,88 %	5	-	-
Pondok Melati	1.857	8,82 %	4	10 %	190
Jatiasih	2.200	10,45 %	6	15 %	330
Bantargebang	1.704	8,10 %	4	-	-
Mustika Jaya	2.473	11,75 %	4	-	-
Bekasi Timur	1.349	6,41 %	4	20 %	270
Rawalumbu	1.567	7,44 %	4	15 %	240
Bekasi Selatan	1.496	7,11 %	5	20 %	300
Bekasi Barat	1.889	8,97 %	5	15 %	280
Medan Satria	1.471	6,99 %	4	10 %	150
Bekasi Utara	1.965	9,33 %	6	10 %	200
Kota Bekasi	21.049	100,00 %	56	10,072 %	2.120

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

Tabel 2.7 di atas memperlihatkan ketinggian dan lama genangan yang terjadi selama bencana banjir yang terjadi pada tahun 2013. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut, Kecamatan Jatiasih merupakan wilayah dengan genangan paling luas yaitu 330 hektar dengan rata-rata lama genangan adalah 26,5 jam dan rata-rata ketinggian genangan mencapai 148,75 cm. Sedangkan rata-rata ketinggian genangan yang terjadi di Kota Bekasi adalah 90,81 cm dengan rata-rata lama genangan adalah 18,24 jam.

Tabel 2.8.
Data Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Di Kota Bekasi

No	Lokasi Banjir	Kelurahan	Ketinggian Genangan (m)	Lama Genangan (jam)	Luas Genangan (ha)
A.	Kecamatan Jatiasih				330,0
1.	Perumahan Villa Jatirasa	Jatirasa	1,0 - 1,5	24,0	4,0
2.	Perumahan Pd. Gede Permai	Jatirasa	1,0 - 1,5	28,0	20,0
3.	Perumahan Kemang IFI	Jatirasa	1,0 - 1,7	24,0	12,0
4.	Perumahan PPA Jatiasih	Jatirasa	2,5 - 3,0	24,0	7,0
5.	Perumahan Pd. Mitra Lestari	Jatirasa	0,4 - 0,6	12,0	14,0
	Perum Puri Nusa Pala Persada		0,7 - 1,2	24,0	0,2
	Perumahan Mandosi		1,0 - 1,5	24,0	1,0

No	Lokasi Banjir	Kelurahan	Ketinggian Genangan (m)	Lama Genangan (jam)	Luas Genangan (ha)
6.	Perumahan Graha Indah	Jatimekar	0,4 - 0,7	18,0	18,0
7.	Komplek Nasio	Jatimekar	0,5 - 1,0	22,0	26,0
8.	IKIP	Jatikramat	250,00	30,0	
		Rata-rata	148,75	26,5	
B.	Kecamatan Pondok Gede				160,0
1.	Perumahan Antilop	Jaticempaka	0,6 - 1,3	3,0	9,5
2.	Perumahan Jatibening Baru II	Jatibening Baru	0,2 - 0,6	8,0	4,0
3.	Perum Jatibening Baru (AL)	Jatibening	0,3 - 0,6	24,0	20,0
4.	Perumahan Duta Indah	Jatimakmur	0,5 - 1,0	24,0	3,0
5.	Perumahan Sari Gaperi	Jatimakmur	70,00	12,0	
6.	Perumahan Cahaya Kemang	Jatimakmur	0,5 - 1,0	24,0	
7.	Perumahan Villa Bougenville	Jatibening Baru	40,00	12,0	
	Perumahan IKIP		0,8 - 1,5	20,0	20,0
		Rata-rata	88,57	18,28	
C.	Kecamatan Pondok Melati				190,0
1.	Perumahan Candra Lama	Jatirahayu	0,3 - 0,6	14,0	25,0
2.	Perumahan Candra Baru	Jatirahayu	0,2 - 0,5	14,0	15,0
		Rata-rata	50,00	12,0	
D.	Kecamatan Bekasi Selatan				300,0
1.	Perumahan Jaka Kencana	Jakasetia	1,0 - 3,0	10,0	5,0
2.	Pangkalan Bambu - Giant	Marga Jaya	0,5 - 1,0	24,0	11,0
3.	Pd Timur Mas, Perum Grand Galaxi, Villa Jakasetia, Greenview	Jakamulya	0,6 - 1,0	24,0	
4.	Perumnas II	Kayuringin	0,6 - 1,0	24,0	3,0
5.	Perumahan BSK	Kayuringin	0,2 - 0,5	24,0	2,0
6.	Perumahan Depnaker	Jakasetia	1,0 - 2,5	10,0	1,0
	Pd Surya Mandala, Taman Cikunir, Masnaga, Taman Pelangi		0,3 - 0,6	24	
	Kayuringin/Rawa Tembaga		0,6 - 1,0	18,0	2,0
		Rata-rata	105,00	23,0	
E.	Kecamatan Bekasi Barat				280,0
1.	Mas Naga	Bintara	0,7 - 1,0	6,0	10,0
2.	Jatiluhur	Jakasampurna	0,6 - 1,0	24,0	
3.	Perumahan Harapan Baru II	Kotabaru	0,4 - 0,7	24,0	
	Perumahan Harapan Baru Regency		0,7 - 1,0	6,0	10,0
4.	Perumahan Persada Kemala	Jakasampurna	0,6 - 1,0	24,0	
	Perumahan Bougenville		0,7 - 1,0	6,0	10,0
	Perumahan Fajar Indah		0,5 - 2,0	5,0	10,0
		Rata-rata	75,00	12,0	
F.	Kecamatan Rawalumbu				240,0
1.	Perumahan Kemang Pratama	Bojong Rawalumbu	50,00	10,0	
2.	Rawalumbu Utara	Pengasinan	0,5 - 1,0	20,0	
3.	Narogong	Pengasinan	0,5 - 0,6	24,0	23,0
4.	Perumahan PHP II	Pengasinan	0,7 - 1,0	6,0	5,0

No	Lokasi Banjir	Kelurahan	Ketinggian Genangan (m)	Lama Genangan (jam)	Luas Genangan (ha)
	Perumahan PHP I		0,2 - 0,6	24,0	80,0
	Kel. Sepanjang Jaya		0,8 - 1	24,0	0,6,0
		Rata-rata	85,00	19,0	
G.	Kecamatan Bekasi Timur				270,0
1.	Perumnas III	Aren Jaya	0,5 - 0,8	24,0	91,0
2.	Perumahan Durenjaya	Duren Jaya	0,7 - 1,0	6,0	12,0
3.	Perumahan Danita	Bekasi Jaya	0,3 - 1,0	6,0	15,0
4.	Perumahan wisma Jaya	Aren Jaya	0,7 - 1,0	6,0	0,2
5.	Kartini	Margahayu	0,2 - 1,2	24,0	
6.	Perumahan Karang Kitri	Margahayu	0,2 - 0,6	24,0	
7.	Margahayu	Margahayu	0,5 - 1,0	24,0	5,3
8.	Unisma	Margahayu	0,5 - 1,0	6,0	1,0
		Rata-rata	85,00	22,75	
H.	Kecamatan Bekasi Utara				200,0
1.	Kelurahan Perwira	Perwira	0,7 - 1,0	6,0	5,0
2.	Kelurahan Teluk Pucung	Teluk Pucung	0,4 - 0,6	24,0	
3.	Kelurahan Harapan Mulya	Harapan Mulya	40,00	12,0	
	Perumahan Vila Indah Permai		0,5 - 1,0	2,0	10,0
		Rata-rata	110,00	18,67	
I.	Kecamatan Medan Satria				150,0
1.	Rawa Pasung	Kalibaru	80,00	12,0	
2.	Perumahan Harapan Indah	Pejuang	0,3 - 1,0	6,0	5,0
3.	Kelurahan Pejuang	Pejuang	0,5 - 1,0	5,0	1,1
	Perum Pondok Sani, Komplek PGRI, Kavling Bahagia		0,6 - 1,0	24,0	
		Rata-rata	70,00	12,0	
J.	Kecamatan Mustika Jaya				150,0
1.	Perumahan PTI		0,8 - 1,0	24,0	
2.	Mutiara Gading Timur	Pejuang	0,8 - 1,0	24,0	
	Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Kota Bekasi		90,81	18,24	2.120,0

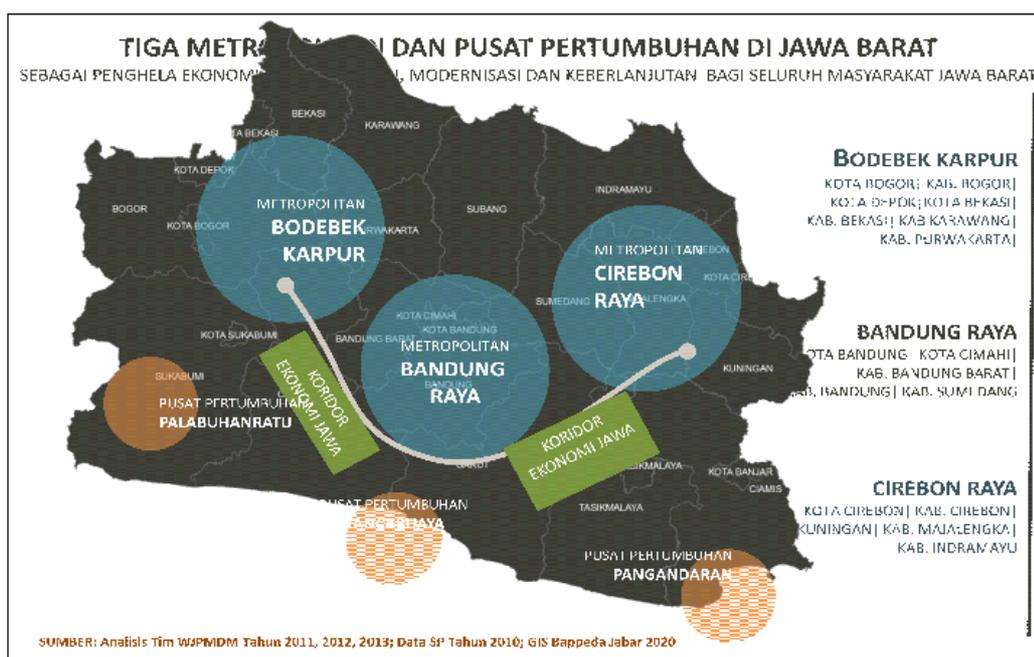
Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2014.

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebepunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, berikut potensi masing-masing wilayah.

Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur menurut Pasal 11 ayat (1) merupakan pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Wilayah ini mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Pacet, Sukaresmi dan Cipanas).

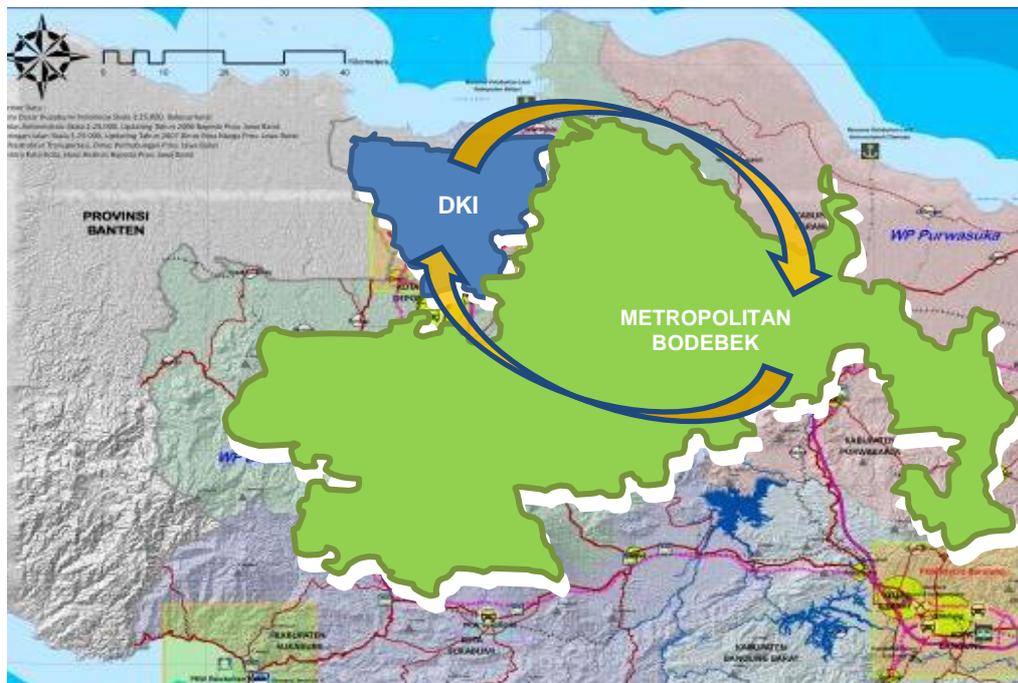
Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat, dikenal Metropolitan Bodebekkarpur wilayah Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai satu kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, aglomerasi penduduk yang mencakup 11,6 juta jiwa yang terletak di 82 kecamatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu: Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Karawang, dan sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, dengan total luas 314,840 hektar.



Gambar 2.4. Tiga Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat

Menurut konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur – DKI Jakarta, metropolitan ini dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan **Industri Manufaktur, Jasa, Keuangan, serta Perdagangan, Hotel, dan Restoran**, dengan karakteristik setiap metropolitan sesuai perda di atas, yaitu:

- (1) memiliki aktivitas perkotaan yang mandiri;
- (2) memiliki ciri khas yang berbeda;
- (3) memiliki manajemen metropolitan yang mandiri; dan
- (4) siap dalam kompetisi sosial-ekonomi yang sehat.



Gambar 2.5 Konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur–DKI Jakarta

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Bodebekkarpur yang dikembangkan dengan arah kebijakan sebagai metropolitan mandiri berbasis manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, dan restoran serta pariwisata. Arah kebijakan pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur diwujudkan melalui pendekatan Metropolitan Kembar (*Twin Metropolitan*) Bodebekkarpur – DKI Jakarta. Pendekatan Metropolitan Kembar dilakukan dengan mengembangkan Metropolitan Bodebekkarpur sebagai metropolitan level 1 yang setara dengan DKI Jakarta yang juga merupakan metropolitan level 1.

Sebagai metropolitan berbasis industri manufaktur, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong kegiatan industri manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur, salah satunya dengan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sistem angkutan barang (*logistic*) terutama untuk memenuhi kebutuhan distribusi dan produksi kegiatan industri manufaktur dalam skala besar. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembangunan sistem perkeretaapian barang yang mengakses ke lokasi pelabuhan-pelabuhan skala regional di wilayah ini. Selain itu, perlu dibangun pusat-pusat kegiatan riset dan inovasi teknologi yang dapat mengakselerasi pemanfaatan teknologi tinggi dalam kegiatan industri manufaktur di Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur.

Sebagai metropolitan berbasis jasa dan keuangan, pembangunan kluster kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi, hukum, penelitian, dan pemerintahan perlu segera dikembangkan di Metropolitan Bodebekkarpur. Pembangunan ini tidak dapat terlepas dari pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) cepat yang terintegrasi menghubungkan pusat - pusat kegiatan ekonomi (CBD dan pusat kegiatan lainnya), perumahan, serta simpul-simpul transportasi regional seperti bandara internasional. Hal ini penting karena kegiatan ekonomi berbagai perusahaan multinasional perlu ditunjang oleh kemudahan akses menuju bandar udara internasional.

Sebagai metropolitan berbasis perdagangan, hotel, restoran serta pariwisata, berbagai kawasan komersial yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi perlu dikembangkan untuk menunjang kebutuhan penduduk Metropolitan Bodebekkarpur. Kegiatan ekonomi yang berskala global harus didorong dan ditunjang ketersediaan fasilitas perdagangan, hotel, restoran, serta pariwisata yang berkelas metropolitan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai salah satu upaya sinkronisasi program, pembangunan tematik kewilayahan Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut:

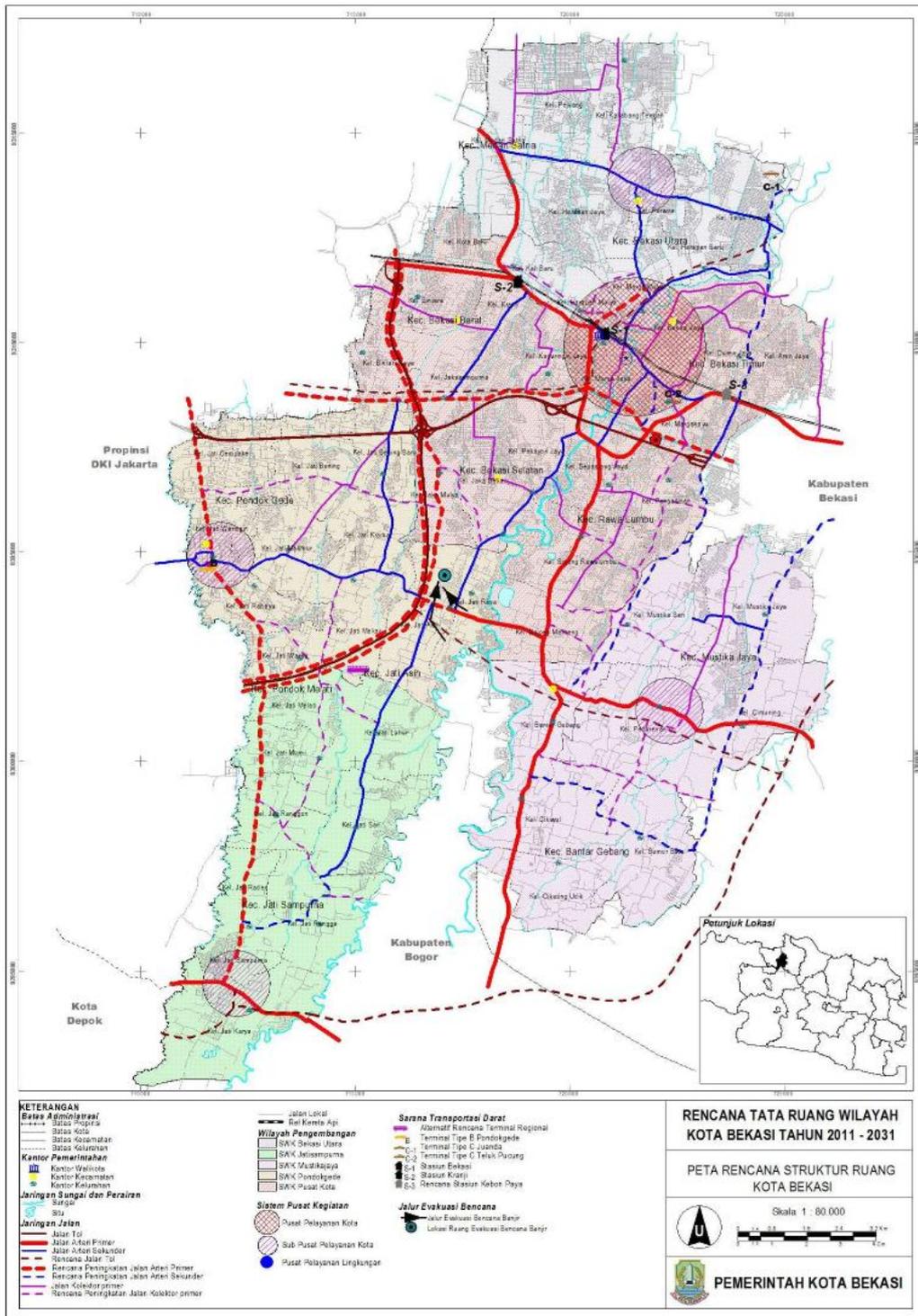
□ Wilayah Kawasan Kota

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;

2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
3. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota;
9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
11. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terpadu dan terstruktur berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
12. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
13. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan kota; dan
14. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi khusus tertentu.

Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek direncanakan dengan melakukan penataan koridor jalan utama Kota Bekasi, meliputi:

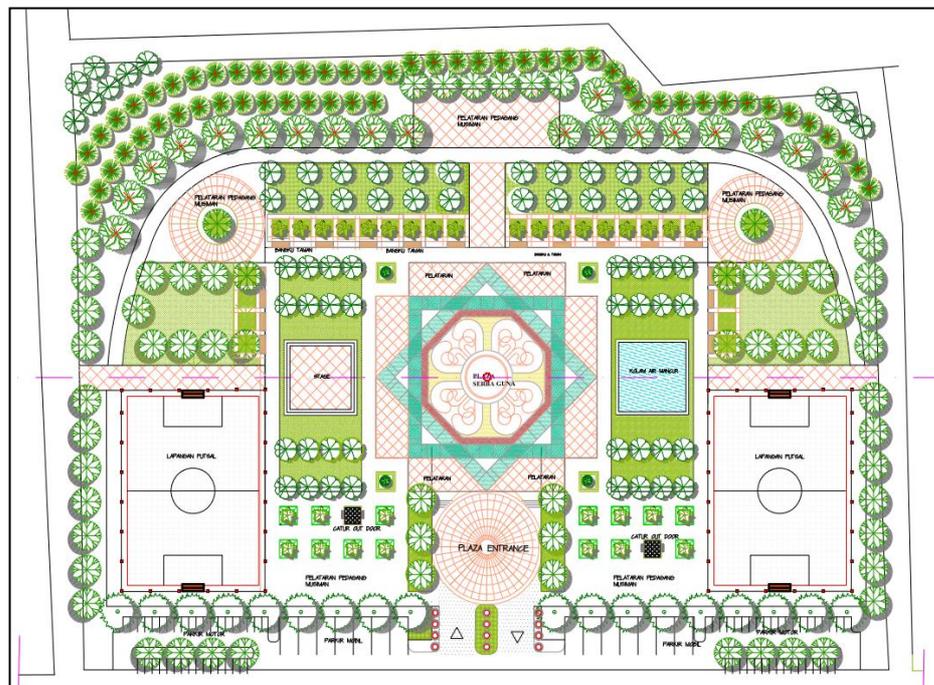
1. Koridor Jalan KH. Noer Ali;
2. Koridor Jalan Ahmad Yani;
3. Koridor Jalan Cut Meutia;



Gambar 2.6. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi

4. Koridor Jalan Juanda;
5. Koridor Jalan Sudirman;
6. Koridor Jalan Pekayon - Pondok Gede; dan
7. Kajian Jalan Pembentuk Struktur Ruang.

- Pembangunan Infrastruktur Sub Pusat Pelayanan Kota
 1. Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi kawasan Jalan Sudirman - Juanda - Cut Meutia - Achmad Yani;
 2. Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), meliputi:
 - SPPK Pondok Gede (pusat Kelurahan Jatiwaringin)
 - SPPK Bekasi Utara (pusat Kelurahan Perwira)
 - SPPK Jati Sampurna (pusat Kelurahan Jatikarya)
 - SPPK Mustikajaya (pusat Kelurahan Pedurenan);
 3. Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:
 - PPL Medan Satria (pusat Kelurahan Medan Satria)
 - PPL Rawalumbu (pusat Kelurahan Bojong Rawalumbu)
 - PPL Bekasi Selatan (pusat Kelurahan Jaka Satria)
 - PPL Bekasi Barat (pusat Kelurahan Bintara)
 - PPL Jatiasih (pusat Kelurahan Jatirasa)
 - PPL Pondok Melati (pusat Kelurahan Jatiwarna)
 - PPL Bantargebang (pusat Kelurahan Bantar Gebang);



Gambar 2.7. Contoh Rencana Penataan Taman Tematik di Kecamatan Mustika Jaya

- Taman Tematik di Beberapa Kecamatan, meliputi:
 1. Pembuatan Taman di 12 (dua belas) Kecamatan;
 2. PSU Perumahan Duren Jaya; dan
 3. Pemanfaatan Fasos Fasum sebagai Taman Lingkungan.



Gambar 2.8. Contoh Rencana Penataan Taman Tematik di Kecamatan Bantar Gebang

2.1.1.2 Aspek Demografi

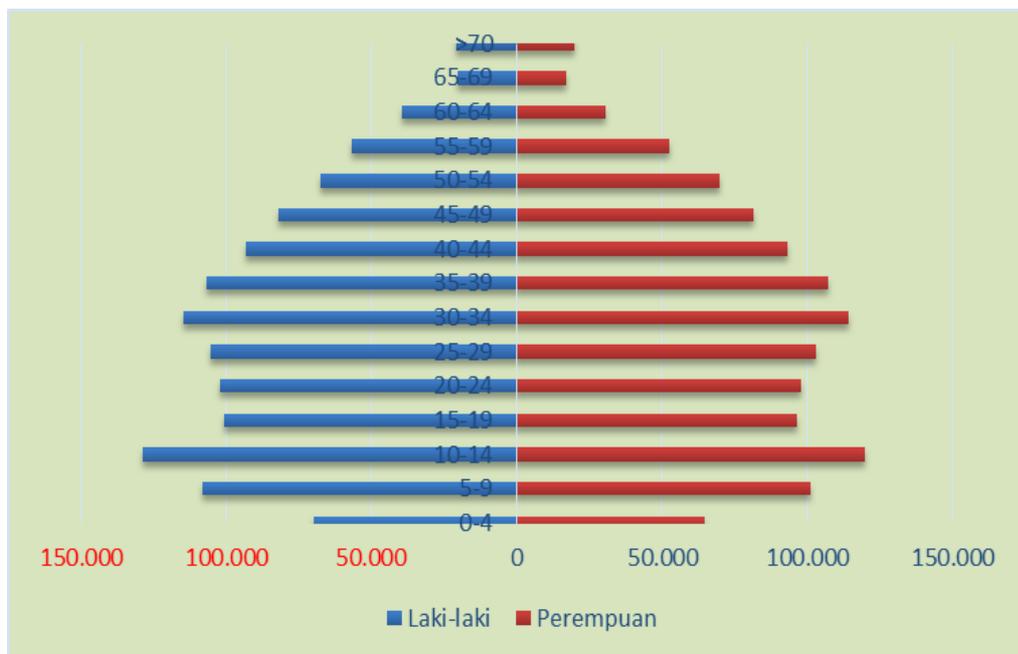
Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota. Namun harus diakui secara empirik pertumbuhan penduduk kota terutama dari arus pendatang menimbulkan permasalahan baru yang cukup kompleks baik fisik maupun non-fisik, terutama bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung terhadap pertumbuhan penduduk. Fungsi Kota Bekasi yang pada awalnya sebagai wilayah penyangga, bergeser menjadi wilayah penyeimbang Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

a. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Pertumbuhan alami akan meningkat apabila kelahiran lebih besar daripada kematian dan atau migrasi masuk (*in-migration*) lebih besar daripada migrasi keluar (*out-migration*).

Pemantauan laju pertumbuhan penduduk sangat penting sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang.

Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.384.413 jiwa, terdiri dari 1.216.260 jiwa penduduk laki-laki dan 1.168.153 jiwa penduduk perempuan.



Sumber: Disdukcapil Kota Bekasi dalam Profil Daerah Kota Bekasi 2016.

Gambar 2.9. Piramida Penduduk Kota Bekasi 2015

Jika dilihat dari tren pertumbuhan selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Bekasi mengalami penurunan antara tahun 2011 - 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan 2015, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.9. Kota Bekasi tergolong sebagai wilayah yang padat penduduknya. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Bekasi 2.084.420. Sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.384.413. Dengan demikian, selama kurun waktu 6 tahun pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mencapai 14,39 persen.

Tabel 2.9.
Tren Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kota Bekasi 2011 - 2015

Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-laki	1.250.435	1.189.733	1.132.289	1.224.430	1.216.260
Perempuan	1.197.495	1.144.409	1.080.056	1.158.259	1.168.153
Jumlah	2.447.930	2.334.142	2.212.345	2.382.689	2.384.413

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2016.

b. *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota Bekasi tahun 2015 cenderung seimbang, jumlah penduduk tercatat sebesar 2.384.413 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.216.260 jiwa (51,39%), dan penduduk perempuan sebanyak 1.168.153 jiwa (48,61%) dan rasio jenis kelamin 104,12. Berdasarkan data persebaran penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2015, penyebaran tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,46%, Bekasi Barat 11,47%, Pondok Gede 11,19% dan terendah di Kecamatan Bantargebang sebesar 4,04%.

Di samping itu, bila diperhatikan lebih cermat, terjadi pemusatan kepadatan penduduk pada beberapa wilayah Kota Bekasi. Kepadatan penduduk Kota Bekasi 11.328 jiwa/km². Terdapat enam kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Pondok Gede, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Rawalumbu, dan Bekasi Selatan yang dihuni oleh 64,68 persen jumlah penduduk Kota Bekasi, sementara lima kecamatan tersebut hanya

memiliki luas wilayah sekitar 47,01 persen dari luas wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis dari unsur-unsur laju pertambahan dan unsur-unsur yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Tabel 2.10.
Luas Wilayah, Seks Rasio, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Per Km²
Menurut Kecamatan Di Kota Bekasi Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Sex Ratio	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bekasi Timur	135.263	130.372	265.635	103,75	13,49	19.691
Bekasi Barat	139.395	134.059	273.454	103,98	18,89	14.476
Bekasi Utara	163.744	157.210	320.954	104,16	19,65	16.334
Bekasi Selatan	100.418	97.899	198.317	102,57	14,96	13.256
Rawalumbu	110.855	106.356	217.211	104,23	15,67	13.862
Medan Satria	77.754	74.683	152.437	104,11	14,71	10.363
Bantargebang	49.818	46.566	96.384	106,98	17,04	5.656
Pondok Gede	136.704	130.022	266.726	105,14	16,29	16.374
Jatiasih	104.919	101.015	205.934	103,86	22	9.361
Jatisampurna	53.260	51.064	104.324	104,30	14,49	7.200
Mustika Jaya	82.324	79.324	161.648	103,78	24,73	6.537
Pondok Melati	61.806	59.583	121.389	103,73	18,57	6.537
Kota Bekasi	1.216.260	1.168.153	2.384.413	104,12	210,49	11.328
2014	1.224.430	1.158.259	2.382.689	105,71	210,49	11.320
2013	1.132.289	1.080.056	2.212.345	104,84	210,49	10.510
2012	1.189.733	1.144.409	2.334.142	103,96	210,49	11.089
2011	1.250.435	1.197.495	2.447.930	104,42	210,49	11.629

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2016.

Tabel 2.11.
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015

NO	KECAMATAN	0 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	> 74	JUMLAH
1.	Bekasi Timur	17.834	22.636	24.147	19.001	22.082	25.498	27.782	22.913	17.711	16.001	16.010	14.864	10.127	4.729	2.335	1.965	265.635
2.	Bekasi Barat	17.617	24.430	27.923	21.860	22.157	24.116	26.547	23.955	19.851	17.219	15.578	13.325	9.071	4.848	2.728	2.229	273.454
3.	Bekasi Utara	19.691	28.264	33.646	27.973	28.381	28.182	28.893	25.834	23.936	23.449	20.441	15.484	8.488	4.013	2.243	2.036	320.954
4.	Bekasi Selatan	11.131	17.299	19.975	15.170	16.349	17.409	19.358	17.539	14.788	13.128	11.574	10.204	7.190	3.626	1.898	1.679	198.317
5.	Rawalumbu	11.202	17.571	21.050	18.160	21.161	21.447	21.775	19.772	16.765	15.240	13.483	9.694	5.043	2.390	1.284	1.164	217.201
6.	Medan Satria	8.176	14.112	17.109	12.856	12.889	13.251	14.185	12.970	11.774	10.956	9.205	6.986	3.832	2.001	1.131	1.014	152.447
7.	Bantargebang	5.274	9.156	11.456	8.137	7.815	8.923	10.754	10.796	8.853	5.867	3.446	2.497	1.392	895	515	608	96.384
8.	Pondok Gede	11.603	19.617	24.535	22.101	22.099	23.347	26.995	25.887	21.755	18.243	15.006	12.864	9.877	5.934	3.426	3.437	266.726
9.	Jatiasih	11.157	18.973	23.223	17.928	16.460	16.421	18.353	18.280	17.215	14.990	11.613	8.402	5.351	3.213	2.341	2.014	205.934
10.	Jatisampurna	5.273	9.406	12.247	9.529	9.231	8.473	9.402	9.173	8.152	7.303	6.105	4.266	2.377	1.359	942	1.086	104.324
11.	Mustika Jaya	9.490	16.692	19.223	14.185	11.913	11.752	14.076	16.028	15.455	12.774	7.973	5.200	3.010	1.754	1.091	1.032	161.648
12.	Pondok Melati	5.941	10.836	13.676	10.117	9.226	9.330	10.878	10.722	9.772	8.525	6.936	5.710	4.389	2.471	1.533	1.327	121.389
TOTAL		134.389	208.992	248.210	197.017	199.763	208.149	228.998	213.869	186.027	163.695	137.370	109.496	70.147	37.233	21.467	19.591	2.384.413

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2015.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Tahun 2015

No	Kecamatan	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
1.	Bekasi Timur	208.744	56.891	265.635
2.	Bekasi Barat	213.812	59.642	273.454
3.	Bekasi Utara	250.646	70.308	320.954
4.	Bekasi Selatan	155.340	42.977	198.317
5.	Rawalumbu	176.326	40.885	217.211
6.	Medan Satria	117.245	35.192	152.437
7.	Bantargebang	72.101	24.283	96.384
8.	Pondok Gede	222.271	44.455	266.726
9.	Jatiasih	164.739	41.195	205.934
10.	Jatisampurna	82.744	21.580	104.324
11.	Mustika Jaya	124.864	36.784	161.648
12.	Pondok Melati	96.025	25.364	121.389
T O T A L		1.884.857	499.556	2.384.413

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2015.

Penduduk Kota Bekasi juga diklasifikasikan berdasarkan status pendidikan mulai dari belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat D-2, tamat D-3, tamat S-1, tamat S-2, dan tamat S-3, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.13. di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Tahun 2015

Kecamatan	Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D-2	Tamat D-3	Tamat Strata 1	Tamat Strata 2	Tamat Strata 3
Bekasi Timur	49.299	25.202	22.619	26.449	110.793	2.114	9.268	18.372	1.436	83
Bekasi Barat	54.361	26.808	23.691	26.964	109.827	1.469	8.940	19.810	1.492	92
Bekasi Utara	61.671	36.564	28.668	35.760	124.663	2.538	10.596	19.116	1.317	61
Bekasi Selatan	38.669	20.147	20.253	20.151	65.688	1.831	8.902	20.521	2.025	130
Rawalumbu	35.700	20.916	17.303	18.430	100.128	1.457	6.238	15.412	1.546	81
Medan Satria	30.812	16.633	12.908	16.958	59.871	1.285	4.194	8.908	812	56
Bantargebang	20.902	11.818	13.153	11.779	36.778	168	685	1.037	56	8
Pondokgede	42.690	28.162	22.224	24.573	103.057	1.421	10.475	31.293	2.677	154

Jatiasih	39.685	25.963	18.199	18.682	77.327	1.164	7.369	15.731	1.735	79
Jatisampurna	21.164	12.331	14.266	11.006	33.694	495	2.827	7.729	759	53
Mustika Jaya	35.001	20.858	18.749	17.405	52.735	1.038	5.168	10.124	544	26
Pondok Melati	23.757	13.197	12.499	12.670	42.055	683	4.790	10.831	851	56
JUMLAH	453.711	258.599	224.532	240.827	916.616	15.663	79.452	178.884	15.250	879

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2015.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan perekonomian suatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dari data PDRB dapat diturunkan indikator lainnya seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Selama periode 2011-2015, basis perekonomian Kota Bekasi adalah industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor. Hal ini ditunjukkan dari struktur ekonomi Kota Bekasi dimana peranan kategori industri pengolahan masih dominan dalam pembentukan PDRB. Peranan terbesar kedua dimiliki oleh kategori perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor. Peranan kategori transportasi dan pergudangan yang menempati urutan ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Bekasi tahun 2010-2012 ternyata mengalami pergeseran struktur di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, digantikan oleh kategori konstruksi. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 35,17%, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 22,73% dan kategori konstruksi sebesar 10,47%. Sedangkan beberapa kategori yang memiliki peranan terkecil di Kota Bekasi adalah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar Rp 70.845.922,64 ribu, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 55.462.726,87 ribu. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2015 adalah 5,57%. Secara umum kinerja kegiatan ekonomi di Kota Bekasi mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional tahun 2015, kenaikan yang terjadi di Kota Bekasi relatif lebih besar.

Perubahan tahun dasar dalam penyusunan PDRB mengharuskan adanya implementasi SNA 2008. Hal ini berdampak pada perubahan konsep, definisi dan metodologi. Salah satu perubahan yang mendasar adalah perubahan lapangan usaha yang tadinya terdiri dari sembilan sektor ekonomi menjadi 17 kategori ekonomi. Kota Bekasi sendiri melakukan penyusunan PDRB berdasarkan 16 kategori ekonomi. Kategori yang tidak dihitung di Kota Bekasi adalah kategori pertambangan dan penggalian. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan tersebut dalam perekonomian Kota Bekasi.



Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional (Persen), 2011-2015

Secara umum, perlambatan yang terjadi sejak tahun 2013 lebih banyak dilatarbelakangi oleh kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang berdampak pada *margin rate* dan pembengkakan biaya produksi. Dari sisi eksternal pasar ekspor masih lesu akibat turunnya permintaan dan krisis global yang masih melanda disertai biaya impor yang cukup tinggi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada produktivitas dari industri yang berbahan baku impor dan berorientasi ekspor.

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dimana tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Data yang disajikan adalah data series tahun 2011 sampai 2015. Disajikan menurut atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dimana PDRB tahun 2014 merupakan angka sementara dan data tahun 2015 merupakan angka sangat sementara. Berdasarkan data PDRB 2011-2015 pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2015 terjadi pada kategori informasi dan komunikasi sebesar 17,92%. Kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi dan jasa pendidikan juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dengan besaran sekitar 10%. Secara umum, seluruh kategori pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang positif kecuali kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pengadaan listrik dan gas.

PDRB per kapita Kota Bekasi tahun 2015 sebesar Rp 26,10 juta. Secara umum angka tersebut memiliki makna bahwa setiap orang di Kota Bekasi diperkirakan mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 26,10 juta. Peningkatan yang terjadi sebesar 7,56% dibandingkan PDRB per kapita tahun 2014 yang sebesar Rp 24,26 juta. Sementara itu, PDRB per kapita riil Kota Bekasi pada tahun 2015 sebesar Rp 20,43 juta atau mengalami kenaikan 2,76% jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Tabel 2.14.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2015
(juta rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	344.996,79	351.517,39	387.750,61	413.950,44	440.744,24
Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	17.994.471,88	19.493.229,28	20.971.060,85	23.113.845,11	24.917.814,91
Pengadaan Listrik dan Gas	1.045.530,49	1.325.108,43	1.553.337,09	1.972.918,56	1.944.779,91
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.747,44	40.155,13	45.939,40	48.518,43	52.218,43

Konstruksi	3.672.191,90	4.474.969,02	5.478.367,65	6.467.084,55	7.417.084,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.907.572,96	12.434.806,80	13.936.356,77	14.749.845,86	16.106.326,63
Transportasi dan Pergudangan	4.144.896,28	4.526.813,82	5.156.356,01	5.988.023,43	7.175.596,75
Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	1.536.597,31	1.721.956,30	1.957.742,73	2.237.969,58	2.530.045,68
Informasi dan Komunikasi	780.132,50	892.781,74	1.011.595,65	1.149.704,65	1.351.503,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.192.129,01	1.393.898,35	1.661.332,81	1.786.031,17	2.006.471,74
Real Estate	775.952,32	869.918,58	956.307,77	1.020.483,26	1.118.283,92
Jasa Perusahaan	183.506,86	208.090,12	233.913,66	273.186,92	303.675,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.068.185,89	1.204.308,47	1.273.820,91	1.330.431,11	1.432.250,99
Jasa Pendidikan	773.532,69	917.828,01	1.061.650,95	1.280.189,67	1.496.501,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	461.252,04	505.455,91	567.344,78	637.613,63	722.929,60
S,T,U Jasa Lainnya	1.226.639,97	1.338.386,41	1.462.122,50	1.639.557,70	1.829.694,62
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	46.144.336,33	51.699.223,76	57.715.000,16	64.109.354,07	70.845.922,64

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016.

Tabel 2.15.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2010-2014
(juta rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	330 213,19	324.317,58	327.352,08	321.982,36	320.908,30
Pertambangan dan Pengalihan	0	-	-	-	-
Industri Pengolahan	17 097 928,22	17.734.781,60	18.348.246,03	19.011.312,68	19.628.374,98
Pengadaan Listrik dan Gas	885 390,27	974.881,69	1.066.930,33	1.140.036,20	1.032.786,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35 483,97	38.248,09	40.892,14	43.067,40	45.206,17
Konstruksi	3 561 796,46	3.992.584,56	4.678.488,41	5.330.104,23	5.877.036,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10 384 147,84	11.271.580,77	11.878.564,30	12.261.388,10	12.858.303,03
Transportasi dan Pergudangan	4 006 353,72	4.274.402,27	4.450.998,19	4.779.795,85	5.205.578,71
Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	1 467 027,82	1.572.664,08	1.723.107,43	1.872.972,10	2.027.233,78
Informasi dan Komunikasi	777 534,67	885.117,26	964.590,26	1.130.443,73	1.332.996,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	1 130 112,63	1.219.013,85	1.376.616,39	1.417.682,46	1.522.127,46
Real Estate	732 891,03	792.589,98	845.329,94	894.260,72	958.042,02
Jasa Perusahaan	173 828,96	190.979,62	207.365,82	225.684,43	241.877,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	973 416,01	1.029.813,58	1.039.273,96	1.045.431,65	106.461,53
Jasa Pendidikan	757 849,88	856.713,14	935.574,84	1.057.275,49	1.165.194,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	438 666,96	468.842,22	512.288,09	557.732,68	618.023,62
Jasa Lainnya	1 193 242,48	1.280.802,62	1.345.507,63	1.444.909,38	1.563.576,10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	43 946 084,12	46.907.332,89	49.741.125,83	52.534.079,47	55.462.726,87

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2015

Tabel 2.16.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,75	0,68	0,67	0,65	0,62
Pertambangan dan Pengalihan		-	-	-	-
Industri Pengolahan	39,00	37,71	36,34	36,05	35,17
Pengadaan Listrik dan Gas	2,26	2,56	2,69	3,08	2,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Konstruksi	7,96	8,66	9,49	10,09	10,47
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,64	24,05	24,15	23,01	22,73
Transportasi dan Pergudangan	8,98	8,76	8,93	9,34	10,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,33	3,33	3,39	3,49	3,57
Informasi dan Komunikasi	1,69	1,73	1,75	1,79	1,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,58	2,70	2,88	2,79	2,83
Real Estate	1,68	1,68	1,66	1,59	1,58
Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,41	0,43	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,33	2,21	2,08	2,02
Jasa Pendidikan	1,68	1,78	1,84	2,00	2,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,98	0,98	0,99	1,02
Jasa Lainnya	2,66	2,59	2,53	2,56	2,58
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

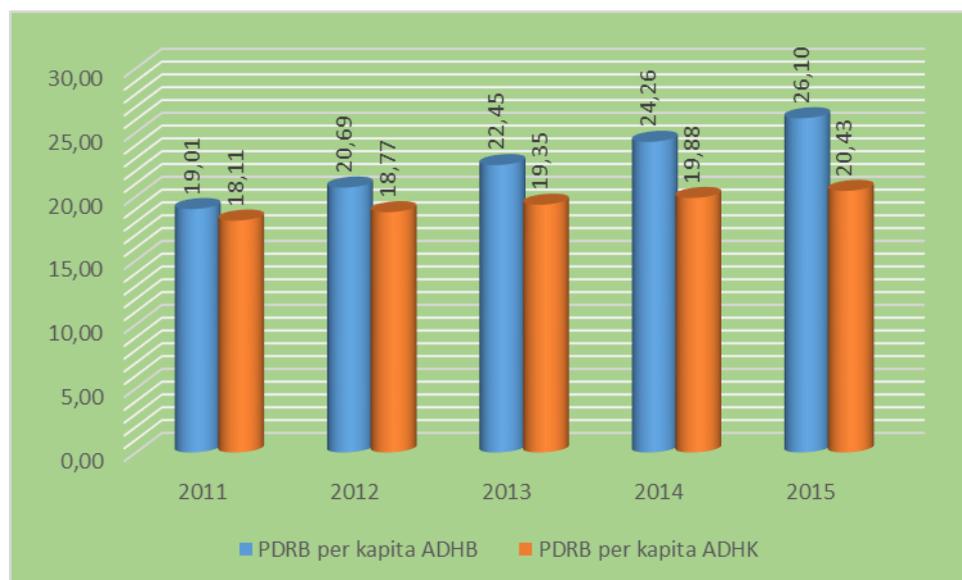
Tabel 2.17.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,75	0,69	0,66	0,61	0,58
Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	38,91	37,81	36,89	36,19	35,39
Pengadaan Listrik dan Gas	2,01	2,08	2,14	2,17	1,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	8,10	8,51	9,41	10,15	10,60
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	23,63	24,03	23,88	23,34	23,18
Transportasi dan Pergudangan	9,12	9,11	8,95	9,10	9,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	3,35	3,46	3,57	3,66
Informasi dan Komunikasi	1,77	1,89	1,94	2,15	2,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,60	2,77	2,7	2,74
Real Estate	1,67	1,69	1,70	1,70	1,73
Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,20	2,09	1,99	1,92
Jasa Pendidikan	1,72	1,83	1,88	2,01	2,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,00	1,03	1,06	1,11
Jasa Lainnya	2,72	2,73	2,71	2,75	2,82
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara (daerah). Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara (atau PDRB bagi daerah) dengan jumlah penduduk negara (daerah) tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Jadi untuk melakukan perhitungan PDRB per kapita adalah dengan membagi nilai total PDRB (ADHB atau ADHK) terhadap jumlah penduduk yang ada pada periode perhitungan PDRB per kapita tersebut. Dengan menggunakan perhitungan PDRB per kapita maka dapat diperkirakan pendapatan rata-rata penduduk di Kota Bekasi setiap tahunnya, walaupun dalam perhitungan PDRB per kapita tidak diperhatikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bekasi tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.11. Terlihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2015, PDRB per kapita Kota Bekasi selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi PDRB ADHB maupun dari sisi ADHK. PDRB per kapita Kota Bekasi tahun 2015 sebesar Rp 26,10 juta, secara umum angka tersebut memiliki makna bahwa setiap orang di Kota Bekasi diperkirakan mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 26,10 juta. Peningkatan yang terjadi sebesar 7,56% dibandingkan PDRB per kapita tahun 2014 yang sebesar Rp 24,26 juta. Sementara itu, PDRB per kapita riil pada tahun 2015 sebesar Rp 20,43 juta atau mengalami kenaikan 2,76% dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Kota Bekasi 2016

Gambar 2.11
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi, 2011-2015

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,88	1,89	10,31	6,76	6,47
Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	9,65	8,33	7,58	10,22	7,80
Pengadaan Listrik dan Gas	15,58	27,35	17,22	27,01	-1,43
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,02	9,27	14,40	5,61	7,63
Konstruksi	13,25	21,86	22,42	18,05	14,69
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,49	14,00	12,08	5,84	9,20
Transportasi dan Pergudangan	15,46	9,21	13,91	16,13	19,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,24	12,06	13,69	14,31	13,05

Informasi dan Komunikasi	14,34	14,44	13,31	13,65	17,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,51	16,93	19,19	7,51	12,34
Real Estate	14,28	12,11	9,93	6,71	9,58
Jasa Perusahaan	19,23	13,4	12,41	16,79	11,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,33	12,74	5,77	4,44	7,65
Jasa Pendidikan	9,30	18,65	15,67	20,58	16,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,00	9,58	12,24	12,39	13,38
Jasa Lainnya	0,55	9,11	9,25	12,14	11,60
Produk Domestik Regional Bruto	11,76	12,05	11,64	11,08	10,51

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Bekasi, 2016

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011-2015 (persen)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,49	1,79	0,94	1,64	0,33
Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	4,19	3,72	3,46	3,61	3,25
Pengadaan Listrik dan Gas	-1,65	10,11	9,44	6,85	9,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,13	7,79	6,91	5,32	4,97
Konstruksi	9,85	12,06	17,18	13,93	10,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,09	8,54	5,39	3,22	4,87
Transportasi dan Pergudangan	11,60	6,69	4,13	7,39	8,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,11	7,2	9,57	8,7	8,24

Informasi dan Komunikasi	13,96	13,84	8,98	17,19	17,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	7,87	12,93	2,98	7,37
Real Estate	7,94	8,15	6,65	5,79	7,13
Jasa Perusahaan	12,94	9,87	8,58	8,83	7,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,19	5,79	0,92	0,59	1,92
Jasa Pendidikan	7,08	13,05	9,21	13,01	10,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,47	6,88	9,27	8,87	10,81
Jasa Lainnya	7,54	7,34	5,05	7,39	8,21
Produk Domestik Regional Bruto	6,45	6,74	6,04	5,61	5,57

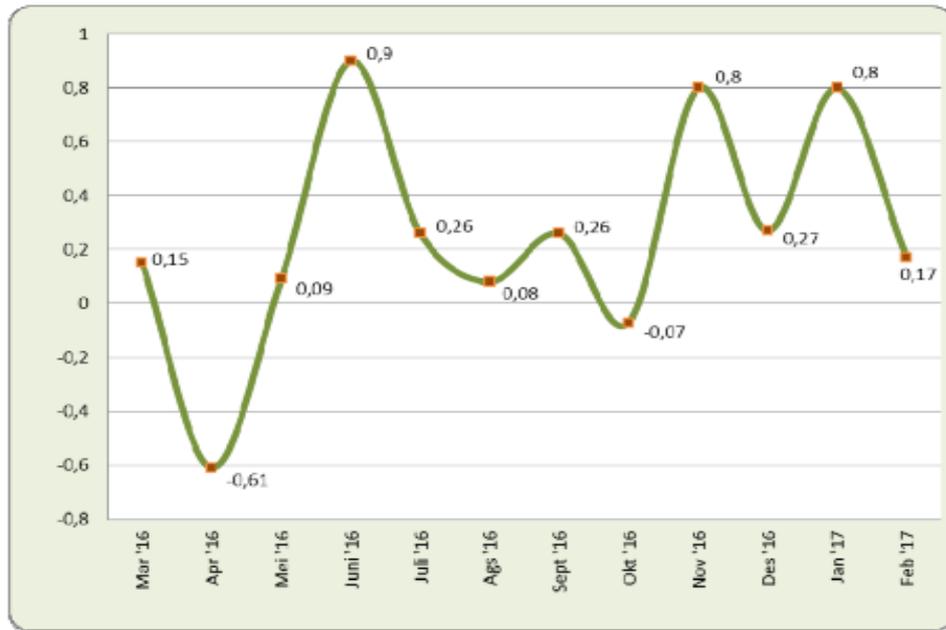
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH).

Pada Februari 2017 terjadi inflasi 0,17%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 124,05 pada Januari 2017 menjadi 124,26 pada Februari 2017. Laju inflasi tahun kalender 2017 *year to date* Kota Bekasi sebesar 0,97% dan laju inflasi tahun ke tahun *year on year* (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,12%. Pada Gambar 2.12 di bawah ini terlihat pergerakan inflasi selama dua belas bulan terakhir dari Februari 2016 sampai Februari 2017.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2017

Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Inflasi Kota Bekasi

Inflasi di Kota Bekasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di 5 (lima) kelompok pengeluaran pada Bulan Februari 2017. Berturut-turut yaitu: kelompok sandang inflasi sebesar 0,86%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar inflasi sebesar 0,63%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau inflasi sebesar 0,45%; kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,30%; dan kelompok kesehatan inflasi sebesar 0,19%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok bahan makanan deflasi sebesar 0,71%; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami deflasi sebesar 0,01%.

Pada Februari 2017, dari 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, IHK gabungan Jawa Barat adalah 125,77 dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,36%. Laju inflasi tahun kalender 2017 Kota Bekasi sebesar 0,97%, Jawa Barat sebesar 1,13%, dan Nasional sebesar 1,21%. Laju inflasi *year on year* selama dua belas bulan terakhir (Februari 2017 terhadap Februari 2016) untuk Kota Bekasi sebesar 3,12%, Jawa Barat sebesar 3,49%, dan Nasional sebesar 3,83%.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Februari 2017, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kota Depok sebesar 0,57% dengan IHK sebesar 126,13. Berturut-turut diikuti Kota Cirebon inflasi sebesar 0,43% dengan IHK sebesar 122,7; Kota Bandung inflasi sebesar 0,38% dengan IHK sebesar 126,37; Kota Sukabumi inflasi sebesar 0,38% dengan IHK 126,58; Kota Bogor inflasi sebesar 0,34% dan IHK sebesar 128,20; Kota Tasikmalaya inflasi sebesar 0,31% dengan IHK 125,69. Inflasi terendah terjadi di Kota Bekasi inflasi sebesar 0,80% dengan IHK 124,05.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2017

Gambar 2.13. Perbandingan IHK di 7 Kota di Jawa Barat Februari 2017

Laju inflasi Kota Bekasi sejak bulan Januari tahun 20124 hingga bulan Februari tahun 2017 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20. Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2012-2017 (menurut bulan)

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	0,74	1,49	1,15	-0,17	0,37	0,80
Februari	-0,14	0,67	0,43	0,06	N/A	0,17
Maret	0,16	0,49	0,32	-0,37	0,15	N/A
April	0,14	-0,04	-0,80	0,10	-0,61	N/A
Mei	-0,04	0,48	-0,14	0,40	0,09	N/A
Juni	0,51	1,48	0,47	0,43	0,90	N/A

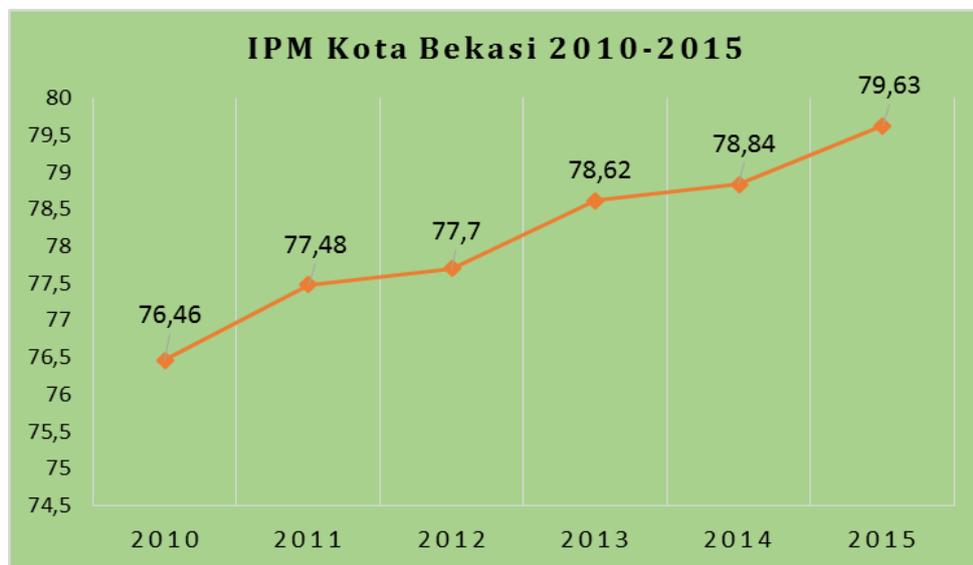
Juli	0,83	4,06	1,05	0,81	0,26	N/A
Agustus	1,05	1,73	0,51	0,82	0,08	N/A
September	0,06	-1,20	0,12	-0,38	0,26	N/A
Oktober	-0,29	-0,15	0,36	-0,32	-0,07	N/A
November	-0,12	-0,12	1,99	0,03	0,80	N/A
Desember	0,52	0,30	1,99	0,91	0,27	N/A

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2017

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dsb. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Barat, 2016
tahun 2010.

Gambar 2.14 IPM Kota Bekasi 2010 - 2015

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kota Bekasi terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Kota Bekasi meningkat dari 76,46 pada tahun 2010 menjadi 79,63 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM Kota Bekasi tumbuh 0,40 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2014-2015, yang tumbuh sebesar 1,00 persen. Saat ini, pembangunan manusia Kota Bekasi berstatus “tinggi” dan menempati peringkat kedua IPM Jawa Barat.

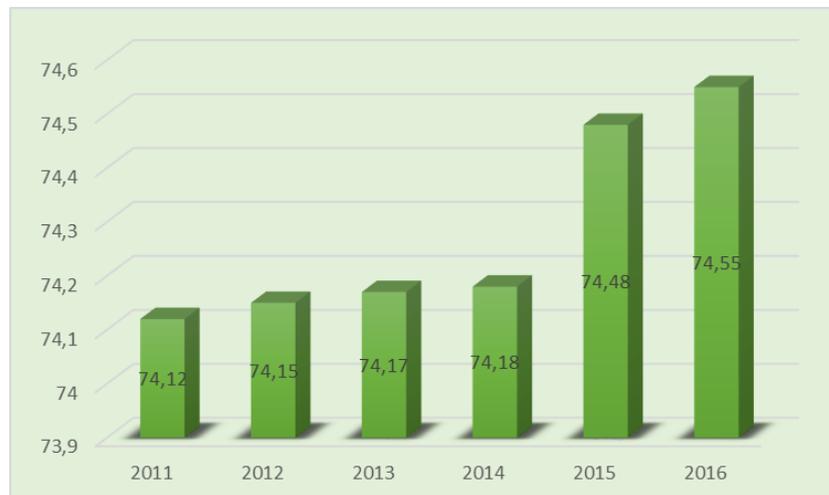
Tabel 2.21.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi
2010 – 2015

Komponen IPM					
Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Perkapita (000 Rp)	IPM
2011	74,13	12,36	10,43	14,187	77,48
2012	74,15	12,43	10,46	14,342	77,70
2013	74,17	13,20	10,49	14,475	78,62
2014	74,18	13,28	10,55	14,556	78,84
2015	74,48	13,36	10,71	15,116	79,63
2016	74,55	13,47	10,78	15,236	79,95

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2015

b. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Layak

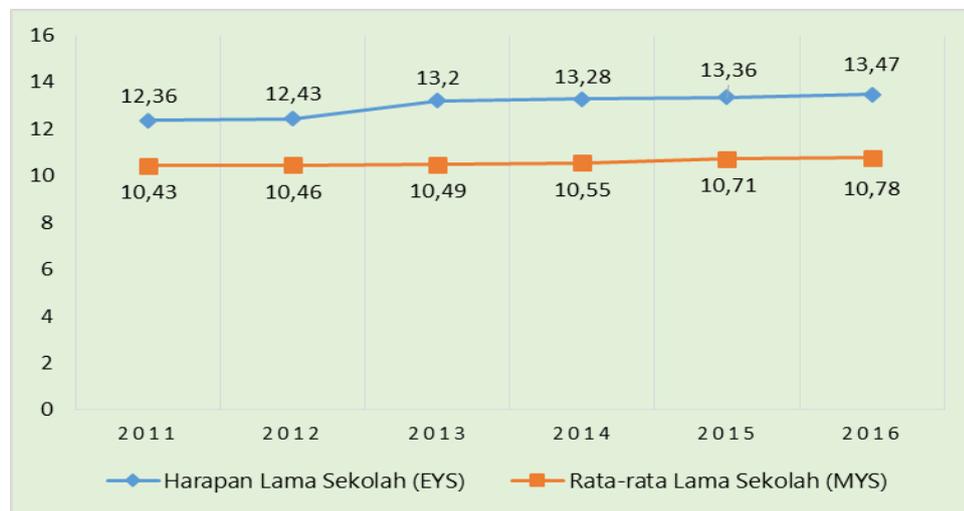
Angka harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2015, Jawa Barat telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup saat lahir sebesar 1,12 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata angka harapan hidup tumbuh sebesar 0,10% per tahun. Pada tahun 2010, angka harapan hidup saat lahir di Kota Bekasi hanya sebesar 74,12 tahun dan pada tahun 2016 telah mencapai 74,55 tahun.



**Gambar 2.15. Angka Harapan Hidup Saat Lahir
Di Kota Bekasi, 2010 - 2016**

c. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011-2016, harapan lama sekolah di Kota Bekasi meningkat sebesar 1,11 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 0,35 tahun. Selama periode ini, harapan lama sekolah tumbuh sebesar 1,80% per tahun, ini merupakan sinyal positif semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2016, harapan lama sekolah di Kota Bekasi mencapai 13,47 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I atau II. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Bekasi tumbuh 0,67% per tahun periode 2011-2016. Pertumbuhan positif ini modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Bekasi yang lebih baik. Hingga tahun 2016, secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA kelas II).

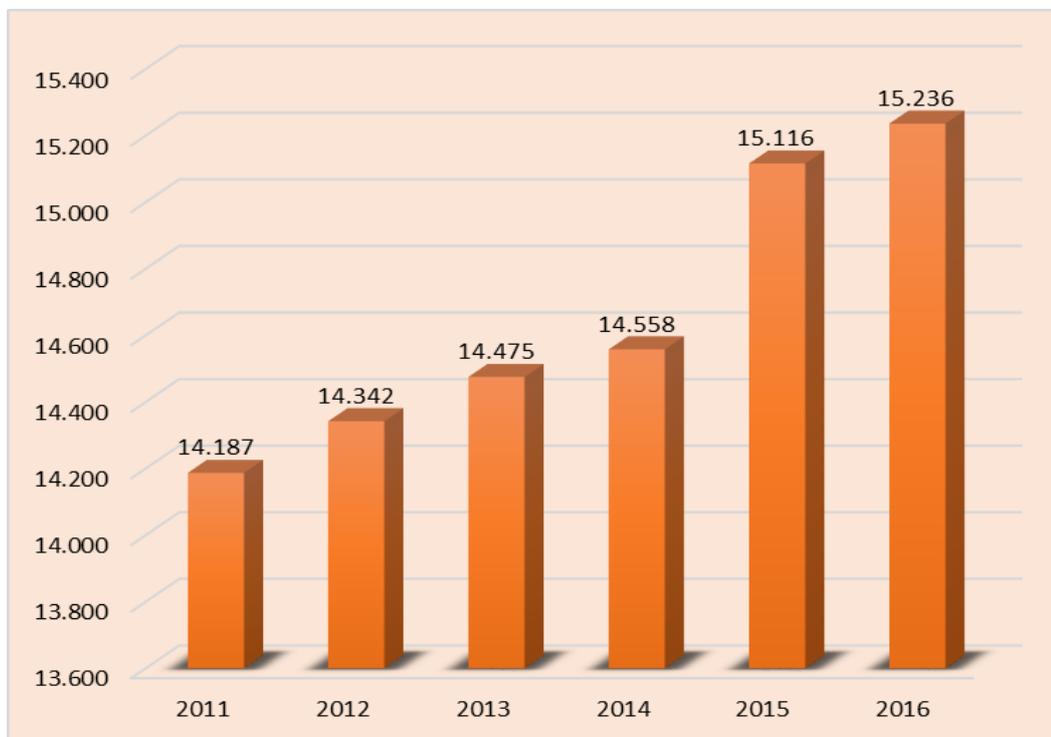


**Gambar 2.16. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata
Lama Sekolah Kota Bekasi (tahun) 2010-2016**

d. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012).

Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bekasi mencapai Rp 15,236 juta per tahun. Selama enam tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar 1,48 persen per tahun.



Gambar 2.17. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Bekasi (Rp 000), 2011-2015

e. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah keadaan yang menggambarkan/ ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

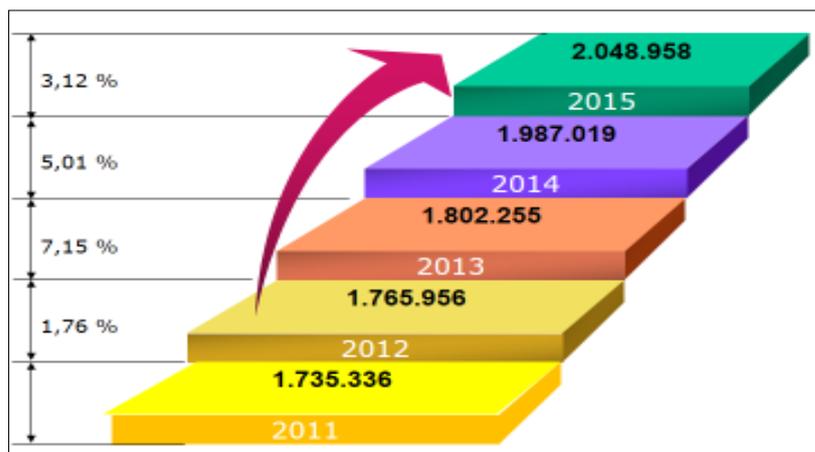
Keadaan ketenagakerjaan di Kota Bekasi pada tahun 2015 digambarkan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja yang berimbas pada menurunkan tingkat pengangguran selama setahun terakhir. Jumlah angkatan kerja berkurang sekitar 42.442 orang dalam kurun setahun (Agustus 2014 - Agustus 2015). Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 38.535 orang dibanding tahun lalu, sementara jumlah penganggur juga turun sebanyak 3.907 orang jika dibanding keadaan setahun sebelumnya.

Tabel 2.22.
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Kota Bekasi
2011 - 2015

Jenis Kegiatan Utama	2011	2012	2013	2014	2015
1. Angkatan Kerja	1.106.920	1.070.719	1.164.251	1.236.114	1.193.672
Bekerja	990.630	977.043	1.052.582	1.120.471	1.081.936
Penganggur	116.290	93.676	111.669	115.643	111.736
2. Bukan Angkatan Kerja	628.416	695.237	728.004	750.905	855.286
Sekolah	155.087	235.211	241.247	242.532	261.914
Mengurus Rumah Tangga	404.254	404.308	424.165	445.043	500.381
Lainnya	69.075	55.718	62.592	63.330	92.991
3. Penduduk Usia Kerja	1.735.336	1.765.956	1.892.255	1.987.019	2.048.958

Sumber: BPS Sakernas, diolah Pusdatinaker 2015

Namun demikian, jumlah penduduk usia kerja selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang kurun waktu 5 tahun dari 2011 hingga 2015, rata-rata peningkatan penduduk usia kerja di Kota Bekasi mencapai 4,26 persen pertahun.



Gambar 2.18. Persentase Peningkatan Penduduk Usia Kerja Kota Bekasi, 2011-2015

Struktur lapangan pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama kurun waktu 5 tahun sedikit mengalami pergeseran. Pada tahun 2015, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Kota Bekasi. Pada tahun 2015, sektor jasa industri pengolahan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 26,54%, sektor perdagangan menyerap sebanyak 26,11%, sedangkan untuk sektor jasa kemasyarakatan tenaga kerja sekitar 21,05%.



Sumber: BPS Sakernas, diolah Pusdatinaker 2015

Gambar 2.19. Struktur Lapangan Pekerjaan Penyumbang Penyerapan Terbesar Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2011-2015

Tabel 2.23.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2011-2015

Lapangan Pekerjaan Utama	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	3.416	4.155	2.025	5.099	5.617
Pertambangan dan penggalian	2.922	7.329	4.129	4.337	4.921
Industri Pengolahan	205.758	231.057	283.750	284.672	287.175
Listrik, gas dan air	4.424	4.210	8.235	9.201	6.270
Bangunan	55.869	57.248	62.362	68.973	87.852
Perdagangan	229.742	235.819	231.625	263.404	282.512
Angkutan, pergudangan & komunikasi	71.551	62.024	81.376	81.262	91.252
Keuangan	99.497	85.840	104.805	100.622	88.623
Jasa kemasyarakatan	317.451	289.361	274.275	302.901	227.714
Jumlah	990.630	977.043	1.052.582	1.120.471	1.081.936

Sumber: Diolah dari Pusdatinaker 2015

Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor industri pengolahan naik sebesar 1,14% atau sebanyak 2.503 orang dan sektor perdagangan naik sebesar 2,60% atau sebanyak 19.108 orang. Sedangkan sektor jasa kemasyarakatan turun sebesar 5,99% atau sebanyak 75.187 orang. Sektor lain yang mengalami peningkatan adalah sektor bangunan/konstruksi meningkat sebanyak 18.879 orang (27,37%), sektor pertambangan dan penggalian meningkat sebanyak 584 orang (13,47%), sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi meningkat sebanyak 9.990 orang (12,29%) dan sektor pertanian meningkat sebanyak 518 orang (10,16%). Sementara itu, sektor listrik, gas dan air dan sektor keuangan mengalami penurunan. Sektor listrik, gas dan air mengalami penurunan paling besar sebanyak 2.931 orang (31,86%) dan sektor keuangan mengalami penurunan sebanyak 11.999 orang (11,92%).

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari kategori status pekerjaan utama,

pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka di Kota Bekasi pada tahun 2015 ada sebanyak 803.929 orang (74,30%) bekerja pada kegiatan formal dan 278.007 orang (25,70%) bekerja pada kegiatan informal. Pekerja sektor formal turun sebanyak 18.803 orang selama setahun terakhir tetapi pekerja di sektor informal meningkat sebanyak 47.324 orang.

Tabel 2.24.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama, 2011-2015

Status Pekerjaan Utama	2011	2012	2013	2014	2015
Kegiatan Formal	804.921	796.130	857.983	889.788	803.929
- Berusaha dibantu buruh tetap	52.269	51.895	57.223	54.431	35.628
- Buruh/karyawan/pegawai	752.652	744.235	800.760	835.357	768.301
Kegiatan Informal	185.709	180.913	194.599	230.683	278.007
- Berusaha sendiri	111.574	109.546	107.993	127.805	168.416
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap	41.068	29.074	43.734	29.533	45.030
- Pekerja bebas di pertanian	0	0	1.193	0	0
- Pekerja bebas di non pertanian	17.869	22.859	22.827	46.319	39.146
- Pekerja tidak dibayar	15.198	19.434	18.852	27.026	25.415
Jumlah	990.630	977.043	1.052.582	1.120.471	1.081.936

Sumber: Diolah dari Pusdatinaker 2015

Status pekerjaan utama dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal dapat dirinci antara lain sebagai berstatus berusaha sendiri sebesar 168.416 orang (15,57%), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 45.030 orang (4,16%), pekerja bebas atau pekerja serabutan sebanyak 84.176 orang atau 7,78%. Sedangkan jumlah pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga mencapai 25.415 orang atau 2,35% dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Kenaikan terbesar pada pekerja sektor informal terjadi pada pekerja dengan status berusaha berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap dengan penambahan sebanyak 15.497 orang atau sebesar 53,47%.

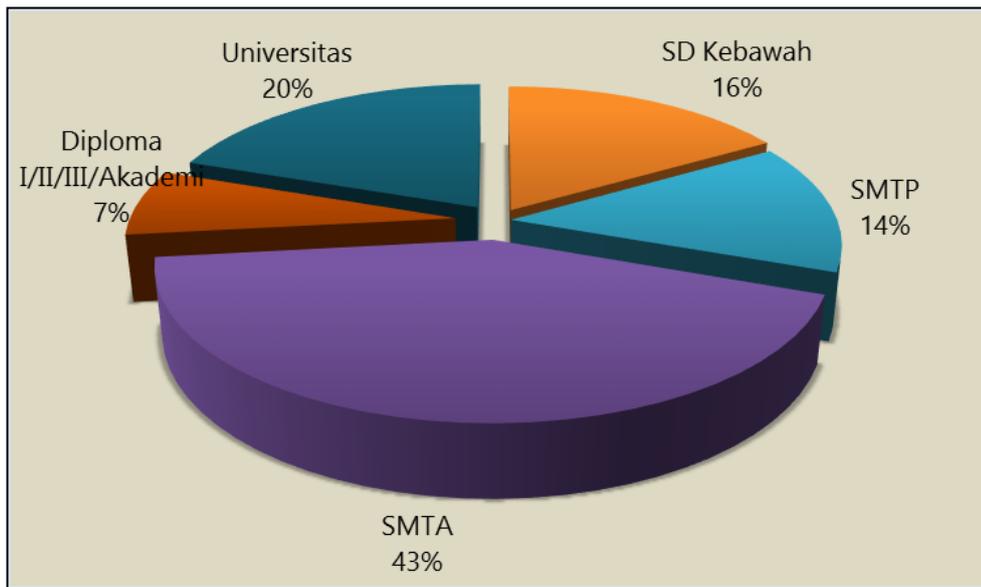
Tabel 2.25.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011-2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2011	2012	2013	2014	2015
SD Kebawah	131.047	107.858	129.352	123.591	178.957
SMTp	159.758	132.015	130.640	125.165	151.112
SMTA	459.609	451.690	494.711	527.849	462.257
Diploma I/II/III/Akademi	76.478	70.219	78.609	90.777	76.954
Universitas	163.738	215.261	219.270	253.089	212.656
Jumlah	990.630	977.043	1.052.582	1.120.471	1.081.936

Sumber: Diolah dari Pusdatinaker 2015

Penyerapan tenaga kerja hingga tahun 2015 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 178.957 orang (16,54%), Sekolah Menengah Pertama sebanyak 151.112 orang (13,97%) dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 462.257 orang (42,72%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 289.610 orang mencakup 76.954 orang (7,11%) berpendidikan Diploma I/II/III/Akademi dan sebanyak 212.656 orang (19,66%) berpendidikan Universitas. Dari keseluruhan penduduk usia kerja yang bekerja masih didominasi oleh laki-laki sebesar 66,39%, sedangkan perempuan hanya 33,61%.

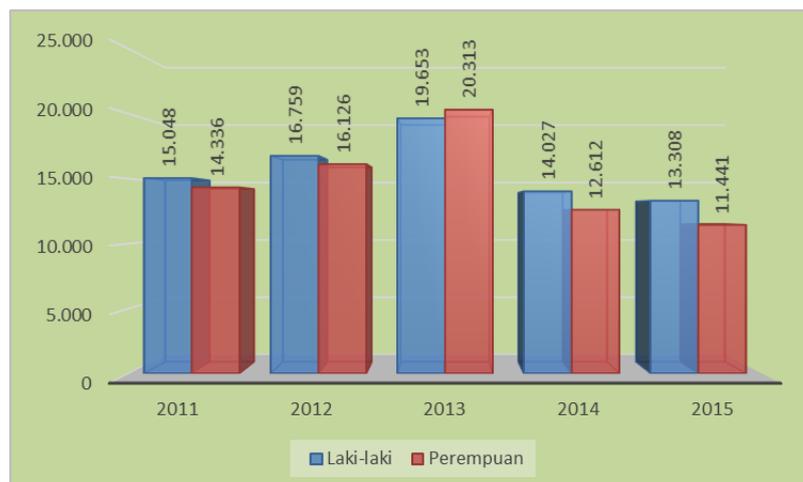
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diketahui bahwa jumlah pengangguran di Kota Bekasi pada tahun 2015 mencapai 111.736 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan pembagian dari penduduk yang menganggur terhadap angkatan kerja menunjukkan angka 9,36%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Artinya, semakin tinggi TPAK maka pemerintah daerah harus bersiap menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Pada tahun 2015 TPAK Kota Bekasi sebesar 58,26%.



Sumber: Diolah dari Pusdatinaker 2015

Gambar 2.20. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2015

Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan TPAK perempuan, ini merupakan indikasi bahwa laki-laki masih dominan dalam pasar kerja. Disamping itu fenomena yang biasanya terjadi adalah perempuan yang sudah menikah biasanya mengurus rumah tangga sehingga masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.21. Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Di Kota Bekasi, 2011-2015

Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kesesuaian penempatan seseorang berdasarkan keahlian dan tingkat pendidikannya. Semakin sesuai antara pekerjaan dengan tingkat pendidikan maka akan semakin baik hasil suatu pekerjaan (*the right men on the right place*). Tingkat serapan tenaga kerja yang paling baik setiap tahunnya adalah SMA Kejuruan. Namun pada umumnya data statistik menunjukkan terjadi fluktuatif tingkat serapan tenaga kerja yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya yang tergambar selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini:

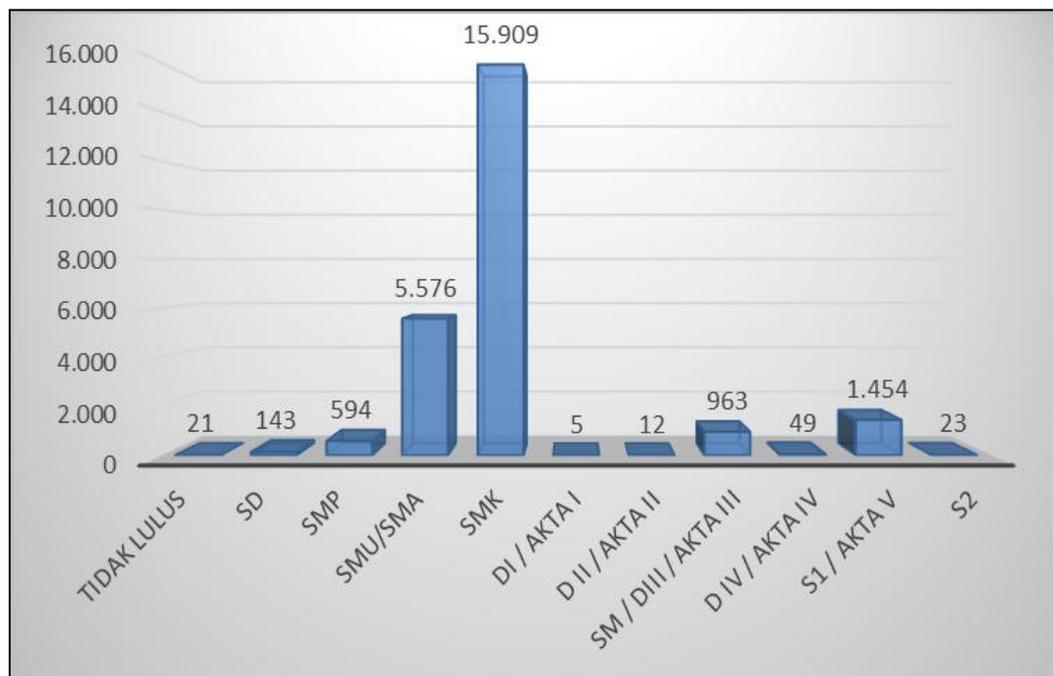
Tabel 2.26.
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2010-2015

Pendidikan yang ditamatkan	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Pencari Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja										
Tidak lulus Sekolah	4	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-
SD	173	-	166	37	133	-	139	3	89	30	165	30
SMP Sederajat	1.527	400	1.292	169	1.071	50	986	52	781	107	1.300	109
SMP Kejuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA Umum	11.163	416	8.902	1.266	8.501	1.970	8.517	1.876	6.131	2.961	9.678	2.786
SLTA Kejuruan	17.582	2.150	16.188	1.723	17.175	2.142	16.862	5.448	15.433	4.922	8.337	4.562
Akademi	3.587	113	1.097	73	1.676	235	3.528	236	1.274	3.293	3.393	2.675
Perguruan Tinggi	8.487	125	1.735	39	4.329	4.628	9.934	374	2.930	1.068	1.876	374
Jumlah	42.523	3.204	29.384	3.309	32.885	4.628	39.966	7.989	26.697	12.381	24.749	10.536

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2015.

Jumlah pencari kerja di Kota Bekasi yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja tahun 2015 sebanyak 24.749 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pencari kerja perempuan, hal ini sangat bisa dimaklumi mengingat peran laki-laki dalam keluarga yang lebih utama sebagai pencari nafkah.

Penduduk yang mencari pekerjaan pada tahun 2015 sebagian besar berpendidikan SMK, yaitu sebanyak 15.909 orang, diikuti oleh mereka yang berpendidikan SMU/SMA sebanyak 5.579 orang dan S1/AKTA V sebanyak 1.454 orang.



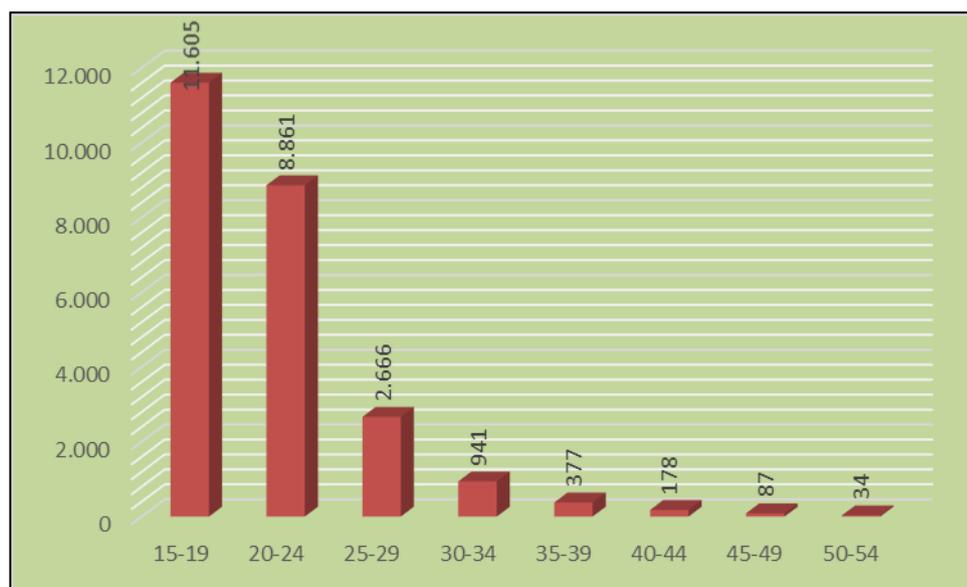
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2016.

Gambar 2.22. Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Bekasi, 2015

Menurut kelompok umur pada tahun 2015, pencari kerja terbanyak pada usia 15-19 tahun sebanyak 11.605 orang. Terbanyak kedua pada usia 20-24 tahun sebanyak 8.861 orang, kemudian diikuti yang berusia 25-29 tahun sebanyak 2.666 orang. Persentase pencari kerja paling banyak terdapat pada kelompok umur 15-

19 tahun yaitu sebanyak 46,89% dari total pencari kerja. Sedangkan pencari kerja paling sedikit terdapat pada kelompok umur 50-54 tahun yaitu sebanyak 0,14%.

Pada umumnya pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, kecuali pada kelompok umur 35-39 tahun. Pada kelompok umur ini pencari kerja laki-laki sebanyak 0,81%, sementara pencari kerja perempuan sebanyak 1,07%.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.23. Jumlah Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur Di Kota Bekasi, 2015

Sampai saat ini jumlah lowongan kerja lebih rendah dari jumlah pengangguran yang ada, ditambah lagi dengan tidak adanya kesesuaian kriteria yang dipersyaratkan pemberi kerja atau jabatan yang ada. Berdasarkan Buku Data Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dari tahun ke tahun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengangguran di Kota Bekasi antara lain:

- (a) kelulusan SLTA yang sederajat banyak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan memerlukan biaya besar;
- (b) penempatan tenaga kerja di sektor formal terbatas;
- (c) pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (d) keterampilan pencari kerja, kualitas, dan pendidikan yang masih rendah; serta
- (e) jumlah pencari kerja dibanding kesempatan kerja tersedia tidak seimbang.

Upaya yang dilakukan untuk menekan pengangguran di Kota Bekasi antara lain:

- (a) peningkatan keterampilan kerja para pencari kerja;
- (b) peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri melalui program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
- (c) peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri;
- (d) pengembangan dan perluasan lapangan kerja sektor informal/usaha mandiri melalui pengembangan dan pemberian fasilitas yang mendorong sistem kewirausahaan;
- (e) perpindahan penduduk melalui program transmigrasi;
- (f) melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dikelola oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di Kota Bekasi sampai saat ini BKK yang terdaftar berjumlah 36 (tiga puluh enam) BKK; dan
- (g) mengadakan *Job Fair* (bursa kerja).

Untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja, disamping pendidikan formal perlu ada sarana dan prasarana pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis. Jumlah lembaga pelatihan yang dikelola/dimiliki pemerintah dan swasta yang ada di Kota Bekasi, antara lain sebagai berikut:

- Dua Balai Latihan Keterampilan Kerja milik Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bekasi; dan
- Lembaga yang dikelola/dimiliki swasta: 65 PPTKIS (31 PPTKIS berkantor pusat di Kota Bekasi dan 34 penampungan), 102 LPK serta 54 BLKLN.

f. Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bappenas dapat dilihat dari: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis;

(4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Sementara menurut Bank Dunia, indikator kemiskinan adalah: (1) kepemilikan tanah dan modal yang terbatas; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota; (3) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat; (4) perbedaan sumberdaya manusia dan sektor ekonomi; (5) rendahnya produktivitas; (6) budaya hidup yang jelek; (7) tata pemerintahan yang buruk; (8) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan cara ini dapat dihitung *headcount index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Garis kemiskinan tersebut terdiri atas GKM dan GKNM. Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, di antaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bekasi pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami jumlah dan persentase penurunan yang relatif kecil. Pada tahun 2011 persentase penurunan adalah sebesar 1,40 persen atau setara dengan 2.071 jiwa penduduk miskin. Lalu pada tahun 2012 persentase penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi adalah sebesar 4,94 persen atau setara dengan 7.211 Jiwa penduduk miskin.

Tabel 2.27.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2012

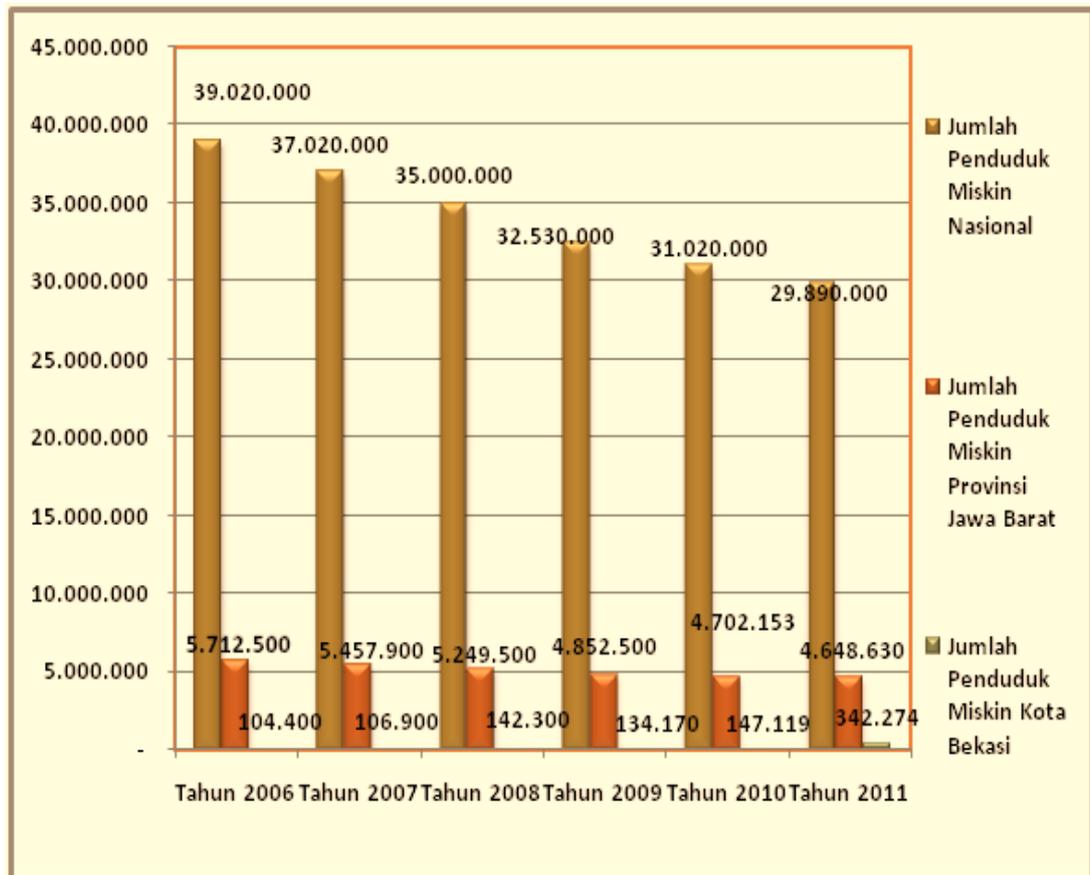
Kabupaten/Kota	Jumlah (000 jiwa)			Persentase (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Bogor	477,1	470,524	447,294	9,97	9,65	8,82
Sukabumi	249,5	246,108	233,956	10,65	10,28	9,78
Cianjur	310,9	306,649	291,488	14,32	13,82	13,17
Bandung	296,2	292,155	277,806	9,30	8,99	8,32
Garut	335,6	330,905	314,597	13,97	13,47	12,70
Tasikmalaya	214,5	211,598	201,162	12,79	12,36	11,75
Ciamis	158,4	156,283	148,589	10,34	9,98	9,61
Kuningan	152,4	150,268	142,884	14,68	14,20	13,69
Cirebon	333,3	328,637	312,408	16,12	15,56	14,94
Majalengka	181,1	178,566	169,797	15,52	14,98	14,44
Sumedang	141,4	139,422	132,525	12,94	12,48	11,85
Indramayu	276,0	272,139	258,677	16,58	16,01	15,42
Subang	198,3	195,526	185,861	13,54	13,06	12,47
Purwakarta	90,3	89,037	84,614	10,57	10,22	9,55
Karawang	260,2	256,658	244,052	12,21	11,80	11,10
Bekasi	161,7	159,536	151,646	6,11	5,93	5,25
Bandung Barat	222,9	219,782	208,959	14,68	14,22	13,33
Kota Bogor	90,2	88,938	84,515	9,47	9,16	8,47
Kota Sukabumi	27,7	27,312	25,953	9,24	8,95	8,41
Kota Bandung	118,6	116,941	111,138	4,95	4,78	4,55
Kota Cirebon	35,5	35,003	33,274	12,00	11,56	11,08
Kota Bekasi	148,0	145,929	138,718	6,30	6,12	5,55
Kota Depok	49,6	48,906	46,495	2,84	2,75	2,46
Kota Cimahi	40,1	39,539	37,551	7,40	7,15	6,67
Kota Tasikmalaya	131,5	129,759	123,399	20,71	19,98	18,92
Kota Banjar	14,8	14,692	13,976	8,47	8,21	7,78

Sumber : BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008-2010

Sementara menurut data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bekasi, lonjakan jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2008 hingga 2011. Penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bekasi pada tahun 2008, tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami jumlah dan persentase kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2008 persentase kenaikan adalah sebesar 24,8 persen atau setara dengan 35.400 jiwa penduduk miskin. Lalu pada tahun 2010 persentase kenaikan jumlah keluarga miskin di Kota Bekasi adalah sebesar 9,6

persen atau setara dengan 12.949 jiwa penduduk miskin, dan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 132,66 persen (atau bertambah 195.155 jiwa).

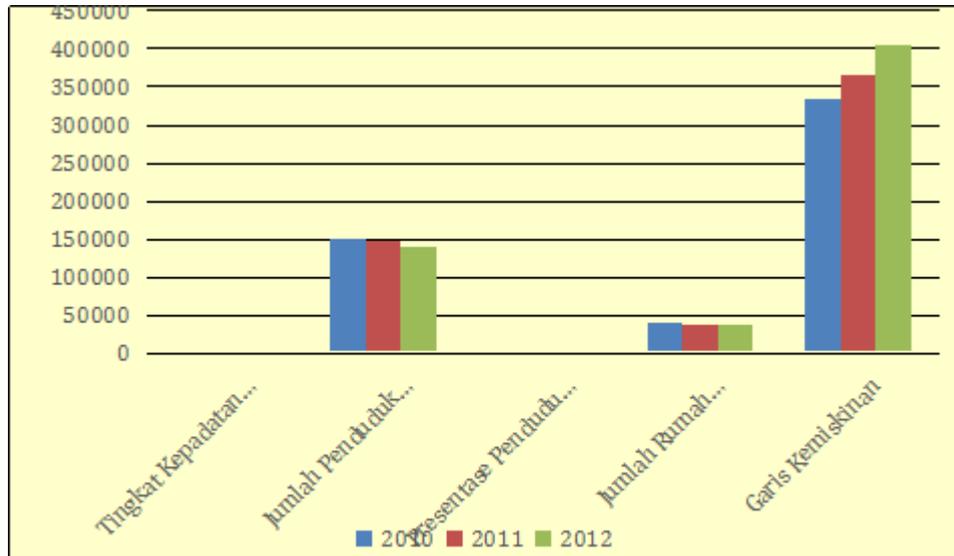
Grafik 2.27
Perbandingan Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2006 – 2011



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010, BPS, PPLS Tahun 2011 BPS, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010), Indikator Kesejahteraan Daerah Jawa Barat – diolah kembali oleh TKPKD Kota Bekasi.

Berikutnya disajikan gambaran perkembangan kondisi kemiskinan khusus Kota Bekasi tahun 2010 – 2012. Seperti dilansir secara resmi, garis kemiskinan Kota Bekasi pada tahun 2012 sebesar Rp 403.303,-

Grafik 2.28
Kondisi Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2010 - 2012



Sumber: BPS Kota Bekasi

Tabel 2.28
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bekasi
Tahun 2004-2013

Tahun	Jumlah Warga Miskin(Jiwa)	Persentase
2004	58.200	3,04
2005	71.500	3,42
2006	104.400	5,07
2007	106.900	4,97
2008	142.300	6,36
2009	134.170	5,78
2010	148.000	6,3
2011	145.929	6,12
2012	139.842	5,56
2013	137.831	5,33

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Pendidikan

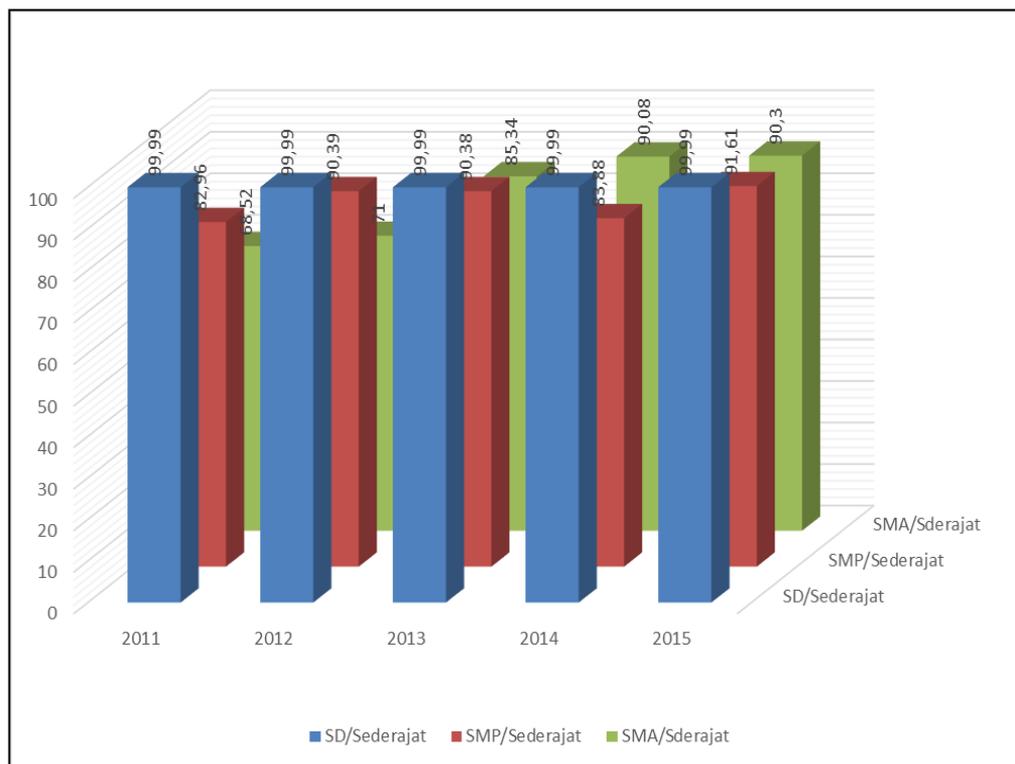
Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APM menunjukkan

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM Kota Bekasi 2015 meningkat dari tahun 2014, untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD relative tetap, yaitu 99,99 persen. APM SD/Sederajat sejak tahun 2011 tetap sebesar 99,99 persen, artinya dari 100 anak berusia 7 - 12 tahun di Kota Bekasi, 99 anak diantaranya sedang bersekolah. APM kelompok umur 13-15 tahun sebesar 91,61 persen yang artinya dari 100 anak berusia 13-15 tahun di Kota Bekasi, 96 anak diantaranya sedang bersekolah. APM kelompok umur 16-18 sebesar 90,30 persen yang artinya dari 100 anak berusia 16-18 tahun di Kota Bekasi, 90 anak diantaranya sedang bersekolah.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar
Menurut Kelompok Umur, 2011 - 2015

Jenis Sekolah					
	2011	2012	2013	2014	2015
7 - 12 tahun					
Angka Partisipasi Murni	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Angka Partisipasi Kasar	106,82	112,44	121,8	121,67	121,88
13 - 15 tahun					
Angka Partisipasi Murni	82,96	90,39	90,38	83,88	91,61
Angka Partisipasi Kasar	84,65	92,23	91,75	88,1	92,54
16 - 19 tahun					
Angka Partisipasi Murni	68,52	71	85,34	90,08	90,3
Angka Partisipasi Kasar	69,92	72,45	89,88	90,6	92,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.29 APM Kota Bekasi Tahun 2011 - 2015

Disamping itu, untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). APK SD/Sederajat tahun 2011-2015 selalu diatas 100 persen yang artinya ada penduduk yang bersekolah SD/Sederajat namun belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Sedangkan APK untuk SMP dan SMA cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.30 APK Kota Bekasi 2011 - 2015

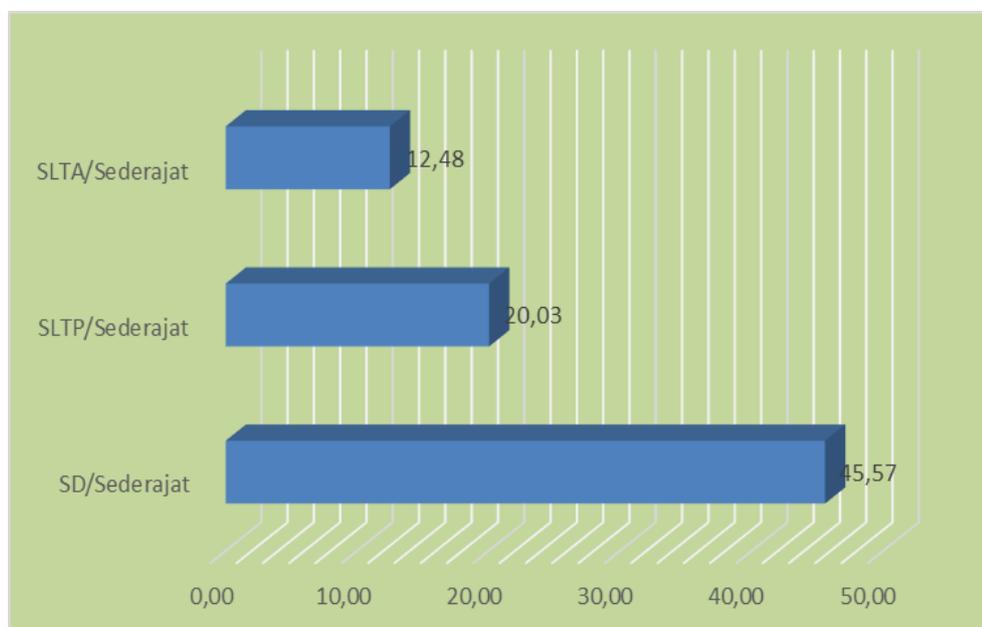
Fasilitas pendidikan yang lengkap merupakan salah satu kesadaran pemerintah daerah maupun pusat akan pentingnya pendidikan. Salah satunya bisa kita lihat dengan penambahan jumlah sekolah baik swasta maupun negeri yang ada di daerah tersebut. Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2015, untuk tingkat SD ada sebanyak 673 unit dengan jumlah guru sebanyak 7.785 orang, SLTP sebanyak 170 unit dengan jumlah guru sebanyak 2.423 orang, dan SLTA sebanyak 215 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 61.235 orang.

Tabel 2.30
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid
Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bekasi, 2015

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
SD/Sederajat	673	5.627	256.405
SLTP/Sederajat	208	2.423	48.524
SLTA/Sederajat	215	4.630	57.776

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah, 2016

Untuk melihat efektivitas pengajaran dapat digunakan rasio murid dan guru sebagai indikator. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak murid yang harus diajar oleh seorang guru, dan ini akan mengurangi daya tangkap murid dalam menerima pelajaran sehingga tidak efektif. Rasio murid per guru di Kota Bekasi tahun 2015 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin bertambah kecil rasio murid dan guru. Pada jenjang pendidikan SD, rasio murid dan guru sebesar 45,57. Hal ini berarti rata-rata guru di jenjang pendidikan SD sederajat mengajar sekitar 45 murid. Rasio murid dan guru pada jenjang pendidikan SLTP sederajat sebesar 20,03, sementara untuk jenjang pendidikan SLTA sederajat sebesar 12,48 persen.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah, 2016

Gambar 2.31 Rasio Guru dan Murid di Kota Bekasi, 2015

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara mudah, murah dan merata.

Dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan layanannya, baik berupa sarana maupun prasarana kesehatan. Sarana kesehatan selain rumah sakit, ada beberapa sarana kesehatan yang dapat menjangkau sampai ke setiap kelurahan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu.

Jumlah rumah sakit di Kota Bekasi pada tahun 2015 adalah 38 unit, puskesmas 31 unit, puskesmas keliling sebanyak 11 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 24 unit. Penunjang kesehatan lainnya adalah balai pengobatan dan praktek dokter bersama sebanyak 386 unit.

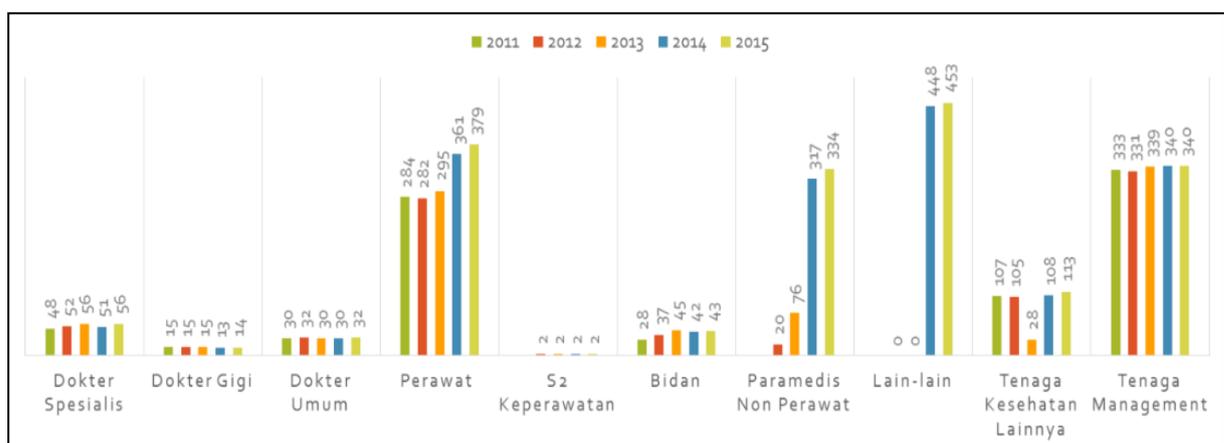
Tabel 2.31
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kota Bekasi
Tahun 2015

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola		Jumlah
		Pemkot	Swasta	
RUMAH SAKIT				
1	Rumah Sakit Umum	1	30	31
2	Rumah Sakit Khusus		7	7
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA				
1	Puskesmas Rawat Inap dan PONEB	10		10
	- Jumlah Tempat Tidur	48		48
2	Puskesmas Non Rawat Inap	21		21
3	Puskesmas Keliling	11		11
	- Ambulans	21		21
4	Puskesmas Pembantu	24		24
SARANA PELAYANAN LAIN				
1	Rumah Bersalin			
2	Balai Pengobatan/Klinik	380		380
3	Praktik Dokter Bersama	6		6
4	Praktik Dokter Umum Perorangan		141	141
	Praktik Dokter Gigi Perorangan		99	99
	Praktik Dokter Spesialis Perorangan		10	10
	Praktik Dokter Spesialis Gigi Perorangan		4	4
5	Praktik Pengobatan Tradisional			
6	Bank Darah Rumah Sakit	1		1
7	Unit Transfusi Darah	1		1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN				
1	Industri Farmasi			
2	Industri Obat Tradisional			

3	PKP		1.405	1.405
4	PIRT		512	512
5	Usaha Kecil Obat Tradisional		6	6
6	Produksi Alat Kesehatan		2	2
7	Pedagang Besar Farmasi		45	45
8	Apotek		553	553
9	Toko Obat		202	202
10	Penyalur Alat Kesehatan		47	47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016

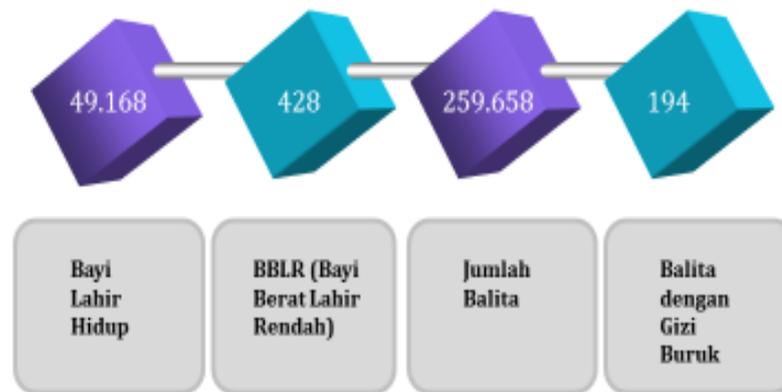
Seiring dengan penambahan jumlah sarana kesehatan, maka jumlah tenaga kesehatan juga mengalami perubahan. Jumlah dokter relatif tidak mengalami penambahan atau pengurangan yang besar, baik dokter spesialis maupun dokter umum. Sedangkan dokter gigi cenderung berkurang. Terdapat 739 dokter yang terdiri dari 336 orang dokter spesialis, 281 orang dokter umum, dan 142 dokter gigi. Rasio dokter spesialis dan umum sebesar 7,39 per 100.000 penduduk. Jumlah perawat dan paramedis non perawat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya tidak banyak mengalami perubahan. Jumlah bidan tahun 2015 sebanyak 383 orang dengan rasio 28,28 per 100.000 penduduk. Jumlah perawat sebanyak 1.035 orang, terdiri dari 989 orang perawat dan 46 perawat gigi dengan rasio 36,18 per 100.000 penduduk. Sedangkan jumlah paramedis non perawat masing-masing adalah tenaga kefarmasian sebanyak 252 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 21 orang, dan tenaga sanitasi sebanyak 37 orang.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.32 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Bekasi, 2011 – 2015

Terdapat pula program khusus untuk pelayanan balita, ibu hamil, dan lansia melalui program posyandu dengan jumlah 1.542 yang tersebar diseluruh kelurahan di Kota Bekasi. Cara kerja dan penyelenggaraan serta pemanfaatan posyandu memerlukan peran serta aktif masyarakat dalam bentuk partisipasi penimbangan balita setiap bulannya, sehingga dapat meningkatkan gizi balita.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.33 Statistika Balita Kota Bekasi, 2015

Data statistika balita Kota Bekasi tahun 2015 menunjukkan bayi lahir hidup sebanyak 49.168 orang. Namun dari jumlah tersebut terdapat sebesar 0,87 persen atau sebanyak 428 orang bayi lahir hidup dengan berat lahir rendah. Di tahun 2015, gizi buruk masih terjadi di Kota Bekasi. Di setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi terdapat balita gizi buruk dengan jumlah keseluruhan sebanyak 194 balita. Kecamatan yang mempunyai 0 balita dengan gizi buruk terbanyak adalah Kecamatan Bekasi Utara sejumlah 30 balita. Selanjutnya Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Bekasi Timur dengan jumlah balita gizi buruk masing-masing sebanyak 29 balita dan 21 balita. Kecamatan Mustika Jaya merupakan kecamatan yang mempunyai balita dengan gizi buruk paling sedikit pada tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 3 balita.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.34 Banyaknya Balita Gizi Buruk Menurut Kelurahan Di Kota Bekasi, 2015

Salah satu indikator kesehatan yang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan ibu dan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan oleh tenaga profesional dan terlatih, seperti dokter dan bidan karena diharapkan dengan semakin profesionalnya tenaga penolong persalinan, maka dapat mengatasi persalinan yang beresiko tinggi. Persalinan oleh tenaga dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada tenaga dukun atau lainnya karena mereka telah mendapat pengetahuan dan pengalaman yang cukup melalui pendidikan formal. Pada tahun 2015, terdapat 90,15 persen ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis atau sebanyak 49.157 orang dari total ibu bersalin sebanyak 54.530 orang.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.35 Penolong Persalingan di Kota Bekasi, 2015

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang berkualitas, berkurangnya ancaman banjir, terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan, dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup menjadi fokus penting dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bekasi. Seluruh aspek tersebut terintegrasi dalam rangka upaya mewujudkan tata kota, kualitas pemukiman dan lingkungan hidup yang berkualitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur difokuskan kepada pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU), penunjang sarana dan prasarana pertamanan, pemakaman dan PJU. Upaya mengurangi ancaman banjir difokuskan pada pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan pengendalian banjir. Pembangunan tata ruang kota yang berkelanjutan difokuskan pada pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan ruang. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku.

Panjang jalan yang berada di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2016 mencapai 3.176,08 km, terdiri atas jalan kabupaten/kota sebanyak 50,46 persen, jalan desa/lokal sebanyak 48,41 persen, jalan provinsi 0,69 persen, dan jalan nasional 0,43 persen. Terjadi peningkatan sepanjang 9,29 km dibandingkan tahun awal RPJMD (2013). Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air sebesar 15,56 persen. Kualitas jalan yang terdapat di Kota Bekasi sebagian besar dalam kondisi baik. Hanya 1,12 persen jalan di Kota Bekasi dalam kondisi rusak ringan.

Rincian panjang jalan yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Bekasi bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.32
Panjang Jalan Menurut Jenis dan Fungsi Jalan di Kota Bekasi (km),
2012 – 2015

Fungsi Jalan	2012	2013	2014	2015
Arteri Primer	61,04	61,837	61,837	61,837
Kolektor Primer	71,15	71,145	71,145	71,145
Arteri Sekunder	80,44	80,443	80,443	80,443
Kolektor Sekunder	122,35	122,352	122,352	122,352
Lokal Sekunder	1.324,56	1.324,560	1.324,560	1.324,560
Lingkungan	1.533,50	1.533,500	1.533,500	1.533,500
Jumlah	3.193,04	3.193,837	3.193,837	3.193,837

Sumber: Bekasi Dalam Angka 2016, BPS Kota Bekasi 2016

Rencana umum tata ruang wilayah untuk Kota Bekasi hingga tahun 2031 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi No.13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 2011-2031. Selanjutnya telah disusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

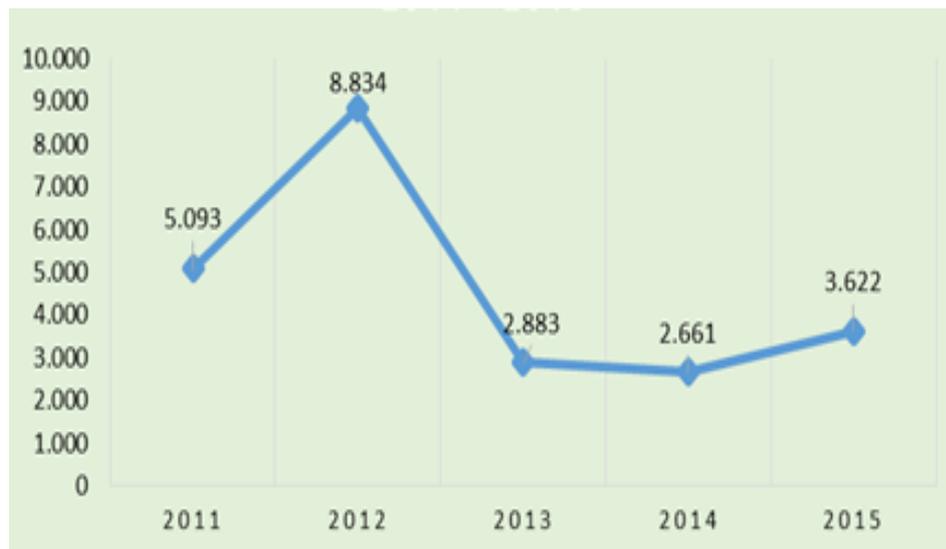
Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Selama Tahun 2015, BPPT telah menerbitkan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebanyak 3.622 IMB.

Tabel 2.33
Banyaknya IMB Yang Dikeluarkan Per Bulan
Menurut Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Banyaknya IMB Yang Dikeluarkan												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb	Oktober	Novemb	Desember	Jumlah
Pondokgede	42	39	52	27	24	22	32	27	26	19	20	22	352
Jatisampurna	19	50	22	34	19	17	26	34	35	14	30	17	317
Pondok Melati	12	14	18	13	6	15	10	19	18	8	13	11	157
Jatiasih	40	41	25	31	31	36	25	26	39	22	34	26	376
Bantargebang	9	10	10	2	7	11	19	10	6	3	6	1	94
Mustikajaya	12	22	13	28	12	22	20	18	37	11	19	22	236
Bekasi Timur	17	38	18	19	19	20	29	24	25	26	24	21	280
Rawalumbu	39	31	34	30	34	41	42	32	27	16	24	29	379
Bekasi Selatan	55	47	50	55	31	27	49	57	39	28	44	33	515
Bekasi Barat	36	29	23	29	22	23	26	23	23	16	26	19	295
Medansatria	34	26	14	16	12	14	24	19	19	16	25	16	235
Bekasi Utara	39	42	34	26	26	31	29	37	51	14	31	26	386
Jumlah	354	389	313	310	243	279	331	326	345	193	296	243	3.622
2014	320	163	160	276	158	190	255	157	220	219	287	256	2.661
2013	496	228	162	205	240	267	212	93	198	257	268	257	2.883
2012	640	573	988	756	1.172	554	708	1.071	754	569	508	541	8.834
2011	30	492	724	515	325	584	289	334	259	561	381	599	5.093

Sumber: BPPT Kota Bekasi, 2016

Jumlah IMB yang diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Sejak 2011 hingga 2015, tercatat pada tahun 2012 BPPT paling banyak menerbitkan IMB, yaitu sebanyak 8.834. Meskipun tahun 2015 tidak sebanyak tahun 2012, namun jumlah IMB tahun 2015 lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dan bangunan gedung terus berkembang di Kota Bekasi.



Sumber: Diolah dari BPPT Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.36 Jumlah Penerbitan IMB di Kota Bekasi Tahun 2011-2015

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia disamping sandang dan pangan. Dalam skala yang sederhana perumahan bukan hanya mengandung arti sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan satuan kompleks yang melibatkan berbagai unsur kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas, tetapi juga mengenai kualitas rumah. Secara umum kualitas rumah tinggal dapat dilihat dari bahan bangunan yang digunakan dan keadaan fasilitas rumah tersebut sehingga membuat rumah yang sehat.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Jakarta secara optimal.

Tabel 2.34
Data Jumlah Bangunan Rumah Di Kota Bekasi Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Rumah	%	Jumlah Rumah Layak Huni	%
Bekasi Timur	242.173	26,23	239.532	26,2
Bekasi Barat	82.604	8,94	81.704	8,94
Bekasi Utara	71.838	7,78	71.051	7,78
Bekasi Selatan	68.841	7,45	69.089	7,56
Rawalumbu	63.539	6,9	62.844	6,87
Medan Satria	24.916	2,7	24.642	2,69
Bantar Gebang	20.149	2,18	19.925	2,18
Pondok Gede	47.049	5,1	46.536	5,1
Jatiasih	103.927	11,25	102.793	11,24
Jatisampurna	26.615	2,89	26.318	2,88
Mustikajaya	143.939	15,59	142.364	15,57
Pondok Melati	27.627	2,99	27.320	2,99
Jumlah	923.217	100	914.118	100

Sumber : Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi, 2016

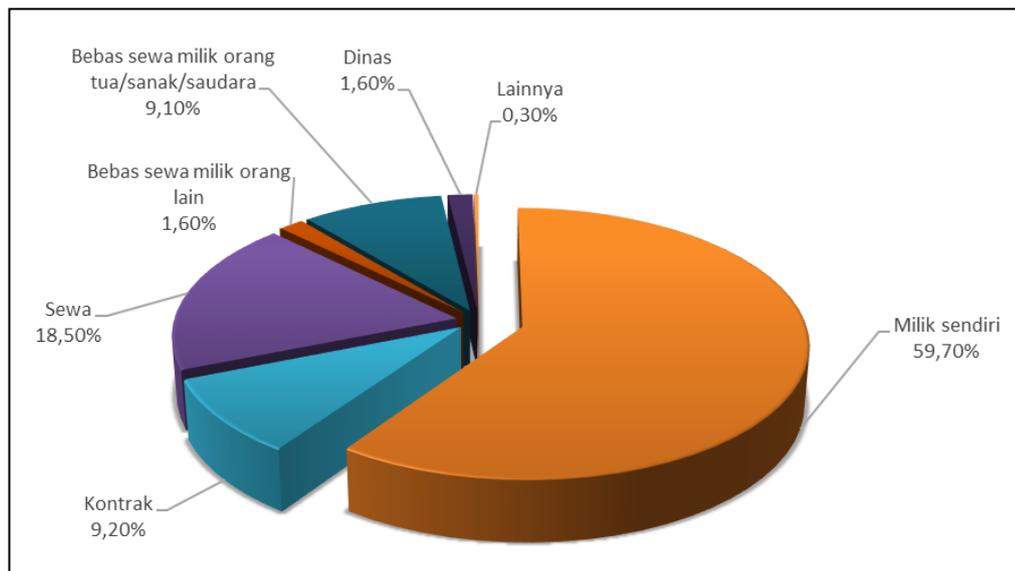
Capaian pembangunan perumahan di Kota Bekasi tahun 2015 dapat diukur dari cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau dan didukung PSU serta berkurangnya luasan permukiman kumuh. Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 10 persen, cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau sebesar lima persen, cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU sebesar 10 persen, dan luasan permukiman kumuh berkurang sebesar lima persen. Sejak 2011 hingga 2015 Pemerintah Kota Bekasi telah berhasil menangani permukiman kumuh seluas 3,8 ha. Setiap tahun ditargetkan bisa menangani 1,2 ha, kecuali pada tahun 2013 tidak ada permukiman kumuh yang ditangani dan tahun 2011 hanya 0,2 ha yang ditangani.



Sumber: Disbangkim Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.37 Luasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Kota Bekasi, 2015

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu indikasi rumah sehat adalah rumah tempat tinggal yang memiliki luas lantai perkapita minimal 10 m². Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menjadi pilihan para penduduk yang bekerja di wilayah Jakarta. Dari total penduduk yang memiliki tempat tinggal di Kota Bekasi, sebanyak 59,7 persen merupakan milik sendiri, sedangkan 18,5 persen berstatus sewa dan 9,2 persen berstatus kontrak.



Sumber: Disbangkim Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.38 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Di Kota Bekasi 2014

Kebanyakan kondisi lantai rumah yang di tempati oleh penduduk Kota Bekasi adalah marmer/ keramik/granit dengan persentase sebanyak 90,5 persen. Rumah yang memiliki lantai dari tegel/teraso sebanyak 3,7 persen dan berlantai semen sebanyak 5 persen. Sedangkan rumah yang berlantai kayu dan tanah masing-masing sebanyak 0,4 persen dan 0,5 persen.

Data Dinas Kesehatan 2015, secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan fasilitas BAB leher angsa 84,84 persen, komunal 0,19 persen dan cemplung 0,23 persen. Sedangkan masyarakat yang masih menggunakan fasilitas BAB di sungai (tidak mempunyai jamban) sebesar 14,74 persen.

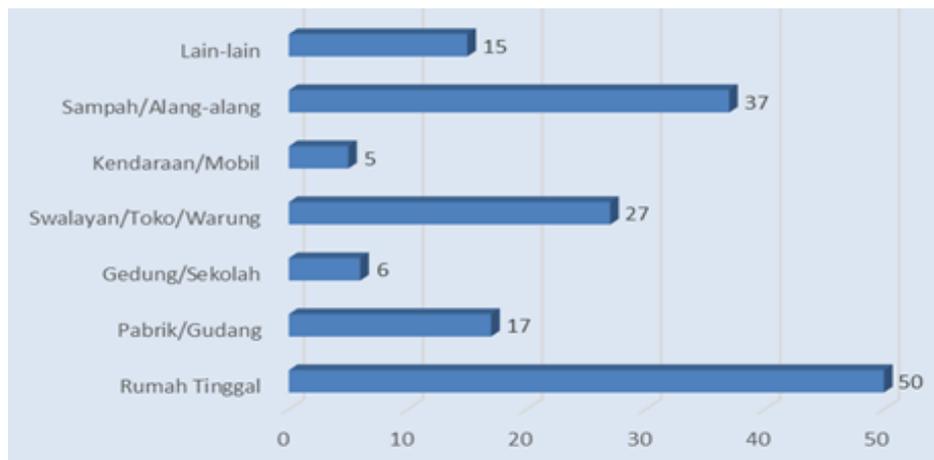


Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.39 Jenis Lantai dan Fasilitas BAB yang Dimiliki Rumah tangga di Kota Bekasi, 2015

e. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

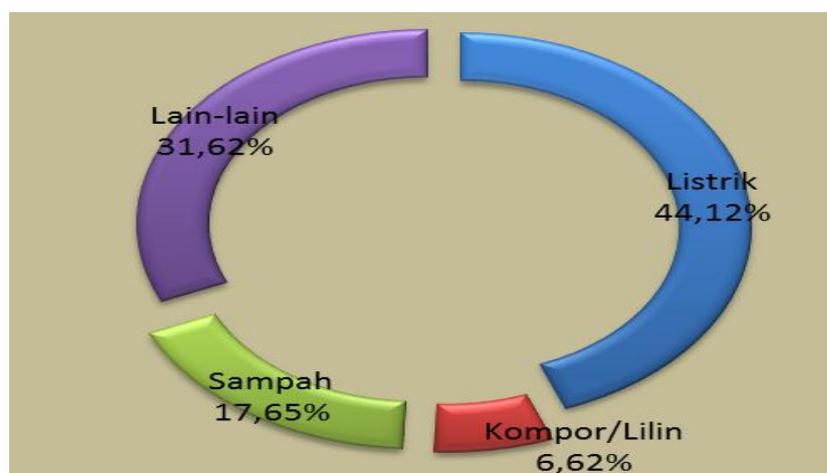
Keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Fokus penting dalam penyelenggaraan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bekasi adalah peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.



Sumber: Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi 2016

Gambar 2.40 Jenis Kebakaran di Kota Bekasi, 2015

Sepanjang tahun 2015 terdapat 157 kejadian kebakaran di Kota Bekasi. Kejadian paling banyak terjadi di bulan Juli, sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Dari 157 kejadian, yangn paling sering terjadi adalah kebakaran rumah tinggal, yaitu sebanyak 50 kejadian, diikuti kebakaran sampah/alang sebanyak 37 kejadian, kebakaran swalayan/toko/warung sebanyak 27 kejadian, kebakaran pabrik/gudang sebanyak 17 kejadian, dan lain-lain sebanyak 15 kejadian. Sedangkan kebakaran gedung/sekolah dan kendaraan/mobil paling jarang terjadi, masing-masing 6 dan 5 kejadian dalam setahun. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh listrik sebesar 44,12%, diikuti sebab lain-lain sebesar 31,62%, sampah sebesar 17,65% dan kompor atau lilin sebesar 6,62%.

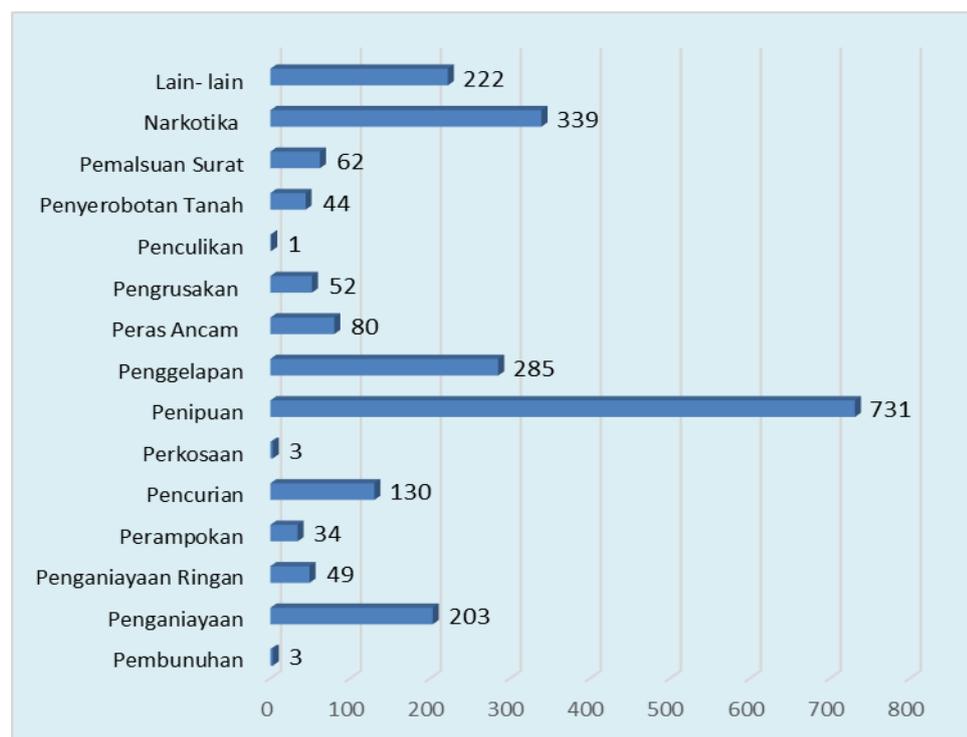


Sumber: Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Analisis Profil Daerah Kota Bekasi 2016

Gambar 2.41 Persentase Penyebab Kebakaran Di Kota Bekasi, 2015

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tingkat kriminalitas di Kota Bekasi selama kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, walaupun demikian *trend* menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2011 tercatat terdapat 3.616 tindak kriminalitas di Kota Bekasi, angka ini kemudian meningkat menjadi 3.648 kasus pada tahun 2012, tahun 2013 meningkat menjadi 3.553, tahun 2014 turun menjadi 3,291 kasus, dan terakhir tahun 2015 kembali turun menjadi 2.238.



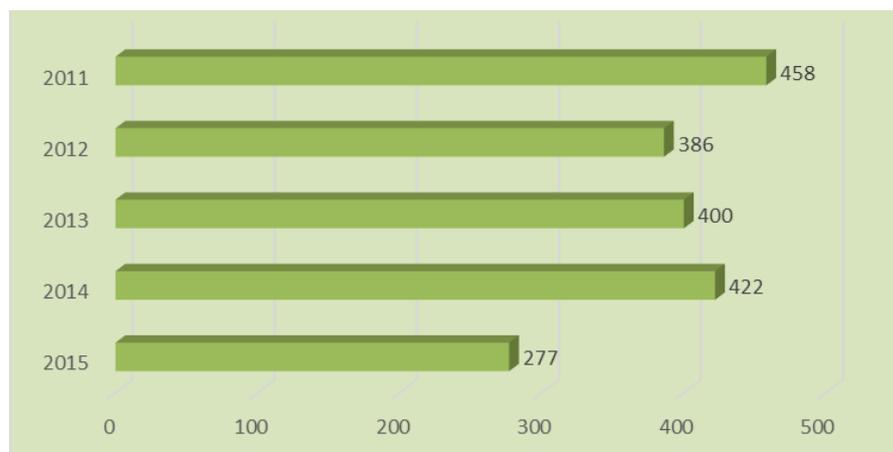
Sumber: Polres Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.42 Jumlah Kriminalitas Menurut Jenis Di Kota Bekasi, 2015

Berdasarkan dari data Kepolisian Resort Kota Bekasi, kasus penipuan merupakan jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2015, diikuti dengan

narkotika sebanyak 339 kasus, penggelapan 285 kasus, kriminalitas lainnya 222 kasus, penganiayaan 203 kasus, dan pencurian sebanyak 130 kasus. Jenis kriminalitas seperti perasancam, pemalsuan surat, pengrusakan, penganiayaan ringan, penyerobotan tanah, perampokan berada dikisaran 34-80 kasus. Sedangkan pembunuhan dan perkosaan masing-masing tiga kasus, dan penculikan terjadi sekali.

Jumlah kasus narkoba di Kota Bekasi selama kurun waktu 2011 -2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kasus narkoba paling tinggi terjadi tahun 2011 dengan jumlah kasus sebanyak 458 kasus, kemudian tahun 2014 terjadi 422 kasus. Sedangkan tahun 2015 kasus narkoba paling rendah sepanjang 5 tahun terakhir, yaitu sebanyak 277 kasus. Total selama kurun waktu 2011-2015 persoalan narkoba sebanyak 1.943 kasus di Kota Bekasi melibatkan 1.485 orang pelaku terdiri dari 98,38 persen pelaku laki-laki dan 1,62 persen pelaku perempuan.



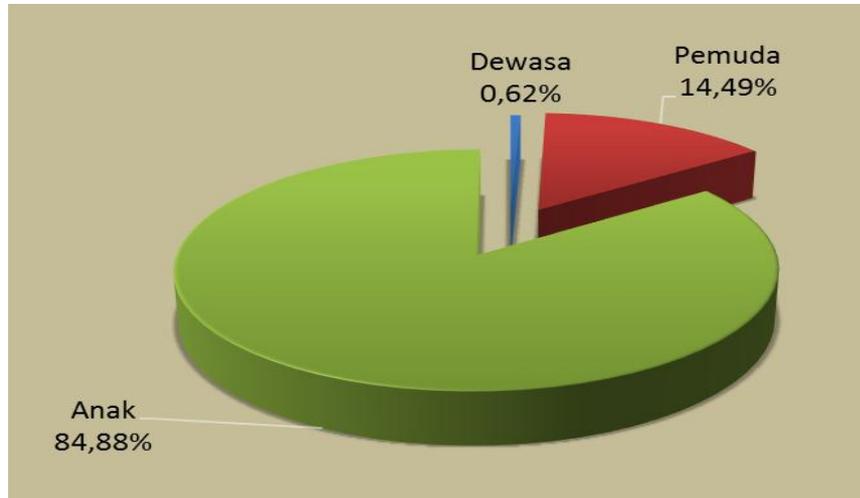
Sumber: Polres Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.43 Jumlah Kasus Narkoba Kota Bekasi, 2011-2015

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat pemberian hukuman bagi pelaku tindak kriminalitas. Menurut data SDP Lapas Kelas IIA Kota Bekasi, sebagian besar lapas justru dihuni oleh anak-anak mencapai 84,88%, pemuda sebanyak 14,49%, dan orang dewasa hanya 0,62%.

Sebagai salah satu pihak yang bertugas memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat, di tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mempunyai petugas perlindungan masyarakat sebanyak 1.736 orang dan telah

berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) sebanyak 2.883 kasus dan pelanggaran peraturan daerah (perda) sebanyak 910 kasus.

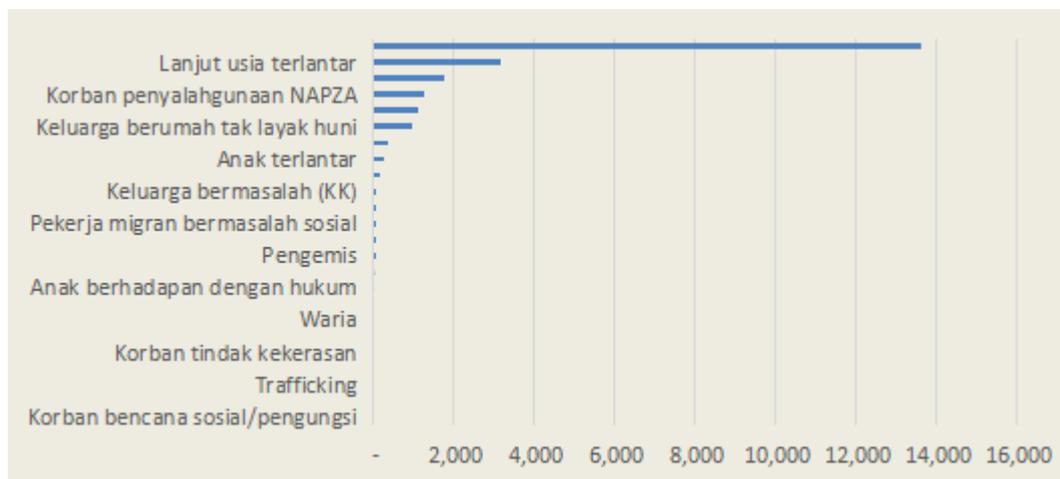


Sumber: SDP Lapas Kelas IIA Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.44 Persentase Penghuni Lapas di Kota Bekasi, 2015

f. Urusan Sosial

PMKS merupakan perseorangan, kelompok, dan atau masyarakat yang karena satu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun social secara memadai dan wajar. Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan PMKS, namun belum sepenuhnya tuntas menghapuskan PMKS di Kota Bekasi.



Gambar 2.45 Jumlah PMKS menurut Kategori di Kota Bekasi, 2015

g. Urusan Tenaga Kerja

Dalam hal ketenagakerjaan dan transmigrasi, Pemerintah Kota Bekasi telah mengupayakan peningkatan kesempatan kerja, perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, Pemerintah Kota Bekasi fokus pada upaya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan.

Dari data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, tercatat sebanyak 24.749 orang pencari kerja, terdiri dari 13.308 perempuan dan 11.441 laki-laki. Dari jumlah ini, sebagian besar berusia 15-19 tahun, yang jumlahnya mencapai 11.605 orang.

Tabel 2.35
Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur di Kota Bekasi
Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-19	5.987	5.618	11.605
20-24	4.883	3.978	8.861
25-29	1.577	1.089	2.666
30-34	491	450	941
35-39	183	194	377
40-44	98	80	178
45-49	57	30	87
50-54	32	2	34
Jumlah	13.308	11.441	24.749

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2016

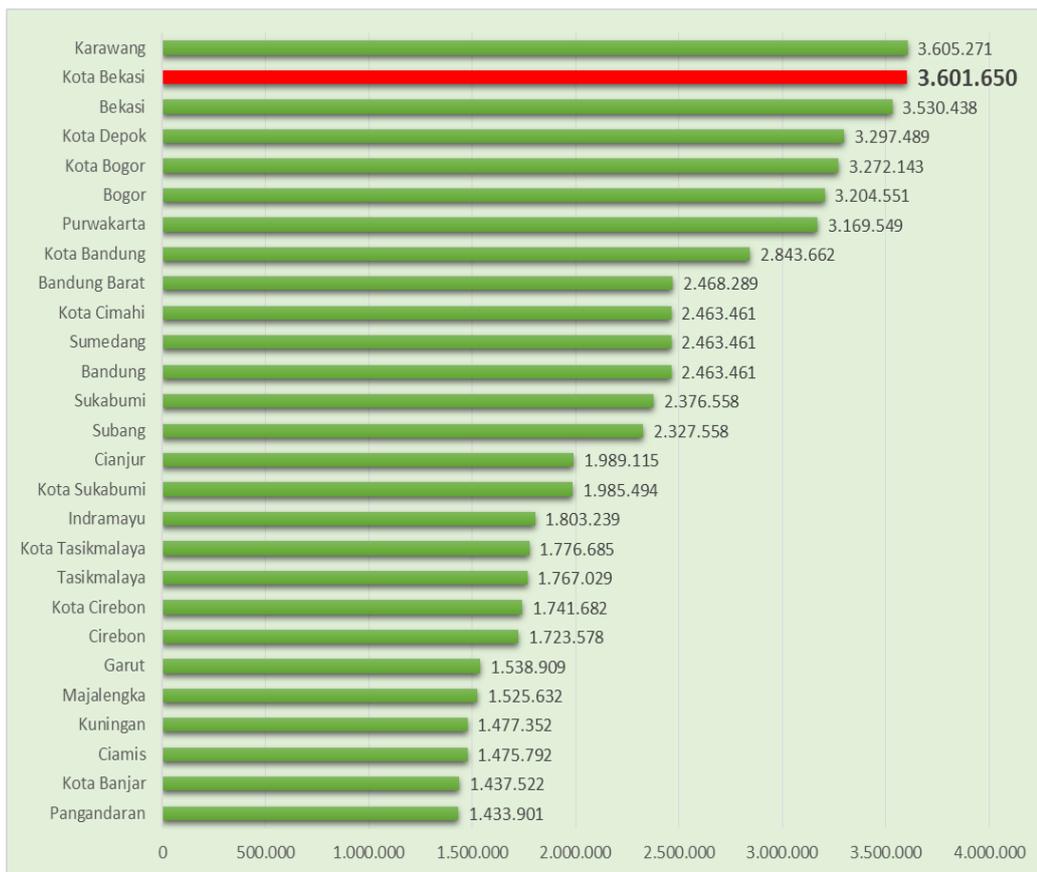
Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi sebanyak 1.193.672 orang, jumlah pencari kerja yang terdaftar sangat kecil, yakni hanya 2,07%. Dari jumlah tersebut, sebesar 42,57% ditempatkan, artinya, tidak ada separuh dari tenaga kerja yang mendaftar bisa ditempatkan. Selama tahun 2015, terdapat sebanyak 36.476 lowongan pekerjaan.

Tabel 2.36
Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan, dan Penempatan
Di Kota Bekasi, 2015

Bulan	Pencari Kerja Terdaftar		Jumlah	Lowongan		Jumlah	Penempatan Tenaga Kerja		Jumlah
	L	P		L	P		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Januari	960	725	1.685	4.337	2.479	6.816	683	568	1.251
Februari	720	538	1.258	216	101	317	30	27	57
Maret	562	332	894	1.227	1.023	2.250	228	134	362
April	1.256	1.110	2.366	116	111	227	13	23	36
Mei	1.727	1.872	3.599	48	34	82	14	2	16
Juni	1.184	1.036	2.220	6.203	2.610	8.813	1.142	761	1.903
Juli	1.212	1.041	2.253	972	368	1.340	414	282	696
Agustus	1.916	1.628	3.544	605	322	927	81	52	133
September	1.281	1.112	2.393	6.620	5.203	11.823	2.979	1.929	4.908
Oktober	911	823	1.734	95	88	183	56	61	117
Nopember	888	665	1.553	137	80	217	128	79	207
Desember	691	559	1.250	2.003	1.478	3.481	501	349	850
Jumlah	13.308	11.441	24.749	22.579	13.897	36.476	6.269	4.267	10.536

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2016

Pemerintah Kota Bekasi juga berupaya meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan melakukan pengawasan terhadap pengusaha agar melaksanakan upah minimum kota (UMK) sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disebutkan bahwa kenaikan UMK mengikuti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kenaikan upah secara nasional sebesar 8,25%. Pada tahun 2017, UMK Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp 3.601.650,00. Nilai UMK ini nomor dua terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang. Berdasarkan sektornya, UMK Kota Bekasi juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, sektor I, terdiri dari logam, otomotif, mesin, bubur kertas, minyak goreng, kimia (mayoritas kimia), karet, dan plastik (bukan alat-alat rumah tangga) sebesar Rp 3.922.709,00 dan sektor II terdiri dari elektronik, kayu (bukan kayu lapis), jasa perbankan, garmen (jumlah pekerja di atas 1.000 orang), mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), *phylon*, makanan dan minuman (jumlah pekerja di atas 500 orang) sebesar Rp 4.101.344,00.



Sumber: SK Gubernur Jawa Barat No: 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Gambar 2.46 Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2017 (Rupiah)

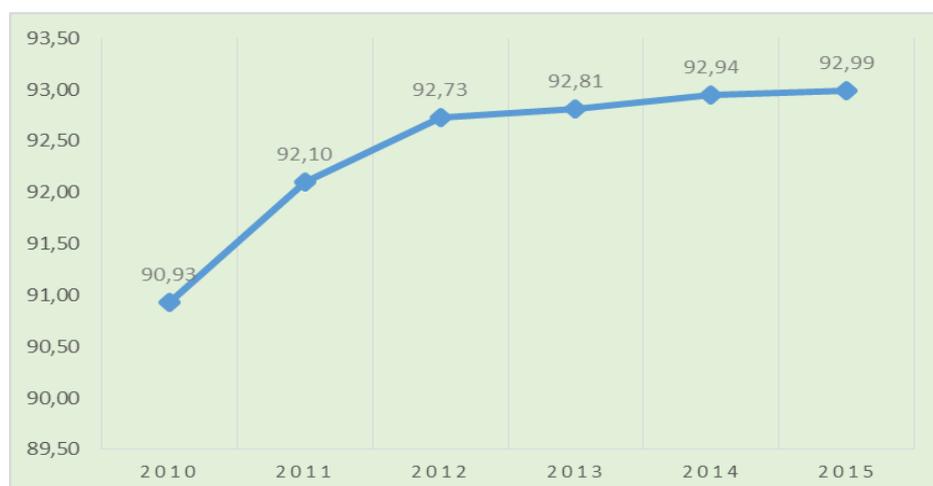


Gambar 2.47 Tren Upah Minimum Kota Bekasi, 2013-2017 (Rupiah)

Dari tahun 2013, UMK Kota Bekasi cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2015. Demikian halnya dengan UMK sektoral. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat ada 102 sengketa pengusaha dengan pekerja yang berhasil diselesaikan. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dengan mendorong meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja.

h. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

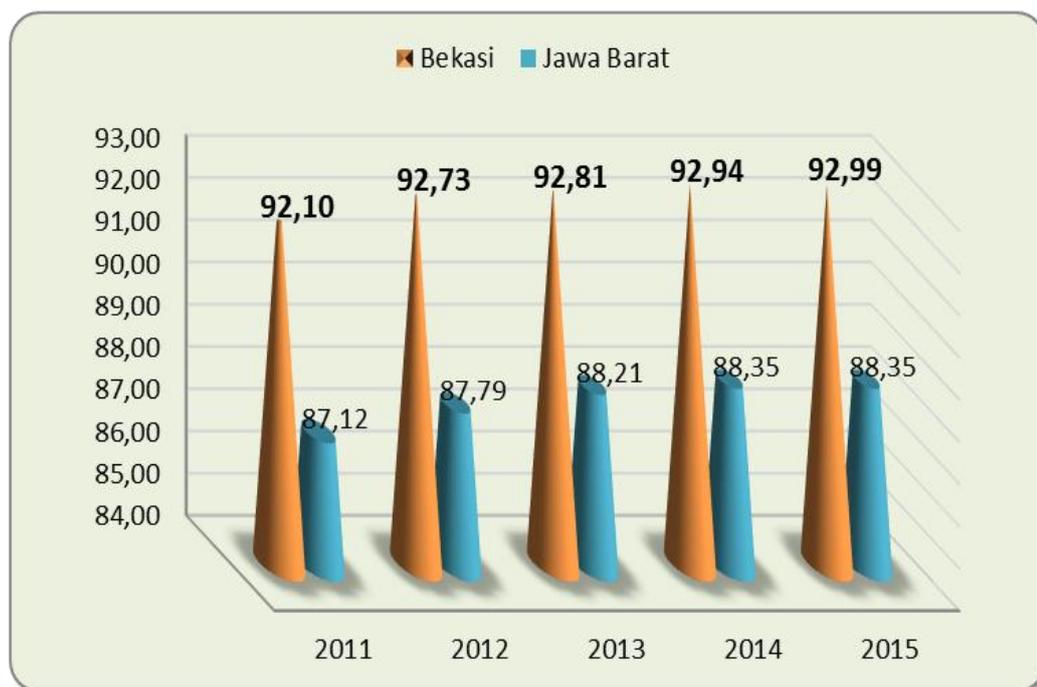
Pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi/mendapatkan akses, kontrol, manfaat terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya. Terkait dengan hal tersebut, digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) serta untuk mengetahui peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.48 Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi, 2010-2015

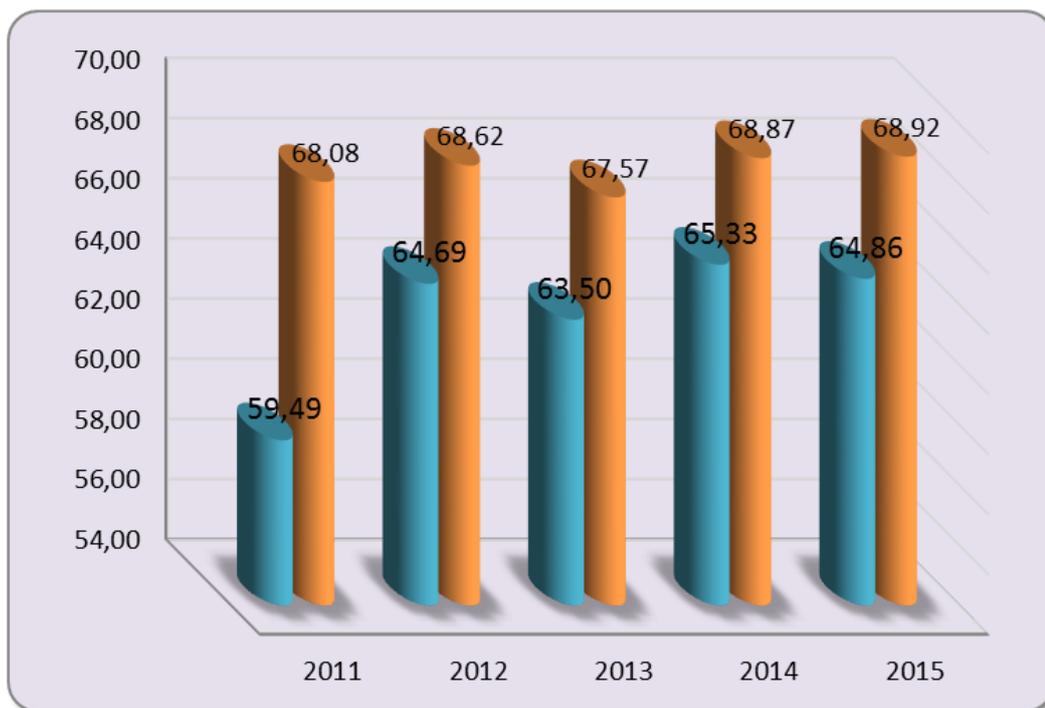
Sejauh ini, hasil yang dicapai upaya pembangunan kualitas hidup di Kota Bekasi memperlihatkan semakin rendahnya kesenjangan gender. Selama kurun waktu 2010 - 2015, IPG Kota Bekasi selalu menunjukkan posisi yang selalu meningkat. Pencapaian Kota Bekasi dalam membangun kesetaraan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPG Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.49 Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, 2011-2015

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk didalamnya partisipasi politik yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumberdaya ekonomi, yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Secara umum, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Bekasi yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik.

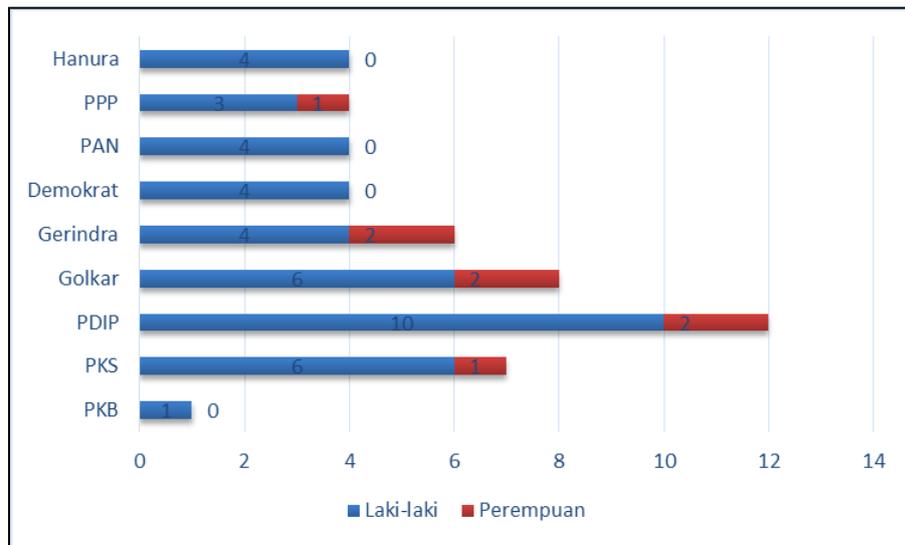


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.49 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, 2011 - 2015

Keterwakilan perempuan dalam legislatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengamanatkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama dalam lembaga perwakilan rakyat.

Dari sebanyak 50 orang anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2014-2019, sebanyak 84% adalah anggota laki-laki (42 orang), sedangkan anggota DPRD perempuan hanya sebesar 16% (delapan orang). Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih kurang dari kuota 30 persen, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Gambar 2.50 Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi menurut Parpol dan Jenis Kelamin, periode 2014-2019

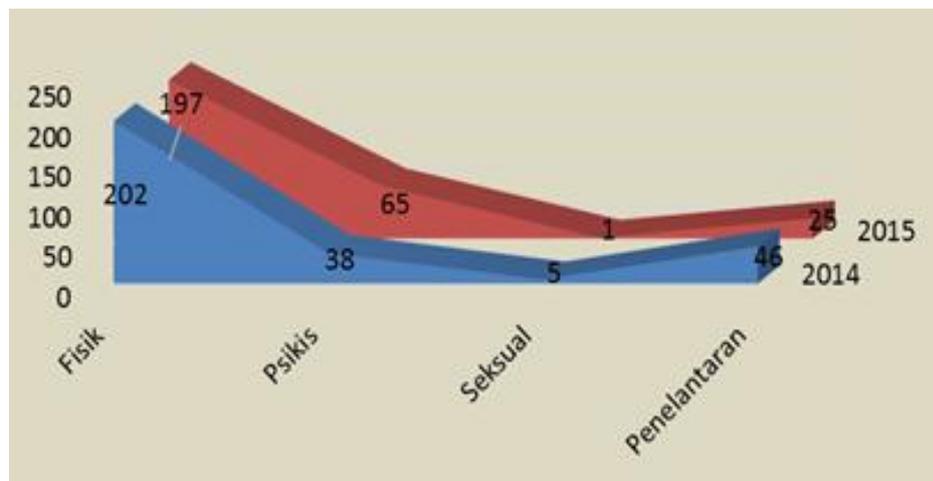
Pemerintah Kota Bekasi senantiasa berusaha meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mendorong peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan. Hal ini dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak terbilang masih cukup besar. Jumlahnya cenderung mengalami penurunan, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.



Sumber: BP3AKB Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.51 Persentase KDRT Menurut Jenis Kekerasan Di Kota Bekasi, 2015

Data dari BP3AKB menunjukkan ada sebanyak 288 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan korban sebanyak 213 orang terjadi di tahun 2015. Dari 288 kasus tersebut, jenis kekerasan yang terjadi paling banyak adalah kekerasan fisik, yakni sebesar 68,40% atau sebanyak 197 kasus. Selanjutnya kekerasan psikis sebesar 22,57% atau sebanyak 65 kasus, penelantaran sebesar 8,68% atau sebanyak 25 kasus, dan satu kasus kekerasan seksual. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2014 terjadi kasus KDRT sebanyak 291 kasus. Secara keseluruhan, KDRT memang mengalami penurunan, namun kekerasan psikis meningkat cukup besar di tahun 2015, yaitu dari 38 kasus pada tahun 2014, menjadi 65 kasus di tahun 2015 atau meningkat sebesar 71,05%.

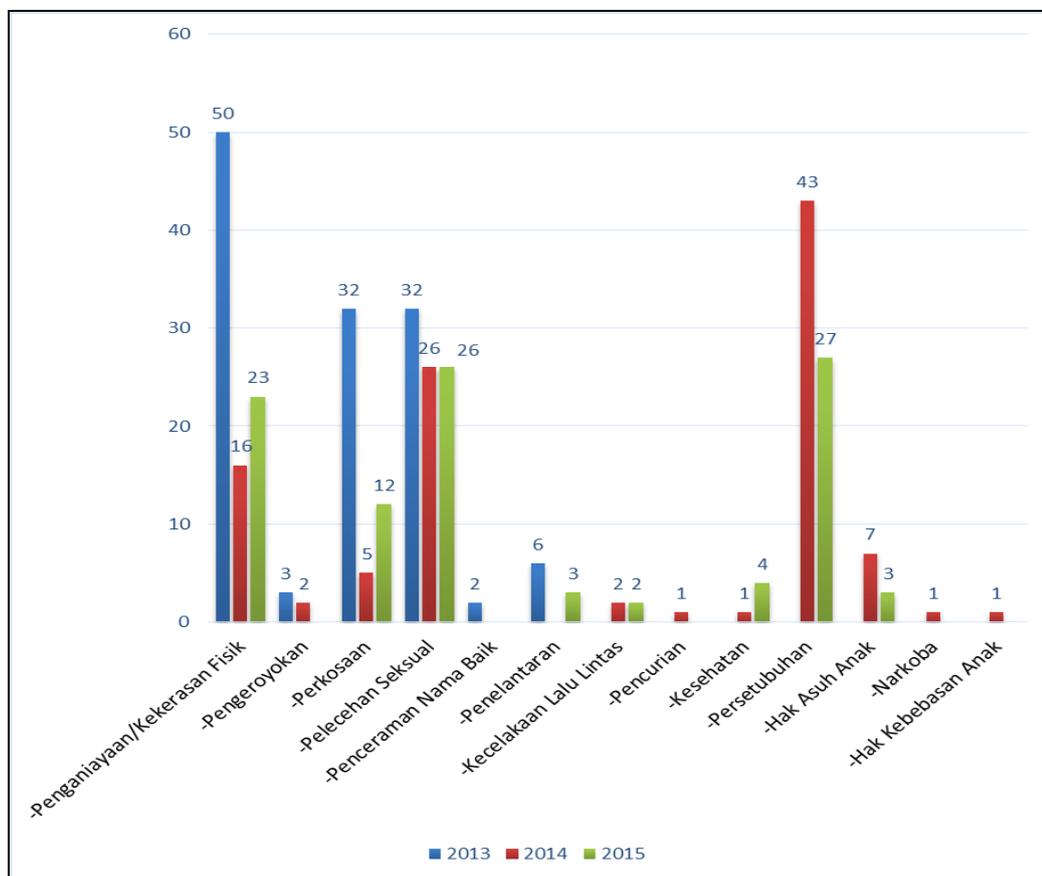


Sumber: BP3AKB Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.52 Banyaknya KDRT Menurut Jenis Kekerasan Di Kota Bekasi, 2014-2015

Selain KDRT, anak seringkali menjadi korban kekerasan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Tahun 2013 terdapat 125 kasus. Jumlah ini turun menjadi 105 kasus pada tahun 2014, kembali menurun di tahun 2015 sebanyak 100 kasus. Jika dilihat dari jenis kekerasan yang dialami oleh anak, ada kecenderungan bentuk kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi. Dari tahun 2013, berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, baik itu perkosaan, pelecehan seksual maupun persetubuhan selalu merupakan kasus yang jumlahnya cukup banyak.

Bahkan di tahun 2014, kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak. Sedangkan kasus kekerasan fisik mempunyai kecenderungan makin menurun jumlahnya.



Sumber: BP3AKB Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.53 Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bekasi, 2013 - 2015

i. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Oleh karena itu, pembangunan Kota Bekasi harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2013 telah dilaksanakan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi, peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) masih terkendala belum optimalnya pembebasan lahan dan pengembangan serta pembangunan taman dan tandon yang dilakukan oleh OPD dan bagian terkait. Selain itu, belum ada dasar hukum untuk penerapan peraturan zonasi yang ada dalam rencana detail tata ruang Kota Bekasi.

Untuk menjaga ketersediaan air baku bagi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah membuat sumur resapan sebanyak 102 buah pada tahun 2015. Jumlah ini 150% lebih banyak dibandingkan sumur resapan yang dibangun tahun sebelumnya, yaitu 40 buah pada tahun 2014.

Tabel 2.37
Jumlah Pembuatan Sumur Resapan Di Kota Bekasi (2011-2015)

Kecamatan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pondok Gede	0	1	2	0	0
2. Jatisampurna	0	0	0	0	0
3. Pondok Melati	0	0	0	0	0
4. Jatiasih	2	0	0	2	0
5. Bantargebang	0	0	0	2	19
6. Mustika Jaya	1	0	1	2	0
7. Bekasi Timur	4	3	0	9	0
8. Rawalumbu	0	0	0	6	13
9. Bekasi Selatan	1	7	6	1	25
10. Bekasi Barat	2	2	2	7	0
11. Medan Satria	0	1	0	4	10
12. Bekasi Utara	3	0	1	7	35
Jumlah	13	14	12	40	102

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2016

Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan air baku masyarakat, ada 1.021 titik ijin pengambilan air tanah, yang terdiri dari 369 sumur bor dan 652 sumur pantek dengan dengan debit air sebesar 40.577,52 m³/hari.

Persoalan sampah sering menjadi polemik bagi masyarakat perkotaan, demikian halnya di Kota Bekasi. Dari data Dinas Kebersihan tahun 2015, volume sampah selalu meningkat dari waktu ke waktu. Produksi sampah rata-rata mencapai 7.040,92 ton/hari. Menurut data statistik, terdapat 76 unit tempat pembuangan

sampah (TPS) dengan kapasitas daya tampung sebesar 1.115 ton. Selain itu, terdapat satu unit tempat pengolahan akhir (TPA) dan sembilan unit tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Volume produksi sampah mencapai 543.944 ton, namun yang mampu ditangani sebesar 60,23% saja, yaitu sebanyak 327.971 ton. Selain sarana pembuangan dan pengolahan sampah, terdapat satu unit sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat.

Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah di Kota Bekasi belum efektif memberikan pelayanan pengelolaan sampah. Ritase pengangkutan sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang ada. Hal ini terjadi karena TPA Sumur Batu hampir penuh (mencapai umur teknisnya) sehingga berakibat pada bertambahnya proses bongkar sampah pada zona aktif. Dalam kondisi normal setiap unit truk memerlukan waktu 15 menit untuk antri dan membongkar sampah. Sedangkan sejak tahun 2016, satu unit truk sampah memerlukan waktu antri dan pembongkaran selama dua jam.

Tabel 2.38
Tonase & Volume Sampah yang Masuk ke TPA Sampah Sumur Batu
Kota Bekasi, 2015

Bulan	Ritase (Kali)	Berat Sampah (Ton)	Volume Sampah (m ³)	Rata-rata (Ton)/Hari
Januari	10.901,00	19.076,75	76.307,00	615,38
Februari	9.319,00	16.308,25	65.233,00	582,44
Maret	10.600,00	18.550,00	74.200,00	598,39
April	9.936,00	18.754,75	75.019,00	625,16
Mei	10.564,00	18.487,00	73.948,00	596,36
Juni	10.663,00	18.660,25	74.641,00	622,00
Juli	10.019,00	17.533,25	70.133,00	565,59
Agustus	10.058,00	17.601,50	70.406,00	567,79
September	10.018,00	17.531,50	70.126,00	584,38
Oktober	9.737,00	17.039,75	68.159,00	549,67
November	9.860,00	17.255,00	69.020,00	575,17
Desember	9.895,00	17.316,25	69.265,00	558,59
Jumlah	121.570,00	214.114,25	856.457,00	7.040,92
2014	115.338,00	201.841,50	807.366,00	6.640,33
2013	107.543,00	188.200,25	752.801,00	6.185,22
2012	82.683,00	144.695,25	578.781,00	395,64
2011	82.355,00	144.121,25	576.479,00	395,01

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Bekasi, 2016

j. Urusan Pertanahan

Dengan luas wilayah Kota Bekasi yang relatif tetap, kebutuhan ruang (tanah) secara garis lurus terus-menerus meningkat. Akibatnya timbul ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tanah. Hal ini menimbulkan tumbuh dan berkembangnya penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara tidak sah (liar) dan munculnya spekulasi tanah karena harga tanah yang selalu naik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi fokus melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

k. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban. Penerbitan administrasi kependudukan melalui kepemilikan *e-KTP*, kartu keluarga, akte perkawinan, akte kelahiran, dan akte kematian sebagai bentuk pelayanan publik di bidang kependudukan di Kota Bekasi. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, belum semua penduduk Kota Bekasi memiliki *e-KTP*. Ada sebanyak 63.112 *e-KTP* yang belum tercetak dan masih 96.116 jiwa yang belum melakukan perekaman *e-KTP*. Selain itu, capaian pelayanan penerbitan akte kelahiran juga masih rendah, yaitu hanya 54,54% dari target di akhir tahun 2016 mencakup 85,45% penduduk lahir di Kota Bekasi mendapatkan akte kelahiran. Hal ini ditengarai kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting akte kelahiran.

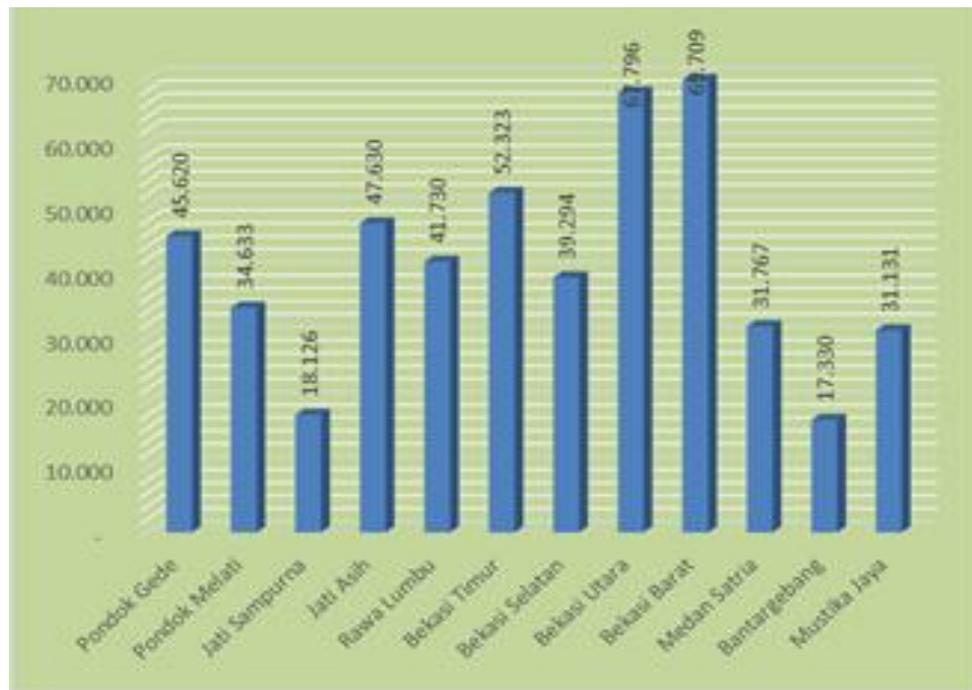
l. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sebagai pemerintahan di wilayah berkarakter perkotaan (*urban*), Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dalam 3 (tiga) fokus, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan data kependudukan secara berkala, dan mendorong pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam kaitannya dengan kebijaksanaan bidang kependudukan, salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang ditempuh melalui program KB

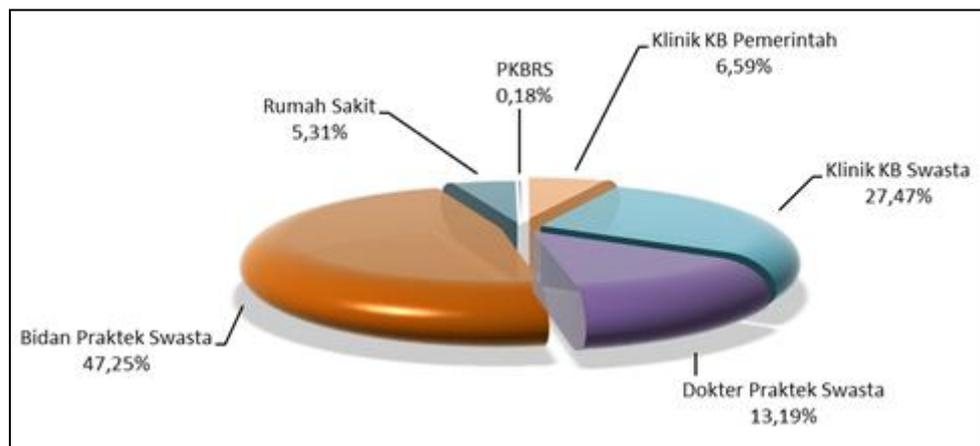
adalah pendewasaan usia perkawinan pertama dan pemakaian alat/cara kontrasepsi, karena kedua faktor ini dianggap langsung dapat mempengaruhi fertilitas (angka kelahiran). Salah satu tujuan program keluarga berencana (KB) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.54 Pasangan Usia Subur di Kota Bekasi, 2015

Di Kota Bekasi, persentase wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin atau yang biasa disebut Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 497.089 orang dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 69.709 orang. Proporsi PUS yang sedang menggunakan alat/cara KB yaitu sekitar 39,45% pada tahun 2007 naik menjadi sekitar 48,10% pada tahun 2010. Di Kota Bekasi selama tahun 2015 terdapat 546 unit sarana pelayanan KB, meliputi KKB Pemerintah sebanyak 36 unit, KKB swasta sebanyak 150 unit, dokter praktek swasta sebanyak 72, bidan praktek swasta sebanyak 258, rumah sakit sebanyak 29 unit dan PKBRS sebanyak satu unit.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.55 Tempat Pelayanan KB di Kota Bekasi, 2015

n. Urusan Perhubungan

Bentuk pelayanan publik lain yang cukup signifikan dirasakan masyarakat Kota Bekasi adalah transportasi publik. Meskipun sudah tersedia cukup banyak sarana layanan transportasi, seperti: angkutan kota, bus kota, kereta *commuter line* yang terintegrasi dengan Jakarta dan sebagainya, harus diakui bahwa pengguna kendaraan pribadi berupa roda dua maupun roda empat masih cukup mendominasi. Berdasarkan data Direktorat Bina Transportasi Perkotaan (BTSP) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan dengan menggunakan VC Ratio (*Volume to Capacity*) Kota Bekasi, volume kendaraan sudah mendekati kapasitas jalan yang tersedia. Jika VC Ratio di atas 70%, maka kondisi jalan bisa dipastikan sudah padat.

Tahun 2014, VC Ratio Kota Bekasi sebesar 0,83 menduduki urutan keempat sampai dengan keenam dengan lalulintas terpadat bersama kota Surabaya (0,83) dan Depok (0,83) dan setelah Bogor (0,86), DKI Jakarta (0,85) dan Bandung (0,85) serta masih di atas Tangerang (0,82) dan Medan (0,76).

Kepadatan lalu lintas di Kota Bekasi menyebabkan rata-rata kecepatan kendaraan hanya 21,86 kilometer/jam, keenam terlambat setelah Bandung (14,3 kilometer/jam), Bogor (15,32 kilometer/jam), Jakarta (<20 kilometer/jam), Surabaya (21 kilometer/jam), dan Depok (21,4 kilometer/jam) serta di atas Tangerang (22 kilometer/jam) dan Medan (23,4 kilometer/jam). Sebagaimana tujuh kota

lainnya yang termasuk kota-kota termacet, penyebab kemacetan di Kota Bekasi menurut data yang dihimpun Kementerian Perhubungan adalah: penyempitan jalan (40%), kecelakaan (25%), cuaca buruk (15%), kawasan perkantoran (10%) dan sisanya masing-masing lima persen karena kurangnya lampu lalu lintas dan adanya acara khusus atau lainnya.

Selain itu, sebesar 19,82% penduduk Kota Bekasi berumur lima tahun ke atas atau sebanyak 460.069 jiwa merupakan penduduk komuter yang berkegiatan di luar Kota Bekasi (terutama di Jakarta). Sedangkan komuter yang berasal dari luar Kota Bekasi dan berkegiatan di Kota Bekasi sebanyak 132.000 jiwa. Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kegiatan adalah sepeda motor, kendaraan umum dan mobil. Komuter yang menggunakan sepeda motor untuk pergi sebesar 51,79% sedangkan untuk pulang 50,67%. Komuter yang menggunakan transportasi umum untuk pergi sebesar 19,42% dan untuk pulang sebesar 20,78%. Komuter yang saat pergi menggunakan mobil sebesar 20,21% dan untuk pulang sebesar 18,60%. Secara rinci potret penggunaan moda transportasi baik untuk pergi ke ataupun pulang dari tempat kerja dapat dilihat pada dua tabel berikut:

Tabel 2.39
Banyaknya Moda Transportasi Yang Digunakan Komuter
Untuk Pergi ke Tempat Kegiatan

Moda Transportasi Yang Digunakan	Jumlah	Persentase
Jalan Kaki	-	0,00
Sepeda	699	0,15
Sepeda Motor	238.284	51,79
Mobil	92.960	20,21
Kendaraan Umum	52.529	11,42
Kereta	31.373	6,82
Bus/Transjakarta/APTB	5.439	1,18
Kendaraan Jemputan	37.656	8,18
Lainnya	1.129	0,25
Jumlah	460.069	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

Tabel 2.40
Banyaknya Moda Transportasi Yang Digunakan Komuter
Untuk Pulang dari Tempat Kegiatan

Moda Transportasi Yang Digunakan	Jumlah	Persentase
Jalan Kaki	1.256	0,27
Sepeda	699	0,15
Sepeda Motor	233.120	50,67
Mobil	85.587	18,60
Kendaraan Umum	58.772	12,77
Kereta	31.373	6,82
Bus/Transjakarta/APTB	5.439	1,18
Kendaraan Jemputan	42.694	9,28
Lainnya	1.129	0,25
Jumlah	460.069	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

Data di atas menunjukkan bahwa untuk mobilitasnya, penduduk komuter lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan moda transportasi umum. Hal ini mempunyai potensi menambah tingkat kemacetan di Kota Bekasi.

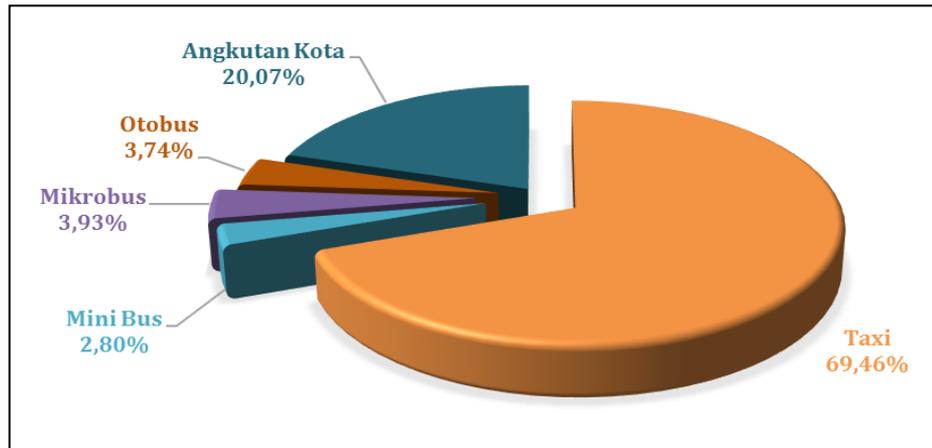
Untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum, di Kota Bekasi terdapat dua stasiun kereta api, yaitu Stasiun Kranji dan Stasiun Bekasi dan dua terminal tipe B dan C. Stasiun kereta api melayani penumpang komuter dan kereta jarak jauh. Sejak 2011, jumlah kendaraan umum selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015 terdapat 15.148 unit kendaraan umum, terdiri dari 69,46% taksi, 20,07% angkutan kota, 3,93% mikrobus, 3,74% otobus, dan 2,80% minibus.

Tabel 2.41 Banyaknya Kendaraan Umum Menurut Jenis
di Kota Bekasi, 2011-2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Taksi	5.986	6.875	7.312	9.325	10.522
Mini Bus	716	644	581	485	424
Mikrobus	425	414	496	550	596
Otobus	304	386	499	536	566
Angkutan Kota	4.487	3.762	3.383	2.985	3.040
Jumlah	11.918	12.081	12.271	13.881	15.148

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2016.

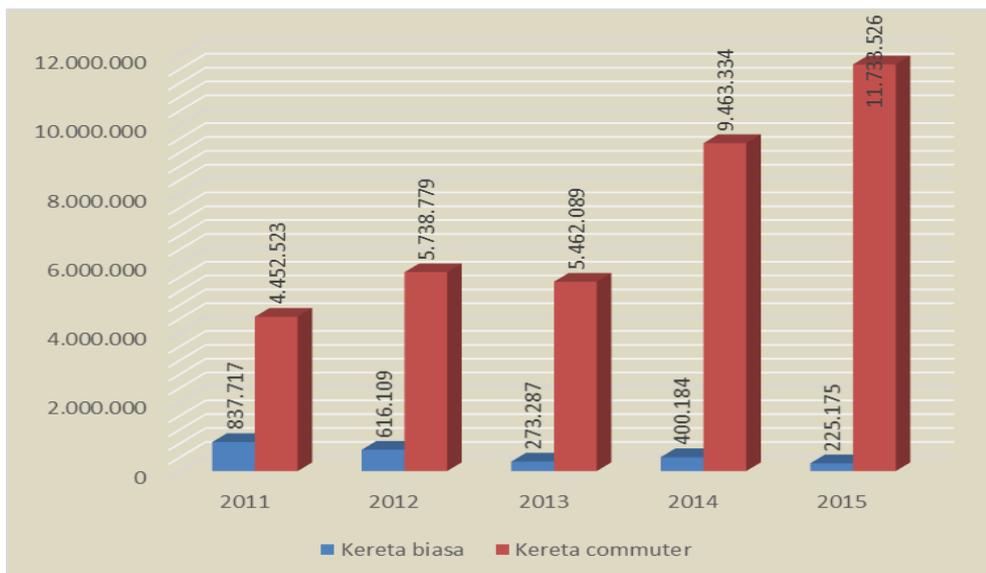
Sebagai wilayah penopang ibukota dan pusat ekonomi, angkutan penghubung antar kota di sekitar merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Di Kota Bekasi terdapat bus kota yang jumlahnya kian menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2015 terdapat 67.944 unit bus kota. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi penurunan jumlah bus kota sebesar 21,70% dari tahun 2014 sebanyak 86.775 unit.



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2016

Gambar 2.56 Presentase Kendaraan Umum Menurut Jenis, 2015

Selama kurun waktu 2011-2015 jumlah penumpang kereta komuter terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2013. Sementara jumlah penumpang kereta biasa pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan, kecuali tahun 2014.



Sumber: PT KAI KSB Bekasi, 2016

Gambar 2.57 Jumlah Penumpang KA dari Stasiun Bekasi, 2011-2015

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Kota Bekasi. Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah penerapan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan yang dimulai dengan *e-planning* dan *e-monev*. Selain itu juga telah dilakukan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, kerjasama informasi dan media massa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

p. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

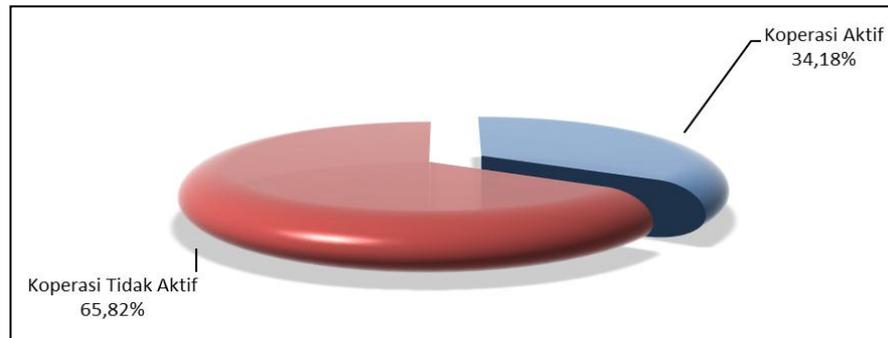
Indikator pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro menengah (UMKM) antara lain pertumbuhan dan peningkatan koperasi aktif, peningkatan jumlah UMKM, penyediaan regulasi yang mendukung UMKM dan peningkatan produk UMKM yang bersertifikat. Koperasi merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Kota Bekasi. Tahun 2015, terdapat sebanyak 846 unit koperasi di Kota Bekasi. Dari 846 unit koperasi, 63,24% atau sebanyak 535 unit merupakan koperasi lembaga kedinasan, 21,16% atau sebanyak 179 unit koperasi karyawan, 9,22% atau sebanyak 78 unit koperasi lingkungan sekolah, 6,26% atau sebanyak 53 unit koperasi fungsional, dan yang paling sedikit adalah koperasi sekunder hanya 0,12% atau sebanyak satu unit.



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.58 Persentase Jumlah Koperasi di Kota Bekasi, 2015

Dari keseluruhan jumlah koperasi, hanya 34,18% yang aktif. Selebihnya sebanyak 65,82% merupakan koperasi tidak aktif.



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.59 Presentase Keaktifan Koperasi di Kota Bekasi, 2015

q. Urusan Penanaman Modal

Dalam hal urusan peningkatan penanaman modal, terutama untuk meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perizinan satu pintu (*one gate service*) melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Selain itu juga dilakukan peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Berdasarkan data Sistem Penyediaan Informasi dan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), tercatat sebanyak 4.612 ijin perusahaan terdiri dari 41 PMA dan 271 PMDN serta data non-SPIPISE sebanyak 4.300 perusahaan pada tahun 2015.



Sumber: Bagian Kerjasama Dan Investasi Setda Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.60 Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Bekasi, 2012-2015

Secara kumulatif, total nilai investasi yang disetujui pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 6,73 triliun, meningkat 24,10% dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp 5,24 triliun. Dari nilai tersebut, nilai investasi PMA yang disetujui tahun 2015 sebesar Rp 821,22 miliar meningkat hampir dua kali lipat (93,54%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 44,32 miliar pada tahun 2014. Sedangkan nilai investasi PMDN yang disetujui pada tahun 2015 adalah sebesar RP 5,88 triliun, lebih tinggi (18,50%) dibandingkan nilai investasi PMDN tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4,96 triliun.



Sumber: Bagian Kerjasama Dan Investasi Setda Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.61 Nilai Investasi Kota Bekasi, 2011-2015 (Triliun)

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Terdapat delapan klub olahraga dan 40 organisasi olahraga di Kota Bekasi. Sebagai sarana menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga, terdapat satu gedung dan 95 lapangan olahraga yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi dengan 11 cabang olahraga berprestasi.

**Tabel 2.42
Statistika Olahraga Kota Bekasi, 2011-2015**

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah klub olahraga	Klub	0	8	8	8	8
Jumlah gedung olahraga	Gedung	2	2	1	1	1
Jumlah organisasi olahraga	Jumlah	40	40	40	40	40
Lapangan olahraga	Jumlah	47	49	54	83	95
Jumlah cabang olahraga berprestasi	Cabang Olah raga	10	11	11	11	11

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Bekasi, 2016

Sedangkan dalam hal kepemudaan, jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2015 tercatat sebanyak tujuh organisasi.

s. Urusan Kebudayaan

Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, Pemerintah Kota Bekasi fokus melaksanakan pengelolaan kekayaan budaya, salah satunya adalah pelestarian cagar budaya, situs dan monumen. Belum tersedia data terkait keberadaan cagar budaya, situs dan monument di Kota Bekasi. Sementara untuk memperkenalkan kebudayaan lokal (khas) Kota Bekasi kepada anak-anak, generasi muda, dan masyarakat secara umum, Pemerintah Kota Bekasi menggelar festival seni dan budaya setiap tahun. Pada tahun 2015, diselenggarakan sebanyak sembilan kali festival seni dan budaya. Festival ini juga sekaligus sebagai wadah bagi para pelaku seni dan 63 kelompok/grup kesenian.

t. Urusan Perpustakaan

Dalam pelayanan perpustakaan, Pemerintah Kota Bekasi memiliki koleksi 2.653 judul buku, dengan jumlah koleksi buku sebanyak 19.212 buku. Dari koleksi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Bekasi. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kota Bekasi masih rendah karena kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Bekasi akan keberadaan perpustakaan Kota Bekasi dan kondisi gedung perpustakaan yang kurang representatif. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi di tahun 2015, jumlah pengunjung perpustakaan hanya 0,18% saja, yaitu sebanyak 4.188 orang, terdiri dari 1.901 laki-laki dan 2.287 perempuan.

u. Urusan Kearsipan

Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, fungsi yang harus dilaksanakan yaitu menyimpan, memelihara, menyelamatkan, dan mengaktualisasikan kembali arsip kepada publik/masyarakat. Aktivitas kearsipan berjalan seiring dengan perkembangan aktivitas instansi, semakin dinamis aktivitas instansi, maka arsip yang tercipta semakin banyak, sehingga diperlukan pengelolaan arsip yang baik. Dengan bertambahnya instansi di Kota Bekasi, maka semakin banyak pula arsip

yang harus dikelola oleh perangkat daerah yang mengurus perpustakaan dan kearsipan di Kota Bekasi.

Pada tahun 2015, dari 43 OPD, sebanyak 21,86% telah menerapkan arsip secara baku. Pada tahun 2015, ada sebanyak 707 boks arsip yang dikelola oleh OPD yang mengurus arsip di Kota Bekasi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah arsip yang diolah pada tahun 2014, yaitu sebanyak 524 boks.

v. **Urusan Pariwisata**

Di bidang pariwisata, Kota Bekasi dikenal sebagai kota patriot karena Bekasi merupakan daerah perjuangan dan pertahanan Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Potensi wisata Kota Bekasi tidak terlalu banyak, namun demikian fasilitas yang menunjang pariwisata di Kota Bekasi cukup memadai.

Tabel 2.43
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Bekasi, 2011-2015

Tahun	Hotel Bintang	Akomodasi Lainnya	Jumlah
2011	3	21	24
2012	2	24	26
2013	2	26	27
2014	9	24	33
2015	9	24	33

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Bekasi, 2016

Di tahun ini, Kota Bekasi memiliki sembilan hotel berbintang dan 24 akomodasi lainnya. Statistik pariwisata menunjukkan bahwa persentase tingkat hunian hotel mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa banyak tamu yang menginap di Kota Bekasi. Peningkatan jumlah hotel/dan penginapan diikuti dengan meningkatnya jumlah restoran/rumah makan dan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Selama dua tahun terakhir, usaha restoran/rumah makan dan tempat hiburan meningkat cukup tajam. Jumlah restoran/rumah makan meningkat sebesar 23,12% atau sebanyak 43 buah dan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi meningkat sebesar 10,39% atau sebanyak delapan kegiatan. Untuk hotel

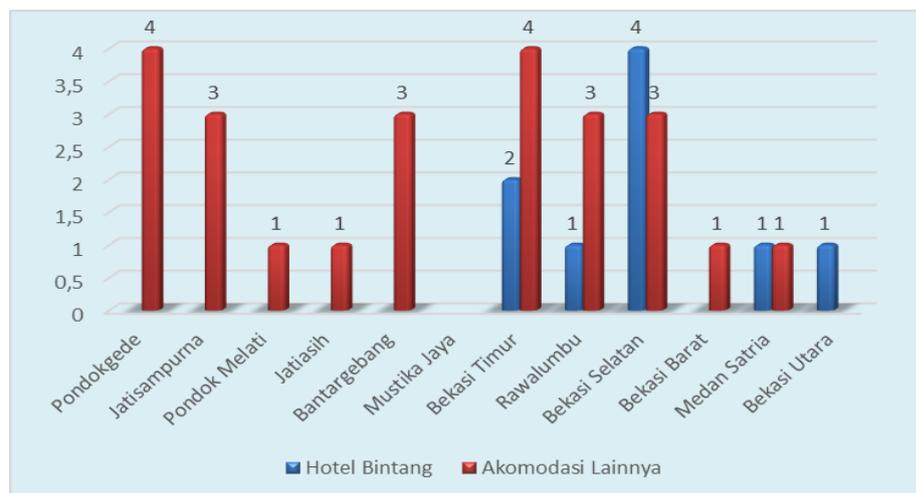
berbintang di Kota Bekasi paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Tabel 2.44
Statistika Pariwisata Kota Bekasi 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah hotel	24	26	27	33	33
Jumlah kamar hotel/penginapan	783	783	783	3.908	4.208
Jumlah restoran/rumah makan	0	0	0	186	229
Jumlah tempat hiburan dan rekreasi	0	0	0	77	85

Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi 2016

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pertumbuhan sentra bisnis dan meningkatnya berbagai sektor di Kota Bekasi termasuk sektor pariwisata. Hal ini bisa terlihat dari jumlah ijin kepariwisataan yang meningkat dari 285 ijin ditahun 2012 menjadi ijin 369 di tahun 2013. Jumlah ini kembali meningkat di tahun 2015 menjadi 396 ijin. Selain hotel dan usaha kepariwisataan lainnya di Kota Bekasi di tahun 2015 terdapat 161 ijin usaha toko moderen dan tiga ijin usaha pusat perbelanjaan. Sebagai kota metropolitan, wisata belanja merupakan salah satu daya tarik Kota Bekasi.



Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.62 Sebaran Hotel dan Penginapan Di Kota Bekasi, 2015

w. Urusan Pertanian

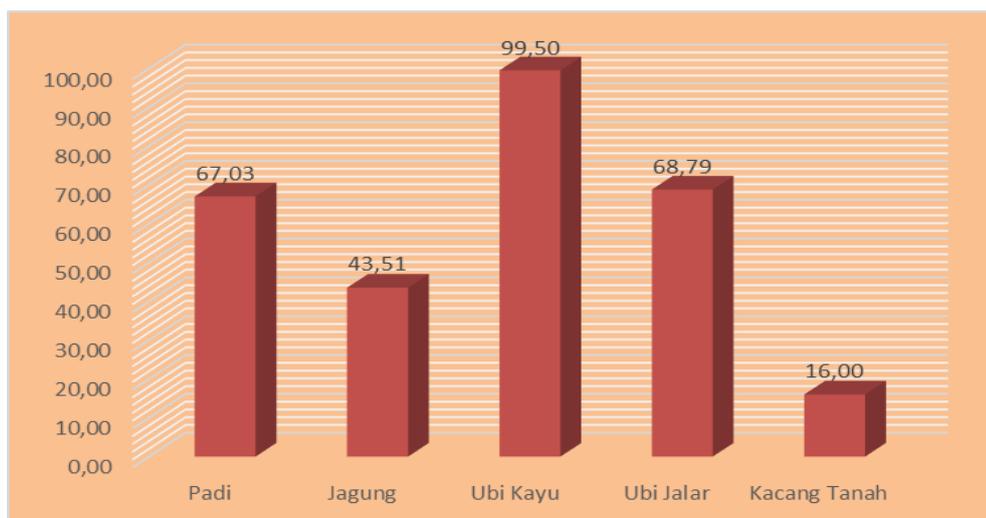
Pertanian di Kota Bekasi sulit berkembang karena terkendala oleh ketersediaan lahan yang makin terbatas. Banyaknya alih fungsi lahan makin mempersempit kegiatan pertanian di Kota Bekasi. Kondisi ini berimplikasi pada produksi pertanian yang kuantitasnya menurun.

Tabel 2.45
Statistik Pertanian Kota Bekasi, 2011-2015

Jenis Tanaman Pangan	2011	2012	2013	2014	2015
Padi					
Luas Panen (Ha)	1.009	855	749	643	544
Produksi (Ton)	5.950,79	5.230,07	4.666,64	4.245,15	3.646,43
Jagung					
Luas Panen (Ha)	55	54	47	47	35
Produksi (Ton)	180,36	177,23	151,81	152,28	152,28
Ubi Kayu					
Luas Panen (Ha)	63	52	49	66	46
Produksi (Ton)	649,67	531,08	492,06	647,06	457,7
Ubi Jalar					
Luas Panen (Ha)	40	14	11	12	13
Produksi (Ton)	372,28	131,95	104,63	81,23	89,43
Kacang Tanah					
Luas Panen (Ha)	6	9	10	15	6
Produksi (Ton)	11,66	17,04	18,45	22,5	9,6

Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Luas panen tanaman padi pada tahun 2015 sebesar 544 ha dengan produksi sebesar 3.646,43 ton, dan produktivitas per hektar 67,03 kw/ha. Produksi tersebut selalu menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Masing-masing produksinya pada tahun 2015 yaitu 152,28 ton, 457,70 ton, 89,43 ton, dan 9,60 ton.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.63 Produktivitas Tanaman Pangan Kota Bekasi (Kw/Ha), 2015

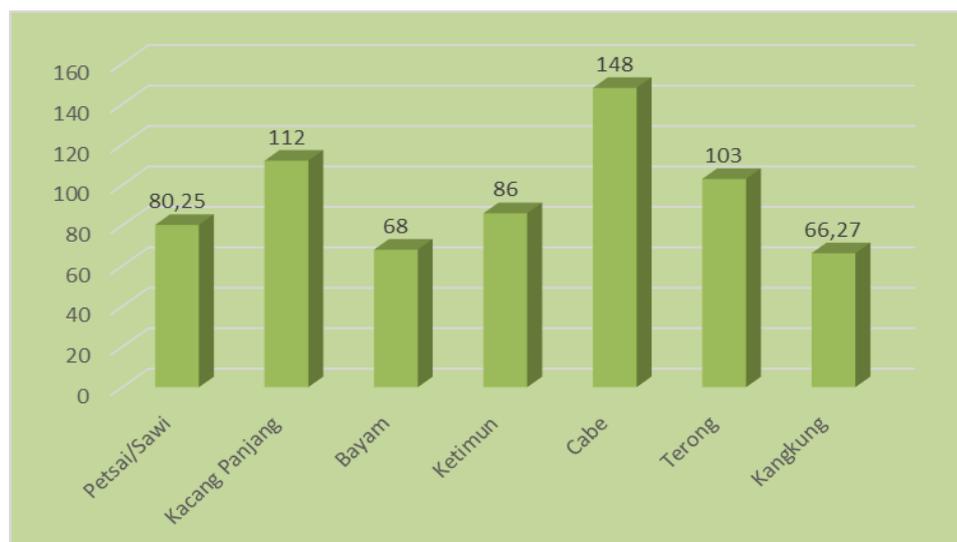
Produksi tanaman sayur yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2015 petsai/sawi mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada jenis tanaman kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong dan kangkung.

**Tabel 2.46
Produktivitas Tanaman Sayur di Kota Bekasi, 2011-2015**

Sayuran	2011	2012	2013	2014	2015
Petsai/Sawi	3.616,40	3.504,80	2.761,90	21.661,10	2.126,63
Kacang Panjang	86	195,38	206,2	143	179,2
Bayam	3.559,65	3.456,55	2.414,30	2.860,00	3.413,60
Ketimun	21	28	15,3	16,8	25,8
Cabe	120,81	74,04	40	88,2	251,6
Terong	56,5	22,48	91,9	61,2	103
Kangkung	4.348,26	3.826,06	2.368,20	3.081,45	3.518,94

Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Pada tahun 2015 produksi kangkung merupakan produksi terbesar yaitu sebesar 3.518,94 ton dengan produktivitas 66,27 kw/ha. Kemudian diikuti oleh produksi bayam sebanyak 3.413,6 ton dengan produktivitas 68 kw/ha. Produksi ketimun pada tahun 2015 memiliki produksi paling sedikit dibandingkan dengan produksi tanaman sayuran lainnya. Sementara cabe merupakan tanaman sayur dengan produktivitas tertinggi, yaitu mencapai 148 kw/ha.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.64 Produktivitas Tanaman Sayur Kota Bekasi (Kw/Ha) Tahun 2015

Produksi tanaman buah di Kota Bekasi menunjukkan perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun ada kecenderungan peningkatan produksi di tahun 2015. Jenis tanaman jeruk siam, durian, jambu biji, manga, sawo, pepaya dan rambutan mengalami kenaikan produksi. Sedangkan jenis tanaman duku dan pisang mengalami penurunan produksi. Buah paling banyak produksinya adalah pepaya, mencapai 4.710,75 ton dan yang paling rendah adalah duku dengan produksi 55,87 ton di tahun 2015. Secara detil produksi tanaman buah di Kota Bekasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.47
Produksi Tanaman Buah di Kota Bekasi (Ton), 2011-2015**

Jenis Tanaman Buah	2011	2012	2013	2014	2015
Jeruk siam	2,70	1,94	2,80	4,79	285,92
Durian	51,97	136,19	309,40	93,87	312,07
Duku	613,55	105,29	368,00	71,86	55,87
Jambu Biji	986,74	1.096,18	483,70	634,80	1.719,24
Mangga	131,76	266,22	853,90	621,29	1.450,27
Sawo	201,38	57,13	159,60	27,99	706,06
Pepaya	265,77	364,81	920,90	2.273,60	4.710,75
Pisang	207,85	71,16	721,50	3.067,83	2.617,00
Rambutan	2.006,87	1.113,45	2.147,70	668,84	1.507,03

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi 2016

Ada dua komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kota Bekasi, yaitu jahe dan kencur. Luas lahan dan produksi jahe mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Tahun 2011-2013 luas lahan dan produksi cenderung mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat di tahun 2014 dan 2015.

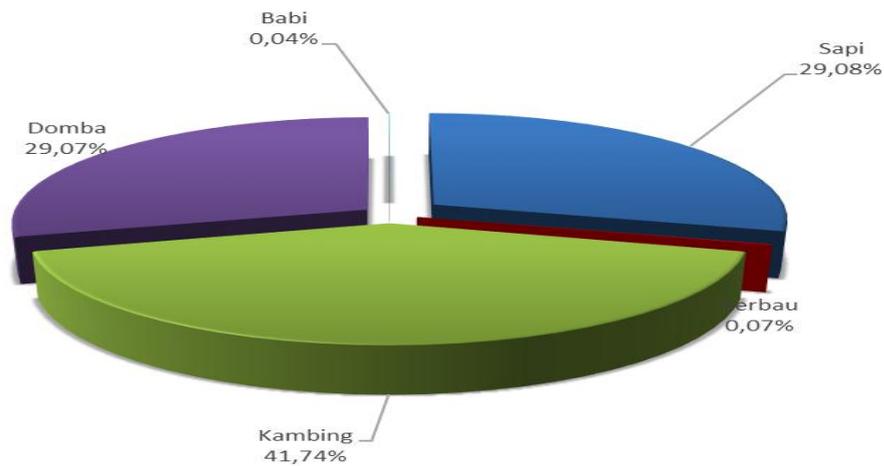
Tabel 2.48
Statistik Perkebunan Kota Bekasi, 2011-2015

Jenis Tanaman Perkebunan	2011	2012	2013	2014	2015
Jahe					
Luas tanam (ha)	5,66	1,11	0,4	0,74	1,98
Produksi (Ton)	207,33	35,68	12,96	23,97	60,44
Kencur					
Luas tanam (ha)	3,48	3,87	0,7	1,05	1,29
Produksi (Ton)	78,62	68,97	12,56	18,82	25,42

Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Tahun 2015 terdapat 1,98 ha lahan perkebunan jahe dengan produksi sebesar 60,44 ton. Sedangkan untuk jenis tanaman kencur juga fluktuatif. Sama halnya dengan jahe, kencur juga mempunyai kecenderungan penurunan luas lahan dan produksi di tahun 2011-2013 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2014 dan 2015. Tahun 2015 terdapat lahan perkebunan kencur seluar 1,29 ha dengan produksi sebesar 25,42 ton.

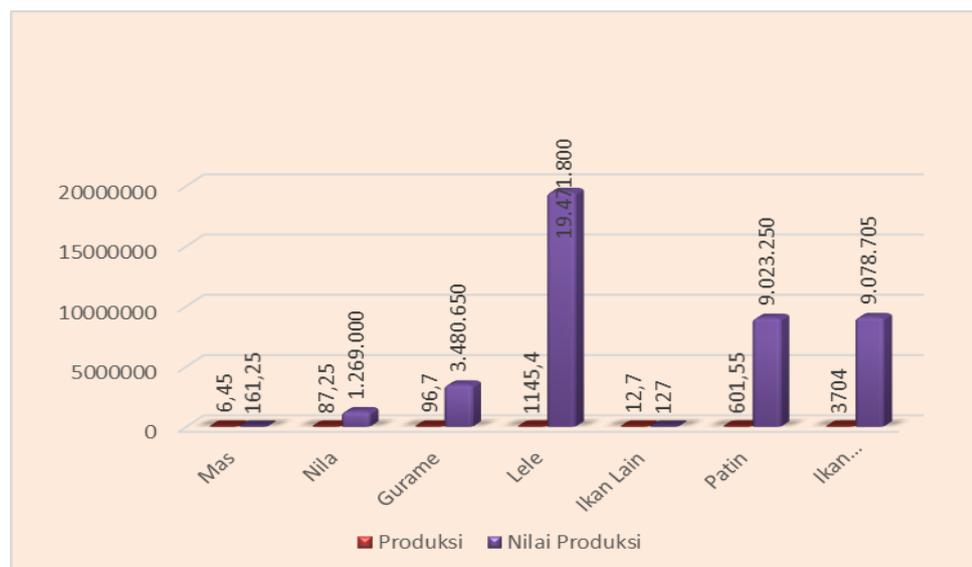
Kota Bekasi merupakan kota dengan jumlah penduduk yang padat. Kebutuhan konsumsi penduduk akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian produksi hasil ternak perlu terus dikembangkan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.65 Persentase Produksi Daging Ternak di Kota Bekasi 2015

Berdasarkan data Dinas Perekonomian Rakyat, pada tahun 2015 ternak sapi dan sapi perah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya masing-masing sebanyak 1.804 ekor dan 30 ekor. Sedangkan ternak lain, seperti kerbau, domba, babi dan kuda mengalami penurunan, masing-masing sebanyak 147 ekor, 2.228 ekor, 52 ekor, dan 10 ekor. Ternak kambing mengalami penurunan dibandingkan lainnya yaitu sebanyak 13.750 ekor. Ayam ras pedaging merupakan unggas yang produksi dagingnya paling banyak di Kota Bekasi yaitu sebanyak 4.850.120 kg pada tahun 2015. Sedangkan itik merupakan daging unggas paling sedikit produksinya di Kota Bekasi hanya sebanyak 31.518 kg.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

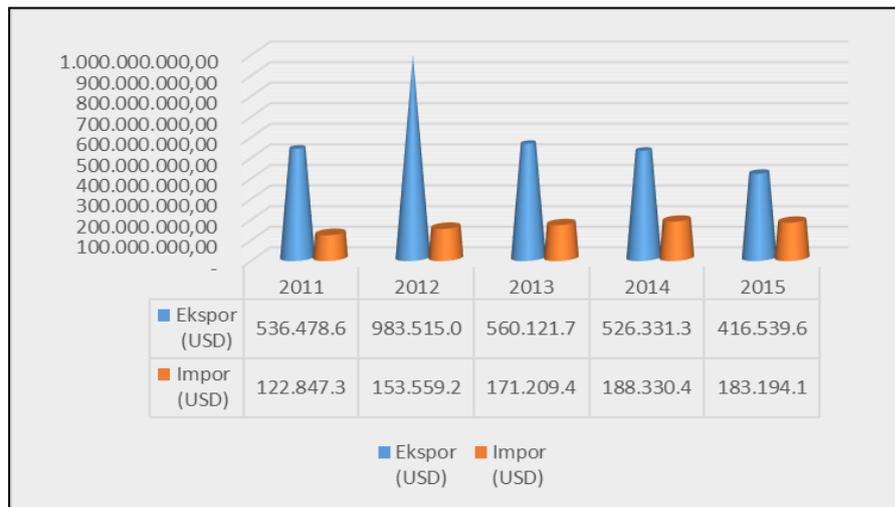
**Gambar 2.66 Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (ribu)
Perikanan Darat Kota Bekasi, 2015**

Dari sektor perikanan produksi ikan terbanyak berasal dari jenis ikan hias yaitu sebanyak 3704 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 9.078.705.000. Produksi terbanyak kedua berasal dari jenis ikan lele sebanyak 1.145,40 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 19.471.800, dan produksi terbanyak ketiga berasal dari jenis ikan patin dengan produksi sebanyak 601,55 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 9.023.250.000.

x. **Urusan Perdagangan**

Perdagangan memiliki peranan penting dalam distribusi barang dari produsen ke konsumen. Sebagai daerah yang ditunjang sektor perdagangan dan jasa, perdagangan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi. Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan dan pengembangan ekspor, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, pembinaan pedagang kaki lima, asongan, penataan prasarana, dan peningkatan pelayanan pasar.

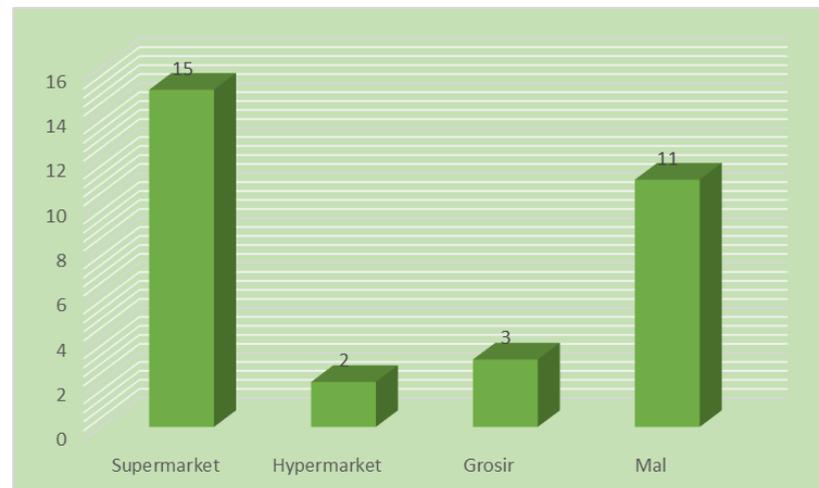
Perdagangan di Kota Bekasi terbagi atas perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, perkembangan ekspor dan impor luar negeri berfluktuatif. Nilai ekspor luar negeri sejak 2013 terus mengalami penurunan setelah meningkat cukup tajam pada tahun 2012. Sementara nilai impor cenderung meningkat tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai ekspor luar negeri yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi sebesar US\$ 416.539.629,64 sementara nilai impor luar negeri mencapai US\$ 183.194.124,78.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.67 Perkembangan Ekspor-Impor Kota Bekasi, 2011-2015

Potensi pasar di Kota Bekasi tercemin dari tersedianya sarana perdagangan. Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi mencatat, jenis sarana perdagangan besar yang paling banyak terdapat di Kota Bekasi adalah supermarket. Pada tahun 2015 jumlah supermarket yang ada di Kota Bekasi sebanyak 15 unit. Kemudian mal sebanyak 11 unit, grosir sebanyak tiga unit, dan *hypermarket* sebanyak dua unit.



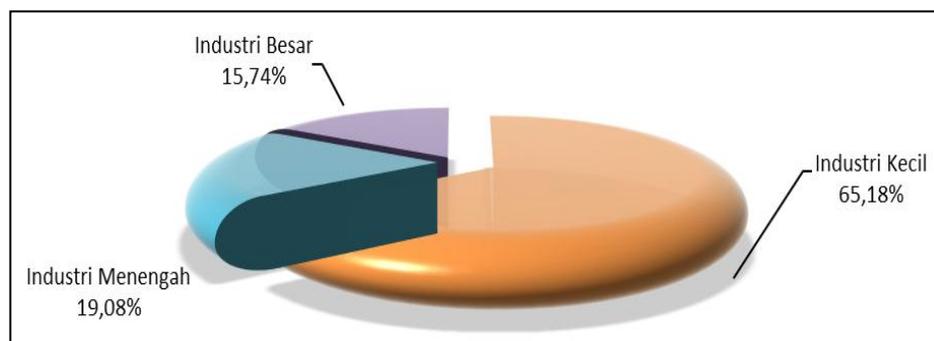
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.68 Sarana Perdagangan Besar di Kota Bekasi, 2015

y. Urusan Perindustrian

Urusan ini merupakan salah satu urusan yang memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Kota Bekasi. Pada urusan ini telah dilaksanakan beberapa

program antara lain peningkatan kemampuan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah dan pengembangan sentra-sentra industri potensial.



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

Gambar 2.69 Persentase Industri di Kota Bekasi, 2015

Secara umum, perkembangan industri di Kota Bekasi sejak tahun 2011 sampai 2014 jumlah industri besar sedang terus mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.49
Perkembangan Jumlah Perusahaan Yang Mendapat SIUP
Di Kota Bekasi Tahun 2011-2015

Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
1. Januari	-	227	82	202	362
2. Februari	535	469	360	251	326
3. Maret	225	353	364	264	351
4. April	395	298	392	352	433
5. Mei	388	339	384	270	396
6. Juni	280	112	304	361	338
7. Juli	316	435	373	326	340
8. Agustus	217	266	151	224	250
9. September	197	245	257	353	350
10. Oktober	299	364	279	431	345
11. Nopember	210	364	324	279	368
12. Desember	277	517	447	509	441
Jumlah	3.339	3.989	3.717	3.822	4.300

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2016.

Terdapat 1.950 usaha industri, terdiri dari 65,18% industri kecil, 19,08% industri menengah dan 15,74% industri besar. Industri ini mampu menyerap 7.433 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi sebesar Rp 505.717.074.116,-. Industri

menengah menyerap paling banyak tenaga kerja, yaitu sebesar 44,06%. Industri besar menempati urutan kedua, menyerap sebesar 40,20% tenaga kerja. Dan industri kecil mampu menyerap 15,74% tenaga kerja.

Pertumbuhan investasi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui beberapa indikator, indikator pertama untuk mengukur tingkat pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah jumlah pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap tahunnya. Sejak tahun 2011, pemohon SIUP cenderung mengalami peningkatan, kecuali tahun 2013. Pada tahun 2011, terjadi penurunan permohonan SIUP sebesar 8,59% dan kembali meningkat pada tahun 2012 sebesar 19,47% atau sebanyak 3.989 permohonan. Pada tahun 2013, kembali mengalami penurunan sebesar 6,82% atau sebanyak 3.717 pemohon. Pada tahun 2014 kembali mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,82% atau sebanyak 3.822 pemohon, dan tahun 2015 meningkat sebesar 12,51% atau sebanyak 4.300 pemohon.



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

Gambar 6.70 Penambahan Industri Menurut Jenisnya Tahun 2015

Dilihat dari jenis industri, pada tahun 2015 di Kota Bekasi terdapat 88 unit usaha industri baru dengan nilai investasi sebesar Rp 224.689.632.249,00 dan mampu menyerap 2.068 tenaga kerja. Dari 88 perusahaan tersebut, 28 unit merupakan industri logam mesin dan elektronik (ILME) dengan nilai investasi sebesar Rp 58.024.306.878,00 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 659 orang. Industri agro dan hasil hutan (IAHH) sebanyak 26 unit dengan nilai investasi sebesar Rp 54.190.018.908,00 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 644 orang. Dan yang

terbanyak adalah industri kimia teknik dan aneka (IKTA) 34 unit dengan nilai investasi sebesar Rp 112.475.306.463,00 menyerap tenaga kerja sebanyak 765 orang.

Tabel 2.50
Nilai Investasi Berdasarkan Kategori Industri
Di Kota Bekasi Tahun 2015

Jenis Industri	Unit Usaha		Investasi (Rp)		Tenaga Kerja	
	Baru	Daftar Ulang	Baru	Daftar Ulang	Baru	Daftar Ulang
I. Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME)						
Industri Kecil	2	2	261,780,000	319,200,000	15	99
Industri Menengah	16	15	13,526,225,000	14,126,030,684	299	633
Industri Besar	10	6	44,236,301,878	37,904,220,500	345	191
Total	28	23	58,024,306,878	52,349,451,184	659	923
II. Industri Agro dan Hasil Hutan (IAHH)						
Industri Kecil	6	1	848,630,000	170,000,000	52	22
Industri Menengah	12	18	20,342,284,908	17,881,185,683	385	866
Industri Besar	8	4	32,999,104,000	86,409,600,000	207	487
Total	26	23	54,190,018,908	104,460,785,683	644	1.375
III. Industri Kimia Teknik dan Aneka (IKTA)						
Industri Kecil	8	4	48,120,895,000	84,290,000,000	66	916
Industri Menengah	19	20	28,300,806,416	15,264,205,000	333	759
Industri Besar	7	5	36,053,605,047	24,663,000,000	765	993
Total	34	29	112,475,306,463	124,217,205,000	1.164	2.668

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

z. **Urusan Perencanaan**

Pada hakekatnya, perencanaan merupakan serangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi. Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi dan bersifat akumulatif, atau sebagai arahan bagi proses pembangunan agar berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan, diharapkan ada satu pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.

Urusan perencanaan di Kota Bekasi difokuskan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial budaya, perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam, peningkatan

kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan data/informasi. Keberhasilan perencanaan ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan sektoral, persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan sektoral, persentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD, persentase kesesuaian program RKPD dengan APBD, jumlah aparatur perencana yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktifitas, serta presentase jumlah data primer dan sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaru presentase jumlah data primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaru. Sejauh ini, penyelenggaraan urusan perencanaan terselesaikan 100 persen.

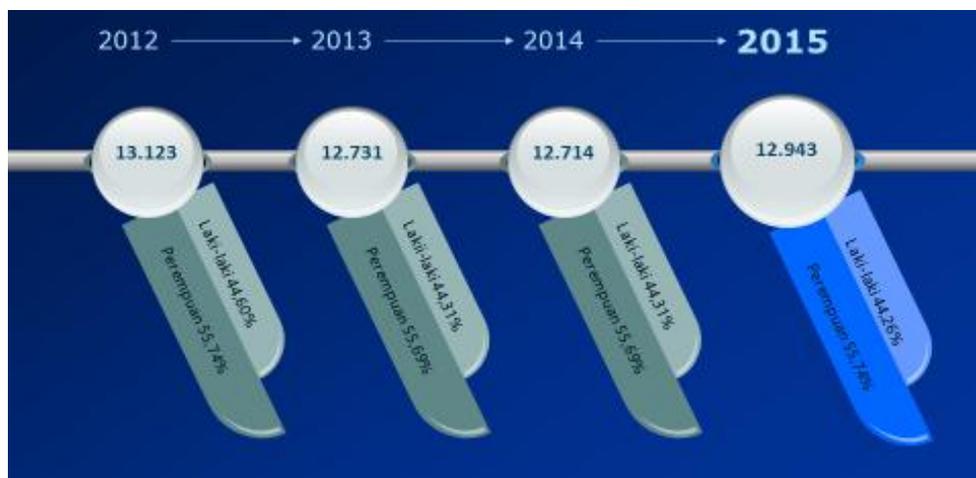
aa. Urusan Keuangan

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dilaksanakan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah telah membuahkan hasil dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016.

bb. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi mengembangkan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan dan pengembangan aparatur. Pada tahun 2015 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota Bekasi mencapai 12.940 pegawai. Jika melihat tren jumlah PNS di Kota Bekasi, bisa dikatakan

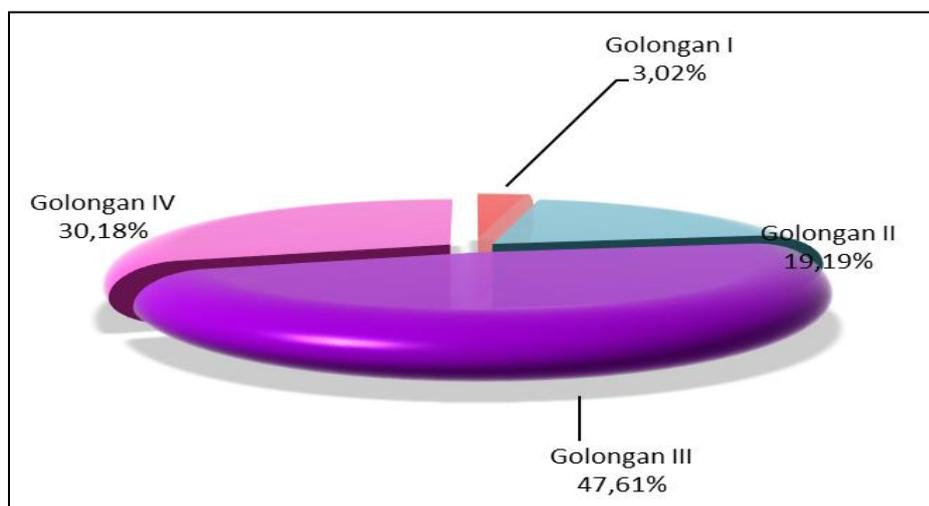
menurun dari tahun ke tahun, hanya terdapat penambahan sedikit yang satunya disebabkan terdapat mutasi PNS yang masuk ke Pemerintahan Kota Bekasi.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi 2016

Gambar 2.71 Tren PNS di Kota Bekasi Menurut Jenis Kelamin (2012-2015)

Penurunan ini disebabkan tidak adanya penerimaan PNS pada tahun tersebut. Pada tahun 2012 jumlah PNS di Kota Bekasi tercatat sebanyak 13.123 pegawai, turun menjadi 12.731 pegawai pada 2013, turun lagi menjadi 12.714 pegawai pada tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12.940 pegawai.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi 2016

Gambar 6.72 Persentase PNS Kota Bekasi Menurut Golongan, 2015

Jika dilihat dari tren jenis kelamin, jumlah PNS di lingkungan Kota Bekasi dari tahun 2012 hingga 2015 menunjukkan bahwa pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki, yakni berada di kisaran 56% pegawai perempuan

dan 44% pegawai laki-laki. Berdasarkan kelompok golongan, sebagian besar pegawai di lingkungan Kota Bekasi merupakan Golongan III, yaitu sebesar 47,61%, diikuti Golongan IV sebesar 30,18%, Golongan II sebesar 19,19% dan Golongan I sebesar 3,02%.

Jika dilihat dari kelompok umur pegawai, sebagian besar PNS di lingkungan Kota Bekasi ada di usia 51-60 tahun, yaitu sebesar 36,10% dari total jumlah pegawai di tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 62,17% merupakan Golongan IV. Pada tahun 2015, terdapat sebanyak 11,80% pegawai berada pada kelompok umur 56-60 tahun. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ada cukup banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.



Sumber: Analisis Profil Daerah Kota Bekasi 2016

Gambar 2.73 Persentase PNS Kota Bekasi Menurut Kelompok Umur, 2015

Sementara itu, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan diukur dengan indikator keikutsertaan pejabat struktural dalam pendidikan sesuai dengan tingkatan eselonnya dan standar kompetensi teknis fungsional.

cc. Urusan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Urusan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi meliputi:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Program Implementasi Peran Konsultatif dan *Quality Assurance* Inspektorat;

3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Ppengawasan;
4. Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah;
5. Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur;
9. Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Perkantoran;
10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
11. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
13. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
14. Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan; dan
15. Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara agregat, konsumsi merupakan penjumlahan dari pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui total pengeluaran

suatu perekonomian, maka akan dapat diketahui beberapa masalah penting yang muncul dalam perekonomian, seperti pemerataan pendapatan, efisiensi penggunaan sumberdaya dalam suatu perekonomian, masalah-masalah lainnya. Dengan demikian, kita dapat menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagai kota yang memiliki letak cukup strategis sebagai *comercial city* merupakan potensi yang cukup besar untuk dapat membuka peluang investasi di bidang jasa dan perdagangan. Jaminan kondusifitas iklim investasi oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Kota Bekasi. Oleh karena itu beberapa hal pokok yang telah dan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi antara lain peningkatan keamanan, kepastian hukum, kemudahan proses perizinan investasi, peningkatan infrastruktur, mekanisme ketenagakerjaan, peningkatan kualitas lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang terukur. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa potensi yang merupakan unggulan dari Kota Bekasi dapat menjadi daya saing bagi daerah lain serta dapat menjadi alasan mengapa berinvestasi di Kota Bekasi antara lain:

a. Potensi Perdagangan

Kota Bekasi tumbuh menjadi kota perdagangan yang maju dan berkembang sejalan dengan upaya pemerintah kota bekasi meningkatkan berbagai aspek kenyamanan berinvestasi di Kota Bekasi. Titik tolak hal tersebut adalah dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan melalui BPPT dioptimalkan dengan pembentukan *standard operating prosedure* (SOP) untuk setiap perizinan.

Peningkatan aktivitas perdagangan di Kota Bekasi dapat dilihat dari perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) setiap tahunnya.

Tabel 2.51
Perkembangan TDP di Kota Bekasi, 2011-2015

Jenis Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015
1. PT	1.869	2.098	1.884	2.276	1.820
2. Koperasi	66	52	36	36	28
3. CV	1.415	1.682	1.530	1.445	1.037
4. PO	695	582	723	653	622
5. Badan Usaha Lainnya	3	8	-	2	2
Jumlah	4.048	4.422	4.173	3.759	3.509

Sumber: BPPT Kota Bekasi

Sentra utama kawasan perdagangan di Kota Bekasi terletak di Jl. Ahmad Yani yang dapat dilihat dari keberdaan berbagai toko dan mal. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan KH. Noer Ali (Kalimalang), Kranji, dan Harapan Indah. Beberapa pusat perbelanjaan, seperti Mal Metropolitan, Mega Bekasi *Hypermall*, *Revo Town*, Plaza Pondok Gede, *Grand Mal*, Bekasi *Cyber Park*, *Bekasi Trade Centre*, *Carrefour*, *Giant*, *Makro*, dan *Hypermart*.

Selain itu, potensi perdagangan di Kota Bekasi bukan hanya terlihat dari berkembangnya pertokoan tetapi juga relatif berkembangnya nilai ekspor perdagangan Kota Bekasi.

Tabel 2.52
Perkembangan Ekspor - Impor Kota Bekasi, 2008-2015

Tahun	Nilai (USD)	
	Ekspor	Impor
2008	183.070.855,60	52.493.273,75
2009	268.158.088,20	63.790.255,84
2010	315.480.103,77	66.403.991,29
2011	536.478.650,91	122.847.383,89
2012	983.515.065,83	153.559.229,86
2013	560.121.757,28	171.209.462,41
2014	526.331.378,12	188.330.408,65
2015	416.539.629,64	183.194.124,78

Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, 2015

Bidang perdagangan melayani dokumen ekspor yaitu Surat Keterangan asal (SKA) atau CO yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan preferensi

di negara tujuan. SKA dapat diterbitkan disetiap instansi penerbit SKA yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan bukan berdasarkan wilayah. Peningkatan ekspor yang dimulai pada tahun 2013 dan berlanjut tahun 2014 dikarenakan ada beberapa eksportir besar pindah pengurusan SKA dari kabupaten bekasi ke Kota Bekasi karena perubahan system e- SKA (pelayanan SKA secara elektronik melalui internet). Hal tersebut menunjukkan bahwa produk usaha dari Kota Bekasi banyak diminati oleh pihak luar.

Pada tahun 2015 nilai ekspor menurun dikarenakan data belum seluruhnya diserahkan oleh Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Data yang diserahkan pada Pemerintah Kota Bekasi terhitung sejak bulan November 2015.

b. Potensi Koperasi

Perkembangan koperasi di Kota Bekasi sejak tahun 2011 dapat digambarkan dalam uraian berikut. Pada tahun 2011 Koperasi di Kota Bekasi berjumlah 840 Koperasi, kemudian di tahun 2012 menembus jumlah 897 koperasi atau meningkat 6,79% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2013 meningkat sebesar 3,45% dari tahun sebelumnya menjadi 928, tahun 2014 meningkat kembali menjadi 954 koperasi atau mengalami peningkatan 2,8%, begitu juga pada tahun 2015 koperasi di Kota Bekasi mengalami peningkatan menjadi 986 atau sebesar 3,35%.

Tabel 2.49.
Perkembangan Jumlah Koperasi

TAHUN	JUMLAH KOPERASI
2011	840
2012	897
2013	928
2014	954
2015	986

Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, 2015

Berkembangnya koperasi di Kota Bekasi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam berbagai hal antara lain:

- Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi perkoperasian dilingkungan masyarakat;
- Tingginya minat/animo masyarakat membangun ekonomi rakyat dalam bentuk badan hukum koperasi;
- Program kegiatan penataan badan hukum sebagai jalan baik sehingga peningkatan jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif, dan pemacuan terhadap peningkatan kualitas koperasi dilaksanakan secara optimal melalui langkah-langkah:
 - peningkatan SDM pengelola koperasi;
 - peningkatan kemitraan;
 - peningkatan permodalan koperasi;
 - peningkatan system dan organisasi koperasi;
 - peningkatan akses teknologi yang berbasis *software*;
 - peningkatan kerjasama antar koperasi; dan
 - peningkatan sosialisasi perkoperasian bagi tokoh, masyarakat dan pemerintah, kelompok-kelompok mitra strategis.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga telah menetapkan kebijakan serta target-target perkembangan koperasi melalui berbagai program dan kegiatan antara lain:

- Program yang disusun diarahkan untuk pembinaan dalam rangka mewujudkan koperasi tetap eksis berkembang;
- Program disusun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertarik untuk berkoperasi, sehingga jumlah koperasi bertambah terus;
- Pembinaan yang berlanjut kepada gerakan koperasi;
- Perhatian pemerintah daerah dalam menunjang tumbuh kembangnya koperasi di Kota Bekasi, melalui penyediaan anggaran yang terus bertambah;

- Membina hubungan yang harmonis dengan Dekopinda Kota Bekasi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan perkoperasian di Kota Bekasi.

c. Potensi UMKM

Pelayanan serta pembinaan terhadap sektor UMKM yang ada di Kota Bekasi terus menerus diupayakan sampai pada titik optimal. Hal ini dilaksanakan melalui diambilnya kebijakan- kebijakan yang dapat membantu tumbuh dan berkembangnya sektor ini. Kebijakan dan upaya yang dilakukan antara lain:

- Mendata UMKM secara berkelanjutan baik yang aktif maupun tidak aktif;
- Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan nilai produk-produk UMKM;
- Melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia para UMKM; dan
- Mengikuti sertakan para UMKM melalui gelar produk dan pameran untuk memperkenalkan produk UMKM.

Dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut munculah sikap penggiat UMKM di Kota Bekasi yang responsif terhadap perkembangan UMKM dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, seperti:

- Mendaftarkan diri ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UMKM Kota Bekasi untuk menjadi binaan;
- Secara berkelanjutan aktif dalam mengikuti informasi-informasi tentang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri dalam menunjang keikutsertaan UMKM dalam berbagai aktivitas; dan
- Mengurus ijin berupa SIUP dan TDP dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UMKM.

Pada akhirnya, dapat dirasakan pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Bekasi menjadi hal yang nyata.

Tabel 2.53
Pertumbuhan UMKM Kota Bekasi 2011-2015

Tahun	Jumlah UMKM	Pertumbuhan (%)
2011	945	7,26
2012	1.057	11,85
2013	1.226	15,99
2014	1.431	16,72
2015	1.756	18,51

Sumber : Disperindagkop Kota Bekasi, 2015

Jenis usaha UMKM yang menjadi potensi keunggulan Kota Bekasi yaitu UMKM Boneka. IKM Boneka merupakan salah satu IKM yang mengalami pertumbuhan pesat. Hingga tahun 2015 tercatat 60 IKM inti dengan beberapa IKM plasma didalamnya. Total produksi per tahun mencapai 6,5 juta *pieces*, dan sudah dipasarkan ke berbagai mancanegara antara lain Malaysia, Brunei, dan Korea Selatan.

Perkembangan IKM Boneka semakin didukung dengan diberlakukannya SNI wajib bagi mainan anak di tahun 2014. Dengan diberlakukan SNI wajib ini semakin mendorong IKM Boneka Kota Bekasi untuk mampu bersaing dengan boneka-boneka produksi luar negeri. Disperindagkop Kota Bekasi sendiri mendukung pemberlakuan SNI wajib bagi mainan anak ini dengan cara memfasilitasi IKM Boneka Kota Bekasi untuk mendapatkan SNI wajib. Di tahun 2014 ini tercatat 10 IKM sudah mendapatkan SNI. Di tahun 2015, SNI yang difasilitasi Pemerintah Kota Bekasi terhadap pelaku usaha yaitu sebanyak 12 sertifikat.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah

bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK 2011-2031 bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah meliputi:

1. Pengembangan system pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN, meliputi:
 - Menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - Mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara & Tengah;
 - Mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan;
 - Mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;
 - Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan
 - Menetapkan PPK, SPPK dan PPL.
2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan system transportasi Jabodetabek, meliputi:
 - Meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol;
 - Mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi masal Jabodetabek;
 - Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki dari jaringan jalan;

- Membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
 - Mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
 - Menyediakan angkutan umum massal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah dan mengembangkan terminal dan sub-terminal yang ada di Kota Bekasi; dan
 - Mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke sub-pusat pelayanan kota lainnya.
3. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, meliputi:
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air minum; dan
 - Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air minum.
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, meliputi:
- Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses *Reduced, Reused, Recycled* (3R);
 - Mengembangkan teknologi pengolahan sampah;
 - Mengembangkan jaringan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu;
 - Mengembangkan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi, meliputi:
- Membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ sebagai daerah penampungan air;
 - Menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air; dan
 - Menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota.

6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu, meliputi:
 - Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan telekomunikasi; dan
 - Menata dan mengembangkan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu.
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal, meliputi:
 - Menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat;
 - Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung;
 - Merehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan; dan
 - Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi.
8. Perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi, meliputi:
 - Memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
 - Mengembangkan RTH di sekeliling zona Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) DKI Bantargebang;
 - Mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
 - Revitalisasi RTH;
 - Penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu;
 - Meningkatkan jumlah RTH privat melalui penetapan KDH minimal 10% pada setiap kavling lahan; dan
 - Menerapkan mekanisme insentif/disinsentif dalam penyediaan RTH privat.

9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, meliputi:
- Mengembangkan kawasan peruntukan perumahan berdasarkan kepadatan tinggi, sedang dan rendah;
 - Mengarahkan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi pada pengembangan pola-pola hunian vertikal;
 - Menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - Meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal;
 - Mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap ijin pembangunan perumahan;
 - Mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan
 - Mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat IPAL komunal, mengelola sampah komunal secara 3R, dan menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.
10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi, meliputi:
- Mewajibkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengelola limbah cair, padat maupun gas hingga mencapai kualitas baku mutu lingkungan yang disyaratkan, dan melakukan pengelolaan bahan B3 dan limbah B3;
 - Mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih;

- Mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
 - Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan industri untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.
11. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal, meliputi:
- Mengendalikan dan menertibkan pusat belanja yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;
 - Membatasi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara linier pada ruas jalandengan tingkat pelayanan rendah;
 - Mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi;
 - Mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - Merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurunkan kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;
 - Mengatur dan menata ulang pasar-pasar tradisional;
 - Mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal;
 - Mengkonsentrasikan kegiatan perdagangan dan jasa pada lokasi yang sudah berkembang;
 - Mewajibkan para pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk mengelola limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah secara 3R; dan
 - Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.
12. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya, meliputi:

- Pembentukan kawasan pariwisata ke dalam dua wilayah yaitu Kota Bekasi utara dan Kota Bekasi selatan; dan
 - Pembagian sub-pengembangan pariwisata menurut wilayah yang membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata olah raga dan wisata budaya.
13. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi, dilakukan melalui strategi pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertambangan.
14. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu, meliputi:
- Penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - Pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

Adapun kebijakan struktur ruang meliputi:

1. Sistem Pusat Pelayanan
- Penetapan PPK, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan, yang meliputi kawasan Jalan Sudirman - Juanda - Cut Meutia - Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi.
 - Penetapan SPPK meliputi:
 - SPPK Pondok Gede disekitar Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
 - SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira,

Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat perdagangan;

- SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;
 - SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang), dengan penyediaan pembangunan *-buffer zone-* yang dapat berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.
- Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan, meliputi Kecamatan Medan Satria berpusat di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Barat berpusat di Kelurahan Bintara, Kecamatan Jatiasih berpusat di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna dan Kecamatan Bantargebang berpusat di Kelurahan Bantargebang.

Ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Bekasi cukup memadai. Selain dilintasi jalan arteri, baik primer maupun sekunder, Ketersediaan infrastruktur jalan menjadi daya dukung bagi ketersediaan moda transportasi yang beroperasi 24 jam di Kota Bekasi.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan terselenggara baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta meminimalisir kuantitas dan kualitas kriminalitas. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk. Tingkat kriminalitas di Kota Bekasi selama 2008-2013 mengalami fluktuasi menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2011 tercatat 3,616 kasus, tahun 2012 meningkat sedikit menjadi 3.648 (0,89%), tahun 2013 kembali turun 2,60% menjadi 3.553, tahun 2014 turun sebesar 7,37% menjadi 3.291 kasus dan terakhir tahun 2015 turun cukup besar, yaitu 32% menjadi 2.238 kasus. Ini menunjukkan *trend* bahwa angka kriminalitas di Kota Bekasi cenderung menurun dari waktu ke waktu. Artinya bahwa Kota Bekasi semakin kondusif dan aman.

Tabel 2.53
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kota Bekasi, 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pembunuhan	6	3	4	3	3
Penganiayaan	210	256	261	226	203
Penganiayaan Ringan	40	31	-	39	49
Perampokan	354	70	-	44	34
Pencurian	955	813	894	795	130
Perkosaan	2	1	4	4	3
Penipuan	559	598	652	658	731
Penggelapan	223	256	269	171	285
Peras Ancam	60	59	62	59	80
Pengrusakan	41	52	44	57	52
Penculikan	4	5	4	2	1
Penyerobotan Tanah	21	26	25	39	44
Pemalsuan Surat	45	33	41	55	62
Narkotika	360	325	295	285	339
Lain- lain	736	1.120	998	854	222
Jumlah	3.616	3.648	3.553	3.291	2.238

Sumber: Polres Metro Bekasi dalam Profil Daerah Kota Bekasi 2016.

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Analisis kinerja atas sumberdaya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja

Tenaga kerja di Kota Bekasi masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan kurang dari S1, yaitu mencapai 94,03 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 5,97 persen merupakan lulusan S1 dan S2.

Tabel 2.54.
Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bekasi
Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Lulus	12	9	21
2.	SD	61	82	143
3.	SMP	240	354	594
4.	SMU/SMA	2.752	2.824	5.576
5.	SMK	9.172	6.737	15.909
6.	DI/Akta I	4	1	5
7.	D II/Akta II	7	5	12
8.	SM/DIII/Akta III	317	646	963
9.	D IV/Akta IV	18	31	49
10.	S1/Akta V	719	735	1.454
11.	S2	6	17	23
12.	S3	-	-	0
	Jumlah	13.308	11.441	24.749

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2016

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tabel 2.55.
Rasio Ketergantungan Kota Bekasi 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	710.822	591.702
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	63.056	78.258
3.	Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	773.878	669.960
4.	Jumlah Penduduk usia 15 - 64 tahun	1.889.133	1.714.453
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	40,96	39,08

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2016 DAN REALISASI RPJMD

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja RPJMD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Target Kinerja RKPD Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(tahun n-1)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)*	(10) = (9/4)*	-11
	Urusan Pendidikan									Dinas Pendidikan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	SMK Terakreditasi	70%	74,15%	69					Dinas Pendidikan
		SMA/MA Terakreditasi	75%	50%	74					Dinas Pendidikan
		SMP/MTS Terakreditasi	75%	77,27%	74					Dinas Pendidikan
		SD/MI Terakreditasi	70%	89,93%	69					Dinas Pendidikan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif	1376	40,64%	275					Disbangkim
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah pertama yang representatif	381	41,01%	76					Dinas Pendidikan
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang representatif	98	86,44%	19					Dinas Pendidikan
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang representatif	156	35,94%	31					Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD yang sertifikasi	51	45,41%	49,50					Dinas Pendidikan
		Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi yang diajarkan	57	83,84%	55					Dinas Pendidikan

					Guru SMP/MTs yang sertifikasi	63	69.32%	61,50					Dinas Pendidikan
					Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs terhadap bidang studi yang diajarkan	82	94.51%	80					Dinas Pendidikan
					Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	56	41.92%	54,50					Dinas Pendidikan
					Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap bidang studi yang diajarkan	86	79.01%	84					Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Kualifikasi Tutor Paket A, B, C	90	90.24%	85					Dinas Pendidikan
					Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	70	3.38%	67					Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Daya Tampung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	50	79.72%	48					Dinas Pendidikan
					Guru PAUD Menenuhi Kompetensi Dasar	26	44.78%	25					Dinas Pendidikan
					Rasio Guru : Siswa PAUD	0	1 : 8.8	7					Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	APK SD/MI	115,74	121.26%	115,22					Dinas Pendidikan
					Angka Putus Sekolah SD/MI	0,08	0.04%	0,09					Dinas Pendidikan
					Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	94,88	95.33%	94,24					Dinas Pendidikan
					Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SD	60	40.10%	58					Dinas Pendidikan
					Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta	42	1:41	43					Dinas Pendidikan
					Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD	62	76.45%	60					Dinas Pendidikan
					APK SMP/MTs	96,00	114.33%	95,32					Dinas Pendidikan
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,09	0.13%	0,10					Dinas Pendidikan
					Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan	94,50	99.78%	93,90					Dinas Pendidikan
					Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SMP	62	69.57%	60					Dinas Pendidikan
					Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta	40	1 : 44	41					Dinas Pendidikan
					Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP	1,30	1 : 1.05	1,40					Dinas Pendidikan
					Rerata UN SD/MI	8,20	7.77%	8,10					Dinas Pendidikan

					Rerata UN SMP/MTs	7,40	6.62%	7,25					Dinas Pendidikan
					Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau nasional	10	38 jenis juara	10					Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah	APK SMA/MA/SMK	77,70	98.61%	76,20					Dinas Pendidikan
					Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,40	0.07%	0,42					Dinas Pendidikan
					Lulusan SMA/SMK/MA melanjutkan ke PT/Akademi	70	78.28%	65					Dinas Pendidikan
					Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di SMA	60	63.10%	59					Dinas Pendidikan
					Rasio siswa SMA : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta	38	1 : 31.48	38					Dinas Pendidikan
					Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMA	1	1 : 1.1	2					Dinas Pendidikan
					Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di SMK	70	71%	68					Dinas Pendidikan
					Rasio siswa SMK : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta	35	1 : 44.31	35					Dinas Pendidikan
					Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMK	1	1 : 1.4	2					Dinas Pendidikan
					Rerata UN SMA	8,40	Nilai 59.97	8,30					Dinas Pendidikan
					Rerata UN SMK	8,30	Nilai 58.87	8,20					Dinas Pendidikan
					Prestasi yang diraih di tingkat propinsi dan atau nasional	10	46 jenis juara	10					Dinas Pendidikan
					Urusan Kesehatan								Dinas Kesehatan
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	32,26	6.45%	29					Dinas Kesehatan
					Persentase klinik yang berizin	67	45%	57					Dinas Kesehatan
					Persentase Rumah Sakit yang berizin	40	100%	39					Dinas Kesehatan
					Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan pengendalian)	21	58%	16					Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut	80,00	41%	78,00					Dinas Kesehatan
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned)	10	10 Poned	9					Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM

					Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi Puskesmas	34	39 Puskesmas	33					Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru, RS Mata	100	100%	95					RSUD/ DISBANGKIM
					Tersediannya RSUD Kelas D	2	0.00	0					Dinas Kesehatan/ Disbangkim
					Program Peningkatan Pelayanan RSUD	100	100%	100					RSUD
					Kematian pasien ≤ 24 jam di IGD		1.7 Permil						RSUD
					Kematian pasien > 48 jam di Ruang Rawat Inap		0.025 Permil						RSUD
					Kejadian Infeksi Nosokomial		0.11%						RSUD
					Terakreditasinya RS (Tingkat Dasar = 1, Tingkat Madya = 2, Tingkat Utama = 3, Tingkat Paripurna = 4)		3.00						RSUD
					Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi		Indeks 80.8						RSUD
					Capaian kinerja keuangan +kinerja operasional + kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat								RSUD
					Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas		Indeks 76						Puskesmas
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	65	39%	60					Dinas Kesehatan
					Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita penyakit (pasien baru) TB BTA Positif	70	50%	70					Dinas Kesehatan
					penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100%	100					Dinas Kesehatan
					Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	85	30%	80					Dinas Kesehatan
					Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST)	95	74%	90					Dinas Kesehatan
					Mikro Filaria Rate (Filariasis)	0,90	-	0,90					Dinas Kesehatan
					Penderita kusta yang selesai berobat/RFT	90	93.30%	90					Dinas Kesehatan
					Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP)	2	2 per 100.000 penduduk usia kurang dari 15	2					Dinas Kesehatan

				URUSAN PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG									
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan baru terhadap panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		3.176,08 km						Dinas Bina Marga dan Tata Air
					Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	1,39	15,56%	1,36					Dinas Bina Marga dan Tata Air
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,28	95,13%	95,23					Dinas Bina Marga dan Tata Air
				Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan data base pembangunan	100	173,33%	100					Dinas Bina Marga dan Tata Air
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	73,28	74,02%	72,73					Dinas Bina Marga dan Tata Air
				Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)	Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n)	100	105,55%	80,95					Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
					Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum (PJU)	100	101,77%	96,29					Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
					Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik	72	82%	72					Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
				Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan, Pemakaman dan PJU	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas DPPPJU	100	18,33%	20,13					Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
				Program Pengendalian Banjir	Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	33,27	18,64%	4,99					Dinas Bina Marga dan Tata Air
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	90	88%	89					Dinas Tata Kota
					terkendalnya jumlah titik reklame	100	87,04%	94,29					Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
				Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota	25	3 Lokasi/Kawasan	7					Dinas Tata Kota
					jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	15	2 Lokasi	2					Dinas Tata Kota
				Program Pemanfaatan Ruang	jumlah penyerahan psu	25	89 Bidang	25					Dinas Tata Kota

				Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya	47%	40%	42%					Dinas Sosial
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah	39%	37%	38%					Dinas Sosial
				URUSAN TENAGA KERJA									
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50.000 orang	7,905 orang	10.000 orang					Dinas Tenaga Kerja
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan	100	95,74%	95					Dinas Tenaga Kerja
					Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	70	100%	75					Dinas Tenaga Kerja
					Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja	50	83,00%	45					Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	20.450	270 Orang	4.090					Dinas Tenaga Kerja
				URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK									
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100%	100					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Menurunnya Rasio KDRT	470:1	Rasio 460 : 1 (46.96%)	465 : 1					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Prosentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	30,75	22%	30,55					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Partisipasi perempuan di lembaga swasta	35,00	78%	34,55					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Prosentase perempuan di DPRD Kota	18	16%	18					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	38,14	38,57%						Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	rasio luas RTH terhadap wilayah kota	12	11,15%	11					Dinas Tata Kota

					Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota	5		1					Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Pengawasan terhadap Penggunaan Air Tanah	50	60%	45					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Persentase Penurunan Kerusakan Lahan dan /atau Tanah untuk Produksi Biomassa	100	-	80					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis	60	39%	55					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Perolehan Adipura	Adipura	Sertifikat	Adipura					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Usaha dan atau Kegiatan Sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	60	84%	50					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Persentase lokasi/ wilayah yang dipantau kualitas udara ambien dan diinformasikan mutu udara ambien	100	100%	60					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Program peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis Pencemaran Air	60	76%	55					Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	69	37,26%	66					Dinas Kebersihan
					Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	4,83	3.02 Persil	0,97					Dinas Kebersihan
					Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah	663	262 Kelompok	138					Dinas Kebersihan
					Persentase Limbah Yang Terolah	21,11	17,60%	20,81					Dinas Kebersihan
					Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan sampah di TPS	296015	114,825 ritase	259880					Dinas Kebersihan
					Jumlah Teknologi Baru	1	-	0					Dinas Kebersihan
				URUSAN PERTANAHAN									
				Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan		24,741 M2						Setda bagian Pertanahan
					Penanganan Kasus Negara		14 Kasus						Setda bagian Pertanahan
				URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL									

				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik	100	80,77%	100					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	52,65	100%	52,35					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase cakupan kepemilikan akte perkawinan	100,000	71,59%	100					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian	74,57	31,04%	74,16					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	55,92	54,54%	46,17					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA/KELURAHAN									
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	LPM Berprestasi	6	6 LPM	6					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					Posdaya Berprestasi	6	6 Posdaya	6					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					PKK Aktif	100	100%	100					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					Jumlah UEP/KUBE	77	52 KUBE	57					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					Jumlah Inovasi TTG	10	2 Produk	2					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					Posyandu Mandiri	10	8%	9					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	45	40%	40					Kantor Pemberdayaan Masyarakat
					Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	90	90%	90					Kecamatan
					Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui	100	100%	100					Kecamatan
				Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	76	78					Kecamatan
				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA									
				Program Keluarga Berencana	Cakupan Penyediaan Alat/Obat Kontrasepsi dalam memenuhi permintaan masyarakat	30	30%	30					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya dibawah usia 20 Tahun	1,40	1,85%	1,85					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

					Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	6,65	15,72%	7,45					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Total Fertility Rate (TFR)	2,73	1,85%	2,88					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB	70	80,59%	70					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB	87	84,18%	85					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Presentase Keluarga Remaja Yang Mengikuti POKTAN		7,06%						Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Presentase Keluarga Balita Yang Mengikuti POKTAN		18,29%						Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Presentase Keluarga Lansia Yang Mengikuti POKTAN		16,08%						Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Presentase Laki-laki dengan Ber KB	4,06	4,07%	3,96					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Prosentase Peserta KB Baru		100,38%	75,58					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi	0	-	0,1					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
					Peningkatan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama	>21 Tahun	20 Tahun	21 Tahun					Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Ketersediaan Data Kependudukan	100	60%	80					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					URUSAN PERHUBUNGAN								
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Terpenuhi sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	3	2%	3					Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan BRT di Kota Bekasi	50	35%	40					Dinas Perhubungan
					Persentase pelayanan angkutan umum yang	47	43%	45					Dinas Perhubungan

				Persentase Perpustakaan Yang Terbina	20	18,61%	20					Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				URUSAN KEARSIPAN								
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan Arsip SKPD secara baku	55	23,08%	55				Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				URUSAN PARIWISATA								
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase kawasan wisata milik Pemerintah Kota Bekasi yang tertata	100	60%	90				Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
					Persentase Usaha / Jasa Kepariwisataan yang Berizin		29,8%					Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				URUSAN PERTANIAN								
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	0	-	3				Dinas Perekonomian Rakyat
					Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	100	100%	100				Dinas Perekonomian Rakyat
				Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Produksi pertanian	64	62 Ton	63				Dinas Perekonomian Rakyat
					Produksi peternakan	15.118	16,500 Ton	14.398				Dinas Perekonomian Rakyat
					Produksi perikanan	2.094	1,815 Ton	1.904				Dinas Perekonomian Rakyat
					Ketersediaan Pangan Utama	100	76,45%	95				Dinas Perekonomian Rakyat
					Pusat Promosi Ikan Hias, Rumah Potong Hewan & BPTHH yang representatif	3	3 Unit	3				Dinas Perekonomian Rakyat
					Meningkatnya produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	15.118	16,500 Ton	14.398				Dinas Perekonomian Rakyat
				URUSAN PERDAGANGAN								
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan	3.806	5%	5				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	US \$ 1,336,652,173.39	-28.4%	10				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat	260	52 Jenis	52				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang	470000	7,000 Unit	150000				Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

					Penyelesaian sengketa konsumen	221	15 Sengketa	60					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi	3	3 Laporan	3					Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
				Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Tertata	2.200	2,200 PKL	2.050					Dinas Perekonomian Rakyat
				Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan pasar	Pasar Tradisional Modern	1	-	0					Dinas Perekonomian Rakyat
					Pasar tradisional yang representatif	12	11 Pasar	11					Dinas Perekonomian Rakyat
					Pasar swasta/lingkungan yang terbina	40	35 Pasar	40					Dinas Perekonomian Rakyat
					Peningkatan retribusi pasar	#####	0,01	5					Dinas Perekonomian Rakyat
					URUSAN PERINDUSTRIAN								
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	324		10					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Industri Kecil	2541 Industri Kecil	1%	1%					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Pertumbuhan Industri Menengah	494 Industri Menengah	1%	1%					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tersedianya UMKM Center	1	-	1					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					URUSAN PERENCANAAN								
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi	100%	-	0					BAPPEDA
					Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bekasi	100%	100%	100					BAPPEDA
					Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD	100%	100%	95					BAPPEDA
					Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD	100%	100%	100					BAPPEDA
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi	0	-	100					BAPPEDA
					Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor	100	100%	100					BAPPEDA

					Persentase peningkatan dana perimbangan keuangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	#####	14,15%	2,92				Dinas Pendapatan Daerah
					Ketepatan waktu penetapan APBD	A	Grade A	A				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1	1 Dokumen	1				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap neraca Pemerintah Kota	100	*	100				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Tingkat penyelesaian dokumen DPA-SKPD sesuai jadwal dan akurat	100	100%	100				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase SKPD yang penyerapan dananya sesuai dengan alokasi anggaran	100	86%	98				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase rata-rata sarana prasarana SKPD sesuai RKBUS	76	-	74				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Ketepatan Penyelesaian Pelaporan Kegiatan Pembangunan	90	70%	80				Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
					Persentase Ketersediaan Aparatur memiliki Sertifikat PBJ	75	60%	70				Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
					Prosentase BUMD dalam kondisi baik	100	60%	80				Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
					Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara Elektronik	750	1,058 Paket	700				KLPBJ
					Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaporkan ke KLPBJ	100	70%	80				KLPBJ
				URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN dan PELATIHAN								Badan Kepegawaian Daerah
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Pendidikan sesuai dengan	100%	100%	100%				Badan Kepegawaian Daerah

			Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	100	95,24%	100					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelesaian Jumlah Kasus yang Dihadapi Pemerintah Daerah	40	70%	30					Sekretariat Daerah Bagian Hukum
				Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	1.095	1,975 Perda/Perkada/kepwal	1.083					Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja DPRD	100	50%	100					Sekretariat DPRD
			Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana aparatur yang memadai	100	77,77%	100					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran	Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	56 unit	10 unit	44 unit					DIBANGKIM
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha
				Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100%					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha
			Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP Pemerintah Kota Bekasi	66	Nilai 54	64					Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan
				Nilai LPPD Pemerintah Kota Bekasi	3,237	Nilai 3.1	3,142					Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	100%					KESBANGPOL
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan politik daerah	5 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan					KESBANGPOL
			Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Ketersediaan Regulasi yang mengatur Kehidupan Sosial dan Keagamaan		1 Produk hukum						Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial
				Persentase Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Agama dan Hari Besar Nasional		100%						Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial
			Program pengembangan kehidupan demokrasi dalam pemilu	Persentase cakupan Sosialisasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi	100		0					KESBANGPOL
				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA/PILGUB/PILPRES/PEMILU dengan tertib aman dan lancar								KESBANGPOL
			Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba	10%	1,22%	4%					KESBANGPOL

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian visi dan misi daerah, maka dibutuhkan evaluasi dan telaahan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah merupakan suatu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang telah ditetapkan dan merupakan benangmerah/tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program dan kegiatan unggulan SKPD yang memiliki skala prioritas paling tinggi (*output* dan *outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu proses penyusunan prioritas program dan kegiatan, yaitu dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

2.3.2. Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan strategis Kota Bekasi berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

a. Urusan Pendidikan

Hingga tahun 2016, target dalam RPJMD 2013-2018 untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sudah tercapai. Begitu pula dengan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan (bekerjasama dengan Dinas Permukiman dan Pertanahan).

b. Urusan Kesehatan

Beberapa isu strategis bidang kesehatan yang masih menonjol hingga tahun 2016 ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi Puskesmas. Ditargetkan sejumlah 31 Pustu, ternyata meningkat sebanyak 39 Puskesmas. Permasalahannya adalah terjadi perbedaan dalam klasifikasi terhadap jumlah Puskesmas yang seharusnya adalah masih Pustu. Untuk diperlukan kegiatan inventarisasi yang lebih valid terkait kriteria dan data Puskesmas dan Pustu, penyusunan prioritas berdasarkan peningkatan status Pustu menjadi Puskesmas, dan data kondisi fisik, personil dan prasarana dan sarana puskesmas;
- (2) Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare. Ditargetkan sebanyak 57,67 persen penderita, ternyata hanya ditemukan sebanyak 30 persen. Hal

ini diakibatkan oleh belum semua fasilitator kesehatan melaporkan penemuan penyakit, sehingga masih banyak warga masyarakat yang melakukan pengobatan secara mandiri sehingga tidak tercatat di data fasilitator kesehatan. Untuk diperlukan adanya peraturan yang tegas agar fasilitator kesehatan melaporkan secara rutin data temuan kasus penderita diare;

- (3) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB (khususnya untuk pasien baru). Ditargetkan temuan BTA positif sebanyak 58,03 persen, namun capaian hanya 50 persen. Belum semua fasilitator kesehatan melaporkan data penemuan penyakit, dan belum semua rumah sakit menerapkan strategi DOTS (*Directly Observe Treatment Short Course*) dalam penanggulangan kasus TB. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan fasilitator kesehatan untuk menerapkan strategi DOTS dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kota Bekasi (melalui Dinas Kesehatan) dengan semua fasilitator kesehatan swasta se Kota Bekasi;
- (4) Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST). Ditargetkan dapat dicakup sebanyak 95 persen ODHA, namun capaian yang ditunjukkan masih berkisar di angka 74 persen. Masih banyak ODHA yang belum bersedia mendapatkan penanganan karena minimnya pemahaman terhadap efek obat. Untuk itu, ke depan perlu optimalisasi sosialisasi keamanan obat terhadap ODHA dengan memanfaatkan media massa dan media sosial;
- (5) Cakupan Kelurahan Siaga Aktif. Ditargetkan sebanyak 80 persen kelurahan sudah ditetapkan, namun baru mencapai 57 persen. Beberapa penyebab antara lain belum optimalnya pengembangan partisipasi masyarakat dalam program Kelurahan Siaga serta belum optimalnya koordinasi antar *stakeholders* (masyarakat, aparat wilayah, puskesmas). Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan Kelurahan Siaga, sosialisasi, dan penetapan Kelurahan Siaga;
- (6) Persentase rumah tangga ber-PHBS. Ditargetkan sebanyak 68,14 persen rumah tangga sudah ber-PHBS, ternyata capaiannya masih di angka 60,6

persen. Belum optimalnya pendataan oleh puskesmas dan masih tingginya indikator anggota keluarga yang merokok di dalam rumah menyebabkan banyak rumah tangga yang tidak dapat dikategorikan ber-PHBS. Untuk itu perlu melanjutkan pendataan, penyuluhan PHBS ke rumah tangga, serta pencanangan gerakan tidak merokok di dalam rumah;

- (7) Presentase apotek, toko obat, produk obat-obatan, IRTP, produk pangan dan jajanan yang sesuai standar kesehatan. Ditargetkan sejumlah 80 persen sudah sesuai standar kesehatan, namun capaiannya masih jauh, yaitu baru 16,25 persen. Penambahan jumlah sarana farmasi dan IRTP tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang kompeten pada UPTD POM, sarana pendukung kegiatan, dan anggaran. Untuk itu perlu penambahan SDM yang kompeten, penambahan sarana pendukung kegiatan, dan penambahan anggaran;
- (8) Presentase institusi yang memenuhi standar kesehatan. Ditargetkan sebanyak 90 persen institusi kesehatan sudah memenuhi standar kesehatan, namun capaiannya masih kurang sedikit, yaitu 86,9 persen. Masih belum optimal pengendalian dan pengawasan pemenuhan standar kesehatan pada institusi. Untuk itu perlu penetapan regulasi daerah (dalam bentuk Peraturan Walikota dan bahkan Peraturan Daerah) yang mengatur penerapan standar kesehatan pada institusi pemerintah dan swasta;
- (9) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. Ditargetkan hingga akhir masa RPJMD sebanyak 97,13 persen, namun capaian baru 32 persen. Minimnya capaian target lebih banyak diakibatkan oleh ketersediaan data yang minim akibat dari belum optimalnya pelaporan dari RS dan Balai Pengobatan Swasta. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan database yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan dengan fasilitas kesehatan di Kota Bekasi;
- (10) Prevalensi balita gizi buruk. Ditargetkan hingga akhir masa RPJMD (2018), proporsi balita gizi buruk sebanyak 0,28 persen, ternyata target sudah terlampaui pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,20 persen;

- (11) Prevalensi balita gizi kurang. Ditargetkan hingga akhir masa RPJMD proporsi balita gizi buruk sebanyak 5 persen, ternyata sudah terlampaui pada tahun 2016 sebesar 4,3 persen; dan
- (12) Cakupan pelayanan anak balita. Ditargetkan pada akhir masa RPJMD sebesar 20,08 persen, namun capaian hingga tahun 2016 baru 3,7 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya peran posyandu dan pelaporan dari rumah sakit dan balai pengobatan swasta (BPS). Untuk itu perlu optimalisasi peran posyandu dan pengembangan database yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang melayani kesehatan balita di Kota Bekasi.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih menonjol hingga tahun 2016 ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Menjawab titik kemacetan. Perlu penanganan titik kemacetan secara komprehensif, terutama meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait melalui pembuatan *road map* yang jelas;
- (2) Penanganan sedimentasi dan sampah. Perlu dilakukan penanganan sampah dengan pematuan sinergitas dengan perangkat daerah lain, terutama Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Pengendalian banjir. Terkait dengan persoalan banjir dan pengendaliannya, analisis dan usulan solusinya sebagai berikut:
 - Perlu dilakukan penurunan dasar saluran, pembuatan tandon, peninggian. Upaya peninggian secara estetika kurang, sehingga yang seharusnya pendalaman. Untuk mengatasi persoalan ini yang harus dilakukan adalah membuat *road map* untuk seluruh penanganan daerah aliran sungai (DAS), kemudian dihitung per DAS dilihat dari kondisi eksisting dan rencana penanganannya;
 - Restorasi sungai belum tersentuh. Oleh karena daerah tangkapan air (*catchmen area*) mengikuti DAS dan tingkat penyerapan tanah, maka

menurunkan dasar saluran cenderung tidak efektif karena aliran air tidak sampai ke hilir (kecuali pake *tamping*). Pembangunan tandon (*polder*) relatif efektif namun masih perlu kajian, diantaranya karena relatif mahal. Untuk itu yang diusulkan adalah *preliminary design* sebagai dasar perencanaan penanganan DAS tahun 2018;

- (4) Kebocoran pembayaran listrik penerangan jalan umum (PJU). Solusi yang diajukan adalah penerapan mekanisme pemasangan meter listrik.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa isu strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih menonjol hingga tahun 2016 ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Rumah tidak layak huni belum melibatkan masyarakat. Diharapkan mulai tahun 2017 rumah tidak layak huni harus dikelola masyarakat, dalam hal ini melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan penentuan titik lokasinya tidak keluar dari data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Perlu diusulkan kampung percontohan, yang akan difokuskan pada Kampung Warna-warni;
- (2) Pelibatan perempuan masih kurang dalam program perumahan dan permukiman. Selama ini pengambilan keputusan terkait masalah perumahan dan kawasan permukiman cenderung direpresentasi melalui kepala keluarga, yang pada umumnya diwakili oleh suami (terkecuali janda). Mekanisme inilah yang mendorong kurangnya pelibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlu diusulkan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemberdayaan perempuan;
- (3) Akses terhadap air bersih masih menjadi permasalahan bagi sebagian warga. Ada bantuan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau *United States Agency for International Development* (USAID) terkait dengan air dan sanitasi di perkotaan. Programnya adalah Program Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia atau *Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene* (IUWASH), yang merupakan proyek lima tahun

untuk membantu Pemerintah Indonesia meraih kemajuan untuk mencapai target *Millenium Development Goals* melalui perluasan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang aman. Untuk tahun 2018, pembangunan sanitasi di kota Bekasi diusulkan untuk diprioritaskan untuk kawasan yang sudah siap dengan kelembagaan kelompok swadaya masyarakat (KSM) bentukan dari IUWASH; dan

- (4) Program sanitasi dan air bersih belum sinkron. Program sanitasi dan air bersih yang melibatkan DPKPP dengan Dinkes belum sinkron, dan belum terdata *septictank* yang ber-SNI (standar nasional Indonesia) di Kota Bekasi. Yang perlu diusulkan terkait pengadaan air bersih ini tidak sekedar perpipaan, tapi pembuatan sumur artesis yang pengelolaannya diserahkan pada KSM.

e. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Beberapa isu strategis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Bekasi yang masih relevan untuk diusulkan pada RKPD 2018 antara lain:

- (1) Perlunya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, diantaranya untuk memperbaiki cakupanencana kebakaran, seperti memperbaiki tingkat tanggap waktu (*respon time rate*) layanan wilayah manajemen kebakaran;
- (2) Pemeliharaan kondisi keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diantaranya melalui:
 - Peningkatan jumlah deteksi dini dan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - Peningkatan jumlah penyelesaian pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
 - Peningkatan jumlah pos siskamling yang berfungsi;

- Penurunan jumlah pelanggaran keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- (3) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, diantaranya melalui:
- Peningkatan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat;
 - Peningkatan jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;

f. Urusan Sosial

Beberapa isu strategis bidang sosial yang masih menonjol hingga tahun 2016 ini adalah Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial. Pembangunan panti ini bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berdasarkan hasil evaluasi capaian target indikator RPJMD belum direalisasikan dari targetnya satu unit panti akan dibangun. Untuk itu, rencana aksi yang diusulkan adalah pembangunan panti rehabilitasi PMKS di lahan milik pemerintah dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan *feasibility study* (FS) oleh pihak Dinas Sosial, dengan pembiayaan dari APBD murni tahun 2017;
- Penetapan lokasi pembangunan panti rehabilitasi sosial berdasarkan rekomendasi hasil FS tahun 2017 dengan pelaksana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD);
- Penyusunan *detail engineering design* (DED) dengan pembiayaan dari APBD Perubahan 2017, dilaksanakan oleh Disperkimtan;
- Pembentukan kelembagaan pengelola panti rehabilitasi sosial, yang dibiayai dengan APBD Tahun 2018, dengan pelaksana Dinsos dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
- Pelaksanaan pembangunan panti rehabilitasi PMKS oleh Disperkimtan,

dengan sumber pembiayaan APBD Tahun 2018.

g. Urusan Ketenagakerjaan

Beberapa isu strategis bidang ketenagakerjaan yang masih menonjol hingga tahun 2016 ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Tingginya angka pengangguran terbuka, hingga 9,20 persen. Sesuai target dalam RPJMD 2013-2018, sesungguhnya target sampai dengan akhir 2018 sebanyak 50.000 lowongan sudah tercapai pada akhir tahun 2016, yaitu sebanyak 61.935 lowongan atau ada kelebihan target sebesar 11.935 lowongan (23,87 persen). Namun demikian, untuk kepentingan menurunkan angka pengangguran, target menciptakan 10.000 lowongan per tahun tetap harus diusulkan dan direalisasikan pada tahun 2018. Dan, bila target 2017 diasumsikan tercapai, maka akan terjadi kelebihan realisasi lowongan sebanyak 21.935 lowongan (tahun 2018 tidak dihitung karena masa transisi). Penyediaan 10.000 lowongan kerja diusulkan pada RKPD tahun 2018 ditempuh melalui:
 - *Job fair* sebanyak 4.250 lowongan pekerjaan. Meskipun realisasi sudah melebihi target, akan tetapi karena belum seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya di Jamsostek, maka masih perlu dilakukan pembinaan kepada perusahaan sehingga diharapkan ke depannya seluruh perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek);
 - Bursa kerja khusus sebanyak 3.500 lowongan; dan
 - Meskipun target tercapai, namun setiap tahunnya UMK selalu dirumuskan sehingga anggarannya tetap harus dialokasikan;
- (2) Masih kurangnya pencari kerja yang memiliki keahlian. Secara keseluruhan masih terdapat sisa target yang harus dipenuhi agar target hingga akhir RPJMD sebesar 11.686 orang pencari kerja telah disertifikasi. Akan tetapi karena ada kesalahan dalam menentukan target maka pada saat revisi RPJMD target capaiannya dirubah, sehingga sampai dengan tahun 2018

masih ada sisa target yaitu sebanyak 7.500 pencari kerja. Keahlian tersertifikasi ini mutlak sebagai salah satu cara mendapatkan pekerjaan ataupun untuk membuka lapangan pekerjaan dalam upaya mengurangi angka pengangguran terbuka. Untuk itu, beberapa kegiatan yang diusulkan antara lain:

- Peningkatan jumlah UMKM sebanyak 257 unit;
- Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 200 orang;
- Peningkatan industri kecil sebesar 1,5 persen atau sekitar 32 unit industri kecil, yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar 350 orang;
- Penataan pedagang informal menjadi pelaku usaha mikro sebanyak 943 pelaku usaha;
- Peningkatan kompetensi berbasis kewirausahaan dan kemasyarakatan sebanyak 500 orang;
- Pelatihan calon tenaga kerja berbasis kompetensi sebanyak 250 orang;
- Pelatihan calon tenaga kerja berbasis kewirausahaan hingga 250 orang
- Pelatihan calon tenaga kerja berbasis masyarakat hingga 250 orang;

h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih menonjol hingga tahun 2016 ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan masih kurang. Ditargetkan proporsi jumlah perempuan yang duduk di lembaga pemerintahan sebanyak 30 persen, namun hingga tahun 2016 ketercapaian masih sekitar 16,55 persen. Terdapat kesalahan dalam menghitung capaian target, yaitu jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi dengan jumlah keseluruhan pekerja perempuan. Seharusnya perhitungan capaian target sesuai RPJMD adalah jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja pemerintah. Rekomendasi yang diajukan pada tahun 2018 adalah segera memperbaiki capaian target sesuai hasil analisis;

- (2) Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga masih kurang. Ditargetkan proporsi jumlah perempuan yang duduk di lembaga swasta mencapai 32,75 persen, namun realisasinya masih kurang, yaitu baru sebesar 25,86 persen. Sama dengan sebelumnya, terdapat kesalahan dalam menghitung capaian target, yaitu jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi dengan jumlah keseluruhan pekerja perempuan. Seharusnya perhitungan capaian target sesuai RPJMD adalah jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi dengan jumlah pekerja swasta. Rekomendasi yang diajukan pada tahun 2018 adalah segera memperbaiki capaian target sesuai dengan hasil analisis;
- (3) Prosentase jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Bekasi masih kurang. Diharapkan proporsi jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif hingga sebanyak 18 persen, namun capaian yang ditunjukkan hingga tahun 2016 sebesar 16 persen. Sesungguhnya saat ini belum diterapkan kuota bagi perempuan di lembaga legislatif. Untuk itu, diusulkan sosialisasi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya bagi organisasi partai politik tingkat kota Bekasi;
- (4) Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan dinilai masih kurang. Ditargetkan proporsi jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 38,34 persen, namun realisasinya masih sebanyak 28,96 persen. Perlu penyempurnaan perhitungan capaian target disesuaikan dengan capaian di atas yang telah disempurnakan. Untuk itu, diusulkan kegiatan peningkatan keterampilan perempuan;
- (5) Prosentase penyelesaian pengaduan masalah perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan masih rendah. Ditargetkan prosentase bisa mencapai 100 persen, namun prakteknya masih jauh, yaitu sebesar 56,02 persen. Rendahnya capaian ini karena dihitung sampai dengan kasus terselesaikan secara *inkracht* secara hukum (proses peradilan) yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Seharusnya prosentase penyelesaian pengaduan masalah perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan dihitung pada proses penyelesaian sampai dengan proses hukum dimulai. Untuk itu harus segera dilakukan penyesuaian kembali perhitungan capaian target;

- (6) Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ditargetkan KDRT hanya akan terjadi di setiap 460 rumah tangga, atau 460 : 1. Sayangnya tidak ada data terkait dengan capaian. Data yang tersedia masih sangat terbatas karena minimnya pelaporan KDRT. Untuk itu, pada tahun 2018 nanti akan dilakukan perhitungan rasio kekerasan berdasarkan data kasus KDRT yang dilaporkan ke kepolisian dan satgas KDRT.

i. Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa isu strategis bidang lingkungan hidup yang masih menonjol di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah masih banyak persoalan yang dihadapi untuk memperoleh penghargaan Adipura. Beberapa persoalan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Volume sampah yang tidak tertangani masih cukup banyak. TPA masih tergantung pada TPST Bantargebang, yang juga merupakan tempat pembuangan sampah akhir empat daerah (Kota Bekasi, DKI Jakarta, Kota Depok, dan Kota Bogor). Saat ini, sampah DKI Jakarta saja yang dibuang ke TPST Bantargebang mencapai 7.000 ton per hari. Secara teknis, dengan adanya teknologi *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dapat meminimalisasi volume sampah yang *over capacity*. Untuk itu, diusulkan TPST Bantargebang menjadi TPST regional berteknologi ITF, dengan langkah awal penyusunan strategi untuk pemastian permasalahan lokasi dan sarana pendukungnya;
- (2) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Secara umum belum cukup pemahaman dan kesadaran warga dalam pengelolaan sampah, mulai dari memilah sampah di sumber timbulannya (rumah tangga, pasar, lokasi industri, dsb). Untuk itu diusulkan kegiatan terkait

dengan penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- (3) Pemanfaatan TPA Sumur Batu masih belum memadai. TPA Sumur Batu diharapkan dapat difungsikan sebagai alternatif, namun secara teknis operasional belum berjalan efektif. Untuk itu diusulkan kegiatan untuk tahun 2018, yaitu pelaksanaan cover harian zona aktif TPA Sumur Batu;
- (4) Fungsi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) masih salah. TPS adalah pemindahan sampah sementara (*waste transfer station*), setelah diolah sebagian. Seharusnya tidak ada sampah yang “menginap” di TPS, semaksimal mungkin harus diolah di tempat. Kalau ada sisa (residu, dll) sampah harus langsung dipindahkan ke alat angkut ke TPA. Harus diubah konsep TPS menjadi unit pengolahan sampah (UPS) dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan menambah lokasi selama tidak mengganggu lingkungan;
- (5) Pembuatan TPA baru masih terhambat masalah lokasi. Yang perlu diusulkan adalah memastikan pengadaan tanah untuk lokasi TPA, yaitu calon lokasi yang sudah dicadangkan seluas 2,6 hektar ke bidang Pertanahan di DPKPP (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan); dan
- (6) Kualitas lingkungan hidup, khususnya terkait dengan mutu udara dan air, masih belum memenuhi syarat. Sebagai pusat hunian Kota Bekasi harus memperhatikan kualitas lingkungan hidup agar memenuhi syarat untuk dinilai layak memperoleh penghargaan Adipura. Untuk itu, perlu disusun strategi pengelolaan mutu udara dan air.

j. Urusan Pertanahan

Beberapa isu strategis bidang pertanahan yang menonjol di Kota Bekasi adalah:

- (1) Pola konsolidasi lahan belum, khususnya area pemakaman belum diimplementasikan, diantaranya sebagai berikut:

- Beberapa tempat pemakaman umum (TPU), seperti TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari sudah penuh. Lahan tidak bisa ditambah, kecuali dibeli baru kebetulan di sebelah barat TPU ada lahan (pemilik Ahmad Ustuchuri). Perlu segera pengadaan lahan baru untuk perluasan lahan pemakaman, atau penumpukan makam. Seperti TPU Perwira, solusinya adalah dengan model “tumpang lahan” (yang masih satu keluarga), karena untuk pembuatan lubang baru sudah tidak bisa. Atau, mereka dipindahkan kerangkanya;
 - Kondisi lahan makam kurang layak. Seperti di TPU Padurenan, permasalahannya adalah merupakan tanah pengurugan. Juga, TPU Jatisari, lahannya tebing dan kemiringannya agak tinggi. Perlu ada pematangan dan penataan serta penurunan;
 - Untuk jalan akses menuju TPU Jatisari harus melewati lahan permukiman dan areal pesantren “Sirodjul Munir”. Perlu diantisipasi akses ke area TPU agar tidak bermasalah di belakang hari. Diusulkan untuk dilakukan penyiapan infrastruktur untuk seluruh TPU;
- (2) Proyeksi kebutuhan lahan untuk TPU belum optimal. TPU Padurenan luasnya 10 hektar untuk dimanfaatkan hingga sekitar 15 tahun, namun bisa dioptimalkan hingga 17 tahun dengan asumsi satu orang kebutuhan untuk makam sekitar 3,75 meter persegi. Untuk itu, perlu optimalisasi pemanfaatan lahan.

k. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa isu strategis bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang menonjol di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- (1) Cakupan kepemilikan KTP masih belum memenuhi target. Ditargetkan pada tahun 2016 seluruh warga Kota Bekasi sudah memiliki KTP semua (100 persen), namun capaian yang ditunjukkan masih jauh, yaitu 80,77 persen. Banyak persoalan yang melatarbelakanginya, antara lain:

- Terbatasnya ketersediaan blanko KTP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi persoalan ini;
 - Proses penerbitan KTP dirasakan masih terlalu panjang, mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Perlu dilakukan perubahan regulasi untuk menyederhanakan prosedur pengurusan KTP;
 - Proses pengurusan KTP/KK belum berbasis *online*. Perlu segera diwujudkan dan dikembangkan pelayanan KTP berbasis *online*;
- (2) Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih sedikit. Ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 85,45 persen penduduk Kota Bekasi sudah memiliki akte kelahiran, namun capaiannya masih jauh, yaitu baru sekitar 54,54 persen. Terdapat beberapa latar belakang terkait rendahnya cakupan kepemilikan akte kelahiran ini, antara lain:
- Adanya kesalahan dalam metode perhitungan terhadap target indikator program kepemilikan akte kelahiran, yaitu penerbitan akte lahir pada tahun berkenaan dibagi dengan jumlah bayi lahir pada tahun berkenaan. Perlu dilakukan penyesuaian metode perhitungan capaian indikator sesuai rumus perhitungan dalam RPJMD;
 - Belum optimalnya kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Dinas Kesehatan, klinik bersalin, bidan, dan rumah sakit, terkait pembuatan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Perlu pengembangan sistem pelayanan akte kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani persalinan;
 - Pelayanan pembuatan akte kelahiran belum berbasis *online*. Perlu pengembangan layanan akte kelahiran berbasis *online*.

l. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Beberapa isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Bekasi yang masih relevan untuk diusulkan pada RKPD 2018 adalah:

- (1) Peningkatan partisipasi masyarakat, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan: penilaian LPM berprestasi, posdaya berprestasi, peningkatan jumlah PKK aktif, peningkatan jumlah UEP/KUBE, peningkatan jumlah inovasi teknologi tepat guna (TTG) yang berwawasan lingkungan, peningkatan jumlah posyandu mandiri, peningkatan swadaya masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan intensitas keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- (2) Penyediaan Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui (*updated*);
- (3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

m. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa isu strategis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah:

- (1) Keterbatasan data yang dimiliki, sehingga penyajian data capaian tidak tepat. Terkait dengan ini kegiatan yang diusulkan pada tahun 2018 adalah pengembangan database terkait KB berbasis IT yang terintegrasi dengan layanan kesehatan dan petugas KB di lapangan;
- (2) Belum optimalnya pemahaman atas resiko kehamilan di bawah usia 20 tahun. Beberapa kegiatan yang diusulkan di tahun 2018 adalah:
 - Perlu dirancang kegiatan untuk mendukung/akselerasi pencapaian target indikator yang belum tercapai, misalnya kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama agar memasukan materi ini di dalam khutbah nikah dan menegaskan bahwa pernikahan harus cukup usia;
 - Pengembangan kegiatan KB keliling; dan
 - Usulan kegiatan inovasi, misalnya terkait pembangunan aplikasi untuk konsultasi remaja, perkawinan, dan KB.

n. Urusan Perhubungan

Beberapa isu strategis bidang perhubungan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Masih banyaknya titik/simpang kemacetan, yang disebabkan oleh:
 - Tidak adanya kajian komprehensif terkait 19 titik kemacetan saat jam sibuk. Jika tidak dilakukan kajian yang komprehensif dikhawatirkan ada simpang lain yang macet selain 19 titik ini akibat dari pertumbuhan kota. Saat ini yang tertangani baru 11 titik kemacetan/simpang, dan sisanya yang delapan simpang belum tertangani. Namun, seluruhnya masih terdapat kemacetan. Untuk itu, perlu inventarisasi kemacetan, khususnya di simpang-simpang yang belum tertangani;
 - Juga, diusulkan untuk menyusun *roadmap* terhadap penanganan 19 titik kemacetan dan kemungkinan titik kemacetan baru serta disusun penyelesaian penanganan simpang secara kawasan;
 - Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen ANDAL lalu lintas sebagaimana yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, dan perlu dilakukan inventarisasi terhadap ANDAL lalu lintas akibat kegiatan baru;
 - Perlu dilakukan *redesign* dan evaluasi trayek angkutan eksisting berdasarkan *clustering* dan pembatasan jam operasional kendaraan barang;
- (2) Adanya kebutuhan angkutan umum massal. Hingga saat ini belum diimplementasikan sistem angkutan umum massal. Implementasi sistem angkutan umum massal akan membawa dampak pada kebutuhan berikut:
 - Kegiatan perbaikan rute trayek eksisting agar lebih terintegrasi dengan KRL, BRT, dan LRT;
 - Kegiatan reformasi kelembagaan dan peremajaan armada angkutan umum;

- Kegiatan penyusunan data angkutan umum yang lengkap;
- (3) Implikasi dari penanganan persoalan kemacetan, antara lain:
- Antisipasi kemacetan akibat pembangunan proyek infrastruktur dan pengoperasian infrastruktur baru (toll, LRT, DDT, dll);
 - Koordinasi dengan pihak DLLAJ;
 - Integrasi pemanfaatan ATCS se Jabodetabek oleh BPTJ
 - Peningkatan SDM Dinas Perhubungan dengan kemampuan *traffic engineering* yang sesuai;
 - Pola penganggaran *money follows program* yang membutuhkan mekanisme dan SOP monitoring dan evaluasi yang lebih baik;
 - Penanganan kemacetan harus dalam satu paket yang meliputi: penanganan *U-turn*, penanganan parkir, penanganan akses mobil, penanganan penyempitan geometri, penanganan kendaraan angkutan berat, *route assignment*, ATCS, dan tata tertib diskresi penanganan lalu lintas di lapangan;
 - Kegiatan pembangunan prasarana yang langsung fokus pada penanganan kemacetan di delapan titik yang belum ditangani dengan koordinasi yang lebih baik, melalui koordinasi dengan PUPR dan Kepolisian;
 - Kegiatan sinkronisasi dengan RTRWN Jabodetabek dan RITJ;

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

Beberapa usulan kegiatan bidang komunikasi dan informatika di Kota Bekasi untuk tahun 2018 adalah:

- (1) *Gap indicator* untuk pengukur pencapaian program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa harus mulai dilakukan dihitung berdasarkan jenis informasi sesuai undang-undang KIP;

- (2) Melakukan penyebarluasan lewat *website*, *email*, pengaduan *online*, *talkshow*, diversifikasi media dan komunitas, penguatan PPID, yang seharusnya ditetapkan dengan peraturan walikota. Dialokasikan di tahun 2018 untuk 300 titik dan kerjasama dengan *vendor* untuk yang tidak ada pos anggarannya;
 - (3) Membuat kamus IT terkait pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*);
 - (4) Memanfaatkan jaringan ISP untuk instansi yang belum terkoneksi internet;
 - (5) Arahan untuk Rencana Induk Penataan Jaringan Telekomunikasi (RIPJT) untuk pembangunan *tower* bersama, regulasi, dan *cell planning*;
- p. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Isu strategis bidang koperasi dan UKM di Kota Bekasi adalah masih rendahnya pertumbuhan koperasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan koperasi di Kota Bekasi ditetapkan sebesar 10 persen setiap tahunnya, angka ini tidak tercapai sampai dengan tahun 2016. Dari target 1.099 koperasi pada tahun 2016, realisasinya hanya mencapai 1.020 koperasi sehingga ada kekurangan target sebanyak 79 koperasi. Apabila tahun 2017 pertumbuhan koperasi diprediksi sebesar 10 persen maka pada tahun 2018 masih ada target sebesar 30.67 persen. Target tersebut tidak tercapai disebabkan masih banyaknya pelaku usaha di masyarakat yang belum berbadan hukum. Untuk beberapa kegiatan yang diusulkan dalam RKPD 2018 adalah:
 - Pendirian koperasi di lingkungan RW dan kelompok masyarakat;
 - Perkuatan modal koperasi melalui dana bergulir;
 - Intermediasi koperasi dengan lembaga keuangan dan lembaga pemasaran;
 - Kemitraan gerakan koperasi melalui peningkatan peran Dekopinda;
 - Pembinaan, pengawasan dan pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi dan tokoh gerakan koperasi;

- Peningkatan manajemen koperasi melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan, perpajakan, dan penggunaan IT;
- (2) Perlu peningkatan jumlah koperasi aktif, agar setiap tahun tercapai bahkan melebihi, sehingga sisa target 2018 hanya tinggal sebesar empat persen; dan
 - (3) Perlu peningkatan jumlah UMKM, setiap tahun tercapai bahkan melebihi hingga akhir RPJMD. Akan tetapi, untuk tahun 2018 masih perlu adanya penambahan anggaran karena UMKM yang ada akan diarahkan untuk dapat menjadi industri kreatif. Selain itu, pemasarannya perlu didorong ke arah *e-commerce*.

q. Urusan Penanaman Modal

Beberapa isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Potensi daerah yang berdayasaing tinggi guna meningkatkan nilai investasi di Kota Bekasi. Diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sebesar 5,57 persen, sehingga target tercapai. Untuk itu, diusulkan untuk memperbaharui (*upgrade*) profil potensi daerah;
- (2) Peningkatan kerjasama promosi dan kerjasama investasi. Sampai dengan tahun 2015 target sudah tercapai dan diasumsikan tahun 2016 dan 2017 kenaikannya sebesar 10 persen, sehingga sisa target yang harus dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 224,446 milyar atau 0,71 persen. Untuk itu diupayakan pada tahun 2018 untuk lebih mengoptimalkan kegiatan promosi;
- (3) Peningkatan nilai investasi, sudah terpenuhi dan tidak terdapat sisa target RPJMD. Capaian investasi sampai dengan 2016 telah terlampaui hingga sebesar 39 persen. Meskipun demikian masih diperlukan anggaran dalam rangka peningkatan nilai investasi;
- (4) Terkait penataan kebijakan investasi, target setiap tahun telah tercapai. Terdapat sisa target RPJMD, yaitu nilai IKM bidang perizinan sebesar 82,50.

Diperlukan tambahan anggaran untuk meningkatkan pencapaian nilai IKM bidang perizinan pada tahun 2018. Beberapa kegiatan yang diusulkan antara lain:

- Peningkatan kualitas SDM;
- Penyempurnaan SOP; dan
- Penataan ruang dan sistem pelayanan perizinan *online* yang terintegrasi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan.

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Beberapa isu strategis bidang kepemudaan dan olah raga di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Sulitnya menemukan pemuda pelopor di wilayah masing-masing kecamatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kategori memenuhi lima bidang (pendidikan; sosial, budaya, pariwisata, dan bela negara; pengelolaan sumberdaya alam; pangan; dan inovasi dan teknologi. Target sampai dengan 2016 belum tercapai sehingga diperlukan pengkaderan untuk mendapatkan bibit-bibit baru pemuda pelopor yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang akan dikirim ke tingkat provinsi dan nasional. Perlu diupayakan terus pemilihan dan pembinaan pemuda pelopor tingkat Kota Bekasi bersama SKPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Statistik dan Persandian, serta Badan Penelitian dan Pengembangan);
- (2) Juga, terkait dengan pembinaan kewirausahaan, target sampai dengan 2016 sudah melampaui. Berdasarkan kondisi eksisting, semua organisasi pemuda di Kota Bekasi telah 100 persen aktif. Akan tetapi masih diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong peran pemuda putus sekolah melalui pembinaan kewirausahaan;

- (3) Minimnya ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan stadion mini. Dari delapan target selama periode RPJMD, sampai dengan 2016 baru terbangun tiga stadion mini di Kecamatan Bekasi Utara, Mustika Jaya dan Pondok Gede. Sedangkan lima stadion mini lainnya akan dibangun di Kecamatan Bekasi Barat, Rawalumbu, Jatisampurna Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Dibutuhkan anggaran untuk pembangunan lanjutan di lima stadion mini tersebut. Pencapaian target sampai dengan 2016 sudah melampaui, yaitu sebesar 90 persen dari 80 persen yang ditargetkan dan diprediksikan pada tahun 2017 dapat tercapai 100 persen. Meskipun demikian, masih diperlukan alokasi anggaran pada tahun 2018 dalam rangka pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif
- (4) Penyediaan sarana olah raga berupa lapangan. Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk sampai dengan 2016 adalah 240 lapangan.

s. Urusan Kebudayaan

Beberapa isu strategis bidang kebudayaan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Sarana pendukung berkebudayaan masih kurang. Saat ini sudah mulai dibangun satu panggung kesenian *outdoor* di lapangan multiguna dan satu gedung kesenian di Situ Rawagede yang akan diselesaikan pada tahun 2017 dengan sumber dana dari Bantuan Provinsi sebesar Rp 4,5 milyar. Akan tetapi, untuk Situ Rawagede tahun 2018 masih memerlukan tambahan dana untuk penataan akses jalan dan sarana prasarana pendukung lainnya yang akan dijabarkan dalam Rencana Aksi. Untuk itu, pada RKPD 2018 ini diusulkan kegiatan penataan akses jalan dan sarana prasarana pendukung lainnya;
- (2) Pemeliharaan situs cagar budaya. Sampai dengan tahun 2016, target pemeliharaan sudah 75 persen, terlampaui sebesar lima persen dari target yang ditetapkan sebesar 70 persen. Sehingga sisa target sampai dengan akhir m RPJMD (Oktober 2018) tinggal sebesar 20 persen, dan akan

diselesaikan pada tahun 2018. Untuk itu, pada RKPD 2018 akan dilaksanakan pemeliharaan situs cagar budaya berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 451/Kep.255.PorBudPar/VI/2001;

- (3) Penyelenggaraan *event-event* budaya Kota Bekasi. Ditargetkan sampai dengan 2016 akan diselenggarakan sebanyak 24 *event*, dan sudah terlampaui tujuh *event*. Sehingga sisa target sampai dengan akhir masa RPJMD 2013-2018 sebanyak empat *event*, yang akan diselesaikan pada tahun 2018. *Event-event* yang akan dilaksanakan merupakan agenda rutin, baik untuk tingkat kota, provinsi, maupun nasional, sehingga tetap membutuhkan anggaran, terlebih tema pembangunan tahun 2018 adalah Tahun Inovasi dan Kreativitas, dengan prioritas untuk mengembangkan seni dan budaya Kota Bekasi.

t. Urusan Perpustakaan

Beberapa isu strategis bidang perpustakaan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Angka kunjungan ke perpustakaan rendah. Beberapa penyebabnya antara lain lokasi gedung perpustakaan Kota Bekasi kurang strategis dan terbatasnya jenis koleksi buku yang dimiliki perpustakaan Kota Bekasi. Untuk hal yang harus dilakukan di tahun 2018 adalah sosialisasi informasi perpustakaan Kota Bekasi, di antaranya melalui bedah buku dan seminar;
- (2) Kurang memadai dan kurang meratanya layanan perpustakaan di Kota Bekasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab, yaitu:
 - Terbatasnya informasi tentang perpustakaan Kota Bekasi dan koleksi buku belum terinformasikan secara luas.
 - Terbatasnya sarana pelayanan perpustakaan keliling. Perlu dilakukan penambahan armada perpustakaan keliling;
 - Belum tersedianya gedung perpustakaan pemerintah kota yang representatif. Diusulkan untuk menyusun rencana aksi pembangunan gedung perpustakaan pemerintah Kota Bekasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) penyusunan FS;
 - (b) penetapan lokasi;
 - (c) penyusunan DED gedung perpustakaan daerah Kota Bekasi;
 - (d) realisasi pembangunan fisik;
- Belum adanya pengembangan perpustakaan digital Kota Bekasi. Untuk itu perlu pengembangan *e-library* Kota Bekasi dan *library corner*;
- (3) Tenaga fungsional pustakawan masih kurang, dan belum terbentuknya lembaga pengelola perpustakaan. Oleh karenanya, belum optimal pula pengendalian, pengawasan, dan pembinaan untuk perpustakaan, baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Untuk itu perlu pembentukan lembaga pengelola perpustakaan Kota Bekasi.

u. Urusan Kearsipan

Usulan kegiatan bidang kearsipan di Kota Bekasi untuk tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. Ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018 bahwa di akhir tahun 2018 seluruh dokumen/arsip daerah sudah dikelola secara baku (100 persen). Menilik pengalaman tahun 2016, capaian yang ditunjukkan masih jauh dari harapan, yaitu target sebanyak 55 persen -baik menurut RPJMD 2013-2018 maupun menurut RKPD 2016- namun capaian yang ditunjukkan masih kurang dari separuh, yaitu 23,08 persen.

v. Urusan Pariwisata

Beberapa isu strategis bidang pariwisata Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) masih perlu terus ditingkatkan. Target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2016, kontribusi ke PAD sudah tercapai dan (bahkan) melebihi target. Namun karena merupakan target tahunan terkait PAD maka anggaran tetap dialokasikan untuk mendorong pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018;

- (2) Penataan kawasan pengembangan destinasi wisata Curug Parigi. Target kontribusi PAD melalui peningkatan angka kunjungan sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan penetapan di RPJMD 2013-2018 baru tercapai 60 persen dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Sisa target sebesar 20 persen yang harus diselesaikan pada tahun 2018 ditambah dengan hutang target tahun-tahun sebelumnya akan dipenuhi, diantaranya dengan melakukan penataan kawasan wisata Curug Parigi. Penyusunan studi kelayakan (FS) kawasan wisata Curug Parigi yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2016 tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang. Ke depan diharapkan penataan kawasan wisata Curug Parigi ini akan dilakukan dengan melibatkan dinas teknis terkait, seperti:
 - (a) Dinas Lingkungan Hidup;
 - (b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- (3) Iklim usaha untuk jasa kepariwisataan kurang kondusif. Ditargetkan sampai sampai dengan tahun 2016 sesuai RPJMD 2013-2018 sebesar 30 persen, namun baru tercapai sebesar 20,9 persen. Sisa target akhir menurut RPJMD adalah sebesar 16 persen, dan akan berusaha dicapai melalui penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan. Selain ketiga dinas teknis di atas, penyusunan naskah akademik Raperda Kepariwisataan juga akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

w. Urusan Pertanian

Beberapa isu strategis bidang pertanian di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Masih ditemukan kejadian penyakit hewan menular. Sesuai target di RPJMD, setiap tahun seharusnya tidak ada kasus/kejadian penyakit hewan menular di Kota Bekasi. Akan tetapi pada tahun 2015 saja masih terdapat satu kasus penyakit hewan menular. Mengingat lalu lintas hewan di Kota Bekasi cukup tinggi sehingga masih perlu dianggarkan dalam rangka

antisipasi terhadap kejadian penyakit hewan menular di Kota Bekasi. Dan, untuk itu perlu upaya penurunan kejadian penyakit hewan menular;

- (2) Prevalensi penyakit ternak masih cukup tinggi. Ditargetkan setiap tahun tidak ada penyakit ternak, akan tetapi mengingat lalu lintas/ distribusi hewan ~termasuk hewan ternak~ di Kota Bekasi cukup tinggi maka diperlukan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit ternak di Kota Bekasi;
- (3) Produksi pertanian dan nilai tambah petani. Target tiap tahunnya adalah upaya selalu tercapai, akan tetapi masih tetap perlu dianggarkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan nilai tambah bagi petani melalui peningkatan penggunaan teknologi pertanian dan kapasitas SDM pertanian;
- (4) Peningkatan produksi peternakan. Target tiap tahunnya adalah upaya selalu tercapai ~bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi di tahun 2016, terdapat kelebihan target produksi peternakan hingga sebesar 2.787 ton dan diproyeksikan tahun 2017 mencapai 17,150 ton;
- (5) Peningkatan produksi perikanan. Hingga tahun 2016, realisasi capaian tiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Demikian juga diproyeksikan untuk tahun 2017 juga akan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu masih perlu dianggarkan dalam upaya peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perikanan di Kota Bekasi melalui peningkatan/pengembangan teknologi pertanian dan kapasitas SDM perikanan (petani ikan);
- (6) Jaminan ketersediaan pangan. Hingga tahun 2016, target penyediaan pangan belum tercapai dikarenakan lahan pertanian yang semakin berkurang sehingga perlu adanya perubahan pertanian di Kota Bekasi ke arah pertanian perkotaan. Untuk itu, tahun 2018 masih diperlukan kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan utama di Kota Bekasi, yang implementasinya secara simultan di Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan;

- (7) Kurangnya *outlet* untuk promosi ikan hias, rumah potong hewan, dan BPTHH. Realisasi capaian tiap tahun selalu tercapai, akan tetapi masih perlu dianggarkan kegiatan terkait dengan upaya optimalisasi PPIH, RPU, dan BPTHH;
- (8) Kebutuhan produk asal hewan yang aman, sehat utuh, dan halal (ASUH) terus meningkat. Target pemenuhan produk asal hewan tiap tahunnya selalu tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, untuk tahun 2016 terdapat kelebihan target sebesar 2.787 ton kebutuhan produk asal hewan, dan diproyeksikan tahun 2017 mencapai 17.150 ton.

x. Urusan Perdagangan

Beberapa isu strategis bidang perdagangan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Menurunnya nilai ekspor. Realisasi nilai ekspor Kota Bekasi tahun 2016 hanya sebesar USD 357.984.953 atau turun sebesar 28,4 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai ekspor ini diantaranya disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri agak melambat. Sementara, pelaku usaha (eksportir) tidak dibatasi oleh administrasi wilayah sehingga tidak tercatat secara real. Diperlukan upaya-upaya meningkatkan nilai ekspor Kota Bekasi, yaitu dengan:
 - Membangun jejaring dengan eksportir;
 - Pendataan pelaku usaha eksportir;
 - Promosi perdagangan produk ekspor;
 - Pembinaan dan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri;
 - Menginformasikan produk yang dibutuhkan negara tujuan ekspor;
 - Meningkatkan pelayanan & kemudahan perizinan bagi eksportir;
 - Peningkatan kualitas produk IKM; dan
 - Peningkatan SDM untuk mendorong tumbuhnya industri-industri kreatif yang berskala ekspor;

(2) Kondisi pasar milik pemerintah yang tidak layak. Beberapa pasar yang HPTDnya sudah berakhir dan akan berakhir yaitu: Pasar Bintara (2016), Pasar Jatiasih (2017), Pasar Kranji Baru (2018), dan Pasar Bantargebang (2019). Ditargetkan tahun 2016 satu pasar tradisional yang modern sudah tercapai, yaitu dengan dibangunnya Pasar Pondok Gede oleh pihak swasta. Secara umum perlu dilakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional, antara lain:

- Revitalisasi Pasar Bintara tahun 2018;
- Revitalisasi Pasar Jatiasih, yang saat ini masih dilakukan studi kelayakan (FS) dan DED, dan diharapkan tahun 2018 sudah mulai pembangunan;
- Revitalisasi Pasar Kranji Baru, tahun depan (2018) mulai dilakukan studi kelayakan (FS) dan penyusunan DED, dan tahun 2019 sudah mulai pembangunan fisik;
- Revitalisasi Pasar Bantargebang, tahun 2019 pelaksanaan studi kelayakan (FS) dan penyusunan DED, dan 2020 mulai pembangunan fisik.

y. Urusan Perindustrian

Beberapa isu strategis bidang perindustrian di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan industri kecil. Ditargetkan pada tahun 2016 industri kecil bertumbuh sebanyak 2.418 unit. Namun karena target tercapai maka untuk tahun 2018 dalam rangka mengurangi angka pengangguran, target ditambah 1,5 persen, sehingga masih diperlukan alokasi anggaran;
- (2) Pertumbuhan industri menengah. Ditargetkan pada tahun 2016 industri menengah bertumbuh sebanyak 470 unit. Dibutuhkan alokasi anggaran dalam rangka mendorong/meningkatkan nilai ekspor daerah dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

z. Urusan Perencanaan

Beberapa isu strategis terkait dengan urusan perencanaan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Kesesuaian antara perencanaan program pembangunan jangka menengah (5 tahunan) dengan pembangunan jangka pendek (tahunan) masih kurang sesuai. Jika mengacu pada target capaian kinerja di RPJMD 2013-2018 maka seluruh isi dokumen RKPD sudah sesuai dengan dokumen RPJMD (100 persen) pada tahun 2018. Namun realisasi target tahunan sampai dengan tahun 2016 (n-2) kesesuaiannya masih 95 persen. Untuk itu, masih perlu ditingkatkan lagi konsistensi sebesar lima persen dalam penyusunan dan elaborasi dokumen RPJMD ke dokumen RKPD;
- (2) Ketersediaan data primer terkait pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi masih kurang. Target capaian kinerja di dokumen RPJMD 2013-2018 untuk tahun 2018 untuk ketersediaan data primer yang tervalidasi dan terbaharui hingga 80 persen (diasumsikan yang 20 persen lagi data primer dari berbagai sumber), sedangkan realisasinya hingga tahun 2016 (n-2) sudah 100 persen. Untuk itu, target yang dituangkan dalam dokumen RKPD 2018 ini sifatnya hanya mempertahankan capaian kinerja saja;
- (3) Ketersediaan data sekunder terkait pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi masih kurang. Target capaian kinerja di dokumen RPJMD 2013-2018 untuk tahun 2018 ditargetkan ketersediaan data sekunder yang tervalidasi dan terbaharui hingga 50 persen (diasumsikan yang 50 persen sisanya data sekunder yang belum tervalidasi dan terbaharui). Realisasi target kinerja pada RKPD 2016 (n-2) sudah 100 persen. Namun demikian, tetap diusahakan target capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen RKPD 2018 sebesar 45 persen;

aa. Urusan Keuangan

Beberapa isu strategis terkait dengan urusan keuangan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Proporsi peningkatan penerimaan dari PAD masih rendah. Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk proporsi penerimaan PAD pada tahun 2018 adalah 21,32 persen, namun realisasi target kinerja pada RKPD 2016 (n-2) baru 13,63 persen. Masih ada selisih negatif sebesar 7,69 persen;
- (2) Proporsi peningkatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih rendah. Target capaian kinerja dokumen RPJMD 2013-2018 untuk proporsi peningkatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 100 persen, atau rata-rata 20 persen per tahun. Namun, kenyataannya, realisasi target kinerja tahunan pada tahun 2016 (n-2) baru bisa dipenuhi sebesar 14,15 persen, masih ada *gap* 2,92 persen dibanding target 17,07 persen;
- (3) Target capaian kinerja di RPJMD 2013-2018 untuk persentase perangkat daerah (PD) yang penyerapan dananya sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Namun realisasi target capaian kinerja pada tahun 2016 (n-2) baru 86 persen, masih perlu digenjot lagi;
- (4) Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk persentase rata-rata sesuai RKBU tahun 2018 adalah 76 persen. Realisasi target capaian kinerja di RKPD 2016 (n-2) adalah 74 persen. Untuk tahun terakhir RPJMD target capaian kinerja masih harus ditingkatkan;
- (5) Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk persentase ketepatan penyelesaian pelaporan kegiatan pembangunan adalah sebesar 90 persen. Realisasi target capaian kinerja di RKPD 2016 (n-2) adalah sebesar 80 persen. Untuk RKPD 2018, target capaian kinerja untuk persentase ketepatan penyelesaian pelaporan kegiatan pembangunan diusulkan sebesar 70 persen;
- (6) Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk persentase ketersediaan aparatur yang memiliki sertifikat PBJ sebesar 75 persen. Realisasi capaian kinerja di RKPD 2016 (n-2) sebesar 60 persen;
- 7) Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk persentase BUMN dalam

kondisi baik sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja di RKPD 2016 (n-2) sebesar 60% Tahun 2018;

- 8) Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk jumlah pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik sebanyak 750 paket. Realisasi capaian kinerja di RKPD 2016 (n-2) sebesar 700 paket;
- 9) Target capaian kinerja RPJMD 2013-2018 untuk persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan ke KLPBJ sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja di RKPD 2016 (n-2) sebesar 80%.



BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pokok bahasan pada Bab ini adalah kondisi ekonomi Kota Bekasi tahun 2016 dan prospek perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2017 dan 2018, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada besaran pendapatan daerah dan selanjutnya mempengaruhi besaran belanja serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini memberikan gambaran kondisi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2018.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Bekasi tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang memiliki tema memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Bekasi juga diarahkan untuk **mencapai tata kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya** dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Kota Bekasi yang Ihsan.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Bekasi di tahun 2018 masih akan terpengaruh oleh dinamika perekonomian nasional dan global. Kondisi perekonomian Kota Bekasi diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat. Oleh karena itu, penyusunan asumsi perekonomian Kota Bekasi tahun 2018 juga mempertimbangkan kinerja perekonomian global, regional, dan nasional tahun sebelumnya.

3.1.1. Perekonomian Global

Berdasarkan data *World Economic Outlook* IMF April 2017, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menurut IMF pada tahun 2017 meningkat 3,4 persen. Artinya, perekonomian dunia tahun 2017 mengalami pemulihan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja ekonomi global tahun 2016 yang hanya tumbuh 3,1 persen. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global dapat mencapai sebesar 3,5 persen pada 2017 dan sebesar 3,6 persen pada 2018. Dalam proyeksi tersebut, IMF menyatakan meski ada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2017 dan 2018, kondisi ekonomi dunia masih memiliki risiko untuk alami penurunan. Terlebih hal itu dorong oleh isu-isu struktural yang dapat menahan pembangunan ekonomi di setiap negara.

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 dan 2018

Kawasan/Negara	Estimasi	Proyeksi	
	2016	2017	2018
Dunia	3,1	3,5	3,6
Negara Maju	1,7	2,0	2,0
Amerika Serikat	1,6	2,3	2,5
Kawasan Eropa	1,7	1,7	1,6
Jepang	1,0	1,2	0,6
United Kingdom	1,8	2,0	1,5
Kanada	1,4	1,9	2,0
Negara Berkembang	4,1	4,5	4,8
Negara Berkembang	0,3	1,7	2,1
Asia	6,4	6,6	6,2
Tiongkok/China	6,7	6,6	6,2
India	6,8	7,2	7,7
ASEAN-5	4,9	5,0	5,2

Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, April 2017

Dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) April 2017, IMF memprediksi kelompok negara Asean 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam

akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat selama 2017-2018. Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen pada tahun 2017 dan 5,3 persen pada 2018. Level tersebut berada di bawah Filipina yang diproyeksi tumbuh 6,8 persen dan Vietnam dengan 6,5 persen pada 2017. Sementara itu, pada periode yang sama di bawah Indonesia terdapat Malaysia dengan 4,5 persen dan Thailand 3,0 persen. Sama seperti negara berkembang dunia lainnya, beberapa negara di Asean-5 ini juga mendapatkan sentimen positif dari mulai pulihnya harga komoditas dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi yang paling terpengaruh.

3.1.2 Perekonomian Nasional

Berdasarkan asumsi ekonomi makro APBN dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan investasi di tengah dorongan belanja infrastruktur pemeringah dan dampak tranmisi *tax amnesty* terhadap perekonomian. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 13.300,- per dolar AS. Sedangkan untuk tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,4 - 6,0 persen dengan laju inflasi 2,5 - 4,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp 13.200,- - Rp 13.900,- per dolar AS.

Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,1	5,4 - 6,0	5,6 - 6,4
Inflasi (% , yoy)	4,0	2,5 - 4,5	2,5 - 4,5
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.300	13.200 - 13.900	13.200 - 13.900
Tingkat Suku Bunga SON 3 Bulan (%)	5,3	4,6 - 5,4	4,6 - 5,4
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	45,0	35 - 50	35 - 50
Lifting Minyak Mentah (ribu barell per hari)	515	630 - 680	540 - 610
Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.150	1.100 - 1.200	1.100 - 1.200

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2017, Kementerian Keuangan

3.1.3 Perekonomian Jawa Barat

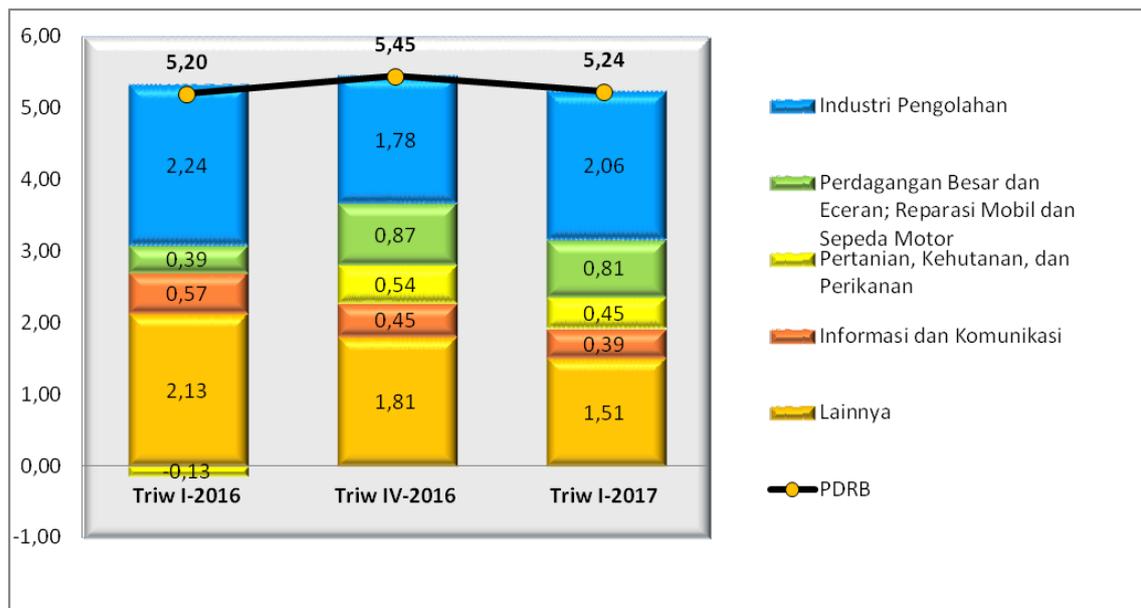
Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2016 tumbuh melambat dibanding triwulan II dan triwulan III yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi. LPE Jawa Barat melambat dari 5,97% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 5,45% (yoy) pada triwulan IV 2016. LPE Jawa Barat pada triwulan IV 2016 kembali tercatat lebih tinggi dari nasional yang tumbuh sebesar 4,94%.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ini terutama disebabkan oleh melambatnya laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga. Perlambatan ini didorong oleh beberapa faktor antara lain : 1) berakhirnya penyelenggaraan PON dan Peparnas pada triwulan III 2016; 2) kecenderungan depresiasi rupiah sepanjang triwulan IV 2016; dan 3) adanya pengalihan lalu lintas akibat perbaikan Jembatan Cisomang menjelang libur Natal Desember 2016. Sementara dari sisi lapangan usaha, tiga lapangan usaha utama penopang perekonomian Jawa Barat yakni industri pengolahan, perdagangan besar-eceran & reparasi mobil serta pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 2,75% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 2,54% (yoy). Berdasarkan dis Agregasi kelompok, tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 masih disumbang oleh kelompok *core* dan *volatile food*.

Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2017 dibanding triwulan I-2016 (y-on-y) tumbuh 5,24 persen. Pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,37 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,42 persen, serta Jasa Lainnya sebesar 8,96 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri Pengolahan; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Konstruksi masih mendominasi PDRB Jawa Barat.



Gambar 3.1 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (y-o-y, persen)

3.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi Ekonomi suatu wilayah atau daerah ditentukan oleh berbagai indikator dan sangat bergantung kepada kondisi perekonomian nasional dan perekonomian global. Sistem perekonomian Indonesia dibagi atas dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan Moneter dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengatur kebijakan moneter Indonesia.

Pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal mengatur kebijakan keuangan melalui berbagai kebijakan anggaran yang tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan fiskal daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya akan menjadi indikator bagi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah antara lain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana

indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Nilai PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp 70,85 triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp 26,096 juta. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan, perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,57 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,61 persen. Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan perekonomian Jawa Barat dan Nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tahun 2015, struktur perekonomian Kota Bekasi tahun 2015 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama, yaitu industri pengolahan sebesar 35,17 persen, perdagangan sebesar 22,73 persen, dan konstruksi sebesar 10,47 persen.

Tabel 3.3 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	2014 (Milyar Rp)	2015 (Milyar Rp)	Laju Pertumbuhan 2016	Distribusi Presentase
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	413.950,44	440.744,24	6,47	0,62
Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-
Industri Pengolahan	23.113.845,11	24.917.814,91	7,8	35,17
Pengadaan Listrik dan Gas	1.972.918,56	1.944.779,91	-1,43	2,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48.518,43	52.218,43	7,63	0,07
Konstruksi	6.467.084,55	7.417.084,55	14,69	10,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.749.845,86	16.106.326,63	9,2	22,73
Transportasi dan Pergudangan	5.988.023,43	7.175.596,75	19,83	10,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.237.969,58	2.530.045,68	13,05	3,57
Informasi dan Komunikasi	1.149.704,65	1.351.503,13	17,55	1,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.786.031,17	2.006.471,74	12,34	2,83
Real Estate	1.020.483,26	1.118.283,92	9,58	1,58
Jasa Perusahaan	273.186,92	303.675,64	11,16	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.330.431,11	1.432.250,99	7,65	2,02
Jasa Pendidikan	1.280.189,67	1.496.501,90	16,9	2,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	637.613,63	722.929,60	13,38	1,02
Jasa Lainnya	1.639.557,70	1.829.694,62	11,6	2,58
Total	64.109.354,07	70.845.922,64	10,51	100,00

a. Pertanian, kehutanan dan perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB di Kota Bekasi. Hal ini sangat dimaklumi mengingat bahwa Kota Bekasi bukanlah daerah potensi pertanian. Dalam kurun waktu 2011-2015 terlihat distribusi kategori ini semakin lama semakin mengalami penurunan. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, kategori ini terus mengalami penurunan kinerja kecuali pada tahun 2013. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.

Tabel 3.4 Ringkasan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	345	351,52	387,75	413,95	440,74
Distribusi (Persen)	0,75	0,68	0,67	0,65	0,62
LPE (Persen)	-2,49	-1,79	0,94	-1,64	-0,33
Indeks Harga Implisit	104,48	108,39	118,45	128,56	137,34
Inflasi NTB (Persen)	4,48	3,74	9,29	8,54	6,83

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Pada tahun 2015, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,64 persen terhadap PDRB Kota Bekasi. Peternakan merupakan penyumbang terbesar dalam kategori ini. Sementara kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan jasa pertanian mengalami penurunan.

b. Industri pengolahan

Kategori industri pengolahan memiliki peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB di Kota Bekasi. Namun peranan kategori ini cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Selama periode 2011-2015 kategori ini mengalami peningkatan kinerja pada kisaran 3-4 persen dan cenderung mengalami perlambatan. Disinyalir perlambatan ini disebabkan oleh pengaruh krisis global yang berimbas pada industri-industri berorientasi ekspor. Melemahnya nilai tukar rupiah juga memberikan tekanan pada *margin rate* terutama untuk industri yang bahan baku utamanya berasal dari impor. Ditambah lagi dengan tuntutan peningkatan upah minimum yang berakibat pada peningkatan biaya produksi.

**Tabel 3.5 Ringkasan Kategori Industri Pengolahan Kota Bekasi,
2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
NTB ADBH (Milyar Rp)	17.994,47	19.493,23	20.971,06	23.113,85	24.917,81
Distribusi (Persen)	39	37,71	36,34	36,05	35,17
LPE (Persen)	4,19	3,72	3,46	3,61	3,25
Indeks Harga Implisit	105,24	109,92	114,29	121,58	126,95
Inflasi NTB (Persen)	5,24	4,44	3,98	3,98	4,42

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Pada tahun 2015 peranan kategori Industri Pengolahan sebesar 35,17 persen yang ditopang oleh subkategori Industri Makanan dan Minuman sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari subkategori Industri Barang Galian Bukan Logam. Kinerja kategori ini meningkat sebesar 3,25 persen di tahun 2015, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen. Kinerja kategori ini pada tahun 2011 merupakan yang terbaik selama lima tahun terakhir.

c. Pengadaan Listrik dan Gas

Peranan kategori Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2015 sebesar 2,75 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tahun 2014. Dilihat dari pertumbuhannya, ternyata kategori ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.6 Ringkasan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Kota Bekasi,
2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	1.040,53	1.325,11	1.553,34	1.972,92	1.944,78
Distribusi (Persen)	2,26	2,56	2,69	3,08	2,75
LPE (Persen)	-1,65	10,11	9,44	6,85	-9,41
Indeks Harga Implisit	117,52	135,93	145,59	173,06	188,3
Inflasi NTB (Persen)	17,52	15,66	7,11	18,87	8,81

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Menurunnya pertumbuhan pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas terutama disebabkan pasokan gas kota yang memang berkurang secara signifikan di tahun 2015. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bekasi merupakan kota yang memiliki fasilitas gas kota yang mempunyai peranan penting dalam penciptaan nilai tambah di kategori ini.

d. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang

Peranan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang terhadap perekonomian di Kota Bekasi selama tahun 2011-2014 sebesar 0,08 persen. Sementara pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 0,07 persen.

Tabel 3.7 Ringkasan Kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	36,75	40,16	45,94	48,52	52,22
Distribusi (Persen)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
LPE (Persen)	9,13	7,79	6,91	5,32	4,97
Indeks Harga Implisit	103,56	104,99	112,34	112,66	115,51
Inflasi NTB (Persen)	3,56	1,38	7,01	0,28	2,53

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Laju pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Kota Bekasi memiliki 2 (dua) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani kebutuhan air bersih. Keduanya melayani wilayah yang berbeda dengan sumber air yang berbeda pula.

e. Konstruksi

Kota Bekasi yang merupakan salah satu daerah penopang Jakarta mempunyai karakteristik tingkat migrasi yang cukup tinggi. Sebagian penduduk yang mempunyai mata pencaharian di wilayah Jakarta memilih untuk bermukim di wilayah Kota Bekasi. Hal ini tentu membawa dampak pada kebutuhan akan perumahan dan fasilitas yang mendukung kebutuhan hidup penduduknya.

Sehingga tidak mengherankan jika pembangunan di Kota Bekasi mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tercatat selama tahun 2011-2015, kontribusi kategori konstruksi terus mengalami peningkatan. Namun pertumbuhannya di tahun 2015 tidak sebesar pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kategori ini mampu menyumbang sebesar 10,47 persen dalam pembentukan PDRB dengan kinerja mencapai 10,26 persen.

Tabel 3.8 Ringkasan Kategori Konstruksi Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	3.672,19	4.474,97	5.478,37	6.467,08	7.417,08
Distribusi (Persen)	7,96	8,66	9,49	10,09	10,47
LPE (Persen)	9,85	12,09	17,18	13,93	10,26
Indeks Harga Implisit	103,1	112,08	117,1	121,33	126,2
Inflasi NTB (Persen)	3,1	8,71	4,47	3,62	4,02

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Kategori ini mampu menggeser peran sektor Transportasi dan Perdagangan mulai tahun 2013. Nampaknya pembangunan perumahan dan infrastruktur yang giat dilaksanakan di Kota Bekasi sejak tahun 2010 mulai menunjukkan hasilnya. Mega proyek Summarecon merupakan salah satu dari sekian banyak proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di Kota Bekasi.

f. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Salah satu ciri dan karakter ekonomi wilayah perkotaan adalah kontribusi kategori perdagangan yang besar. Kota Bekasi sebagai salah satu kota megapolitan di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa peran kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada di atas 20 persen dalam penciptaan PDRB. Pada tahun 2015 kontribusi kategori ini mencapai 22,73 persen, sedikit menurun dibandingkan kontribusinya di tahun 2014. Namun laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 Ringkasan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	10.907,57	12.434,81	13.936,36	14.749,85	16.106,33
Distribusi (Persen)	23,64	24,05	24,15	23,01	22,73
LPE (Persen)	7,09	8,54	5,39	3,22	4,87
Indeks Harga Implisit	105,04	110,32	117,32	120,3	125,26
Inflasi NTB (Persen)	5,04	5,03	6,35	2,53	4,13

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan nilai tambah pada sektor ini.

g. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan yang ada di Kota Bekasi mencakup 3 (tiga) subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, Angkutan Darat, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Sebelum tahun 2013, kategori ini merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap pembentukan PDRB di Kota Bekasi. Namun sejak tahun 2013 posisi tersebut diambil alih oleh kategori Konstruksi.

Selama tahun 2011-2015, kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan berada pada kisaran 8-10 persen. Laju pertumbuhan yang terjadi berfluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2015. Pada tahun 2015 kategori ini mampu tumbuh sebesar 8,91 persen. Angka ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 7,39 persen.

Tabel 3.10 Ringkasan Kategori Transportasi dan Pergudangan Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	4.144,90	4.256,81	5.156,36	5.988,02	7.175,60
Distribusi (Persen)	8,98	8,76	8,93	9,34	10,13
LPE (Persen)	11,6	6,69	4,13	7,39	8,91
Indeks Harga Implisit	103,46	105,91	115,85	125,28	137,84
Inflasi NTB (Persen)	3,46	2,37	9,39	8,14	10,03

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Subkategori Angkutan Darat sangat mempengaruhi peranan kategori ini. Hal ini dikarenakan sumbangan terbesar dalam penciptaan nilai tambah pada kategori Transportasi dan Pergudangan berada pada subkategori Angkutan Darat. Sementara penyumbang terkecil adalah subkategori Angkutan Rel.

h. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Selama periode tahun 2011-2015 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sekitar 3 persen terhadap PDRB Kota Bekasi. Pada tahun 2015 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 3,57 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 3,49 persen.

Tabel 3.11 Ringkasan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	1.536,60	1.721,96	1.957,74	2.237,97	2.530,05
Distribusi (Persen)	3,33	3,33	3,39	3,49	3,57
LPE (Persen)	8,11	7,2	9,57	8,7	8,24
Indeks Harga Implisit	104,74	109,49	113,62	119,49	124,8
Inflasi NTB (Persen)	4,74	4,54	3,77	5,17	4,45

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat laju pertumbuhan positif sebesar 8,24 persen pada tahun 2015. Angka pertumbuhan ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

i. Informasi dan komunikasi;

Dalam era globalisasi, peranan sektor komunikasi menjadi sangat vital sebagai penunjang aktivitas di setiap sendi ekonomi. Di Kota Bekasi sendiri, kategori ini mempunyai kontribusi sebesar 1,91 persen pada tahun 2015. Perkembangan teknologi modern membuat kategori ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Tercatat di tahun 2014 dan 2015 kategori informasi dan komunikasi mampu tumbuh hingga mencapai 17 persen. Kenaikan tersebut cukup fantastis mengingat kondisi tahun 2013 dimana laju pertumbuhan yang terjadi sebesar 8,84 persen.

Tabel 3.12 Ringkasan Kategori Informasi dan Komunikasi Kota Bekasi, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6
NTB ADBH (Milyar Rp)	780,13	892,78	1.011,60	1.149,70	1.351,50
Distribusi (Persen)	1,69	1,73	1,75	1,79	1,91
LPE (Persen)	13,96	13,84	8,98	17,19	17,92
Indeks Harga Implisit	100,33	100,87	104,87	101,7	101,39
Inflasi NTB (Persen)	0,33	0,53	3,97	-3,02	-0,31

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

j. Jasa Keuangan dan Asuransi

Jasa keuangan dan Asuransi selama tahun 2011-2015 memiliki peranan sekitar 2 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Kategori ini memberikan sumbangan sebesar 2,83 persen terhadap pembentukan PDRB tahun 2015. Laju pertumbuhan kategori keuangan dan asuransi pada tahun 2015 sebesar 7,37 persen. Angka pertumbuhan ini meningkat cukup pesat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 2,98 persen. Hal ini menandakan bahwa

kategori ini mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

k. Real Estate

Menjadi salah satu kota penyanggah Jakarta, Kota Bekasi menjadi kota yang sangat berkembang. Banyak pusat perbelanjaan modern yang cukup besar dibangun di kawasan ini. Kondisi ini membuat kinerja perekonomian kategori Real Estat mengalami pertumbuhan yang positif.

Distribusi kategori Real Estat dalam perekonomian Kota Bekasi sebesar 1,58 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut sebesar 7,13 persen, lebih besar dibandingkan tahun 2014 yang tingkat pertumbuhannya tercatat sebesar 5,79 persen.

l. Jasa Perusahaan

Selama tahun 2011-2015 sektor jasa perusahaan telah memberikan kontribusi sebesar 0,4 persen terhadap perekonomian Kota Bekasi. Peranan sektor ini secara lambat namun pasti terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sektor ini memberikan sumbangan sebesar 0,43 persen. Kinerja sektor ini juga tercatat sebesar 17,7 persen.

m. **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini meliputi kegiatan yang bersifat pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2011-2015 peranannya relative stabil dengan menunjukkan sedikit perlambatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2,32 persen; 2,33 persen; 2,21 persen; 2,08 persen dan 2,02 persen.

Laju pertumbuhan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2015 meningkat, yaitu dari 0,59 persen di tahun 2014 menjadi 1,92 persen di tahun 2015.

n. Jasa -Jasa.

Sektor jasa-jasa ditopang oleh jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pada tahun 2015 jasa pendidikan menyumbang sebesar 2,11 persen terhadap total perekonomian Kota Bekasi, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 1,68 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2012-2014 yaitu berturut-turut sebesar 1,78 persen, 1,84 persen dan 2 persen. Melalui penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan ini mengalami perlambatan sebesar 13,01 persen pada tahun 2014 menjadi 10,21 persen pada tahun 2015.

Sementara jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 1,02 persen terhadap perekonomian Kota Bekasi dengan laju pertumbuhan sebesar 10,81 persen. Selama tahun 2011-2015 peran sektor ini relatif stabil. Sementara untuk laju pertumbuhannya cukup fluktuatif dengan kisaran sebesar 6-9 persen.

Sedangkan kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kota Bekasi relatif kecil yaitu berturut-turut selama periode 2011-2015 sebesar 2,66 persen, 2,59 persen, 2,53 persen, 2,56 persen dan 2,58 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif, masing-masing yaitu sebesar 7,54 persen, 7,34 persen, 5,05 persen, 7,39 persen dan 8,21 persen pada periode yang sama.

3.1.4.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesenambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, maka penting untuk menjadikan inflasi sebagai salah satu indikator dalam penyusunan perencanaan keuangan Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bekasi pada April 2017 terjadi Inflasi 0,08 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 124,55 pada Maret 2017 menjadi 124,65 pada April 2017. Laju inflasi tahun kalender 2017 “*year to date*” Kota Bekasi sebesar 1,28 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “*year on year*” (April 2017 terhadap April 2016) sebesar 3,93 persen. Inflasi di Kota Bekasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di 6 (enam) kelompok pengeluaran pada Bulan April 2017. Berturut-turut yaitu: kelompok sandang inflasi sebesar 0,80 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar inflasi sebesar 0,73 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau inflasi sebesar 0,41 persen; kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan inflasi sebesar 0,04 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok bahan makanan deflasi sebesar 1,19 persen.

Pada April 2017, dari 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, IHK gabungan Jawa Barat adalah 126,08 dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,17 persen. Laju inflasi tahun kalender 2017 Kota Bekasi sebesar 1,28 persen, Jawa Barat sebesar 1,38 persen, dan Nasional sebesar 1,28 persen. Laju inflasi *Year on Year* selama dua belas bulan terakhir (April 2017 terhadap April 2016) untuk Kota Bekasi sebesar 3,93 persen, Jawa Barat sebesar 3,92 persen, dan Nasional sebesar 4,17 persen. Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat April 2017, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya dengan inflasi sebesar 0,55 persen dan IHK sebesar 126,42. Berturut-turut diikuti Kota Cirebon sebesar 0,40 persen dan IHK sebesar 123,04; Kota Sukabumi sebesar 0,37 persen dan IHK sebesar 127,34; Kota Depok sebesar 0,22 dengan IHK sebesar 126,47; Kota Bandung sebesar 0,10 dengan IHK sebesar 126,48; Kota Bekasi sebesar 0,08 dengan IHK sebesar 124,65; dan inflasi terendah terjadi di Kota Bogor sebesar 0,07 persen dan IHK sebesar 128,41.

Tabel 3.13 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Bekasi April 2017, Tahun Kalender 2017, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2016	IHK April 2017	Inflasi April 2017 ¹⁾	Laju Inflasi Tahun Kalender 2017 ²⁾	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾	Andil Inflasi April 2017 (%)
Umum	124,55	124,65	0,08	1,28	3,93	-
Bahan Makanan	141,41	139,73	-1,19	-0,96	3,94	-0,2616
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	123,80	124,31	0,41	1,10	3,52	0,0730
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	119,72	120,59	0,73	3,34	4,93	0,1774
Sandang	111,45	112,34	0,8	2,05	2,92	0,0360
Kesehatan	112,44	112,49	0,04	0,45	1,42	0,0017
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	118,12	118,13	0,01	-0,07	5,27	0,0006
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	123,58	123,93	0,28	2,18	3,08	0,0518

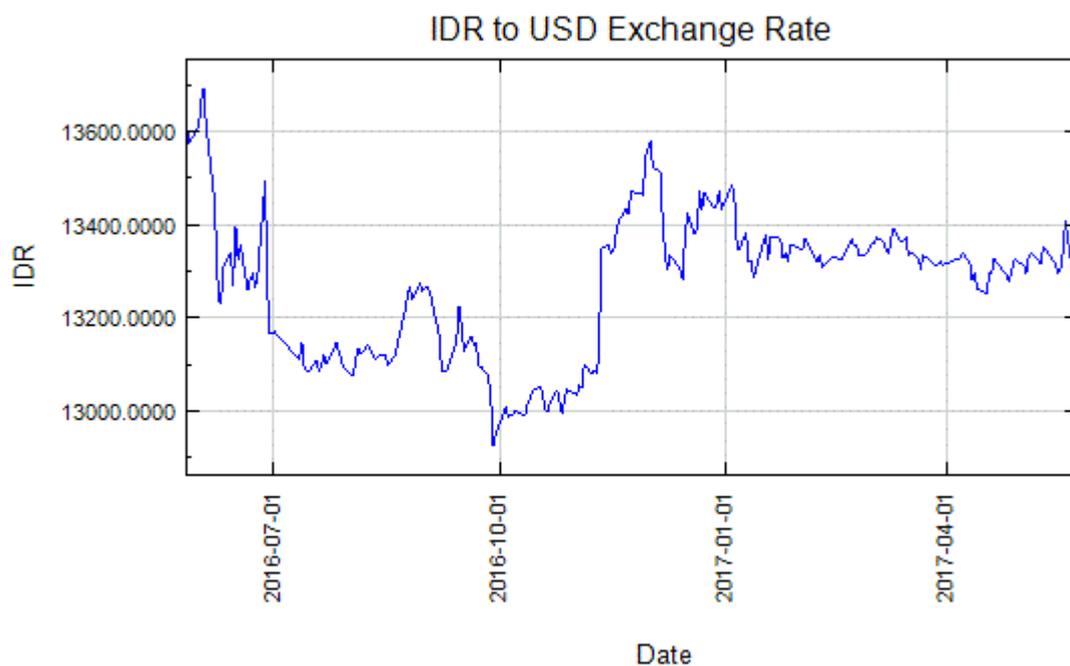
¹⁾ Persentase perubahan IHK April 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya

²⁾ Persentase perubahan IHK April 2017 terhadap IHK Januari 2017

³⁾ Persentase perubahan IHK April 2017 terhadap IHK April 2016

3.1.4.3 Nilai Tukar

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian Kota Bekasi. Hal ini disebabkan Kota Bekasi merupakan kota penyangga bagi Jakarta yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollah Amerika berada pada kisaran Rp 12.926 - Rp 13.946 per Dollar Amerika.



Sumber: United States Federal Reserve Bank of New York

Gambar 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD

Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Kota Bekasi. Dalam hal indikator nilai tukar rupiah terhadap dollar, Pemerintah Kota Bekasi mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. Nilai tukar IDR/USD pada tahun 2017 sebagaimana diproyeksikan dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN Kementerian Keuangan 2017 akan berada pada kisaran Rp 13.300 dan pada tahun 2018 akan berada pada kisaran Rp 13.200 sampai dengan Rp 13.900.

3.1.4.4 Investasi

Secara kumulatif, total nilai investasi yang disetujui pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 6,73 triliun, meningkat 24,10 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp 5,24 triliun. Dari nilai tersebut, nilai investasi PMA yang disetujui tahun 2015 sebesar Rp 821,22 miliar meningkat hampir dua kali lipat (93,54 persen) dibanding tahun

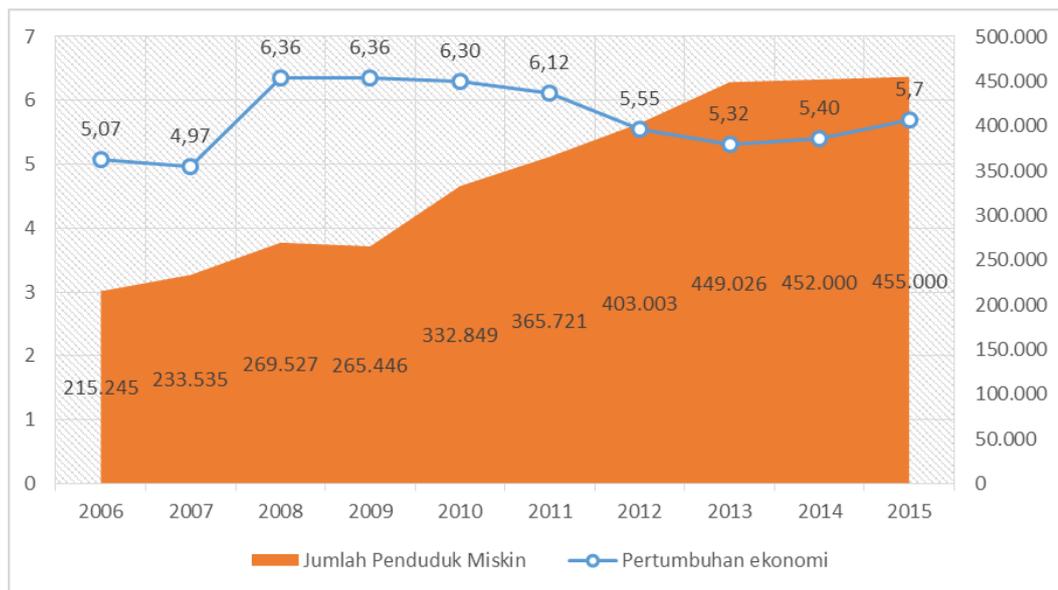
sebelumnya sebesar Rp 44,32 miliar pada tahun 2014. Sedangkan nilai investasi PMDN yang disetujui pada tahun 2015 adalah sebesar RP 5,88 triliun, lebih tinggi (18,50 persen) dibandingkan nilai investasi PMDN tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4,96 triliun.

3.1.4.5 Kemiskinan

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi.

Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kelompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

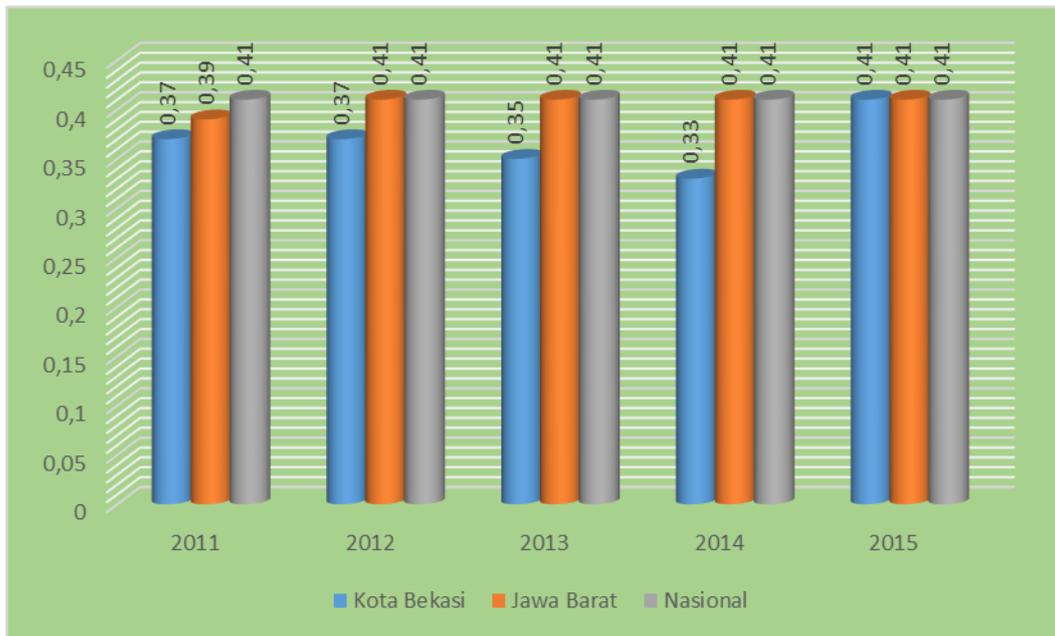
Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Bekasi terus meningkat dari 215.245 jiwa di tahun 2006, menjadi 455.000 jiwa di tahun 2015 atau meningkat dua kali lipat lebih (111 persen). Laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.



Gambar 3.3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bekasi, 2006 - 2015

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah *gini ratio*. Koefisien **Gini** (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Jika dilihat dari koefisien gini (*gini ratio*) di Kota Bekasi, ketimpangan masih cukup besar. Secara berturut-turut, fluktuasi *gini ratio* sejak 2011 sampai 2015 yaitu 0,37, 0,37, 0,35, 0,33 dan terakhir 0,41. Ketimpangan paling rendah terjadi di tahun 2014, yaitu sebesar 0,33 dan meningkat cukup tajam pada tahun 2015 menjadi 0,41. Angka ini sama besarnya dengan *gini ratio* di Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



Gambar 3.4 Gini Ratio Kota Bekasi, Jawa Barat dan Nasional, 2011-2015

3.1.4.6 Ekspor dan Impor

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, perkembangan ekspor dan impor luar negeri berfluktuatif. Nilai ekspor luar negeri sejak 2013 terus mengalami penurunan setelah meningkat cukup tajam pada tahun 2012. Sementara nilai impor cenderung meningkat tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai ekspor luar negeri yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi sebesar US\$ 416.539.629,64 sementara nilai impor luar negeri mencapai US\$ 183.194.124,78.

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan kondisi perekonomian, baik global, nasional, maupun regional sebagaimana diuraikan di atas, perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,50 - 6,50 persen. Sedangkan pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap pada kisaran 5,50 - 6,50 persen.

**Tabel 3.14 Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bekasi, 2017 dan 2018**

Indikator	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,50 – 6,50 persen	5,50 – 6,50 persen

Sumber: RPJMD Kota Bekasi, 2013 – 2018

Inflasi di Kota Bekasi diperkirakan meningkat pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bekasi pada April 2017 terjadi Inflasi 0,08 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 124,55 pada Maret 2017 menjadi 124,65 pada April 2017. Laju inflasi tahun kalender 2017 “*year to date*” Kota Bekasi sebesar 1,28 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “*year on year*” (April 2017 terhadap April 2016) sebesar 3,93 persen.

Tekanan inflasi tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok *administered prices* yang memiliki potensi dampak terhadap inflasi dalam level yang tinggi. Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei 2017 akan meningkatkan tekanan inflasi. Selain itu, terjadi potensi kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi akibat tren kenaikan harga minyak internasional.

Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan cukup stabil dan dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestic dan eksternal. Dalam Nota Keuangan dan APBN 2017, pemerintah pusat memproyeksikan nilai tukar periode 2017 pada kisaran Rp 13.300 per USD. Selanjutnya dengan memperhatikan factor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat selama periode 2018 - 109 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 13.200 hingga Rp 13.900 per USD.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2018, kebijakan keuangan daerah

difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas transfer fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan untuk mendukung kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang sifatnya wajib dan mengikat.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keurangan Pemerintah Pusat dan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pemerintah Kota Bekasi perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada.

Di lain pihak, ruang gerak anggaran daerah perlu lebih dioptimalkan. Hal ini bisa ditempuh tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan yang ada, tetapi juga melalui upaya-upaya yang lainnya seperti penggalan sumber pembiayaan dari pinjaman dan obligasi daerah, efisiensi belanja daerah, penganggaran partisipatif yang melibatkan peran masyarakat, serta pengupayaan *public-private partnership* di dalam pembangunan di daerah.

Secara garis besar kinerja keuangan Kota Bekasi selama 2014 - 2018 disajikan pada tabel 3.14. Dalam tabel di bawah ini, PDRB Kota Bekasi, baik ADBH maupun ADHK mengalami peningkatan berkelanjutan selama kurun waktu 2014- 2018.

Terjadinya peningkatan tersebut disertai dengan kenaikan pendapatan perkapita ADHK masyarakat dalam periode yang sama, yakni Rp Rp 19,88 juta pada tahun 2014 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 21,58 juta pada tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai Rp 22,17 juta pada tahun 2018. Pada periode yang sama, pendapatan per kapita ADBH meningkat dari Rp 24,26 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 30,21 juta pada tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai Rp 32,50 juta pada tahun 2018.

Tabel 3.15 Perkembangan Indikator Keuangan Kota Bekasi, 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB ADBH	64.109.354,07	70.845.922,64	78.290.365,38	86.517.065,25	95.608.221,31
PDRB ADHK	52.534.079,47	55.462.726,87	58.554.639,25	61.818.918,25	65.265.172,87
PDRB PER KAPITA ADBH	24,26	26,10	28,08	30,21	32,50
PDRB PER KAPITA ADHK	19,88	20,43	21,00	21,58	22,17
APBD	3.480.363.127.728,55	3.955.955.949.014,23	4.225.314.416.408,40	4.532.976.286.431,00	5.536.190.679.710,00
APBD (dalam Jutaan)	3.480.363,13	3.955.955,95	4.225.314,42	4.532.976,29	5.536.190,68
APBD/PDRB	5,43	5,58	5,40	5,24	5,79
PAD	1.205.265.728.288,55	1.504.493.440.889,23	1.607.389.410.491,40	1.827.107.722.405,00	2.231.787.151.850,00
PAD/APBD	34,63	38,03	38,04	40,31	40,31

Keterangan:

* Angka perkiraan/proyeksi 2017

** Angka perkiraan/proyeksi 2018

Nilai APBD Kota Bekasi selama periode 2014 - 2018 juga mengalami peningkatan dari Rp 3.480.363.127.728,55 pada tahun 2014, menjadi Rp 4.532.976.286.431,00 pada tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai Rp 5.536.190.679.710,00 pada tahun 2018. Di sisi lain, kualitas daya ungkit (*leverage*) APBD yang mengindikasikan peran APBD terhadap pembentukan PDRB masih berada di kisaran 5 persen, namun cenderung mengalami perbaikan (penurunan) dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 sebesar 5,43 persen, meningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan sejak 2016 menjadi 5,40 persen. Namun tahun 2018 diproyeksikan kembali naik mencapai 5,79 persen. Secara kualitatif, kondisi ini membaik dibandingkan awal tahun RPJMD. Artinya, selama 5 tahun terakhir peran APBD untuk mendorong PDRB semakin kecil dan secara bertahap diambil alih oleh masyarakat. Di samping itu, rasio PAD terhadap APBD secara kuantitas juga mengalami peningkatan dari 34,65 persen pada tahun 2014 menjadi 40,31 persen pada tahun 2017, dan diproyeksikan mencapai 40,31 persen pada tahun 2018. Proporsi PAD yang meningkat mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan dari dana luar (pusat dan provinsi) semakin kecil. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki iklim dan daya dukung investasi serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha.

Tabel 3.16 Proporsi Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Realisasi 2014-2016 dan Proyeksi 2017-2018

Uraian	Proporsi				
	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi Tahun 2018
PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	34,63%	37,92%	38,04%	40,31%	42,65%
Hasil Pajak Daerah	24,30%	26,09%	27,00%	30,43%	31,98%
Hasil Retribusi Daerah	1,45%	1,98%	1,98%	2,22%	2,73%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,34%	0,29%	0,29%	0,36%	0,35%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,54%	9,56%	8,98%	7,30%	7,59%
DANA PERIMBANGAN	36,97%	33,74%	38,99%	39,68%	33,50%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,79%	2,61%	3,50%	3,84%	3,28%

Dana Alokasi Umum	32,57%	30,34%	29,20%	29,19%	24,97%
Dana Alokasi Khusus	0,62%	0,79%	6,29%	6,66%	5,25%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28,40%	28,34%	22,97%	20,01%	23,86%
Pendapatan Hibah	0,30%	0,10%	0,05%	0,00%	0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17,65%	17,07%	16,93%	15,31%	13,75%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,26%	6,97%	0,00%	1,17%	0,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,18%	4,20%	5,99%	3,53%	10,10%
BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	43,27%	36,90%	36,65%	37,37%	38,93%
Belanja Pegawai	40,32%	35,13%	34,16%	33,62%	35,78%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Belanja Hibah	2,11%	1,18%	1,69%	1,51%	1,86%
Belanja Bantuan Sosial	0,72%	0,54%	0,66%	1,40%	1,22%
Belanja Bantuan Keuangan	0,03%	0,03%	0,02%	0,77%	0,02%
Belanja Tidak Terduga	0,09%	0,02%	0,11%	0,06%	0,05%
BELANJA LANGSUNG	56,73%	63,10%	63,35%	62,63%	61,07%
Belanja Langsung Penunjang Urusan	10,78%	9,59%	10,87%	12,24%	8,41%
Belanja Langsung Urusan	45,94%	34,86%	34,42%	33,51%	52,66%

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun proporsi pendapatan asli daerah makin meningkat, dari 34,63 persen pada tahun 2014 menjadi 42,65 persen di tahun 2018. Terjadi peningkatan sebesar 8,02 persen. Sedangkan dana perimbangan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Bekasi semakin mandiri, dengan indikasi semakin menurunnya ketergantungan pada pembiayaan dari luar, baik pemerintah pusat maupun provinsi. Proporsi keuangan daerah untuk kebutuhan belanja pegawai juga lebih kecil dibandingkan belanja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Kota Bekasi semakin sehat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mencakup dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian otonomi khusus.

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu diperhatikan dalam penganggaran pendapatan daerah adalah:

1. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah supaya memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
4. Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal.

Maka strategi yang ditempuh untuk mencapai target pendapatan daerah yang optimal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah adalah upaya untuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun

2018 melalui upaya yang lebih serius untuk memungut pajak dan retribusi yang ada dengan meningkatkan pemberian pelayanan yang maksimal debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga diharapkan adanya dampak positif yaitu pengurangan jumlah tunggakan pajak dan retribusi, penambahan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi;

2. Penyempurnaan regulasi tentang pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan peran sosialisasi untuk ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah supaya informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah terinformasikan kepada masyarakat (WP/WR) dan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
5. Meningkatkan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi;
6. Meningkatkan peran koordinasi baik antar SKPD penghasil maupun ke Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat;
7. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi; dan
8. Pembangunan sistem pajak online.

3.2.1.1 Pajak Daerah

Upaya intensifikasi meliputi:

- a. Kegiatan Forum Komunikasi Stakeholders PBB dan BPHTB adalah upaya untuk menjalin sinergitas dengan PPAT dan Notaris dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor Pajak PBB dan BPHTB
- b. Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB adalah upaya pelayanan pada Dispenda Kota Bekasi terhadap masyarakat Bekasi sebagai Wajib Pajak guna memudahkan dan mengefektifkan pelayanan.
- c. Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan Daerah adalah upaya untuk mensinergikan antara Dispenda dengan SKPD Penghasil melalui Fokus Group

Diskusi (FGD) untuk upaya perencanaan pendapatan daerah dan pengembangan pendapatan daerah.

- d. Penanganan, Konsultasi, Keberatan, dan Banding PBB dan BPHTB, yaitu upaya meningkatkan pelayanan terhadap WP melalui konsuling terhadap WP dengan melibatkan pendamping yakni tenaga ahli.
- e. Pengelolaan Barang Khusus Milik Dispenda Kota Bekasi, yakni melakukan pendataan dan menginventarisir segala jenis barang yang menjadi milik Dispenda untuk di labelisasi dan di hapus terhadap barang yang sudah tidak terpakai.
- f. Rekonsiliasi dan Monitoring Dana Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu upaya meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil Sektor Dana Perimbangan melalui rekonsiliasi dengan Provinsi dan Departemen Keuangan.
- g. Sistem Online Pajak Daerah Kota Bekasi, yakni upaya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pembayaran pajak daerah;
- h. Pendataan Potensi PBB yakni upaya peningkatan penerimaan PAD dari sektor PBB dengan melakukan penilaian OP PBB berdasarkan data yang muktahir
- i. Penyempurnaan ZNT, yaitu kegiatan yang berupaya meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan analisa pasar.
- j. Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB, yakni upaya peningkatan PAD dari sektor PBB melalui penyampaian SPPT (potensi) PBB ke WP.
- k. Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah, , yakni upaya memverifikasi data potensi dengan waktu berkala.
- l. Optimalisasi Pengelolaan PAD, yakni melakukan upaya Penegakan Perda Atas Pajak Daerah, Sosialisasi atas Pajak Daerah
- m. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA), Upgrade aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah dan supervisi UPTD Pendapatan.

- n. Penataan Arsip Dispenda Kota Bekasi, yakni upaya untuk penataan arsip pada kantor pada Dispenda Kota Bekasi.
- o. Penerapan Sistem Penetapan PBB Online, yakni membuat sistem aplikasi pembayaran online melalui android.
- p. Penelitian Lapangan Atas PBB dan BPHTB, yaitu upaya pencocokan data untuk meningkatkan PBB dan BPHTB dalam rangka mengecek nilai pasar terhadap transaksi;
- q. Pelaksanaan Operasi Sisir Pemungutan PBB, yakni upaya jemput bola pembayaran PBB pada hari libur dengan door to door.
- r. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yakni upaya sosialisasi terhadap WP daerah, sosialisasi melalui media cetak, Pendataan potensi pajak air tanah, pajak hotel, dan pajak restoran se-kota Bekasi Pemeriksaan Pajak Daerah, yakni upaya peningkatan PAD audit pajak daerah terhadap WP yang tidak patuh.
- s. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB, yaitu kegiatan penunjang melalui aplikasi sistem guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- t. Penilaian Individual Objek PBB Khusus atau Non Standar, yaitu upaya peningkatan pajak daerah melalui pendataan terhadap objek pajak yang besar.

Adapun upaya ekstensifikasi dilaksanakan melalui:

1. Review terhadap Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) sebagai bentuk upaya penyusunan regulasi yang relevan sesuai kondisi Kota Bekasi saat ini.
2. Melakukan penyesuaian tarif pajak.
3. Melakukan perluasan basis obyek pajak.
4. Peningkatan kualitas kualitas dan kuantitas pelayanan melalui peningkatan integritas dan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.

3.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah, yaitu upaya meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Daerah dilaksanakan melalui pengendalian penggunaan benda berharga/barang koasi.

3.2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah berasal dari hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Kebijakan untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini di Kota Bekasi, adalah sbb:

1. Memperkuat struktur modal BUMD.
2. Meningkatkan kemampuan manajemen bisnis pengelolaan BUMD.
3. Meningkatkan kerjasama promosi dan kerjasama investasi.
4. Meningkatkan angka kunjungan wisata melalui intensifikasi dan ekstensifikasi destinasi wisata.
5. Meningkatkan penerimaan retribusi daerah, diantaranya melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional.

Pendapatan lain-lain yang sah diantaranya diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dana kapitasi JKN-FKTP Puskesmas. Kebijakan Kota Bekasi untuk meningkatkan pendapatan sektor ini adalah dengan:

1. Mengoptimalkan pendapatan dari BLUD melalui penataan ulang porto folio usaha.
2. Mengoptimalkan aset daerah yang berada di lokasi strategis, diantaranya melalui kerjasama investasi untuk mendorong penanaman modal daerah.
3. Menertibkan administrasi pelaksanaan pekerjaan, diantaranya mendorong ketepatan pemenuhan rencana kerja, dll.

3.2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, yang dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.3.1 Kinerja Keuangan Daerah

3.3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan Pendapatan Daerah. Jika dilihat dari kinerja pendapatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja pencapaian target pendapatan Kota Bekasi cukup fluktuatif mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Kota Bekasi dan perekonomian global maupun regional, dimana inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga mengalami fluktuasi.

Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2016, baik dari target maupun realisasinya yang terlihat pada Tabel 3.16. Selama periode tahun 2012-2016, kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi kurang dari 100 persen atau kurang dari target, kecuali tahun 2012 yang melebihi dari target. Kinerja realisasi pendapatan yang kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi harus bekerja lebih keras untuk menghimpun sumber-sumber pendapatannya agar

melebihi dari target yang ditetapkan pada awal tahun rencana. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 15,36 persen dari target 7,90 persen. Sedangkan pertumbuhan realisasi pendapatan yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,24 persen.

Pada tahun 2016 yang lalu, kinerja target dan realisasi pendapatan mencapai 98,48 persen. Di tahun yang sama, pertumbuhan pendapatan yang ditargetkan tumbuh sebesar 7,90 persen, ternyata mampu mencapai pertumbuhan sebesar 15,36 persen atau dua kali lipat dari pertumbuhan yang ditargetkan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kapasitas keuangan Kota Bekasi.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Bekasi 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja (%)	Pertumbuhan	
				Target (%)	Realisasi (%)
2012	2.665.100.361.841,00	2.683.641.254.948	100,7	24,31	20,87
2013	2.973.216.093.959,00	2.962.428.650.336,00	99,64	11,56	10,39
2014	3.569.307.346.689,40	3.480.363.127.728,55	97,51	20,05	17,48
2015	3.976.356.352.496,00	3.662.667.813.067,00	92,11	11,40	7,19
2016	4.290.326.129.657,00	4.225.314.416.408,40	98,48	7,90	15,36

Berdasarkan proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2012-2016 terlihat kecenderungan terjadinya peningkatan proporsi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah serta penurunan proporsi dana perimbangan. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar 27,41 persen meningkat menjadi 38,04 persen pada tahun 2016. Sementara proporsi dana perimbangan menurun dari 45,34 persen pada tahun 2012 menjadi 38,99 persen pada tahun 2016. Apabila tahun 2012 PAD Kota Bekasi baru sebesar Rp 735.485.659.293,00 secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun menjadi Rp 1.607.389.410.491,40 pada tahun 2016. Meningkatnya proporsi PAD berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Secara

rinci proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2012-2016 terlihat pada tahun 2012 - 2016 tercantum pada tabel 3.17:

Tabel 3.17.

Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2012-2016 (Dalam Rupiah dan %)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Total
2012	735.485.659.293,00	1.216.694.015.646,00	731.461.580.009,00	2.683.641.254.948,00
	27,41	45,34	27,26	100,00
2013	971.578.762.110,00	1.187.995.922.096,00	802.853.933.130,00	2.962.428.650.336,00
	32,80	40,10	27,10	100,00
2014	1.042.728.151.600,00	1.349.293.645.316,00	1.025.032.528.063,00	3.417.054.324.979,00
	30,52	39,49	30,00	100,00
2015	1.325.896.803.750,00	1.380.334.288.000,00	956.436.721.317,00	3.662.667.813.067,00
	36,20	37,69	26,11	100,00
2016	1.607.389.410.491,40	1.647.365.217.172,00	970.559.788.745,00	4.225.314.416.408,40
	38,04	38,99	22,97	100,00

Apabila dana alokasi khusus komponen pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan; serta dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang merupakan komponen lain-lain pendapatan yang sah dikeluarkan dari perhitungan pendapatan daerah, maka realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi kurun waktu 2012-2016 akan terlihat sbb.

Tabel 3.18. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2012-2016

Tahun	Penerimaan Daerah*)	Pertumbuhan
	(Rp)	(%)
2012	2.359.889.440.875,00	29,46
2013	2.629.168.232.883,00	11,41
2014	3.458.937.103.728,55	31,56
2015	3.918.004.336.129,03	13,27
2016	3.959.355.115.301,40	1,06

**)Tanpa Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya*

Tabel di atas menunjukkan perkembangan pendapatan daerah Kota Bekasi tanpa memasukkan Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2012 pendapatan daerah sebesar Rp 2.359.889.440.875,00 meningkat menjadi Rp 3.959.355.115.301,40 pada tahun 2016 atau tumbuh dengan rata-rata 17,35 persen per tahun. Pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 1,06 persen.

3.3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Selama periode 2012-2016, target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi terlihat peningkatan dari tahun ke tahun seperti tergambar dalam Tabel 3.19. Kinerja realisasi belanja daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selalu berada di bawah pagu atau targetnya. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2013, yakni sebesar 94,48 persen dari pagu/target, sedangkan terendah pada tahun 2012 yakni sebesar 87,69 persen dari pagu/target. Sedangkan berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja daerah, terlihat bahwa pertumbuhan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 26,15 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 5,00 persen. Kinerja realisasi belanja daerah Kota Bekasi dan pertumbuhannya dari tahun 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang baik, karena menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja Kota Bekasi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan makin meningkat.

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Belanja Kota Bekasi 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Kinerja	Pertumbuhan (%)	
	(Rp)	(Rp)	(%)	Target	Realisasi
2012	2.899.452.982.228,00	2.499.559.813.954,00	86,21	32,8	26,15
2013	3.375.314.866.142,00	2.959.813.138.179,00	87,69	16,41	18,41
2014	3.935.251.952.821,22	3.107.838.415.647,00	78,97	16,59	5,00
2015	4.691.313.300.821,37	3.882.237.460.467,00	82,75	19,21	24,92
2016	5.035.435.715.577,40	4.404.495.132.194,82	87,47	7,34	13,45

Proporsi realisasi komponen belanja terhadap belanja daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang baik, karena proporsi belanja tidak langsung cenderung turun dan proporsi belanja langsungnya cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa proporsi belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan

meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi komponen belanja tidak langsung pada tahun 2012 sebesar Rp 1.119.940.930.974,00 atau 44,81 persen menjadi Rp 1.614.077.501.175,00 atau 36,65 persen pada 2016. Sementara proporsi belanja langsung meningkat dari Rp 1.379.618.882.980,00 atau 55,19 persen pada tahun 2012 menjadi Rp 2.790.417.631.019,82 atau 63,35 persen pada tahun 2016.

Tabel 3.20 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2012-2016 (Dalam Rupiah dan %)

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
2012	1.119.940.930.974,00	1.379.618.882.980,00	2.499.559.813.954,00
	44,81	55,19	100,00
2013	1.226.152.472.647,00	1.733.660.665.532,00	2.959.813.138.179,00
	41,43	58,57	100,00
2014	1.511.751.545.621,00	2.237.477.936.466,00	3.749.229.482.087,00
	40,32	59,68	100,00
2015	1.432.646.830.392,00	2.449.590.630.075,00	3.882.237.460.467,00
	36,90	63,10	100,00
2016	1.614.077.501.175,00	2.790.417.631.019,82	4.404.495.132.194,82
	36,65	63,35	100,00

3.3.2 Asumsi Keuangan Daerah

Asumsi keuangan daerah dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 disusun berdasarkan pertumbuhan total pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya. Tahun 2018, pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp 4.446.081.644.300,00 atau meningkat sebesar 4,99 persen dari tahun 2017 yang sebesar Rp 4.234.776.815.800,00. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah periode 2012-2018 tercatat sebesar 8,59 persen per tahun.

Pertumbuhan belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp 4.679.767.741.676,00 atau meningkat 0,25 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan belanja sebesar Rp 4.459.492.393.665,00 atau turun 4,71 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.21

Asumsi Keuangan Daerah (Rp) dan Pertumbuhan Keuangan Daerah (%) Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2013 – 2018

Uraian	Jumlah					
	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realiasi Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
PENDAPATAN	2.962.428.617.336,00	3.417.054.324.979,00	3.662.667.813.067,00	4.171.774.790.571,00	4.234.776.815.800,00	4.446.081.644.300,00
		15,35	7,19	13,90	1,51	4,99
Pendapatan Asli Daerah	971.578.762.110,00	1.042.728.151.600,00	1.325.896.803.750,00	1.611.380.416.976,70	1.853.087.479.400,00	1.933.431.500.000,00
		7,32	27,16	21,53	15,00	4,34
Dana Perimbangan	1.187.995.922.096,00	1.349.293.645.316,00	1.380.334.288.000,00	1.785.835.574.980,00	1.706.866.953.100,00	1.560.313.423.000,00
		13,58	2,30	29,38	-4,42	-8,59
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	802.853.933.130,00	1.025.032.528.063,00	956.436.721.317,00	774.558.798.614,30	674.822.383.300,00	952.336.721.300,00
		27,67	-6,69	-19,02	-12,88	41,12
BELANJA	2.959.813.138.179,00	3.749.229.482.087,00	4.188.655.800.274,00	4.668.006.835.595,00	4.679.767.741.676,00	4.459.492.393.665,00
		26,67	11,72	11,44	0,25	-4,71
Belanja Tidak Langsung	1.226.152.472.647,00	1.511.751.545.621,00	1.662.999.790.601,00	1.678.542.161.105,00	1.885.012.434.280,00	1.932.951.278.800,00
		23,29	10,00	0,93	12,30	2,54
Belanja Langsung	1.733.660.665.532,00	2.237.477.936.466,00	2.525.656.009.673,00	2.989.464.674.490,00	2.794.755.307.396,00	2.526.541.114.865,00
		29,06	12,88	18,36	-6,51	-9,60

3.3.2.1 Asumsi Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode 2013-2016 tercatat sebesar 12,14 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 1,51 persen. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi pendapatan daerah 2013-2016 dan proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah untuk tahun 2017 tersebut, maka pendapatan daerah tahun 2018 diprediksi akan mengalami pertumbuhan antara 4,99 persen sampai dengan 12,14 persen.

Sedangkan untuk tahun 2016, berdasarkan proyeksi RPJMD pendapatan daerah Kota Bekasi diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,99 persen.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah pada RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 yang menetapkan pertumbuhan belanja daerah semakin kecil dari tahun sebelumnya, maka belanja daerah Kota Bekasi diperkirakan akan tumbuh antara 0,25 persen sampai 9,08 persen untuk tahun 2017 dan diperkirakan turun sebesar 4,71 persen di tahun 2018.

a. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan realisasi penerimaan PAD Kota Bekasi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. PAD Kota Bekasi pada tahun 2013 sebesar Rp 971.578.762.110,00 atau tumbuh 99,00 persen menjadi Rp 1.933.431.500.000,00. Artinya selama kurun waktu 5 tahun PAD Kota Bekasi telah bertambah hampir dua kali lipat.

Pertumbuhan PAD yang tinggi ini terutama ditopang oleh tingginya pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang masing masing tumbuh sebesar 19,08 persen dan 31,58 persen. Berdasarkan APBD tahun 2016, PAD Kota Bekasi sebesar Rp 1.607.389.410.491,40, tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 1.827.107.722.405,00 atau meningkat sebesar Rp

219.718.311.913,60 dibandingkan tahun 2016. Sementara untuk tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 2.260.017.151.850,00.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kota Bekasi pada tahun 2013 sebesar Rp 1.187.995.922.096,00 atau tumbuh menjadi Rp 1.647.365.217.172,00 pada tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 8,41 persen. Berdasarkan APBD Kota Bekasi tahun 2015, dana perimbangan sebesar Rp 1.380.334.288.000,00.

Nilai ini meningkat sebesar 19,35 persen menjadi Rp 1.647.365.217.172,00 pada tahun 2016 dan diperkirakan naik sebesar 9,20 persen menjadi Rp 1.798.904.798.784,00 pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp 1.774.979.927.784,00 atau turun sebesar Rp 23.924.871.000,00 dibandingkan tahun 2017.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada tahun 2013 realisasi sumber pendanaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bekasi sebesar Rp 802.853.966.130,00 atau meningkat 9,76 persen dari tahun 2012 yang sebesar Rp 731.461.580.009,00. Berdasarkan APBD Kota Bekasi tahun 2014, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 1.025.032.528.063,00, meningkat sebesar 27,67 persen.

Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6,69 persen menjadi Rp 956.436.721.317,00 dan kembali naik sebesar 1,48 persen pada tahun 2016 menjadi Rp 970.559.788.745,00.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2017 sebesar Rp 906.963.765.242,00 dan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 1.264.122.950.000,00.

Besarnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2017 belum memasukkan komponen Pendapatan Hibah. Sedangkan untuk tahun 2018 selain belum memasukkan komponen Pendapatan Hibah, juga belum memasukkan komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut di bawah ini :

Tabel 3.22
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 - 2018

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	971.578.762.110,00	1.205.265.728.279,55	1.497.596.436.744,03	1.607.389.410.491,40	1.827.107.722.405,00	2.260.017.151.850,00
	Hasil Pajak Daerah	723.599.671.379,00	845.771.913.123,00	1.030.224.055.885,00	1.140.925.902.871,00	1.379.239.176.600,00	1.694.512.594.900,00
	Hasil Retribusi Daerah	44.290.272.442,00	50.386.438.478,00	78.291.147.427,00	83.611.739.483,00	100.579.334.700,00	144.696.694.750,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.371.037.252,00	11.745.573.968,00	11.368.258.534,00	12.289.820.024,00	16.499.094.400,00	18.532.767.100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	192.317.781.037,00	297.361.802.710,55	377.712.974.898,03	379.561.948.113,00	330.790.116.705,00	402.275.095.100,00
II	DANA PERIMBANGAN	1.187.995.922.096,00	1.286.650.122.476,00	1.332.517.465.266,00	1.647.365.217.172,00	1.798.904.798.784,00	1.774.979.927.784,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	123.113.143.096,00	131.806.845.476,00	103.078.105.266,00	147.700.142.065,00	173.856.036.012,00	173.856.036.012,00
	Dana Alokasi Umum	1.051.235.707.000,00	1.133.417.253.000,00	1.198.049.800.000,00	1.233.705.774.000,00	1.323.057.769.772,00	1.323.057.769.772,00
	Dana Alokasi Khusus	13.647.072.000,00	21.426.024.000,00	31.389.560.000,00	265.959.301.107,00	301.990.993.000,00	278.066.122.000,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	802.853.966.130,00	988.447.276.973,00	1.119.279.994.119,00	970.559.788.745,00	906.963.765.242,00	1.264.122.950.000,00
	Pendapatan Hibah	-	10.320.000.000,00	3.857.000.000,00	2.073.000.000,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	483.240.620.677,00	614.453.342.270,00	673.988.192.639,00	715.262.630.045,00	694.099.775.242,00	728.799.775.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.125.791.500,00	252.836.721.000,00	275.366.338.000,00	0,00	52.941.282.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	106.487.553.953,00	110.837.213.703,00	166.068.463.480,00	253.224.158.700,00	159.922.708.000,00	535.323.175.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (I+II+III)		2.962.428.650.336,00	3.480.363.127.728,55	3.949.393.896.129,03	4.225.314.416.408,40	4.532.976.286.431,00	5.299.120.029.634,00

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2018, Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah akan dilakukan melalui kebijakan - kebijakan :

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi penerimaan pendapatan dengan optimalisasi penagihan pajak dan retribusi;
- Melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi dengan menjangking wajib pajak baru;
- Intensifikasi PBB dan BPHTB dengan melakukan validasi NJOP PBB;
- Sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah;
- Mengakomodir upaya-upaya pencarian sumber potensi baru dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Peningkatan kinerja yang efektif dan efisien;
- Membentuk sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana; dan
- Mengupayakan peningkatan dana dari pusat di luar DAU dan DAK ke daerah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun 2018 diharapkan dapat mampu mengakomodasi program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota serta mampu memberikan

kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Belanja daerah dibagi dalam dua kelompok belanja, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, bantuan hibah, belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau yang terkait dengan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung Kota Bekasi tahun 2014 sebesar Rp 1.511.751.545.621,00 atau meningkat 23,29 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 1.226.152.472.647,00. Peningkatan belanja tidak langsung ini disebabkan oleh meningkatnya belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial dan belanja pegawai. Sedangkan belanja bunga dan belanja hibah mengalami penurunan.

Berdasarkan APBD tahun 2015 belanja tidak langsung turun sebesar 5,23 persen menjadi sebesar Rp 1.432.646.830.392,00. Kemudian tahun 2016 kembali meningkat sebesar 12,66 persen menjadi Rp 1.614.077.501.175,00. Sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 diproyeksi sebesar Rp 1.984.361.656.310,00 dan Rp 2.371.176.628.310,00.

Belanja langsung Kota Bekasi tahun 2014 sebesar Rp 2.237.477.936.466,00 meningkat sebesar 25,66 persen dari tahun 2013 yang sebesar Rp 1.733.660.665.532,00. Berdasarkan APBD tahun 2015 belanja langsung meningkat sebesar 9,48 menjadi Rp 2.449.590.630.075,00. Pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 13,91 persen menjadi Rp 2.790.417.631.019,82. Sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 diproyeksikan mengalami peningkatan masing-masing

sebesar 19,19 persen atau Rp 3.325.792.899.619,00 pada tahun 2017 dan 11,94 persen atau Rp 3.722.968.943.010,00 pada tahun 2018.

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah Kota Bekasi adalah diarahkan agar tidak terjadi defisit penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, belanja daerah Kota Bekasi disusun dengan menggunakan asumsi pertumbuhan yang sama dengan yang terjadi pada pendapatan daerahnya.

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bekasi 2012 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 - 2018

Uraian	Jumlah					
	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
						3
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.226.152.472.647,00	1.344.852.696.267,00	1.432.646.830.392,00	1.614.077.501.175,00	1.984.361.656.310,00	
Belanja Pegawai	1.107.965.569.788,00	1.253.175.414.312,00	1.363.650.359.301,00	1.504.471.822.877,00	1.785.444.355.510,00	2.179.370.795.510,00
Belanja Bunga	194.880.507,00	154.866.047,00	120.138.622,00	63.246.793,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Belanja Hibah	87.670.003.277,00	65.547.098.467,00	45.761.627.000,00	74.297.227.000,00	80.359.118.000,00	113.247.650.000,00
Belanja Bantuan Sosial	27.933.692.500,00	22.271.620.000,00	21.126.000.000,00	29.254.800.000,00	74.200.000.000,00	74.200.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	857.113.700,00	940.892.652,00	1.058.182.433,00	964.438.170,00	41.058.182.800,00	1.058.182.800,00
Belanja Tidak Terduga	1.531.212.875,00	2.762.804.789,00	930.523.036,00	5.025.966.335,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	1.733.660.665.532,00	1.762.985.719.380,00	2.449.590.630.075,00	2.790.417.631.019,82	3.325.792.899.619,00	3.724.068.943.010,00
Belanja Langsung Penunjang Urusan	306.530.354.430,00	335.149.910.729,00	372.427.851.919,00	478.765.877.324,00	649.853.032.114,00	512.184.963.600,00
Belanja Langsung Urusan	1.427.130.311.102,00	1.427.835.808.651,00	2.077.162.778.156,00	2.311.651.753.695,82	2.675.939.867.505,00	3.211.883.979.410,00
JUMLAH BELANJA	2.959.813.138.179,00	3.107.838.415.647,00	3.882.237.460.467,00	4.404.495.132.194,82	5.310.154.555.929,00	6.095.245.571.320,00

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah, pembiayaan pembangunan daerah juga harus didukung sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap diarahkan menjadi *back bone* Pendapatan Daerah. Potensi-potensi sumber pembiayaan pembangunan harus terus dikembangkan disamping memperkuat sumber-sumber yang ada. Dalam pengembangan potensi pendapatan daerah, perlu mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul.

Dalam konteks APBD, Pembiayaan Daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai keseimbangan anggaran tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada saat APBD menggunakan system surplus, maka pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk

pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, pembayaran pokok hutang, dan investasi (modal bergulir, modal dasar, dan penyertaan modal BUMD) didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, efektifitasnya serta bentuk kesiapsediaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pembiayaan pembangunan daerah termasuk dalam ruang lingkup hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 - 2018

Uraian	Jumlah					
	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi Tahun 2018
-2	-4	-5		-6		
Penerimaan Pembiayaan	429.185.663.081,26	369.471.145.229,00	4.224.493.886,00	786.239.955.720,40	859.758.639.299,00	500.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	429.185.663.081,26	369.471.145.229,00	-	786.239.955.720,40	859.758.639.299,00	500.000.000.000,00
Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah	-		-		0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Provinsi	-		4.224.493.886,00		0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	429.185.663.081,26	369.471.145.229,00	4.224.493.886,00	786.239.955.720,40	859.758.639.299,00	500.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	30.167.494.521,00	37.295.988.121,00	27.869.369.888,00	19.312.369.904,00	82.580.369.800,00	83.805.369.800,00
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	21.257.792.000,00	36.965.618.321,00	27.557.000.000,00	19.000.000.000,00	72.250.000.000,00	73.475.000.000,00
Dana Bergulir			312.369.888,00	-	330.369.800,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	8.465.618.321,00	330.369.800,00	-	312.369.904,00	10.000.000.000,00	330.369.800,00
Pembayaran Utang RSUD	444.084.200,00		-	-	0,00	0,00
Pembayaran Hutang Kepada Rekanan	-				0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.167.494.521,00	37.295.988.121,00	27.869.369.888,00	19.312.369.904,00	82.580.369.800,00	83.805.369.800,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	399.018.168.560,26	332.175.157.108,00	(23.644.876.002,00)	766.927.585.816,40	777.178.269.499,00	416.194.630.200,00

Kebijakan umum pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan pembiayaan tahun 2018 diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 dan penerimaan Pinjaman Daerah. Tahun 2017 diperkirakan SiLPA sebesar Rp 500.000.000.000,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran pembiayaan Tahun 2018 diperkirakan berasal dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 73.475.000.000,00, dana bergulir sebesar Rp 330.369.800,00 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 10.000.000.000,00. Sehingga, total pengeluaran pembiayaan tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 83.805.369.800,00.

Berdasarkan perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka Keuangan daerah Kota Bekasi dapat diproyeksikan seperti dalam Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25 Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	APBD TA 2017	PROYEKSI APBD TA 2018
I	PENDAPATAN	4,532,976,286,431.00	5,299,120,029,634.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,827,107,722,405.00	2,260,017,151,850.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,379,239,176,600.00	1,694,512,594,900.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	100,579,334,700.00	144,696,694,750.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,499,094,400.00	18,532,767,100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	330,790,116,705.00	402,275,095,100.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,798,904,798,784.00	1,774,979,927,784.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	173,856,036,012.00	173,856,036,012.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,323,057,769,772.00	1,323,057,769,772.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	301,990,993,000.00	278,066,122,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SA	906,963,765,242.00	1,264,122,950,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	694,099,775,242.00	728,799,775,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,941,282,000.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	159,922,708,000.00	<i>535,323,175,000.00</i>
II	BELANJA	5,310,154,555,930.00	6,095,245,571,320.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,984,361,656,310.00	2,371,176,628,310.00
2.1.1	Belanja Pegawai	1,785,444,355,510.00	2,179,370,795,510.00
2.1.2	Belanja Bunga	300,000,000.00	300,000,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	80,359,118,000.00	113,247,650,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	74,200,000,000.00	74,200,000,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	41,058,182,800.00	1,058,182,800.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3,325,792,899,620.00	3,724,068,943,010.00
2.2.1	Belanja Langsung Penunjang Urusan	426,820,803,000.00	512,184,963,600.00
2.2.2	Belanja Langsung Urusan	2,898,972,096,620.00	3,211,883,979,410.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(777,178,269,499.00)	(796,125,541,686.00)
III	PEMBIAYAAN NETTO	777,178,269,499.00	416,194,630,200.00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	859,758,639,299.00	500,000,000,000.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	859,758,639,299.00	500,000,000,000.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	82,580,369,800.00	83,805,369,800.00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	72,250,000,000.00	73,475,000,000.00
3.2.1	Dana Bergulir	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	330,369,800.00	330,369,800.00
	Kemampuan Keuangan Daerah	5,310,154,555,930.00	5,715,314,659,834.00
	Selisih Lebih / (Kurang) Pembiayaan Daerah	0.00	(379,930,911,486.00)

Dalam hal terdapat Sisa Perhitungan Pembiayaan Tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah harus melakukan melakukan :

1. Pengurangan bahkan penghapusan Pengeluaran Pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah;
2. Pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau;
3. Pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Mengacu pada sistematika RKPD sebagaimana yang disarankan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka Bab IV ini berisikan tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2018, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam tahun 2018.

Prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2018 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2016 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2017, masalah dan tantangan pembangunan, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

4.1.1. Tujuan Pembangunan Kota Bekasi

Secara umum tujuan dan sasaran pembangunan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan serta perencanaan tahunan

daerah (RKPD). Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018 ke dalam langkah-langkah operasional tahunan.

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan kriteria perumusan yang baik adalah sebagai berikut:

- (1) dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaran strategis, dengan memperhatikan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
- (2) satu/beberapa tujuan, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan satu misi;
- (3) rumusan tujuan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ditemukan; dan
- (4) rumusan tujuan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Pembangunan dirumuskan dari penjelasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018 yang kemudian dijabarkan ke dalam standar kinerja yang harus dicapai pada sasaran pembangunan. Berdasarkan Visi “Bekasi Maju, Sejahtera, Ihsan” terdapat 5 (lima) butir Misi yang diterjemahkan menjadi 6 (enam) butir Tujuan Pembangunan Kota Bekasi, yaitu:

1. Misi I: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan butir tujuan:

- 1.1. Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima; dan
2. Misi II: Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota, memiliki dua tujuan, yaitu:
 - 2.1. Terciptanya ruang kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur perkotaan modern; dan
 - 2.2. Transportasi murah, cepat, aman dan nyaman.
3. Misi III: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya, dengan tujuan:
 - 3.1. Kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya yang berkualitas dan aksesibel.
4. Misi IV: Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan tujuan:
 - 4.1. Perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing.
5. Misi V: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai, dengan tujuan:
 - 5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

Keenam butir tujuan pembangunan inilah yang menjadi agenda tetap, dan akan dikerjakan dari tahun ke tahun, termasuk pada pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi tahun 2017.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai agar diikuti dengan penetapan indikator dan target capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Sasaran

ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan satu tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran. Sasaran yang baik secara normatif harus memenuhi kriteria SMART, yaitu:

- (1) *Specific* : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- (2) *Measurable* : sasaran memiliki ukuran yang jelas dan terukur;
- (3) *Achievable* : sasaran dapat dicapai sesuai kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- (4) *Relevant* : ada keterkaitan/relevansi antara target dengan tujuan;
- (5) *Time Bond* : ada jadwal waktu/periode pencapaian sasaran.

Dengan memperhatikan penjelasan visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi dirumuskan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi
Periode 2013-2018

Visi: "Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan"				
Misi		Tujuan		Sasaran
1.	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1.	Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yg prima	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparat sipil negara • Meningkatnya efektifitas dan efisiensi anggaran dan kemampuan pendanaan daerah • Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan • Tersedianya pelayanan publik yang prima
2.	Membangun prasarana dan sarana yg serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota	2.1.	Terciptanya Ruang kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur perkotaan modern	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas • Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup • Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas • Terciptanya tataruang kota berkelanjutan • Terwujudnya pengelolaan sampah yg holistik berbasis teknologi & partisipasi masy • Berkurangnya ancaman banjir • Tersedianya ruang terbuka hijau perkotaan • Berkurangnya ancaman banjir
		2.2.	Transportasi murah, cepat, aman dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya multimoda transportasi yang terintegrasi • Meningkatnya kelancaran lalu lintas
3.	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial	3.1.	Kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain yang berkualitas dan aksesibel	<ul style="list-style-type: none"> • Tertanganinya masalah kesejahteraan sosial • Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas • Tersedianya prasarana-sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas • Tersedianya destinasi pariwisata perkotaan

Visi: "Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan"				
Misi		Tujuan		Sasaran
	lainnya			<ul style="list-style-type: none"> • Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya • Meningkatnya aktivitas kepemudaan • Meningkatnya prestasi olahraga dan aktivitas olah raga di masyarakat
4.	Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif	4.1.	Perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan • Meningkatnya aktivitas UMKM dan ekonomi lokal berbasis industri kreatif • Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat • Tersedianya kesempatan kerja • Meningkatnya investasi • Terkendalinya laju inflasi
5.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai	5.1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan & terpeliharanya keamanan dan ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan • Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Sumber: RPJMD perubahan Kota Bekasi 2013-2018

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Untuk menentukan prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan 4 (empat) hal berikut:

- (a) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bekasi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2018;
- (2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sembilan agenda pembangunan (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah;
- (3) Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; dan
- (4) Arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 guna tercapainya visi dan misi Walikota yang ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2018.

4.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2016 dan perkiraan kinerja tahun 2017 menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi pada tahun 2018. Permasalahan pembangunan tersebut dituangkan dalam isu strategis pembangunan tahun 2018. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2018 berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang baik jumlah maupun kualitas, sehingga perlu ditingkatkan ;
- b. Beberapa persoalan kesehatan masih ditemui, seperti prasarana dan sarana kesehatan yang kurang memadai, penemuan dan perwujudan respon dalam penanganan kejadian luar biasa, dan peran serta warga dalam hidup sehat dan perhatian pada balita yang masih perlu ditingkatkan.
- c. Penanganan kemacetan yang masih parsial, sehingga perlu membuat *road map*.
- d. Penanganan penanganan sampah serta pengendalian banjir dan genangan air belum terpadu dan belum sepenuhnya partisipatif.
- e. Kondisi lingkungan permukiman dan jumlah rumah tidak layak huni masih perlu ditangani melalui pelibatan masyarakat (khususnya perempuan) dan kampung warna-warni.
- f. Peningkatan akses terhadap air bersih masih kurang dan perlu diingkatkan melalui perluasan akses terhadap air bersih dan layanan sanitasi yang aman yang bekerjasama dengan berbagai lembaga donor dan lembaga masyarakat.
- g. Perlunya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, diantaranya untuk memperbaiki cakupan rencana kebakaran, seperti memperbaiki tingkat tanggap waktu (*respon time rate*) layanan wilayah manajemen kebakaran;

- h. Perlu pemeliharaan kondisi keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diantaranya dengan memperbanyak porsi keterlibatan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat yang sudah terlatih.
- i. Belum tersedia prasarana dan sarana untuk menangani masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), sehingga kebijakn di bidang ini belum optimal.
- j. Masih tingginya angka pengangguran terbuka, yang diantaranya disebabkan oleh kurangnya pencari kerja yang memiliki keahlian.
- k. Masih rendahnya partisipasi perempuan, khususnya di lembaga pemerintahan, serta dalam pengambilan keputusan (di lembaga legislatif), serta masih terdapat kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- l. Perlu didorong pencapaian prestasi Kota Bekasi di bidang kebersihan, seperti memperoleh penghargaan Adipura, diantaranya melalui mengurangi volume sampah yang tidak tertangani melalui pelibatan warga, pengefektifan TPA (*final disposition area*) dan TPS (*transfer station*).
- m. Konsolidasi dan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pemakaman sangat mendesak.
- n. Cakupan kepemilikan KTP masih belum memenuhi target, begitu pula dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain (akta kelahiran, dll).
- o. Masih banyaknya titik/simpang kemacetan, yang diantaranya akibat dari beberapa alih fungsi lahan yang membutuhkan evaluasi ketat terhadap seluruh dokumen ANDAL lalu lintas, serta perlunya penataan trayek dan peremajaan angkutan.
- p. Mewujudkan impian menjadikan Bekasi Kota cerdas (*Smart City*).
- q. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM agar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
- r. Daya saing produk dan sektor lokal masih kurang, sehingga perlu ditangani secara serius agat berdampak pada peningkatan kerjasama promosi dan investasi. Perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan SOP, dan penataan ruang

dan sistem pelayanan perizinan *online* yang terintegrasi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan.

- s. Penerimaan dari sektor pariwisata masih rendah. Secara umum iklim usaha untuk jasa kepariwisataan kurang kondusif.
- t. Kesesuaian antara perencanaan program pembangunan jangka menengah (RPJMD) dengan pembangunan jangka pendek (RKPD) daerah masih kurang.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan akan merasionalkan pilihan prioritas pembangunan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tema pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 adalah “**Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas**”. Pertama, yang diperhatikan yakni memperbaiki kualitas belanja. Kedua, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih. Ketiga, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Dan keempat, peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Sasaran Pembangunan Nasional yang akan dicapai pada akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- (1) angka Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,1 persen, dengan angka realisasi dan penyesuaian target sebesar 5,5 – 6,1 persen;
- (2) rasio Pajak terhadap PDB ditargetkan sebesar 15,2 persen, dengan angka realisasi dan penyesuaian target sebesar 12,6 - 12,8 persen;
- (3) angka Pengangguran ditargetkan sebesar 5,3 - 5,5 persen, dengan angka realisasi dan penyesuaian target sebesar 5,3 - 5,6 persen;
- (4) angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 9 - 10 persen, dengan angka realisasi dan penyesuaian target sebesar 9,5 - 10,5 persen;
- (5) angka Indeks Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,38; dan

(6) angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 76,1.

Sementara, sasaran pembangunan Kota Bekasi yang akan dicapai pada akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- (1) angka Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,00 – 7,00 persen;
- (2) rasio Pajak Daerah terhadap PDB ditargetkan sebesar persen;
- (3) angka Pengangguran ditargetkan sebesar 8,2 persen;
- (4) angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,37 persen;
- (5) angka Indeks Gini Ratio ditargetkan sebesar $< 0,3$; dan
- (6) angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 77,72.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi 2018

Prioritas Pembangunan Nasional 2018	Prioritas Pembangunan Jawa Barat 2018	Prioritas Pembangunan Kota Bekasi 2018
1. Pendidikan	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan	
2. Kesehatan	2. Peningkatan layanan kesehatan	
3. Perumahan dan Permukiman	3. Penyediaan infrastruktur dasar perumahan di kota dan desa	1. Kekumuhan
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	4. Peningkatan iklim investasi daya saing usaha dan pariwisata	
5. Ketahanan Energi	5. Peningkatan ketahanan pangan energi dan sumber daya air	
6. Ketahanan Pangan	6. Peningkatan kapasitas KUMKM dan daya saing industri	
7. Penanggulangan Kemiskinan	7. Penanggulangan kemiskinan	2. Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	8. peningkatan penataan ruang daerah	3. Kemacetan
9. Pembangunan Wilayah	9. Peningkatan kualitas kependudukan.	4. Persampahan
	10. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	11. Politik hukum dan tata kelola pemerintahan	

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah terkait dengan upaya menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan pembangunan provinsi, dalam arti penyusunan RKPD Kota Bekasi tahun 2018 dilakukan berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang digariskan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, diuraikan tentang tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2017 dan perubahan RKPD Tahun 2017, disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan RKPD tahun 2018 menggunakan target dan capaian SPM 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Bidang Pendidikan
 - Pendidikan Dasar: setiap WNI usia 7-15 tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan (SNP); dan
 - Pendidikan Anak Usia Dini: setiap WNI usia 1-6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai SNP.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 sebagai berikut:

- Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD;
 - Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP; dan
 - Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB.
- Bidang Kesehatan
- Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan *antenatal* sesuai standar;
 - Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - Setiap WNI usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - Setiap WNI usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Setiap penderita *Diabetes Melitus* mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Setiap orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar;
 - Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; dan
 - Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan *hygiene* sanitasi pangan sesuai standar;

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain:

- Pengelolaan data dan informasi kesehatan;
- Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;

- Pembinaan perbaikan gizi masyarakat;
 - Pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja;
 - Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi;
 - Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga;
 - Pembinaan surveilan, imunisasi, karantina dan kesehatan matra;
 - Pengendalian penyakit menular langsung; dan
 - Pengendalian penyakit tidak menular.
- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Setiap WNI berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih; dan
 - Setiap WNI berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar. Untuk di lingkungan Kota Bekasi kegiatan ini masuk ke Dinas Bangunan dan Permukiman

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain:

- Peningkatan ketahanan air;
 - Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku;
 - Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air;
 - Peningkatan kinerja layanan irigasi;
 - Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air;
 - Peningkatan upaya konservasi sumberdaya air;
 - Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
 - Peningkatan potensi energi dari sumber-sumber air;
 - Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai; dan
 - Penyediaan tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan.
- Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; dan
- Setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain:

- Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Walikota. Penanganan kawasan perukiman kumuh akan fokus pada: (a) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat; dan (b) penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkait perumahan dan permukiman.
 - Data dan profil perumahan di daerah; dan
 - Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai *universal access* melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah.
- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat.
- Setiap WNI yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar;
 - Setiap WNI yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan;
 - Setiap WN yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar;

- Setiap WN korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan);
- Setiap WN berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum; dan
- Setiap WN berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

Selain itu, kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 adalah penanganan konflik sosial, yaitu:

- Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik;
- Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional;
- Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini;
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat kota dan kecamatan;
- Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM);
- Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas);
- Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin;
- Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunan umat beragama (FKUB);

- Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing;
 - Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan; dan
 - Pelaksanaan revolusi mental.
- Bidang Sosial
- Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar;
 - Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar;
 - Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga; dan
 - Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental, sensorik, intelektual) dalam dan luar panti;
- Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti.
- Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam dan luar panti;
- Rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang) dalam dan luar panti;

- Pemberian bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga dan bibit tanaman;
- Membangun sistem pelayanan sosial terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di kelurahan (jika ada); dan
- Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan di tingkat kota.

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Review peraturan daerah dan peraturan walikota terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah;
- Dukungan pelaksanaan pilkada serentak;
- Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah;
- Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja dan budaya kerja PD;
- Evaluasi jabatan perangkat daerah;

- Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah;
- Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap LPPD;
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh pemerintah provinsi; dan
- Penyusunan dan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Karenanya, perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan:

- Pemerintah Kota Bekasi yang akan melaksanakan Pilkada agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra PD periode berikutnya;
- *Updating* data dan informasi yang akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumberdaya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan Kota Bekasi dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Bekasi dan Perubahan APBD Kota Bekasi untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;

- Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja PD (Renstra PD, Renja PD, dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
- Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/ atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- Penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengendalian penduduk dan KB untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pema-kaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun), serta penurunan kehamilan tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun);
- Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, terkait (1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, (2) menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga, (3) perencanaan kehamilan, (4) penggerakan pelayanan KB (MKJP) dan konseling kesehatan reproduksi, (5) penggerakan mekanisme operasional lini lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader), dan (6) pembangunan keluarga/peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe);
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah, pendistribusian alokon disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan di dalam Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (Bantuan Operasional KB/BOKB), menjadi tiga wilayah yaitu: (1) daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas), (2) daerah yang masuk non-galciltas, dan (3) daerah yang masuk wilayah perkotaan.

e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di bidang urusan administrasi kependudukan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal:

- Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- Kabupaten/kota yang *database* kependudukan yang tersambung (*online*) dengan provinsi dan nasional;
- Kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah maupun *Data Center* Kependudukan secara *Online*; dan
- Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

f. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah Kota Bekasi agar menjadikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;
- Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan sisdu pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah;

- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintahan Daerah;
- Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut;
- Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK;
- Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis K/L yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non-permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan

- Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari Kota Bekasi ke Provinsi Jawa Barat dan ke Pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain:

- Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan kelurahan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kelurahan;
- Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan keuangan dan aset kelurahan;
- Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan;
- Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan kelurahan sesuai kondisi di masing-masing kelurahan dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
- Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;
- Penyelesaian penyusunan profil kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
- Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat; dan
- Pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar tradisional.

h. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, Pemerintah Kota Bekasi wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan review dokumen RPJMD, RKPD, Renja PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;
- Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, review laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pemerintahan daerah yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2019 adalah 65% untuk pemerintah kota;
- Pengawasan pengadaan/jasa melalui monev kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Pengawasan Dana Desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan Dana Desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh PD yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan pencegahan korupsi di internal pemerintahan daerah dan berada pada level 3 (tiga) di tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Ini sesuai target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- Pengawasan reformasi birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan *Whistle Blower System*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan

- Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan APIP, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

i. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam dokumen RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan:

- Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Kota Bekasi guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub-bidang dan sub sub-bidang urusan pemerintahan;
- Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan
- Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di Kota Bekasi.

j. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

- Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;
- Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;
- Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah;
- Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED);
- Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012;
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); dan
- Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

k. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner. Dalam rangka

mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal:

- Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodaln usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;
- Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HaKI;
- Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
- Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.

l. Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal berikut:

- Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan;
- Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya;
- Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah;
- Penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan; dan
- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

m. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- Akreditasi lembaga pelatihan;
- Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK);
- Pengembangan LPKS yang kredibel;
- Pengembangan instruktur yang kompeten;
- Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro;
- Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- Peningkatan usaha produktif yg menerapkan teknologi tepat guna;
- Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan
- Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan.

n. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah;
 - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, yaitu:
 - Perluasan akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri; dan
 - Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
 - Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui bintek dan fasilitasi standarisasi sertifikasi KUKM; dan
 - Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.
- o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Meningkatkan efektivitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan berkualitas dalam mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;
- Memperkuat sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

p. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD 2018 supaya memperhatikan:

- Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non-komersial;
- Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil;
- Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan *e-Gov* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) nasional;

- Penyusunan daftar putih yang aman digunakan untuk sekolah, pesantren, tempat pendidikan dan masyarakat;
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan penyiaran;

q. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Dalam rangka pemberdayaan pemuda dan olahraga, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal berikut:

- Meningkatkan pembibitan & pengembangan bakat atlet berprestasi;
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan;
- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga; dan
- Memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.

r. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam rangka pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi, melalui penyediaan permukiman transmigrasi yang sarana dan prasarannya berkembang dan berfungsi;
- Pendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan; dan

- Pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi melalui tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.

s. Peningkatan Pelayanan Ketahanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- Pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan;
- Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- Peningkatan produksi bibit ternak;
- Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan;
- Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian;
- Penelitian/perekayasa dan pengembangan mekanisasi pertanian, tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan;
- Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, subterminal agribisnis, unit pemasaran poktan/gapoktan; dan
- Peningkatan produksi pakan ternak.

t. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan perda tentang RPPLH untuk menjamin tersedianya rencana pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

- Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009;
- Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
- Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air; dan
- Pelaksanaan inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

u. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra-bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran (damkar) dan SDM damkar;
- Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi damkar dan SDM damkar;
- Sarana prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah untuk pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- Implementasi penerapan SPM bidang damkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

u. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, K/L dan lembaga berbadan hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

- Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;
- Penegakan peraturan daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP; dan
- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

v. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlakuan.

w. Program Pengembangan Perpustakaan antara lain: meningkatkan pembinaan dan pengembangan jenis perpustakaan di provinsi, kota, dan kelurahan, menambah koleksi, dan koleksi kekhasan daerah serta pelestarian hasil warisan budaya bangsa.

- x. Program Kearsipan antara lain: pembinaan kepada instansi pencinta arsip di kota dan kelurahan serta penerapan e-Arsip dan sistim informasi kearsipan nasional.

4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pembangunan yang dipilih dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun (2013-2018) telah dijabarkan ke dalam tahapan tahunan yang masing-masing memiliki tema sesuai prioritas permasalahan yang akan ditangani, yaitu:

- a. Tahun pertama: Tahun Kelembagaan dan Penataan

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama RPJMD, yaitu tahun 2014 diarahkan untuk memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan Kota Bekasi sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Keberhasilan dari capaian arah kebijakan tahun pertama ini dapat dilihat dengan semakin tertatanya kelembagaan Pemerintah Kota Bekasi dan meningkatnya kapasitas organisasi dan aparatur sipil yang didukung arah kebijakan yang terintegrasi yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada.

- b. Tahun kedua: Tahun Pelayanan Dasar

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua RPJMD, yaitu tahun 2015 diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan dan memperkuat aspek ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan dari capaian program tahun kedua ini dapat dilihat dengan semakin baiknya proses pelayanan publik dan tersedianya standar pelayanan minimal di seluruh instansi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

- c. Tahun ketiga: Tahun Infrastruktur dan Utilitas

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga RPJMD, yaitu tahun 2016 diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui

penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Keberhasilan dari capaian tahun ketiga dapat dilihat dengan semakin meningkatnya infrastruktur perkotaan, meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman, semakin meningkatnya pengendalian sampah dan banjir yang didukung semakin meningkatnya sistem drainase perkotaan dan semakin meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi.

d. Tahun keempat: Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah:

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat RPJMD, yaitu tahun 2017 diarahkan untuk memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi, dengan mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi melalui perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim investasi melalui penataan regulasi tentang investasi, sehingga terwujud skema *public-private partnership* yang saling menguntungkan. Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi, meningkatnya wajib pajak, dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

e. Tahun kelima: Tahun Inovasi dan Kreativitas

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD (2018) diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat kota Bekasi yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Kota Bekasi yang Ihsan. Adapun beberapa indikator keberhasilan pencapaian kebijakan tahun kelima yaitu meningkatkannya aktivitas pariwisata, seni dan budaya, peningkatan *event-event* kepemudaan dan olahraga.

Tahun 2018 merupakan Tahun Kelima (terakhir) pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018, yang memiliki tema “**Berkarya Melalui Kreativitas dan Inovasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.**” Arah kebijakan pembangunan pada tahun kelima ini diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Kota Bekasi yang Ihsan.

Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi
Periode 2013-2018

Tujuan		Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> • Tertatanya kelembagaan pemerintah kota • Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil negara • Terlaksananya tata kelola keuangan dan barang daerah berbasis akrual • Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan • Tersedianya pelayanan publik yang prima • Terwujudnya sinergitas pembangunan dengan daerah lain 	Memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah & seluruh sektor pembangunan serta mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik
2.	Kapasitas pendanaan pembangunan daerah yang meningkat didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas pendanaan pembangunan • Meningkatnya efektivitas dan efisiensi anggaran 	Meningkatkan pelayanan wajib pajak & kerjasama dengan pihak swasta
3.	Ruang kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur perkotaan modern	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas • Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup • Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas • Terciptanya tataruang kota berkelanjutan • Terwujudnya pengelolaan sampah yg holistik berbasis teknologi & partisipasi masy • Berkurangnya ancaman banjir • Tersedianya ruang terbuka hijau perkotaan 	Mendukung perbaikan infrastruktur terkait tatakelola dan kualitas pemukiman kota

Tujuan		Sasaran	Arah Kebijakan
4.	Transportasi murah, cepat, aman dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur transportasi perkotaan • Tersedianya multimoda transportasi yang terintegrasi • Meningkatnya kelancaran lalu lintas • Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana lalu lintas 	Mendukung tersedianya fasilitas transportasi yang berkualitas dan pengendalian kemacetan lalu lintas
5.	Layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain yang berkualitas dan aksesibel	<ul style="list-style-type: none"> • Tertanganinya masalah kesejahteraan sos. • Tersedianya prasarana-sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas • Tersedianya prasarana-sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas • Tersedianya destinasi pariwisata perkotaan • Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya • Meningkatnya aktivitas kepemudaan • Meningkatnya prestasi olahraga dan aktivitas olah raga di masyarakat 	Mendukung program dan infrastruktur yang menjamin tersedianya akses pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya yang terbaik bagi masyarakat
6.	Perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan • Meningkatnya aktivitas UMKM dan ekonomi lokal berbasis industri kreatif • Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat • Tersedianya kesempatan kerja • Meningkatnya investasi • Terkendalinya laju inflasi • Berkembangnya industri yang tertata baik 	Mendukung semua aktivitas perekonomian terutama sektor perdagangan, UMKM dan koperasi sehingga tercipta akses kesempatan kerja
7.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan • Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat 	Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat

Adapun beberapa indikator keberhasilan pencapaian kebijakan tahun kelima yaitu 5 Goals Pembangunan 2018, yaitu:

1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui pengembangan *e - Government*
2. Optimalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya berbasis IT.
3. Pengembangan tata ruang kota yang didukung oleh infrastruktur dan utilitas perkotaan berbasis sustainable development berbasis *smart city (Smart Living & Smart Environment)*
4. Penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kreatif melalui pengembangan inovasi, kreativitas enterprenership dan teknologi informasi (*e-commerce*)

5. Pengembangan *Urban Tourism* yang didukung oleh aktivitas seni, budaya dan event-event kepemudaan serta olahraga (*Smart People*).



Gambar 4.1.
Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Dalam Rangka Mendukung Kreativitas dan Inovasi Daerah Tahun 2018

4.2.5. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018

Mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 terdapat 117 program pembangunan daerah. Ke-117 program pembangunan daerah ini telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahannya. Dengan demikian, ke-117 program prioritas pembangunan daerah ini merupakan program pembangunan yang memiliki Kode Rekening sebagaimana disebut dalam Lampiran A tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Dari 117 program pembangunan daerah sebagaimana hasil Review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, terdiri atas 81 program prioritas dan 36 program pendukung prioritas. Kriteria pengelompokan prioritas pembangunan didasarkan pada:

- (a) Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi terpilih, yang telah ditentukan setiap tahunnya;
- (b) Kesesuaian program pembangunan daerah dengan 9 (sembilan) butir isu strategik hasil review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, sebagai berikut:
 1. Peningkatan kinerja pelayanan publik;
 2. Perbaikan tata kota dan kualitas pemukiman;
 3. Peningkatan transportasi cepat, aman dan nyaman;
 4. Optimalisasi sumber pendanaan daerah;
 5. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah;
 6. Peningkatan daya saing Kota Bekasi bagi investor;
 7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 8. Optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya; dan
 9. Peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat.

Untuk tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, yaitu tahun 2018, terdapat 110 program pembangunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.4.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi
Berikut Kode Rekeningnya Tahun 2018

No	Program	Kode Rekening		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	1	15
2	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	1	1	16
3	Program Pendidikan Non Formal	1	1	17
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	18
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	1	19
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	2	15
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	2	16
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1	2	17
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	2	18
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	19

No	Program	Kode Rekening		
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	2	20
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	2	21
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	2	22
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	2	23
15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	2	24
16	Program Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	1	2	25
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	2	26
18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1	2	27
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	2	28
20	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	3	15
21	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1	3	16
22	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	3	17
23	Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan	1	3	18
24	Program penyediaan dan pengolahan air baku	1	3	19
25	Program Pengendalian Banjir	1	3	20
26	Program Pemanfaatan Ruang	1	3	22
27	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU	1	3	24
28	Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	3	25
29	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	3	27
30	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	3	28
31	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	1	3	29
32	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	1	3	30
33	Program Pengembangan Perumahan	1	4	15
34	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	4	16
35	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1	4	17
36	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	5	15
37	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	5	16
38	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1	5	17
39	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	5	18
40	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1	6	15
41	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	6	16
42	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	6	17
43	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	1	15
44	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	1	16

No	Program	Kode Rekening		
45	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	1	17
46	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	2	2	15
47	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	2	2	16
48	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2	4	15
49	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2	5	15
50	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	5	16
51	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	5	17
52	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	2	5	18
53	Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	2	5	19
54	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2	5	20
55	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	6	15
56	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	2	7	15
57	Program Keluarga Berencana	2	8	16
58	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2	9	15
59	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	9	16
60	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2	9	17
61	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2	9	18
62	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2	9	19
63	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	10	15
64	Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	2	10	17
65	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	10	18
66	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2	11	16
67	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	11	18
68	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	12	15
69	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	2	12	16
70	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2	13	15
71	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2	13	16
72	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	2	13	17
73	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	2	13	18
74	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	16	15
75	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	17	15
76	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	2	18	15
77	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	2	15
78	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3	3	15
79	Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan	3	3	16
80	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3	6	15
81	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	3	6	16

No	Program	Kode Rekening		
82	Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar	3	6	17
83	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3	6	18
84	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	3	6	19
85	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	3	7	15
86	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3	7	16
87	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	1	15
88	Program Penataan Perundang-Undangan	4	1	16
89	Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	4	1	18
90	Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda)	4	1	19
91	Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	4	1	20
92	Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	4	1	21
93	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4	1	22
94	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	4	1	23
95	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	4	1	24
96	Program Pendidikan Politik Masyarakat	4	1	25
97	Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu	4	1	26
98	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbang)	4	1	27
99	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4	2	15
100	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	4	2	16
101	Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance Inspektorat	4	2	17
102	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4	3	15
103	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	3	16
104	Program Perencanaan Sosial Budaya	4	3	17
105	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	3	18
106	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	3	19
107	Program Pengembangan Data dan Informasi	4	3	20
108	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	4	15
109	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD)	4	5	15
110	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4	5	16

Dari 110 program pembangunan yang dialokasikan di tahun 2018, terdapat 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target Kinerja Program
1	Kemacetan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan baru terhadap panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1. 3181.79 km
			Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	2. 14.55 %
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96.28 %
		Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan data base pembangunan	100%
		Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)	Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n)	1. 100 %
			Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum (PJU)	2. 100 %
			Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik	3. 72 %
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan fasilitas sarana lalu lintas yang berfungsi baik	1. 86 %
			Penyelesaian 19 titik kemacetan di Kota Bekasi	2. 74 %
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan BRT di Kota Bekasi	1. 50 %
			Persentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman, dan nyaman	2. 47 %
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	3%
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase terpasangnya/terbangunnya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor	92%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan bermotor yang laik jalan	100%		
2	Kekumuhan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Program	Target Kinerja Program
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	100%
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%
		Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah penyerahan PSU	25 bidang
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio luas RTH terhadap wilayah kota	12 %
Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota	1 Titik			
3	Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya	47%
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah	39%
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	40%
4	Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	69 %
			Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	0.95 persil
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah	140 kelompok
			Persentase Limbah Yang Terolah	21.11 %
			Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan	296.015 %
			Jumlah Teknologi Baru	1 1 unit

4.2.6. Alokasi Pagu Anggaran

Selanjutnya pengalokasian pagu anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah terkait, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.
Alokasi Pagu Anggaran
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan Tahun 2018

No	Perangkat Daerah	Pagu 2018	Persentase Terhadap Keseluruhan
1	Dinas Pendidikan	270.071.571.000	8,41
2	Dinas Kesehatan	203.048.100.410	6,32
3	Rumah Sakit Umum Daerah	291.000.000.000	9,06
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	945.659.921.000	29,45
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	599.982.596.000	18,69
6	Dinas Pemadam Kebakaran	33.882.500.000	1,06
7	Satuan Polisi Pamong Praja	28.177.335.000	0,88
8	Dinas Sosial	13.260.000.000	0,41
9	Dinas Ketenagakerjaan	6.825.000.000	0,21
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.912.000.000	0,25
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.050.000.000	0,13
12	Dinas Lingkungan Hidup	160.468.400.000	5,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.281.849.000	0,48
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.629.200.000	0,27
15	Dinas Perhubungan	38.869.000.000	1,21
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta Persandian	34.450.000.000	1,07
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.200.000.000	0,26
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.220.000.000	0,10
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19.750.000.000	0,62
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.430.000.000	0,32
21	Dinas Perpustakaan Daerah	6.700.000.000	0,21
22	Dinas Kearsipan Daerah	2.663.230.000	0,08
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	7.950.000.000	0,25
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.450.000.000	0,36
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.350.000.000	0,51
26	Badan Pendapatan Daerah	7.150.000.000	0,22
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.344.320.000	0,29
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	13.570.195.000	0,42
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.950.000.000	0,09
30	Sekretariat Daerah	59.745.000.000	1,86
31	Sekretariat DPRD	42.135.000.000	1,31
32	Inspektorat	5.502.100.000	0,17
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.200.000.000	0,16

No	Perangkat Daerah	Pagu 2018	Persentase Terhadap Keseluruhan
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.830.000.000	0,12
35	Kecamatan Bekasi Timur	30.203.200.000	0,94
36	Kecamatan Bekasi Barat	33.174.812.000	1,03
37	Kecamatan Bekasi Utara	40.458.900.000	1,26
38	Kecamatan Bekasi Selatan	27.332.830.000	0,85
39	Kecamatan Jatiasih	30.020.250.000	0,93
40	Kecamatan Pondokgede	25.209.020.000	0,79
41	Kecamatan Bantargebang	11.376.540.000	0,35
42	Kecamatan Jatisampurna	24.704.546.000	0,77
43	Kecamatan Rawalumbu	26.335.430.000	0,82
44	Kecamatan Mustikajaya	24.091.744.000	0,75
45	Kecamatan Medan Satria	20.790.930.000	0,65
46	Kecamatan Pondok Melati	19.378.460.000	0,60
Jumlah		3.210.783.979.410	100

4.2.7. Indikator Kinerja dan Target Capaian

Untuk mewujudkan pencapaian target-target prioritas pembangunan Kota Bekasi, telah dirumuskan program prioritas pada seluruh Perangkat Daerah (PD) beserta target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Misi I : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik				
Sasaran Misi I : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				
1.	Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	Opini	Satus opini	WTP
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks IKM	80
3.	Pencapaian IKK dalam EKPPD	Skor	Nilai EKPPD	3.237
4.	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	%	$\frac{\text{Jumlah program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP}} \times 100\%$	100
5.	Ketersediaan database pembangunan	Jenis database	Jumlah database: Tersedia (S), Terbaharui (B), dan Lengkap (L)	20 SBL
6.	Kepemilikan KTP	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP}} \times 100\%$	100
7.	Bayi lahir mendapatkan akte kelahiran	%	$\frac{\text{Bayi lahir lengkap administrasi mendapatkan akte kelahiran pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP}} \times 100\%$	100

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Jumlah bayi lengkap administrasi pada tahun berkenaan	

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Misi II : Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota				
Sasaran Misi II : Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga				
1.	Panjang jalan dlm kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total panjang jalan}} \times 100\%$	96,28
2.	Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	$\frac{\text{Panjang jalan arteri dan kolektor yang mempunyai trotoar}}{\text{Total panjang jalan arteri dan kolektor}} \times 100\%$	55
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	$\frac{\text{Drainasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah drainase}} \times 100\%$	70,62
4.	Berkurangnya luasan genangan banjir	%	Jumlah genangan	4,99
5.	Pelayanan kebutuhan penerangan Jalan Umum (PJU)	%	$\frac{\text{Jumlah PJU terpasang}}{\text{Jumlah drainase}} \times 100\%$	100

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6.	Rumah layak huni	%	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	99,33
7.	Kawasan kumuh yang tertata	%	$\frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang tertata}}{\text{Jumlah kawasan kumuh}} \times 100\%$	48
8.	Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk	m ² /jiwa	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan lahan TPU per orang}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	0,35
9.	Tingkat tanggap waktu (<i>respon time rate</i>) layanan wilayah manajemen kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$	100
10.	Luasan ruang terbuka hijau (RTH)	%	$\frac{\text{Jumlah ruang terbuka hijau}}{\text{Luas Kota Bekasi}} \times 100\%$	12
11.	Penyimpangan pemanfaatan ruang	%	$\frac{\text{Jumlah ruang yang sesuai dengan perencanaan}}{\text{Luas Kota Bekasi}} \times 100\%$	0,15
12.	Penegakan hukum lingkungan	%	$\frac{\text{Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus hukum lingkungan}} \times 100\%$	100
13.	Perolehan Adipura	Adipura	Piala Adipura	Adipura

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
14.	Status mutu udara ambien	µg/m ³	Baku mutu udara (parameter debu)	172,5
15.	Status mutu air	kelas	Status mutu air	3,0
16.	Cakupan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah sambungan rumah air minum}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	38,2
17.	Persentase penanganan sam-pah	%	$\frac{\text{Volume sampah yang tertangani pada tahun berkenaan}}{\text{Volume produksi sampah pada tahun berkenaan}} \times 100\%$	69
18.	Penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi	%	$\frac{\text{Jumlah titik kemacetan yang tertangani}}{\text{Titik kemacetan di Kota Bekasi}} \times 100\%$	74
19.	Ketersediaan prasarana sarana perhubungan	%	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan prasarana sarana perhubungan yg ada}}{\text{Jumlah kebutuhan prasarana sarana perhubungan}} \times 100\%$	67
20.	Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas		$\frac{\text{Jumlah ketersediaan prasarana sarana lalu lintas yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan prasarana sarana lalu lintas}} \times 100\%$	92

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Misi III : Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya				
Sasaran Misi III : Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan				
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Indeks IPM	77,72
2.	Indeks Pendidikan	Indeks	Indeks Pendidikan	91,10
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	$\frac{\text{Jumlah lama bersekolah sesuai jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penduduk usia > 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia > 15 tahun}} \times 100\%$	11
4.	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD}}{\text{Jumlah anak usia dini}} \times 100\%$	50
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk kel. usia 7 s.d. 12 tahun yang bersekolah di tingkat pendidikan SD/MI sederajat pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk kel. usia 7 s.d. 12 tahun}} \times 100\%$	100
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	$\frac{\text{Jml penduduk kel. usia 13 s.d. 15 thn yg bersekolah di tingkat pen. SMP/MTs/Paket B sederajat pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk kel. usia 13 s.d. 15 tahun}} \times 100\%$	93,68

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	$\frac{\text{Jml penduduk kel. usia 16 s.d. 18 thn yg bersekolah di tingkat pen. SMA/SMK/MA/Paket C sederajat pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk kel .usia 16 s.d. 18 tahun}} \times 100\%$	75,28
8.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	%	$\frac{\text{Jumlah pengunjung tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1}}{\text{Jumlah pengunjung tahun n-1}} \times 100\%$	30%
9.	Indeks Kesehatan	Indeks	Indeks Kesehatan	75,21
10.	Angka harapan hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup	70,18
11.	Angka kematian ibu melahirkan	per 100.000	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan / 100.000 Kelahiran	44
12.	Angka kematian bayi	per 1.000	Jumlah Bayi Lahir Mati / 1000 Kelahiran	15
13.	Prevalensi balita gizi buruk	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	0,15
14.	Kepemilikan kartu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yg memiliki jamkesda dan jamkesmas}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100\%$	100
15.	Kota layak anak (5 kluster/bid)	% (5 kluster)	$\frac{\text{Jumlah anak yang terpenuhi haknya}}{\text{Jumlah anak yang terpenuhi haknya}} \times 100\%$	31

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Jumlah anak	
16.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan}}{\text{Jumlah aparatur/anggota di lembaga pemerintahan}} \times 100\%$	30
17.	Posyandu mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah posyandu mandiri}}{\text{Jumlah posyandu se-Kota Bekasi}} \times 100\%$	18
18.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang menerima bantuan}}{\text{Jumlah PMKS miskin}} \times 100\%$	95

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Sasaran Misi III : Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inovatif, kreatif, dan berperan aktif dalam pembangunan				
19.	LPM Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	100
20.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif	Jumlah	Gedung <i>Outdoor</i> (GO) dan Gedung <i>Indoor</i> (GI)	1 GI

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
21.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	Jumlah event	10
22.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah pendapatan sektor pariwisata (hotel dan restoran)}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$	17,70
23.	Pemuda pelopor tingkat nasional	Pemuda	Jumlah pemuda pelopor Tingkat Kota (TK), Tingkat Provinsi (TP), Tingkat Nasional (TN)	5 TK, 2 TP dan 1 TN
24.	Cabang olahraga berprestasi	Cabang	Jumlah cabang olahraga	9

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Misi IV : Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif				
Sasaran Misi IV : Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha				
1.	Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi	%	$\frac{\text{PDRB ADHK Tahun } n - \text{PDRB ADHK Tahun } n-1}{\text{PDRB ADHK Tahun } n} \times 100\%$	5.50 - 6.50
2.	PDRB per kapita	Rp	$\frac{\text{PDRB ADHK Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah penduduk tahun berkenaan}} \times 100\%$	31.587.646

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
3.	Laju peningkatan investasi	%	$\frac{\text{Nilai investasi tahun n} - \text{Nilai investasi tahun n-1}}{\text{Nilai investasi tahun n}} \times 100\%$	10
4.	Pertumbuhan nilai ekspor bersih	%	$\frac{\text{Nilai ekspor bersih tahun n} - \text{Nilai ekspor bersih tahun n-1}}{\text{Nilai ekspor bersih tahun n}} \times 100\%$	10 %
5.	Laju inflasi	%	Inflasi	<6
6.	Koperasi aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100\%$	5
7.	UMKM produktif	Unit	Jumlah UMKM	1.725
8.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	$\frac{\text{Jumlah pedagang/usaha informal yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	25
9.	Pasar tradisional modern, dan UMKM <i>center</i>	Unit	Jumlah pasar tradisional modern (PTM) dan jumlah UMKM Center	1 PTM
10.	Tingkat kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	5,37

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11.	Indeks Gini		$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana :</p> <p>P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	< 0,3
12.	Penyediaan lapangan kerja	Lowongan	Jumlah lowongan kerja baru	10.000
13.	Angka pengangguran terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	8,2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Capaian	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Misi V : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan damai				
Sasaran Misi V : Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara				
1.	Kasus perselisihan SARA dan kelompok masyarakat	Kasus	Jumlah kasus	0
2.	Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	%	$\frac{\text{Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tahun } n - \text{Jumlah penyalahgunaan narkoba tahun } n-1}{\text{Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tahun } n-1} \times 100\%$	0
3.	Angka kriminalitas yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah kriminalitas tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	100
4.	Penanganan bencana alam	%	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu penanganan bencana alam (>1 jam setelah pengaduan)}}{\text{Jumlah kejadian}} \times 100\%$	100



BAB VI PENUTUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2018. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu PD dan antar PD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing PD. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, RKPD tersebut difungsikan sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang Kota Bekasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2018 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima dari RJPMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 dengan mengacu pada RKP 2018. Pada pembangunan tahun kelima ini, Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Sebagai tahun akhir RPJMD 2013 - 2018, kreativitas dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan mutu birokrasi. Dari pencermatan jangka waktu perencanaan, RKPD Kota Bekasi tahun 2018 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana tahun kelima Walikota. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Walikota beserta perangkat daerahnya pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2018 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bekasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depannya;
- b. Secara normatif, RKPD Kota Bekasi tahun 2018 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Walikota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. Secara operasional, RKPD Kota Bekasi tahun 2018 ini memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah kota yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam RKPD; dan
- d. Secara faktual, RKPD Kota Bekasi tahun 2018 ini menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2018 disusun berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Tahapan dan sistematika penyajian juga telah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan alur pikir yang

melatarbelakangi proses penyusunan RKPD Kota Bekasi tahun 2017. Beberapa substansi penting dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan dimulai dengan pengolahan data dan informasi meliputi analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Analisis didasarkan pada dokumen RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018, serta RKPD Kota Bekasi tahun 2016 dan 2017;
- b. Selanjutnya dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan daerah Kota Bekasi yang didasarkan pada hasil analisis pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan pelaksanaan RKPD tahun berjalan, yaitu kurun waktu Triwulan 1 tahun 2017, juga hasil telaahan terhadap RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, serta pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. Berbagai permasalahan pembangunan yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas beserta pagu indikatifnya;
- d. Selanjutnya dilakukan forum konsultasi publik dan penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya;
- e. Hasil dari tahapan proses ini adalah berupa Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi tahun 2018. Rancangan awal ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja PD Kota Bekasi tahun 2018;
- f. Rancangan Awal RKPD ini diverifikasi dan disinergikan dengan Rancangan Awal RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan disinkronisasikan dengan Rancangan Renja PD. Setelah diverifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya dilakukan integrasi Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja PD, dan hasilnya disajikan dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi tahun 2018;
- g. Rancangan RKPD menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang RKPD tahun 2018. Musrenbang RKPD tahun 2018 juga dalam upaya sinkronisasi dengan hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Selain Musrenbang

RKPD tingkat Kota Bekasi, juga dievaluasi hasil Musrenbang RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat;

- h. Rancangan RKPD yang disinkronkan dengan hasil musrenbang disajikan dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan akhir ini harus mendapat persetujuan dari Walikota Bekasi dan rekomendasi konsultasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelahnya, Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi tahun 2017 ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi; dan
- i. Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi tahun 2018 yang telah dilegalkan menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun 2018. KUA dan PPAS ini harus disepakati oleh Walikota dan DPRD Kota Bekasi, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bekasi tahun 2018.

RKPD Kota Bekasi tahun 2018 merupakan acuan bagi setiap PD maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Setiap OPD serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;
- b. Bagi setiap OPD, RKPD tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun anggaran 2018. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing PD perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2018 sebagai berikut:
 - Uraian rencana penggunaan APBD tahun anggaran 2018 merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan walikota;

- Uraian rencana penggunaan APBD tahun anggaran 2018 merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang tercermin dalam kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; dan
 - Uraian sebagaimana yang dimaksud butir kedua di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan;
- c. Setiap OPD dengan dikoordinasikan oleh Bappeda, sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, merumuskan matriks rencana tindak lanjut untuk setiap bidang urusan pembangunan (matriks rencana tindak lanjut menjadi lampiran dari setiap bidang urusan pembangunan) yang menjadi lampiran dokumen RKPD Kota Bekasi tahun 2018;
- d. Masyarakat Kota Bekasi dapat berperanserta seluas-luasnya dalam proses perancangan dan perumusan kebijakan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; dan
- e. Dalam membuat Renja-PD, setiap OPD wajib melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Demikian RKPD Kota Bekasi tahun 2018 yang akan melandasi penyusunan KUA dan RAPBD Kota Bekasi tahun anggaran 2018, dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018, sekaligus menjadi masa transisi bagi RPJMD periode berikutnya.

Dengan kaidah dan prinsip yang disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik, lancar, dan transparan. Dengan demikian diharapkan tujuan inti pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan dapat terwujud.

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI